

RASIONALITAS KERJASAMA: KAJIAN FILSAFAT TERHADAP
DILEMA NARAPIDANA DALAM TEORI PERMAINAN

DISERTASI

DONNY GAHRAL ADIAN
0706222100




UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI FILSAFAT
DEPOK,
AGUSTUS, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Donny Gahral Adian
NPM : 0706222100
Tanda Tangan : 
Tanggal : 10-08-2009

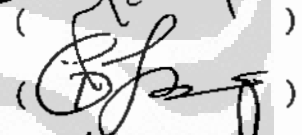
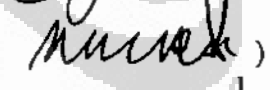
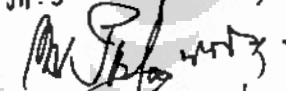
HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Donny Gahral Adian
NPM : 0706222100
Program Studi : Filsafat
Judul Disertasi : Rasionalitas Kerjasama: Kajian Filsafat terhadap Dilema Narapidana dalam Teori Permainan

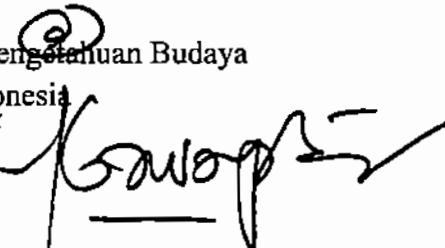
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Dr. Toeti Heraty 
Kopromotor : Dr. Haryatmoko 
Tim Penguji : Dr. Vincentius Jolasa (Ketua) 
: Prof. Dr. Alois Agus Nugroho (anggota) 
: Prof. Dr. Sastrapratedja (anggota) 
: Prof. Dr. Soerjanto Puspwardojo (anggota) 
: Dr. Akhyar Yusuf Lubis (anggota) 
Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Agustus 2009

Oleh


Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta, M.A.
NIP 131882265

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya akademik adalah kerjasama sosial. Dengan kata lain, disertasi ini bukan semata hasil jerih payah saya. Berbagai dukungan dan bantuan datang dari berbagai pribadi yang harus saya berikan ruang bagi ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Toeti Heraty, promotor saya yang dengan telaten membimbing saya sampai selesai. Tanpa dukungan beliau, saya tidak akan mampu menyelesaikan disertasi ini dalam tempo yang relatif singkat. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya dapat memperoleh bimbingan dari Profesor Toeti. Dr. Haryatmoko, kopromotor sekaligus guru yang menempati ruang khusus di bilik batin saya. Bimbingannya selama ini turut mengasah pisau analisa saya, khususnya di bidang filsafat sosial dan politik. Dewan penguji yang terhormat: Profesor Sastrapratedja, Profesor Soerjanto, Profesor Agus Nugroho, Dr. Akhyar dan Dr. Vincent. Semuanya adalah penguji yang sungguh-sungguh membuat saya tertantang untuk berpikir keras menyelesaikan disertasi ini.

Tak lupa saya haturkan terima kasih kepada Profesor Gumilar Rusliwa Somantri, atasan dan guru yang telah memberikan berbagai peluang bagi saya untuk bertumbuh baik secara struktural maupun fungsional. Rekan-rekan di lingkungan struktural Universitas Indonesia: Profesor Ketut (atasan langsung saya), Bambang Wibawarta (atasan saya di Fakultas), Kang Panji, Mas Riki, Firmanzah, Ali Wibisono, Sayed Fauzan, Pak Arifin, Bu Raphaella, Bu Riri dan masih banyak lagi yang lainnya.

Karya akademik adalah pergulatan intelektual. Disertasi ini tidak akan mewujudkan tanpa berbagai diskusi komunitas-komunitas epistemik yang mulia. Izinkan saya menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan di jurusan Filsafat: Rocky Gerung, Saras, Irianto, Eko Wijayanto, Embun Kenyowati, Margaretha, Tommy Awuy, Upik, Soni, Irmayanti, Fuad, Ema, Naupal, Harsya, Ganang, Budiarto Danunjaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Rekan-rekan di Cak Tarno: Bagus Takwin, Daniel, Tarno, Pak Sigid, Zacky, Geger Riyanto, Bang Rein, Pak Damhuri, Aang, Irham, Fahmi dan semua yang terlibat dalam diskusi mingguan CTI. Rekan-rekan di Lingkar Muda Indonesia: Sukardi Rinakit, Effendi Gozali, Mas Irwan Julianto, Mas Toni, Zuhairi Misrawi, Palupi dan mereka yang tak mungkin saya sebutkan satu per satu.

Karya akademik adalah pengakuan kepada yang tercatat. Oleh karena itu, izinkan saya mencatatkan terima kasih kepada dua sekretaris yang baik: Mbak Dwi dan Mbak

Munawaroh. Selain keduanya, saya perlu menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan semua staf baik di rektorat maupun fakultas.

Kerja akademik adalah sebuah pengabdian tak berhela. Izinkan saya menghaturkan banyak terima kasih pada keluarga yang selama ini mendukung dengan sangat. Papa Rudjitarjo, Tante Zakaria, Mama Ning (alm.), Papa Edi Prajitno, Mas Wondo, Mas Budi, Mbak Iya, Mas Iyung, Mas Ario, Mas Ita, dan Andri Wibisana. Terhatur pula terima kasih pada keluarga besar Almarhumah Mama yang tidak mungkin saya sebut satu per satu.

Karya akademik adalah kasih sayang. Kepada istriku tercinta Rieke Diah Pitaloka. Perempuan yang menggenggam beraneka bentuk perjuangan namun setia mendukung perjuangan suaminya di dunia yang berbeda. Tanpanya, karya saya akan menjadi keras, dingin dan tak ber-"batin". Terima kasih istriku. Kepada anakku Sagara Kawani Adiansyah. Kehadiranmu turut memompa semangat Abah dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga setelah ini Abah akan memiliki lebih banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu.

Terakhir adalah almarhumah Mama. Mama adalah perempuan yang telah menanamkan berbagai kebajikan di dalam diri saya. Beliau lah yang mendorong saya untuk mengambil jalan sunyi selaku seorang akademisi. Untuk itu, izinkan saya mengkuratkan beberapa baris puisi sebagai ucapan terima kasih:

Di sudut mata waktu,
Kau tanamkan dua belas bentuk kebajikan
Yang menjelma bunga
Di dingin karang
Anak itu,
Di sudut lainnya,
Dua belas bentuk kebajikan itu
Bergeming sudah
Meski dilewati
Angin tujuh musim
Karang itu adalah diriku

Depok, 10 Agustus 2009

Donny Gahral Adian

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Gahral Adian
NPM : 0706222100
Program Studi : Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Rasionalitas Kerjasama: Kajian Filsafat terhadap Dilema Narapidana dalam Teori Permainan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

Yang Menyatakan



(Donny Gahral Adian)

ABSTRAK

Nama : Donny Gahral Adian

Program Studi : Filsafat

Judul : Rasionalitas Kerjasama: Kajian Filsafat terhadap Dilema Narapidana dalam Teori Permainan

Disertasi ini membahas kemungkinan kerjasama dalam situasi konflik seperti dimodelkan dalam dilema narapidana. Dilema narapidana memuat asumsi rasionalitas yang membuat absennya komitmen etis yang memungkinkan sebuah kerjasama. Asumsi kognitif dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental membuat agen tertutup dari dua hal: pertama, skrutinisasi rasional tujuan, orientasi nilai atau prinsip tindakan; kedua, identitas orang lain sebagai yang konkret dan menyejarah. Rasionalitas instrumental, bertumpu pada prinsip maksimalisasi keuntungan, prinsip yang merupakan bentukan dilema narapidana dan bukan hasil deliberasi rasional agen selaku subyek reflektif. Syarat kemungkinan kerjasama terletak pada kerja rasionalitas yang terbuka. Syarat kemungkinan tersebut adalah rasionalitas kerjasama yang merefleksikan prinsip, orientasi nilai dan tujuan di hadapan orang lain selaku identitas naratif. Narativitas identitas orang lain membuat agen merefleksikan kembali prinsip maksimalisasi keuntungan yang berakibat pada perilaku nonkerjasama.

Kata Kunci:

Dilema Narapidana, Rasionalitas Tindakan, Teori Permainan, Teori Konstrain, Pemaksimal Terkonstrain, *Translucency*, Refleksivitas, Identitas Naratif

ABSTRACT

Name : Donny Gahral Adian
Study Program : Philosophy
Title : Rationality of Cooperation: Philosophical Investigation on Prisoner's Dilemma as One of Variants of Game Theory

This dissertation elaborates the possibility of cooperation within situation of conflict as being illustrated by Prisoner's Dilemma model. My research focuses on the assumption of practical rationality adopted by Prisoner's dilemma. Rationality of prisoner's dilemma is instrumental rationality which encapsulate the agent from two variables: first of all is the objective, principle or value orientation; second of all is other's identity as a concrete and historical identity. Instrumental rationality is based upon principle of utility maximizing, principle which is not caused by agent's rational deliberation but being constructed by prisoner's dilemma situation. The condition of possibility of cooperation lays on the openness of rationality. It is rationality of cooperation which reflects one's principle, value orientation or objective before the other as narrative identity. Narrativity of other's identity enable agent to reflect the utility maximizing principle resulting in noncooperative behavior

Kata Kunci:

Prisoner's Dilemma, Practical Rationality, Game Theory, Constraint Theory, Constrained Maximizer, Translucency, Reflexivity, Narrative Identity.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Halaman Persetujuan Publikasi	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i> (bahasa inggris)	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel dan Kurva	xii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Metodologi	9
I.4 Kerangka Teori	11
I.5 Algoritma Disertasi	28
I.6 Sistematika	29

BAB II KONTEKS FILOSOFIS DILEMA NARAPIDANA

II.1 Moralitas Melalui Kesepakatan	32
II.2 Kebebasan dan Konstrain	39
II.3 Refleksivitas dan Normativitas	50
II.4 Ikhtisar	57

**BAB III JEBAKAN SOSIAL, DILEMA NARAPIDANA,
DAN RASIONALITAS INSTRUMENTAL**

III.1 Jebakan Sosial	61
III.2 Dilema Narapidana	63
III.3 Rasionalitas	79
III.3.1 Teori Pilihan Rasional	79
III.3.2 Rasionalitas Instrumental	83
III.4 Ikhtisar	92

BAB IV MEMPERSOALKAN RASIONALITAS INSTRUMENTAL

IV.1 Beberapa Asumsi Pokok	95
IV.2 Rasionalitas Instrumental yang Diperluas	98
IV.3 Elster: Teori Tebal Rasionalitas Tindakan	106
IV.4 Elster: Rasionalitas Konstrain	112
IV.5 Habermas: Rasionalitas Komunikatif	118
IV.6 Ikhtisar	125

**BAB V PERSOALAN IDENTITAS DALAM
RASIONALITAS TINDAKAN**

V.1 Pemaksimal Terkonstrain (<i>Constrained Maximizer</i>)	128
V.2 Rasionalitas <i>Ad Hominem</i>	133
V.3 Rasionalitas Tindakan, Refleksivitas dan Identitas Praktis	137
V.4 Ricoeur: <i>Idem</i> dan <i>Ipse</i>	144
V.5 Ikhtisar	152

BAB VI KESIMPULAN

VI.1 Dilema Narapidana dan Ketakungkinan Komitmen Etis	156
VI.2 Rasionalitas Kerjasama: Sebuah Benang Merah	159
VI.3 Kesimpulan tentang Rasionalitas dan Dilema Narapidana	167
VI.4 Logika Rasionalitas Kerjasama	169
VI.5 Rasionalitas dan Rekonsiliasi: Aceh	173
VI.6 Catatan Penutup	180
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN (MOU GAM DAN REPUBLIK INDONESIA)	



DAFTAR TABEL DAN KURVA

Tabel 1. Dilema Narapidana I	6
Tabel 2. Dilema Narapidana Hobbes	11
Tabel 3. <i>Dua Salesman</i>	65
Tabel 4. Pembagian Kue	67
Tabel 5. Dilema Narapidana II	70
Tabel 6. Titik Ekuilibrium	72
Tabel 7. Dilema Narapidana Semu	74
Tabel 8a. Maksimalisasi Utilitas	84
Tabel 8b. Marjin Utilitas	85
Kurva 1. <i>Time Discounting</i>	116
Tabel 9. Perbandingan antara rasionalitas komunikatif dengan instrumental	124
Tabel 10. Dilema Narapidana III	128
Tabel 11. Perbandingan Teori Rasionalitas Tindakan	152

Bab I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Persoalan terberat yang dihadapi republik ini adalah konflik horisontal yang menguat baik pra maupun pasca kejatuhan orde baru. Publik mulai terjaga saat membaca berita pembantaian masyarakat Madura di Kalimantan Barat. Di situ diceritakan bagaimana penduduk asli Dayak mulai menyerang para pendatang Madura di kota kecil Sanggau Ledo. Publik tersengat karena kekerasan kolektif antar warga Indonesia berbasis identitas komunal semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Belum lagi kering darah kekerasan di Kalimantan Barat, pertempuran berdarah pecah di Ambon antara kaum Muslim dan Kristiani. Publik pun tercengang menyaksikan konflik agama yang berdarah-darah di berita utama setiap surat kabar. Demokratisasi ternyata tidak mengalirkan kultur diskusi melainkan mengawetkan kekerasan. Terbukti, pada saat yang hampir bersamaan konflik komunal pun pecah di dua tempat lain yaitu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan di Poso, kota kecil di Sulawesi Tengah. Di Kabupaten Sambas terjadi kekerasan terhadap orang-orang Madura oleh penduduk asli Melayu. Sementara, di Poso konflik yang berujung pada kekerasan terjadi antara kaum Muslim dan Kristiani. Pada tahun 1999, setahun setelah jatuhnya Soeharto, konflik terjadi di Maluku Utara antara kaum Muslim dan Kristiani. Akhirnya, yang paling mengerikan adalah pembantaian masyarakat Madura oleh penduduk asli Dayak di Sampit pada bulan Februari tahun 2001.

Di sisi lain, ada sebagian konflik yang mampu diselesaikan dengan baik. Bahkan bentuk penyelesaian tersebut menjadi model bagi penyelesaian konflik di tempat lain. Konflik di Afrika Selatan akibat politik Apartheid adalah salah satu contoh kasus. Setahun setelah Pemilu pertama rejim non-apartheid, dibentuk lah sebuah komisi yang diberi nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Truth and*

Reconciliation Commission)¹. Komisi tersebut bertugas membuat gambaran utuh mengenai penyebab, kodrat dan luas pelanggaran HAM mulai tahun 1960 sampai berakhirnya rejim Apartheid. Untuk itu, KKR pun melakukan berbagai investasi dan dengar pendapat. Tak hanya itu, KKR juga bertugas merehabilitasi korban pelanggaran HAM dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang dianggap perlu. KKR juga menyusun laporan dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah berulangnya kejahatan HAM serupa.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan dianggap sukses dalam melaksanakan tugasnya. Seorang ahli ilmu Politik asal Washington University, James L Gibson, melakukan penelitian terhadap penyelesaian konflik di Afrika Selatan. Penelitiannya mengungkap dua temuan penting sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Gibson, 2006, p.413). Pertama, kebenaran adalah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap rekonsiliasi. Kedua, terdapat faktor sosial dan politik yang berpengaruh terhadap efektivitas proses kebenaran dan rekonsiliasi.

Kebenaran secara konseptual dan operasional diterjemahkan sebagai derajat keberterimaan individual terhadap ingatan kolektif yang disirkulasikan oleh komisi (misalnya, kesimpulan komisi bahwa Apartheid adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua sisi dalam perjuangan Apartheid adalah pelanggaran HAM berat). Gibson membuktikan bahwa ada korelasi positif antara keberterimaan publik terhadap berbagai kebenaran yang ditemukan KKR dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi sendiri memiliki empat dimensi yaitu: (a) rekonsiliasi antar ras (b) toleransi politik (c) dukungan terhadap prinsip HAM dan (c) perluasan legitimasi institusi politik di Afrika Selatan yang baru.

Efektivitas proses kebenaran dan rekonsiliasi ditopang oleh beberapa faktor penting. (a) diseminasi dan penetrasi informasi yang dikeluarkan KKR berjalan dengan sangat baik (b) KKR membiarkan orang biasa (*ordinary people*) berkisah tentang apa yang dialaminya semasa rejim Apartheid tanpa perlu mengikuti prosedur legal (c) tingkat kepuasan publik Afrika Selatan terhadap

¹ Penjelasan lebih lengkap mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan dapat dilihat di Antjie Krog, *Country of My Skull*, London: Vintage, 1999, hal. 5-10

imparsialitas KKR cukup tinggi (d) Ingatan kolektif yang dibangun oleh KKR tidak menyalahkan satu pihak saja melainkan mendistribusikan kesalahan terhadap semua pihak yang terlibat dalam perjuangan melawan Apartheid (e) KKR mengedepankan jenis keadilan non-retributif yang dilakukan antara lain dengan memberikan amnesti kepada pelanggar HAM berat (f) peran Tutu dan Mandela dalam membuat publik menerima ingatan kolektif yang dibangun KKR dan memulai rekonsiliasi.

Persoalan konflik sungguh menimbulkan kegelisahan sendiri di kalangan ilmuwan sosial. Berbagai pendekatan pun diuji untuk mampu mengenali, memahami dan mengatasi persoalan itu. Salah satu pendekatan yakni *Dynamics of Contention* (Klinken, 2007, p.17-18) merumuskan lima pertanyaan kunci yang mesti dijawab sehubungan dengan konflik. Kelima pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pembentukan identitas**, bagaimana suatu identitas bersama berkembang dalam sebuah kelompok?
2. **Eskalasi**, bagaimana sebuah konflik yang muncul kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang jauh lebih banyak?
3. **Polarisasi**, bagaimana ruang politis antara kelompok-kelompok yang saling berseteru meluas ketika para peserta itu saling menjauh dan bergeser ke titik-titik ekstrim?
4. **Mobilisasi**, bagaimana orang yang biasanya bersikap acuh tak acuh dapat digerakkan untuk terjun ke jalan?
5. **Pembentukan aktor**, bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisir atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal?

Pada dasarnya, kelima pertanyaan di atas adalah pertanyaan mengenai bagaimana kelompok-kelompok yang tadinya berdamai bisa masuk dalam situasi konflik. Ini adalah pertanyaan mengenai asal muasal konflik dan memang penting untuk diajukan. Hanya saja, di Indonesia kita juga menyaksikan konflik yang berulang antara kelompok-kelompok yang bersitegang. Konflik antara penduduk asli Dayak dan pendatang Madura, misalnya terjadi pada tahun 1999 dan 2001. Konflik antara kaum Muslim dan Kristiani di Ambon pun berlangsung dalam kurun

waktu yang relatif lama. Artinya, ada pertanyaan lain yang juga mendesak untuk diajukan: bagaimana kelompok-kelompok yang terlibat konflik sulit membangun kepercayaan dan memutus siklus kekerasan.

Pertanyaan di atas dijawab oleh pendekatan dalam ilmu sosial yang disebut jebakan sosial (*social trap*). Jebakan sosial adalah situasi ketika dua pihak yang berhadapan tidak memiliki kepercayaan satu sama lain sehingga kemungkinan kerjasama menjadi mustahil. Ketidakpercayaan tersebut dibangun berdasarkan asimetri dalam komunikasi akibat stereotip-stereotip yang mengeras dalam sistem kognitif pihak yang berhadapan. Jebakan sosial terjadi karena individu atau kelompok tidak percaya bahwa pihak lawan akan bekerjasama sehingga pilihan kerjasama pun menjadi irasional. Dengan kata lain, jebakan sosial membuat individu meletakkan insentif pada nonkerjasama dan disinsentif untuk berlaku sebaliknya.

Dalam jebakan sosial, setiap informasi yang datang dari pihak lawan senantiasa dipersepsi secara negatif. Pun ketika informasi itu menyimpan maksud-maksud kerjasama. Dalam konflik etnis misalnya. Seorang pimpinan kelompok yang mengendalikan aliran informasi memillih untuk berfokus pada informasi negatif tentang maksud pihak lawan. Ini dilakukan demi kepentingannya selaku pimpinan, sebab konflik adalah alasan utama bagi sebuah ketaaatan. Jebakan sosial juga membuat pihak-pihak yang terjerat di dalamnya sukar untuk melepaskan diri. Dua pihak yang sudah saling tidak percaya selama puluhan tahun tidak bisa serta merta bergandengan tangan akibat ingatan kolektif masing-masing tentang kelicikan di masa lalu. Kita tidak bisa menyangkal bahwa relasi sosial senantiasa disesaki oleh pelbagai stereotip yang tertanam dalam ingatan kolektif pihak-pihak yang bertikai. Berikut adalah urutan logis jebakan sosial:

- a. semua orang diuntungkan apabila semua orang memilih untuk bekerjasama
- b. tetapi jika orang tidak bisa mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerjasama maka pilihan untuk bekerjasama menjadi tak bermakna (jika saya tidak bisa percaya bahwa jika kelompok lawan berkuasa maka tidak akan menganiaya saya selaku minoritas (atau sebaliknya) maka pilihan untuk bekerjasama menjadi tidak mungkin, alih-alih saya akan berusaha

menggagalkan dengan berbagai cara atau satu kelompok tidak akan memegang perjanjian damai jika tidak bisa percaya bahwa kelompok lain tidak akan melanggarnya (*pre-emptive strike*)

- c. maka, nonkerjasama mungkin saja rasional ketika orang tidak mempercayai bahwa yang lain akan juga bekerjasama (dilema narapidana)
- d. kesimpulan, kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama (perdamaian) hanya bisa tercapai apabila orang mempercayai bahwa sebagian besar orang juga akan memilih untuk bekerjasama
- e. kurangnya kepercayaan itu akan mengakibatkan terjerembabnya masyarakat pada apa yang disebut: jebakan sosial yaitu kita semua berakhir pada kondisi yang buruk bagi semua orang meski kita tahu bahwa kita bisa lebih baik apabila memilih untuk bekerjasama.

Penting untuk disimak bahwa di balik jebakan sosial tersembunyi asumsi teoritis dalam tradisi teori permainan bernama dilema narapidana. Dilema narapidana adalah situasi ketika dua narapidana yang dipisahkan secara fisik sama-sama memilih untuk bersaksi atas rekannya berdasarkan antisipasi bahwa yang lain pun bersaksi atasnya. Persoalannya, keduanya merugi karena apabila mereka mau bekerjasama maka mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Situasi dilematis itu disebabkan keduanya bertindak berdasarkan rasionalitas instrumental yang menuntut pihak pertama mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi adalah fokus kerja rasionalitas instrumental sehingga nasib atau kepentingan orang lain dikesampingkan. Dengan kata lain, rasionalitas akhirnya lebih diterjemahkan dalam tindakan nonkerjasama daripada sebaliknya.

Tabel 1

Dilema Narapidana I

	B tak bersaksi	B bersaksi
A tak bersaksi	1 tahun, 1 tahun	3 tahun, 0 tahun
A bersaksi	0 tahun, 3 tahun	2 tahun, 2 tahun

Dilema narapidana adalah varian dalam teori permainan. Asumsi yang mendasari teori permainan adalah filsafat manusia yang mematok manusia selaku sosok yang egois dan memakai rasionalitas semata-mata untuk melayani kepentingan pribadinya. Sosok manusia demikian dikenal dalam literatur ilmu ekonomi dengan sebutan teknis: *homo oeconomicus*. Meski demikian, sering dilupakan bahwa teori permainan memiliki dua sisi: matematis dan kognitif. Sisi matematis berfokus pada kalkulasi dan prediksi sementara sisi kognitif pada relasi kognitif dalam situasi konflik.

Teori permainan menerangkan tindakan manusia sebagai tanggapan atas apa yang orang lain akan lakukan. Hasil tindakan selalu adalah hasil bersama dari pilihan yang diambil dua belah pihak. Dimensi kognitif teori permainan berfokus pada bagaimana citra dan keyakinan tentang pihak lain memasuki kesadaran manusia dan bagaimana mereka dimanifestasikan ke dalam pilihan bertindak. Rasionalitas tindakan manusia pun tidak serta merta ditentukan oleh kepentingan pribadi melainkan persepsi terhadap pihak lawan dalam situasi konflik. Evaluasi terhadap pihak lawan bisa datang dari pelbagai sumber: pengetahuan personal, stereotip kultural, dan ingatan masa lalu tentang perilaku pihak lain dalam situasi yang sama. Teori permainan kognitif membuka dimensi baru dalam khasanah teori rasionalitas tindakan. Bahwasannya rasionalitas tidak melulu bersifat instrumental melainkan ditentukan oleh konteks yang mana citra pihak lawan menjadi bahan

pertimbangan. Dengan kata lain, konflik sulit diatasi melalui dengan instruksi etis dan niat baik. Berdasarkan teori permainan kognitif, konflik bersumber pada rasionalitas manusia yang menutup diri pada kesejarahan orang lain. Sehingga penelitian harus difokuskan pada dimensi kognitif teori permainan yakni rasionalitas, khususnya rasionalitas tindakan (*practical rationality*). Asumsi pokok penelitian adalah manusia terbuka pada pembelajaran sosial (*social learning*) melalui peningkatan dan penguatan fungsi-fungsi kognitifnya.

1.2. Rumusan Masalah

Disertasi ini berfokus pada persoalan mengenai asumsi rasionalitas yang terkandung dalam dilema narapidana. Penulis ingin membuktikan bahwa rasionalitas dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental-tertutup sehingga membuat komitmen etis apa pun tak mungkin dibangun. Penelitian ini pada dasarnya memuat dua langkah utama. Pertama, memecahkan persoalan ketertutupan rasionalitas dilema narapidana. Kedua, merumuskan kerja rasionalitas yang mampu melepaskan agen dari situasi dilema narapidana. Kedua langkah penelitian di atas harus terlebih dahulu menjawab persoalan yang tidak kalah penting: bagaimana menjustifikasi penelitian terhadap rasionalitas dilema narapidana sebagai penelitian filosofis?

Di awal abad ke-20 kita menyaksikan kebangkrutan metafisika barat. Metafisika di sini bukan semata cabang filsafat melainkan sebuah modus berfilsafat. Metafisika adalah modus berfilsafat yang berspekulasi atas realitas dan mengklaim spekulasi tersebut sebagai sumber pengetahuan apriori kita tentang realitas.

Terdapat dua diagnosa utama terhadap modus berfilsafat metafisis (Katz, 2000, p.xiii-xv). Diagnosa pertama datang dari kelompok positivisme logis. Menurut positivisme logis, kesalahan modus berfilsafat metafisis adalah memandang filsafat sebagai disiplin kelas pertama (*first order discipline*) sebagaimana halnya sains. Disiplin kelas pertama membahas aspek-aspek realitas sebagai pokok persoalannya. Ini sebuah kesalahan. Sains sudah membicarakan secara tuntas semua aspek realitas. Sekali fisika, biologi, kimia, sejarah, dan ilmu sosial sudah

mengklaim pokok persoalannya masing-masing, tidak ada ruang garapan lagi bagi filsafat. Dengan absennya domain fakta-fakta untuk menyelesaikan ketegangan antara klaim-klaim filsafat, para metafisikus terbenam dalam kontroversi berkepanjangan. Kontroversi tersebut tak pernah berakhir pada resolusi objektif karena tidak berurusan dengan realitas.

Bertolak dari persoalan di atas, Mary Warnock berbicara mengenai filsafat baru (*new philosophy*) (Katz, 2000, p.xiv). Filsafat baru adalah disiplin kelas kedua (*second order discipline*) yang tidak memiliki pokok persoalannya sendiri. Tidak ada objek filosofis untuk diperiksa. Filsafat, berbeda dengan botani atau sejarah, tidak menerapkan konsep pada realitas. Filsafat ada di anak tangga abstraksi berikutnya. Dia menimbang, memeriksa, mengklarifikasi dan menganalisa konsep-konsep yang dimiliki disiplin kelas pertama.

Diagnosa kedua datang dari filsuf analitik bernama Quine. Dia sepakat dengan kelompok positivisme logis bahwa sains sudah membahas seluruh aspek realitas tanpa tersisa. Artinya, modus berfilsafat metafisis tidak dapat lagi diklaim sebagai disiplin yang otonom. Namun, bagi Quine, ini tidak berarti bahwa filsafat tidak dapat secara sah mempertanyakan realitas. Hanya, pertanyaan filsafat tersebut harus dilontarkan dalam koridor ilmu-ilmu alam. Persoalan yang dialami metafisika tradisional adalah klaim bahwa disiplin tersebut dapat berspekulasi tentang realitas secara independen dari konstrain eksperiensial dan metodologi ilmu-ilmu alam. Tanpa konstrain tersebut kesimpulan para filsuf tradisional seringkali berupa spekulasi nonilmiah tentang persoalan ilmiah.

Disertasi ini ditulis berdasarkan cara berfilsafat pasca metafisika. Persoalan relasi interpersonal tidak diperiksa dari sudut pandang filsafat sebagai disiplin pertama. Filsafat tidak dapat berurusan langsung dengan konflik sebagai realitas empiris. Oleh sebab itu, konsep dilema narapidana dalam teori permainan diambil sebagai pokok persoalan. Modus berfilsafat dalam disertasi ini adalah modus berfilsafat kelas kedua (*second order discipline*) yang berupaya memeriksa asumsi-asumsi yang terkandung dalam dilema narapidana.

Pertanyaannya, apakah pemeriksaan terhadap asumsi-asumsi tersebut tidak terjebak pada cara berfilsafat lama yang spekulatif? Menurut penulis,

spekulasi dapat dihindari apabila filsafat memahami sampai sedemikian detil pokok persoalan pada disiplin kelas pertama. Sehingga, spekulasi berlebihan yang mengacuhkan konstrain eksperiensial dan metodologis disiplin kelas pertama dapat dihindari. Hal ini memiliki dampak teknis pada penulisan disertasi ini. Separuh disertasi ini akan menerangkan seluk beluk teknis dilema narapidana. Separuh lainnya adalah refleksi filosofis terhadap asumsi-asumsi dilema narapidana, khususnya rasionalitas.

1.3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah studi kepustakaan terhadap tiga teks primer antara lain: *Ulysses Unbound* (Jon Elster), *Morals by Agreement* (David Gauthier) dan *The Sources of Normativity* (Christine Korsgaard) dan beberapa teks skunder. Studi kepustakaan terhadap, khususnya, tiga teks primer menggunakan beberapa langkah pembacaan sebagai berikut: pertama, menemukan koherensi kontekstual dengan mengevaluasi teks berdasarkan konteks yang lebih luas yang dalam hal ini adalah teori rasionalitas tindakan, teori permainan dan jebakan sosial. Kedua, menemukan komprehensivitas dengan memperluas pembacaan dengan teks skunder sekaligus mengevaluasi alternatif pembacaan guna menyempitkan kemungkinan pembacaan teks. Ketiga, menemukan sofistikasi dengan memperkaya pembacaan satu teks dengan pembacaan teks lainnya dengan senantiasa merujuk pada konteks yang disepakati. Keempat, kesadaran tentang ketidaksempurnaan menjadi batasan dalam pembacaan teks, atau dengan kata lain pembacaan mesti berhenti pada titik tertentu untuk menjaga agar kesimpulan tak terlalu kompleks dan keluar dari konteks.

Dalam studi filsafat, pembacaan teks sekaligus berupa penalaran logis tertentu. Adapun modus penalaran yang dipakai dalam membaca baik teks primer maupun skunder adalah salah satu varian penalaran induktif bernama penyimpulan menuju penjelasan yang terbaik (*inference to the best explanation*). Penyimpulan menuju penjelasan yang terbaik bermula dari sebuah premis tentang kondisi atau kenyataan tertentu menuju penjelasan terbaik tentang kondisi atau

kenyataan tersebut. Premis di sini berupa proposisi mengenai hasil observasi tentang kondisi atau kenyataan tertentu. Penjelasan adalah sebuah klaim mengenai mengapa sampai muncul kondisi atau kenyataan seperti itu. Penyimpulan menuju penjelasan terbaik dimaksudkan untuk menerangkan penjelasan paling baik terhadap kondisi atau kenyataan tertentu tanpa berpretensi menjadi absolut. Sebuah penjelasan disebut paling baik karena didukung oleh argumen yang paling kokoh, paling tidak untuk sementara ini. Pola penalaran penyimpulan menuju penjelasan terbaik memiliki kemiripan dengan dua pola penalaran induktif yaitu: penalaran induktif enumeratif dan induktif analogis.

pola induktif enumeratif

X persen anggota grup A memiliki properti P

Maka, X persen semua anggota grup A kemungkinan besar memiliki properti P

pola induktif analogis

benda A memiliki properti P1, P2, P3 dan P4

benda B memiliki properti P1, P2, P3

Maka, benda B kemungkinan besar memiliki properti P4

Pola penyimpulan menuju penjelasan terbaik sendiri sebagai berikut:

Fenomena Q

E menyediakan penjelasan paling baik untuk Q

Maka, kemungkinan besar E adalah benar

Dalam disertasi ini kondisi atau kenyataan yang ingin dijelaskan adalah konflik sebagai bentuk jebakan sosial. Jebakan sosial kemudian dijelaskan melalui asumsi filsafat manusia dalam dilema narapidana yang berbasis pada *homo oeconomicus* dengan rasionalitas instrumentalnya. Rasionalitas instrumental bermasalah karena menihilkan kemungkinan untuk saling percaya dan bekerjasama antar pihak-pihak yang bertikai. Penjelasan tentang masalah dalam rasionalitas instrumental tersebut didapatkan pada tiga teori dalam tiga teks primer di atas yaitu teori

konstrains (Jon Elster), teori pemaksimal terkonstrains (David Gauthier) dan teori identitas praktis (Christine Korsgaard). Penjelasan terbaik tentang konflik sebagai jebakan sosial, oleh karena itu, adalah rasionalitas instrumental sebagai rasionalitas tertutup dan mengandaikan identitas abstrak dan ahistoris manusia selaku *homo oeconomicus* semata.

1.4. Kerangka Teori

Konflik sebagai persoalan filosofis ditemukan pada pemikiran Thomas Hobbes mengenai kondisi alamiah (*state of nature*). Kondisi alamiah menurut Hobbes adalah kondisi perang semua melawan semua yang memustahilkan terjadinya kerjasama. Situasi ini terjadi karena manusia pada dasarnya egois. Satu-satunya kepentingan yang tertanam di benak manusia adalah kepentingan pribadi untuk menjaga kelangsungan hidupnya (*self preservation*). Dalam kondisi antropologis sedemikian, kepentingan pribadi satu dengan yang lain akan bertabrakan dan manusia terjatuh dalam situasi konflik.

Psikologis Hobbesian membuat pilihan bekerjasama menjadi irasional dalam kondisi alamiah. Bagi manusia Hobbesian, janji untuk tidak menyerang orang lain adalah irasional karena orang lain adalah sosok egois yang dapat dipastikan akan melanggar janji. Persoalan pokok yang dihadapi individu dalam kondisi alamiah adalah apa yang disebut sebagai dilema narapidana. Dilema yang banyak didiskusikan dalam diskursus ilmu sosial kontemporer dan filsafat sejak tahun 1950-an. Situasi dilema narapidana berujung pada konflik karena agen akan senantiasa menjerumuskan pilihan untuk tidak bekerjasama, apa pun yang dipilih pihak lawannya. Hal itu berlaku pula sebaliknya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini:

Tabel 2

Dilema Narapidana Hobbes

	A tidak menyerang	A menyerang
B tidak menyerang	2,2	4,1
B menyerang	1,4	3,3

(skala: 1 terbaik, 4 terburuk)

Agen A berpikir bahwa apabila B memutuskan untuk tidak menyerangnya, dia dapat menyerang (1) atau tidak menyerang (2). Sehingga, hasil terbaik apabila agen B tidak menyerangnya didapatkan melalui pilihan menyerang. Agen A berpikir bahwa apabila B memutuskan untuk menyerangnya, dia dapat memutuskan untuk tidak menyerang (4) atau menyerang (3). Sehingga, hasil terbaik tetap didapatkan melalui keputusan menyerang. Artinya, dalam situasi dilema narapidana, meski buah dari kerjasama adalah terbaik bagi kedua pihak, keduanya akan tetap memilih untuk tidak bekerjasama. Dilema ini menjelaskan mengapa manusia Hobbesian di dalam kondisi alamiah secara persisten gagal untuk bekerjasama dan senantiasa menyerang satu sama lain.

Meski demikian, Hobbes dalam bukunya "Leviathan" tidak serta merta mendukung model penalaran dalam dilema narapidana. Model penalaran tersebut tidak bekerja dalam dilema narapidana yang berulang (*series prisoner's dilemma*). Misalnya, seorang dan tetangganya memiliki kebun yang bersebelahan dan untuk memanen hasil kebun masing-masing membutuhkan bantuan satu sama lain. Keputusan untuk memenuhi janji untuk membantu atau tidak menempatkan kedua pihak dalam situasi dilema narapidana. Namun, kegagalan untuk memenuhi janji akan berujung pada kemerosotan hasil panen akibat absennya bantuan. Sehingga dalam dilema narapidana berulang, kerjasama tidak semata membuahkan keuntungan di saat ini tetapi juga di masa depan (hasil kerjasama masa depan). Sebaliknya, kegagalan dalam bekerjasama di masa kini akan berbuah kerugian di masa depan.

Meskipun demikian, proses penalaran pada dilema narapidana berulang hanya berakhir pada kerjasama jika dan hanya jika sang agen memiliki alasan yang kuat bahwa pihak lawan dijamin akan bekerjasama. Tanpa jaminan tersebut keputusan rasional tetap saja adalah tidak bekerjasama. Agen lebih baik mengorbankan keuntungan masa depan daripada dicerca saat ini oleh kecurangan pihak lawan. Jaminan bahwa pihak lawan akan menepati janji sulit didapatkan dalam kondisi alamiah. Sebab, kondisi alamiah didiami oleh mereka yang hanya memikirkan diri sendiri saja. Dengan demikian, kondisi alamiah Hobbesian tetap

saja situasi perang semua melawan semua. Pun ketika dilema narapidana yang berlangsung adalah dilema narapidana berulang.

Dalam kondisi alamiah, pihak-pihak yang bertikai adalah mereka yang memiliki persoalan dalam proses penalarannya. Penalaran mereka terbatas pada kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek belaka. Ini membuahkan persoalan tersendiri. Pihak-pihak yang bertikai tidak akan membangun kepercayaan bahwa masing-masing akan menepati janji. Absennya kepercayaan adalah buah dari kerja rasionalitas yang keliru. Kerja rasionalitas disebut keliru apabila sekadar melayani kepentingan pribadi dan menutup segala pertimbangan mengenai pihak lawan. Rasionalitas tindakan dalam kondisi alamiah Hobbesian tidak dapat menemukan jaminan apa pun bahwa pihak lawan akan bekerjasama.

Persoalan seputar rasionalitas tindakan bermula dari matra yang dikemukakan David Hume: "rasionalitas adalah hamba sahaya dari keinginan". Tindakan rasional adalah penerapan rasionalitas untuk memilih sarana paling tepat untuk mempromosikan tujuan yang seorang keinginani. Dalam ekonomi, rasionalitas semacam ini dikenal dengan sebutan rasionalitas pemaksimal utilitas (*the rationality of maximizing utility*) dan menjadi tulang punggung teoretis pelbagai model tindakan ekonomi.

Rasionalitas tindakan Humean kemudian dikembangkan dalam apa yang disebut sebagai teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional menjelaskan tindakan manusia sebagai sesuatu yang bercorak intensional yakni disebabkan oleh keinginan dan keyakinan subjek. Menurut teori pilihan rasional, tindakan disebut rasional apabila memenuhi tiga syarat optimalitas. Pertama, tindakan harus optimal didasarkan pada keyakinan. Kedua, keyakinan harus didasarkan pada bukti-bukti. Ketiga, keyakinan harus disebabkan oleh investasi optimal dalam mengumpulkan informasi. Perhatikan diagram di bawah ini:

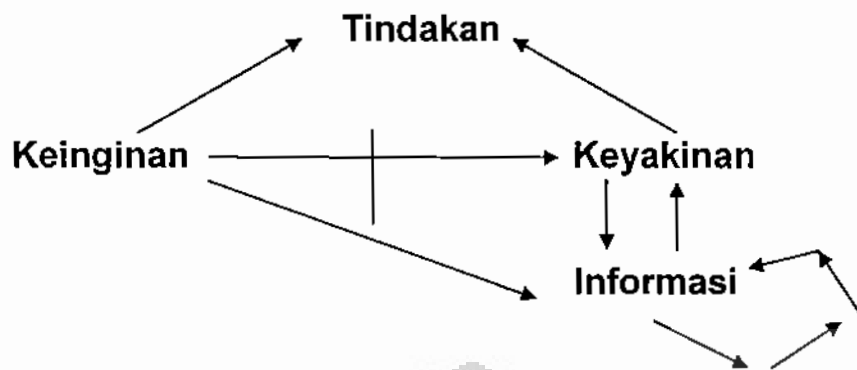


Diagram di atas mesti dibaca dari dua segi baik segi kausalitas maupun optimalitas. Dari segi kausalitas, tindakan harus disebabkan oleh keinginan dan keyakinan yang membuatnya rasional. Tindakan tidak bisa dikatakan rasional apabila sekadar hasil dari ketidaksengajaan. Dari segi optimalitas, suatu keyakinan tidak rasional apabila merupakan hasil dari dua proses yang bias yang saling menegasikan satu sama lain. Misalnya, perokok dan nonperokok memproses informasi tentang bahaya merokok sedemikian rupa sehingga membuat keyakinan mereka lebih dari kenyataan sesungguhnya. Meski keyakinan perokok tentang rendahnya risiko merokok bisa saja sama dengan seorang pengamat yang tidak bias, hal itu tidak membuktikan bahwa keyakinannya rasional.

Singkatnya, rasionalitas bekerja untuk menyusun keyakinan rasional tentang sarana yang paling tepat guna memuaskan keinginan si subjek. Seorang dosen universitas negeri, misalnya, menyusun keyakinan rasional tentang sepeda sebagai sarana transportasi yang murah dan sehat untuk membawanya setiap hari ke universitas. Struktur yang mengemuka dari tindakan tersebut adalah struktur keyakinan-keinginan. Subjek menyusun **keyakinan** rasional tentang sarana yang paling tepat untuk memuaskan **keinginan**-nya bertransportasi secara murah dan sehat.

Instrumentalisasi rasionalitas atau rasionalitas instrumental oleh Jon Elster disebut sebagai rasionalitas tipis sebagai antitesa dari rasionalitas yang lebih luas (Elster, 2001, p. 2-3). Rasionalitas tipis sekadar menimbang sarana terbaik untuk tujuan terberi, sementara rasionalitas yang lebih luas juga mempersoalkan tujuan yang menjadi objek keinginan itu sendiri. Rasionalitas instrumental juga tidak

mampu menarik garis demarkasi antara spesies manusia dan spesies lain di bawahnya. Pada waktu perang dunia pertama, psikolog binatang bernama Wolfgang Köhler menemukan bahwa simpanse mampu memeragakan sebentar rasionalitas instrumental. Sang simpanse mampu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan pisang di dalam kotak.

Filsuf John S Searle menemukan lima persoalan fundamental dalam paralelisme rasionalitas manusia dan simpanse tersebut (Searle, 2001, p.2-3). Pertama, bagi manusia persoalan rasionalitas tindakan bukan semata pemuasan kebutuhan jangka pendek (mendapat pisang). Rasionalitas tindakan bagi manusia menuntut pengorganisasian waktu melampaui kekinian yang diantaranya: tempat yang akan didiami, karir yang akan dijalani, perempuan atau lelaki yang akan dinikahi, keluarga macam apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. Kematian memang menjadi horison untuk rasionalitas kenantian semacam itu, namun manusia tetap mampu merencanakan kehidupan dengan kematian sebagai tapal batasnya.

Kedua, manusia sering dipaksa berpikir serius untuk memilih tujuan-tujuan yang saling berkontestasi satu sama lain. Sementara bagi simpanse tujuannya semata-mata pisang dan tidak sama sekali. Tujuan "tidak mendapat pisang" bukan kontestan bagi pisang sebagai tujuan satu-satunya simpanse. Ia, tidak seperti manusia, tidak menghadapi tujuan yang berkompetisi misalnya: bercocok tanam di kampung atau meneruskan kuliah. Keduanya adalah tujuan yang sama kokoh dari segi biaya dan keuntungan.

Ketiga, simpanse memiliki keterbatasan dalam menimbang alasan lain kecuali keinginannya memakan pisang. Aplikasi rasionalitas sang simpanse dalam menemukan cara paling tepat mendapatkan pisang diikat mati oleh keinginan. Dengan kata lain, alasan simpanse bercorak keinginan-dependen. Sementara manusia mampu menemukan pelbagai alasan lain yang tidak keinginan-dependen (keinginan-independen). Misalnya, manusia menemukan cara tepat mengambil pisang tidak untuk memenuhi keinginan biologisnya melainkan komitmen altruisnya: memberi makan sesama.

Keempat, simpanse tidak memiliki konsepsi tentang dirinya sebagai diri yang berkesatuan dan koheren dalam spektrum ruang-waktu. Dia tidak mampu memandang dirinya selaku agen rasional yang bertanggung jawab di masa akan datang atas keputusan yang diambilnya di masa lalu. Dia tidak mampu melihat keterkaitan logis antara dirinya di masa lalu dan dirinya sekarang. Sementara, diri manusia seperti dikatakan Kant mampu mentransendensi diri empirisnya yang berkelindan dengan ruang-waktu sehingga pengetahuan yang koheren tentang dunia dimungkinkan.

Kelima, simpanse tidak mampu melihat keputusannya sebagai sebagai ekspresi identitas atau komitmen terhadap prinsip umum yang berlaku sama bagi dirinya dan yang lain. Manusia, di lain pihak, mampu melihat tindakannya memberi makan orang miskin sebagai ekspresi identitasnya selaku orang Kristen yang saleh atau mewakili komitmennya pada prinsip aturan emas: "jangan berbuat pada orang lain apa yang tidak kamu inginkan orang lain berbuat padamu".

Searle menemukan persoalan fundamental dalam rasionalitas instrumental yakni ekuivalensi antara tujuan dan keinginan sekaligus reduksi keinginan pada kepentingan pribadi. Artinya, rasionalitas instrumental menutup kemungkinan adanya rasionalitas yang bercorak keinginan-independen. Berdasarkan rasionalitas instrumental, tindakan rasional bertolak dari inventaris tujuan-tujuan primer sang agen yang pada dirinya bukan merupakan fokus dari konstrain rasional.

Sebuah ilustrasi. Seseorang ingin berdamawisata ke Jogjakarta dan menimbang sarana transportasi apa yang paling tepat untuk membawanya ke sana. Setelah menimbang beberapa waktu, ia memutuskan untuk menggunakan pesawat udara karena ongkos pesawat dan kereta api tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, baginya selisih antara biaya dan keuntungan naik pesawat udara lebih besar dari naik kereta api.

Jika cara kerja rasionalitas tindakan seperti yang diilustrasikan di atas ada tiga persoalan yang mengemuka. Pertama, rasionalitas instrumental semacam itu tidak bisa menjelaskan fenomena *akrasia* (kelemahan kehendak). Misalnya, meski sang wisatawan percaya bahwa naik pesawat udara adalah sarana paling efisien untuk

pergi ke Jogjakarta, ia bisa saja tidak mengeksekusi pilihannya tersebut. Mengapa demikian? Si wisatawan ternyata malu dengan rekan sekerjanya yang bergaji sama tetapi naik kereta. Ia takut dibilang sombong dan tidak setia kawan. Di sini, kehendak wisatawan melemah meski pertimbangan rasionalitas instrumental berbicara lain.

Kedua, rasionalitas instrumental tidak memberi tempat pada alasan tindakan yang tidak bertolak dari keinginan. Bagi rasionalitas instrumental, alasan tindakan yang bercorak keinginan-independen adalah ketidakmungkinan dalam pengandaian antropologis yang digariskannya. Ketiga, rasionalitas instrumental menutup pintu bagi evaluasi rasional terhadap tujuan yang dikehendaki. Rasionalitas melulu berfokus pada sarana dan bukan tujuan itu sendiri. Bertrand Russell pun mengatakan, "rasionalitas memiliki makna yang ringkas dan gamblang. Ia mewakili pilihan sarana paling tepat untuk tujuan yang seorang ingin capai. Ia tidak berbicara sama sekali soal pilihan tujuan itu sendiri." (Russel, 1954, p.viii)

Ketidakmungkinan alasan tindakan yang bercorak keinginan-independen dikokohkan oleh Bernard Williams. Menurut Williams, kita tidak mungkin menemukan alasan eksternal bagi agen untuk bertindak (Williams, 1981, p.101-113). Alasan apa pun yang berlaku sebagai alasan seorang agen bertindak haruslah sesuatu yang ada di dalam perangkat motivasinya. Dengan kata lain, alasan tindakan yang bercorak keinginan-independen adalah omong kosong.

Posisi rasionalitas yang menghamba pada keinginan bermasalah di mata Searle. Baginya, fakta bahwa seseorang harus menemukan elemen dalam perangkat motivasi untuk bertindak adalah absurd. Searle memberi ilustrasi menarik. Seorang tamu memesan bir di bar dan meminumnya. Ketika bartender memberikan tagihan untuk dibayar, sang tamu berkata, "saya sudah mencari ke dalam perangkat motivasi saya dan tidak menemukan alasan untuk membayar bir yang saya minum." Tindakan memesan dan meminum bir adalah satu hal sementara menemukan alasan dalam perangkat motivasi adalah hal lain. Keduanya secara logis terpisahkan satu sama lain.

Apologi yang dipakai sang tamu untuk tidak membayar bir adalah absurd. Kita tahu bahwa fakta sang tamu memesan bir dan meminumnya sudah cukup menjadi alasan kuat untuk membayar. Fakta bahwa kita memesan bir dan meminumnya adalah alasan yang bercorak keinginan-independen. Artinya, kita tidak perlu mencari-cari alasan di dalam perangkat motivasi untuk membayar bir yang diminum. Sama halnya ketika kita naik motor tanpa helm di jalan raya. Ketika polisi menilang kita tidak bisa berargumen bahwa kita tidak menemukan alasan apa pun di dalam perangkat motivasi untuk mengenakan helm. Fakta bahwa kita naik motor di wilayah yang berhukum sudah cukup sebagai alasan bagi kita untuk mengenakan helm.

Kesulitan rasionalitas instrumental pada ilustrasi di atas terletak pada keyakinan bahwa alasan tindakan yang keinginan-independen adalah tidak mungkin. Seolah, absennya keinginan membuat kita tak memiliki alasan apa pun untuk bertindak. Padahal, fakta tentang seseorang, pengetahuan dan sejarahnya sudah cukup kuat sebagai alasan untuk bertindak. Kesulitan itu membawa kita pada kesulitan lain yakni dikeluarkannya keinginan dari lingkup pemeriksaan rasional. Berdasarkan prinsip instrumentalisasi rasionalitas, kita hanya memeriksa sarana bukan tujuan. Seolah, apa yang kita kerjakan semata-mata adalah mengaduk perangkat motivasi untuk menemukan keinginan lantas memikirkan sarana yang tepat untuk merealisasikannya. Kita tidak memikirkan apakah keinginan itu masuk akal, relatif terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi, bisa diuniversalisasikan dan lain sebagainya.

Masih dalam konteks yang serupa, sosiolog Margareth Archer menegaskan bahwa keinginan senantiasa bercorak sosial. Manusia dalam kesehariannya bukan *homo economicus* yang menimbang-nimbang sarana guna mewujudkan tujuan yang diinginkannya. Manusia adalah *homo sentiens* yang selalu terlibat secara sosial (Archer, 2000, p.53-54). *Homo sentiens* adalah karakter yang mampu membuat komitmen moral, yang alasan untuk mempertahankannya bertolak dari keterlibatan sosial bukan kepentingan pribadi. Tindak-tanduk seorang *homo sentiens* tidak bisa diukur semata-mata berdasarkan preferensi pribadinya. Kita terutama harus mengukur nilai sosial apa yang diterapkan dalam tindakan itu.

Ketika kita meminta dicintai dan dihormati kita tidak memintanya untuk tujuan lain melainkan demi cinta dan kehormatan itu sendiri. Tujuan-tujuan semacam itu bukan saja merupakan kepanjangan dan ekspresi diri kita tetapi merupakan sesuatu yang bercorak sosial. Segala modus relasi sosial yang menjadi kepedulian utama kita (pernikahan, keluarga, karir, agama dan komunitas) bukan sarana melainkan prinsip konstitutif bagi kualitas hidup. Adalah absurd menanyakan apa untungnya memberi hadiah ulang tahun pada seorang yang kita cintai. Tindakan memberi hadiah ulang tahun adalah ekspresi hubungan asmara yang terjalin dan bukan sarana untuk mempromosikan kepentingan pribadi belaka. Tujuan menyenangkan hati kekasih bukan tujuan kita selaku *homo economicus* melainkan *homo sentiens* yang senantiasa berakar pada konteks sosial. Tindakan memberi hadiah ulang tahun tidak mewakili kalkulasi instrumental melainkan komitmen pada hubungan sosial yang dijalin (hubungan asmara).

Kita tidak menemukan keinginan dalam diri yang terasing secara sosial. Keinginan adalah keinginan dalam diri yang diikat oleh pelbagai norma sosial. Ekspektasi sosial adalah horison normatif yang mengelilingi keinginan seseorang. Kita tidak pernah menemukan keinginan secara telanjang melainkan selalu sudah mengandung pertimbangan sosial. Namun, tidak berarti kita adalah boneka sosial. Tujuan-tujuan sosial yang ada tidak imun terhadap pemeriksaan rasional. Seorang pimpinan universitas yang anaknya kebetulan tidak diterima di universitas yang dipimpinya tidak bisa serta merta bertindak selaku seorang ayah. Ia harus memeriksa ekspektasi sosial yang menghinggapi dirinya selaku seorang ayah. Dengan kata lain, peran sosialnya selaku seorang ayah tidak tanpa persoalan.

Rasionalitas instrumental adalah pengerdilan kerja rasionalitas dalam mengatur tindak-tanduk manusia. Rasionalitas instrumental bukanlah satu-satunya model rasionalitas tindakan yang ada. Ekonom John C Harsanyi mengemukakan tiga alternatif rasionalitas tindakan (Moser, 1990, p.274-276). Pertama adalah rasionalitas kriteria. Rasionalitas kriteria menuntut seseorang untuk menjatuhkan pilihan guna memenuhi kriteria tertentu dan bukan tujuan selanjutnya. Sebuah ilustrasi. Seseorang berniat mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Berdasarkan kriteria "gunung tertinggi di Indonesia" ia memutuskan untuk mendaki gunung

Jayawijaya di Papua. Tindakan mendaki gunung Jayawijaya bukan sarana untuk memenuhi tujuan mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Tindakan mendaki gunung Jayawijaya itu sendiri sudah merupakan tindakan mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Dengan kata lain, tindakan mendaki gunung Jayawijaya adalah operasi rasionalitas tindakan dalam memenuhi kriteria tertentu.

Kedua adalah rasionalitas biaya oportunitas. Menurut rasionalitas ini, sebuah pilihan selalu mengenyampingkan pelbagai alternatif lain yang mungkin. Tindakan mengesampingkan pelbagai alternatif pilihan lain membuahkan biaya yang disebut biaya oportunitas (*opportunity cost*). Model rasionalitas tindakan berbasis biaya oportunitas menuntut kita menimbang dengan seksama biaya oportunitas yang dihasilkan oleh pilihan tersebut. Model ini menjelaskan mengapa individu berpindah dari satu tujuan ke tujuan lain meski perangkat preferensi dasarnya tidak berubah. Seorang individu bisa berpindah tujuan karena biaya oportunitas pilihan-pilihan yang tersedia berubah atau paling tidak informasi yang diperoleh individu mengenai biaya oportunitas yang ada berubah.

Sebuah ilustrasi. Seseorang yang tadinya tidak ingin meneruskan kuliah demi bekerja tiba-tiba membatalkan niatnya. Pertimbangan rasional individu tersebut pada awalnya menegaskan bahwa biaya oportunitas yang dikeluarkan akibat pilihannya meneruskan kuliah sangat tinggi. Hingga pada suatu ketika, ia memperoleh informasi mengenai perkuliahan yang diselenggarakan sore hari sehingga mahasiswa bisa tetap bekerja. Selain itu, ia mendengar bahwa tiga tahun yang akan datang perusahaan akan memberi insentif yang cukup tinggi bagi karyawannya yang bergelar S-1. Ilustrasi itu menunjukkan bahwa perangkat preferensi dasar (kuliah atau bekerja) si calon mahasiswa tidak berubah dan hanya situasi (biaya oportunitas) atau informasinya mengenai situasi tersebut berubah.

Ketiga adalah rasionalitas risiko dan ketidakpastian. Rasionalitas tindakan ini berbeda dengan rasionalitas instrumental yang bekerja dengan kepastian. Orang yang beroperasi dengan rasionalitas instrumental mampu memprediksi secara akurat hasil yang akan dicapai oleh pilihan yang dijatuhkannya. Seperti ketika kita memencet bel dan yakin bel itu akan berbunyi. Sementara orang yang beroperasi dengan rasionalitas risiko dan ketidakpastian tidak memperoleh privilese semacam

itu. Dalam konteks risiko, seseorang tidak bisa memprediksi hasil tapi paling tidak ia mengetahui probabilitas objektif yang melekat pada pelbagai hasil yang mungkin. Ketika kita melempar dadu satu kali, probabilitas objektif untuk mendapat angka tiga adalah satu banding enam. Dalam konteks ketidakpastian, sebagian atau bahkan semua probabilitas objektif yang melekat pada hasil yang mungkin tidak diketahuinya.

Rasionalitas instrumental menerakan dirinya pada salah satu dilema paling kontroversial dalam teori permainan yakni dilema narapidana. Dalam situasi dilema narapidana rasionalitas dipaksa hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan melakukan apapun untuk memperjuangkannya. Insentif dilekatkan pada promosi kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Mekanisme insentif ini lah yang bertanggung jawab memasukkan kita ke dalam jebakan sosial. Sebuah situasi keterjebakan yang berakhir pada kerugian semua pihak yang terlibat. Pertanyaannya, bagaimana membalik insentif tersebut? Bagaimana memberi disinsentif pada kepentingan pribadi demi tujuan jangka panjang? Salah satu hipotesa bisa ditemukan dalam teori konstrain yang dikemukakan oleh Jon Elster. Teori konstrain adalah teori tentang bagaimana individu bisa mengekang pilihan untuk mengedepankan kepentingan pribadinya demi tujuan jangka panjang. Menurut teori konstrain individu tidak bisa menjamin bahwa pilihannya tidak disusupi kepentingan pribadi atau jangka pendek. Karenanya, individu wajib membuat sebuah strategi pra-komitmen untuk mencegahnya meloloskan kepentingan pribadi yang tidak menguntungkan. Strategi pra-komitmen ini bisa dituangkan dalam empat langkah konkret:

1. Membuat pilihan kepentingan jangka pendek yang tidak menguntungkan secara fisik tidak mungkin.
2. Memberikan biaya tambahan pada pilihan kepentingan jangka pendek.
3. Merancang insentif besar bagi pilihan untuk mengedepankan kepentingan jangka panjang.
4. Dengan memperpanjang durasi antara saat memilih kepentingan pribadi dan saat insentif didapatkan.

Pertanyaan lanjutan adalah bagaimana membuat seseorang mau membuat strategi pra-komitmen yang mengekang satu pilihan yang lukratif? Individu yang berada dalam situasi dilema narapidana tidak bisa melihat modus kepentingan lain kecuali kepentingan pribadi dengan imbalan jangka pendek namun merugikan. Untuk itu diperlukan semacam konstrain institusional yang tak berpihak. Konstrain institusional ini sesungguhnya dikehendaki oleh individu-individu dalam masyarakat yang mengharapkan keteraturan dan keadilan. Ini bisa diibaratkan seperti layaknya permainan sepak bola. Dua kesebelasan sepak bola yang bertanding punya kepentingan yang berkontestasi tapi keduanya juga punya kepentingan sama yaitu membuat wasit yang tak berpihak karena tidak masuk akal bermain dengan wasit yang sudah dibayar oleh pihak lawan. Konstrain institusional ibarat wasit yang memberi disinsentif bagi pilihan kepentingan pribadi dan menipiskan penggunaan rasionalitas instrumental-jangka pendek.

Namun, jawaban konstrain institusional terhadap persoalan jebakan sosial membutuhkan pembuktian bahwa rasionalitas kerjasama memang mengeras dalam benak manusia. Sebab apabila tidak konstrain institusional hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan bukan semua pihak yang terlibat. Kelompok yang terlibat konflik bertahan tidak menyerang bukan karena mempercayai yang lain tapi karena demi keamanan kelompoknya semata. Dengan kata lain, ketidakpercayaan dan penolakan bekerjasama masih bersembunyi di balik jejaring relasi sosial.

Refleksi terhadap kemungkinan rasionalitas menanggalkan corak nonkerjasama-nya datang dari filsuf teori keputusan David Gauthier. Gauthier menunjukkan bagaimana rasionalitas seseorang bisa juga mempertimbangkan utilitas orang lain yang terlibat dalam relasi strategis dengannya. Ia membedakan antara pemaksimal serta merta (*straightforward maximizer*) dan pemaksimal terkekang (*constrained maximizer*). Pemaksimal serta merta bertindak berdasarkan rasionalitas instrumental tertutup. Disebut tertutup karena rasionalitas tersebut sekadar mempertimbangkan strategi pihak kedua tetapi menafikan utilitasnya. Sementara, pemaksimal terkekang bertindak berdasarkan rasionalitas instrumental terbuka. Rasionalitas tersebut terbuka pada pertimbangan utilitas

pihak kedua selain strateginya. Rasionalitas instrumental terbuka menuntut seseorang mengekang kepentingan jangka pendeknya dengan membuka mata terhadap utilitas orang lain dan akhirnya, keuntungan jangka panjang. Pendeknya, bagi Gauthier rasionalitas tidak melulu diartikan sebagai pendukung kepentingan pribadi melainkan juga pertimbangan atas utilitas orang lain.

Menjadi pemaksimal terkekang dengan rasionalitas instrumental terbuka menuntut disposisi tertentu yakni disposisi untuk bekerjasama dengan orang lain. Disposisi itu bukan sekadar modus rasional yang dipakai seseorang untuk menghindari hasil yang suboptimal. Itu adalah disposisi yang diadopsi dan dibatinkan seseorang ke relung psikologisnya dan membuatnya menjadi sosok yang kooperatif.

Disposisi seseorang untuk bekerjasama mengandaikan apa yang Gauthier sebut sebagai *translucency*. *Translucency* adalah kemampuan untuk menyingkap disposisi sesungguhnya dari orang lain. Penyingkapan itu tidak mesti akurat tetapi paling tidak lebih baik dari sekadar dugaan. *Translucency* memungkinkan kita untuk memilah antara mereka yang berpura-pura dengan yang sungguhan. *Translucency* memiliki dua fungsi utama. Pertama, itu memberikan kita kriteria dengannya kita memutuskan untuk mempercayai orang lain atau tidak. *Translucency* memungkinkan kita untuk menentukan apakah orang lain berniat bekerjasama atau tidak. Kedua, itu memberi kita alasan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, karena jika orang bisa melihat niat kita sesungguhnya maka hasil maksimal hanya bisa dicapai apabila kita berlaku sebagai pemaksimal terkekang.

Pengandaian Gauthier mengenai rasionalitas instrumental terbuka menuntut refleksi tambahan atas rasionalitas manusia. Rasionalitas dituntut untuk tidak keras kepala melainkan mampu mengubah patokan strategi seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Rasionalitas tidak menghamba pada kepentingan pribadi melainkan mau mendengar kepentingan orang lain dan berubah bersamanya. Itu menuntut rasionalitas yang mau membuka dirinya. Christine Korsgaard seorang filsuf Kantian dari Amerika mengemukakan bahwa rasionalitas manusia memuat apa yang ia sebut struktur refleksifitas. Refleksifitas itu membuat seseorang tidak sekadar bertindak namun juga mempertanyakan preferensi dan

prinsip yang melandasinya. Sebagai contoh, saya memiliki preferensi D untuk melakukan tindakan A, saya memiliki preferensi untuk dipekerjakan berdasarkan kompetensi, maka saya menuntut agar aksi afirmatif perusahaan dihentikan

- a. sebagai subjek reflektif saya sadar akan preferensi (D) yang mendasari tindakan saya (A)
- b. sebagai subjek reflektif saya bertanya: haruskah saya bertindak (A) berdasarkan preferensi (D)
- c. sebagai subjek reflektif saya sadar bahwa untuk bertindak berdasarkan preferensi D berarti mendukung satu prinsip umum (acapkali saya menemui situasi C maka saya akan bertindak berdasarkan preferensi D), setiap kali ada perekrutan pegawai maka saya akan menuntut perusahaan untuk menerima pegawai berdasarkan kompetensi bukan gender, kelas, etnis atau agama.
- d. Sebagai subjek reflektif saya bertanya: haruskah saya bertindak berdasarkan prinsip umum tersebut? Yang kemudian berlanjut pada pertanyaan: apakah saya orang yang cocok untuk bertindak berdasarkan prinsip tersebut, pertanyaan tentang identitas praktis. Mendukung satu prinsip umum berarti mendukung identitas praktis, kalau saya menyokong prinsip umum tersebut maka saya otomatis menyokong identitas praktis yang membuat saya berefleksi untuk sampai kesana.

Korsgaard mengatakan bahwa struktur reflektivitas dalam rasionalitas manusia membuatnya berjangkar pada identitas praktis tertentu. Identitas praktis tidak menutup pintu percakapan melainkan membuat satu prinsip menjadi kontingen dan siap diperlakukan. Preferensi pribadi tidak disokong tanpa banyak tanya, melainkan direfleksikan berdasarkan perjumpaannya dengan orang lain. Dalam konteks rasionalitas terbuka, kemauan untuk menimbang preferensi orang lain sebelum bertindak datang dari corak reflektif yang dimiliki rasionalitas manusia. Refleksifitas ini tidak tertutup karena refleksi bekerja dalam perjumpaan antar identitas praktis yang terlibat dalam situasi strategis. Patut digarisbawahi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam situasi strategis bukan abstraksi matematis belaka

melainkan identitas praktis dengan kesejarahannya masing-masing. Ini merupakan kontribusi cukup penting dalam perandaian mengenai rasionalitas dalam diskursus teori permainan yang mendasari konsep jebakan sosial.

Penulis bermaksud meneruskan pemikiran Korsgaard tentang ketertanaman rasionalitas tindakan pada identitas praktis. Tesis Korsgaard sangat penting mengingat sebuah teori rasionalitas tindakan memerlukan gagasan mengenai yang lain sebagai sosok historis. Patokan rasional sebuah tindakan dapat berubah dalam interaksi antar manusia selaku sosok historis. Corak rasionalitas tidak melulu instrumental melainkan refleksif. Rasionalitas tidak sekadar menghamba pada keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang melainkan membangun kesalingpercayaan. Dengan kata lain, subjek reflektif membangun kesalingpercayaan dengan orang lain karena itu memiliki nilai pada dirinya sendiri dan sesuai dengan tuntutan rasionalitas sebagai reflektivitas.

Penelitian mengenai jebakan sosial sebagai dilema narapidana menuntun kita pada asumsi rasionalitas yang menjadi tumpuannya. Rasionalitas dalam dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental yang menghamba semata pada kepentingan pribadi (*self-interest*). Penghambaan rasionalitas pada kepentingan pribadi ini menciptakan informasi yang asimetris dan dalam situasi sedemikian opsi paling rasional adalah tidak bekerjasama. Alhasil, kepercayaan pun sulit dibangun dan pihak-pihak yang bersengketa tetap terjebak secara sosial.

Rasionalitas instrumental menutup agen dari dua hal: pertama adalah hasrat, keinginan, tujuan dan nilai sang agen sendiri; kedua, kesejarahan identitas orang lain. Penelitian mengenai rasionalitas kerjasama, menurut hemat penulis, harus mampu menyelesaikan dua persoalan itu dengan tuntas. Ada tiga penelitian rasionalitas yang berupaya mempersoalkan rasionalitas instrumental. Pertama, penelitian Elster mengenai watak konstrain rasionalitas tindakan. Kedua, penelitian Gauthier mengenai kemungkinan rasionalitas kerjasama dalam model pemaksimal terkonstrain. Ketiga, penelitian Korsgaard mengenai reflektivitas dalam struktur rasionalitas tindakan.

Jon Elster melandaskan penelitiannya pada asumsi bahwa keinginan atau preferensi agen sangat rentan terhadap gangguan *passion*, dorongan buta, *time*

discounting dan berbagai pengaruh lingkungan. Manusia, misalnya, cenderung mendiskon waktu dengan memilih keuntungan kecil dalam jangka pendek daripada keuntungan besar namun masih lama. Untuk itu, rasionalitas menurut Elster harus mampu mengikat keinginan manusia supaya tidak berubah ke arah yang merugikan dirinya. Rasionalitas konstrain bagi Elster adalah rasionalitas yang menghasilkan strategi pra-komitmen guna mencegah preferensi rasional seorang berubah saat tiba waktu memutuskan. Elster, menurut penulis, berhasil menyelesaikan persoalan ketertutupan rasionalitas instrumental terhadap preferensi atau keinginan agen. Namun, Elster tidak memasukkan variabel orang lain dalam penelitiannya. Sehingga, penelitian Elster jatuh pada solipsisme yang mana agen tidak membutuhkan orang lain dalam menimbang ulang preferensinya.

David Gauthier meneliti kemungkinan rasionalitas lain yang bekerja dalam situasi konflik. Gauthier memperkenalkan gagasan mengenai agen sebagai pemaksimal terkonstrain. Pemaksimal terkonstrain adalah agen yang melihat rasionalitas dalam tindakan kerjasama. Pemaksimal terkonstrain tidak sekadar menimbang strategi lawan tetapi juga utilitasnya. Pertanyaan pemaksimal terkonstrain bukan semata "apa dampak strategi lawan buatku" melainkan "apa dampak strategiku buat lawan". Pemaksimal terkonstrain juga memiliki kemampuan untuk menebak secara hampir pasti disposisi sesungguhnya dari orang lain. Dia dapat membedakan antara pemaksimal terkonstrain sejati dengan pemaksimal terkonstrain semu. Kemampuan ini disebut Gauthier sebagai *translucency*. Penelitian Gauthier sudah menyambangi dua persoalan yang diidap rasionalitas instrumental. Fokus rasionalitas menurut Gauthier bukan lagi kepentingan pribadi semata melainkan juga utilitas orang lain atau interlokkutor. Pertimbangan ulang sang agen terhadap preferensi atau keinginannya didasarkan pada informasi yang bersifat *translucent* mengenai disposisi orang lain. Persoalannya adalah asumsi antropologis yang dipakai Gauthier masih tetap *homo oeconomicus* sebagai pemaksimal utilitas. Orang lain bukan identitas yang menyejarah melainkan model abstrak mengenai manusia ekonomi. Sementara, kerjasama tidak dimungkinkan tanpa suatu keyakinan bahwa disposisi orang lain dapat diandalkan berdasarkan kesejarahannya.

Korsgaard meneliti mengenai modus reflektivitas dalam rasionalitas tindakan. Bagi Korsgaard, sebagai seorang agen yang reflektif seorang memiliki kapasitas untuk secara reflektif menyadari hasrat X yang mendukung tindakan Y. Begitu sang agen menyadarinya, dia dihadapkan pada pertanyaan: "Haruskah saya bertindak seperti yang didiktekan oleh X? Untuk menjawab pertanyaan ini sang agen harus memutuskan apakah dia bertindak berdasarkan X atau tidak. Bagi seorang agen reflektif, bertindak berdasarkan X berarti bertindak berdasarkan prinsip umum tertentu. Reflektivitas akan membawa pertanyaan itu lebih jauh: "Haruskah sang agen mendukung prinsip tersebut?"; "Apakah sang agen adalah jenis orang yang mendukung prinsip tersebut?" Bertindak A dalam reflektivitas yang penuh adalah dukungan terhadap sebuah konsepsi diri yang disebut Korsgaard sebagai "Identitas Praktis".

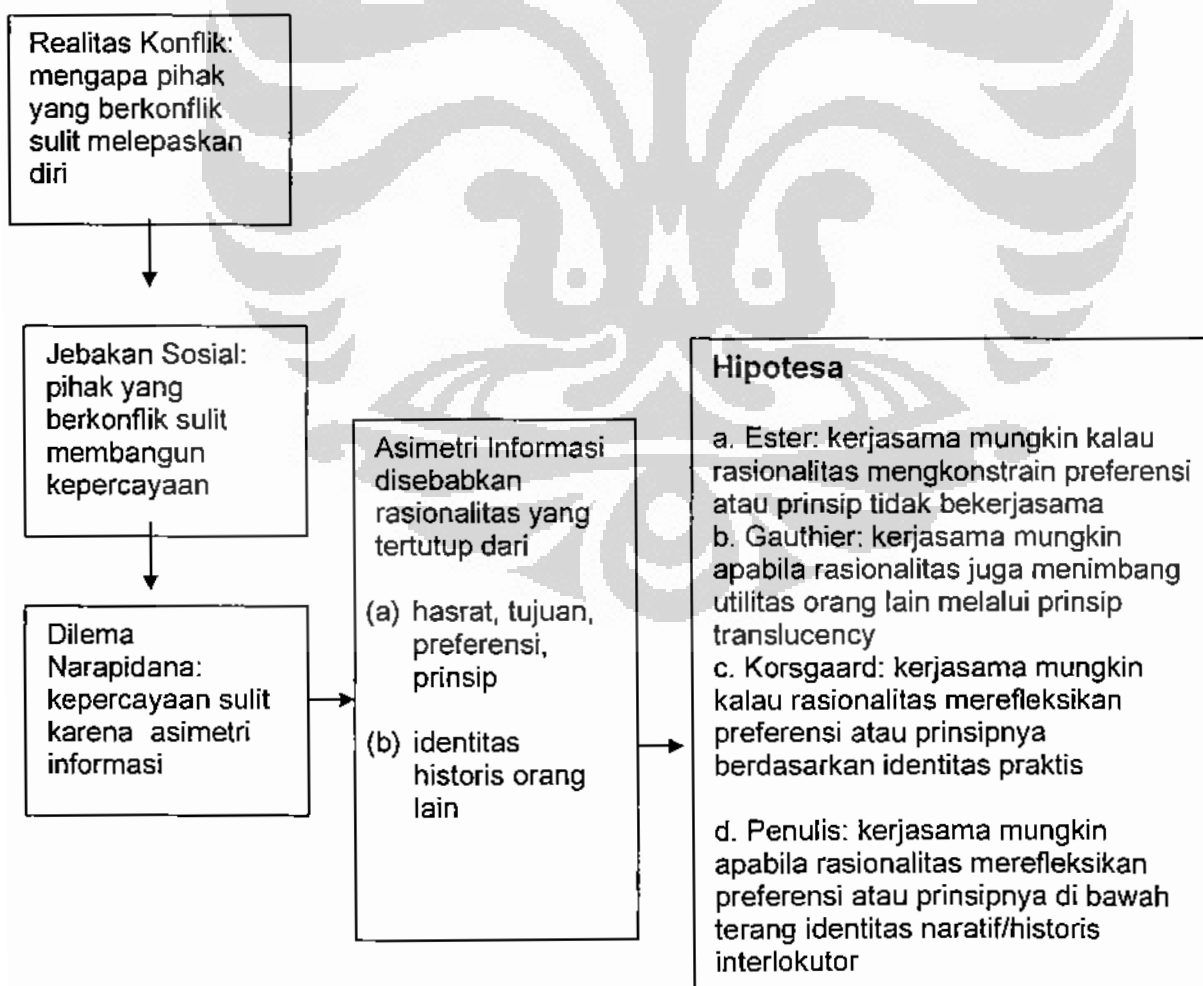
Korsgaard membuat terobosan dengan mendasarkan prinsip tindakan pada identitas praktis. Bahwasannya prinsip tidak berupa sederet proposisi abstrak melainkan ekspresi dari identitas agen. Persoalannya Korsgaard sendiri masih bersikap ambigu mengenai identitas praktis. Di satu sisi, identitas praktis adalah sesuatu yang konkret dan kontekstual sementara di sisi lain, identitas praktis disebut Korsgaard sebagai karakter umum kemanusiaan. Korsgaard gagal menentukan apakah identitas praktis adalah, meminjam istilah Ricoueur, *idem* (*kesamaan*) atau *ipse* (*kepribadian*).

Ketiga penelitian di atas mempersoalkan rasionalitas tindakan, khususnya rasionalitas instrumental, lewat sudut pandangnya masing-masing. Elster mempersoalkan rasionalitas tindakan yang tidak mampu mengkonstrain kepentingan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Gauthier mempersoalkan ketidakmampuan rasionalitas tindakan menyelami disposisi orang lain dalam rangka menimbang preferensi atau keinginan agen. Korsgaard mempersoalkan kealpaan rasionalitas tindakan merefleksikan prinsip tindakan yang tertanam dalam identitas praktis agen.

Penelitian penulis sendiri mengarah pada watak kerjasama dalam rasionalitas yang didasarkan pada dua hal: Pertama adalah kemampuan rasionalitas menimbang preferensi, keinginan, tujuan atau nilai yang dimiliki sang

agen. Kedua adalah kemampuan rasionalitas memeriksa kesejarahan orang lain dalam interaksinya dengan sang agen. Hipotesa penulis adalah kedua kemampuan tersebut tidak berdiri sendiri. Rasionalitas kerjasama menimbang preferensi, keinginan, tujuan atau nilai di bawah terang kesejarahan orang lain. Kedua kemampuan rasionalitas tersebut bekerja secara sekuensial. Berdasarkan skala prioritas, kerja rasionalitas pertama adalah memeriksa kesejarahan orang lain dalam perjumpaannya dengan sang agen. Refleksi terhadap preferensi, keinginan, tujuan atau nilai agen tidak dapat dilakukan tanpa interaksi rasional dengan orang lain yang menyejarah. Dengan kata lain, refleksi tidak dapat dilakukan secara swadaya karena membutuhkan orang lain yang menyejarah sebagai jalan pengenalan diri, identitas praktis dan kontigensi sang agen.

I.5 Algoritma Disertasi



I.6. Sistematika

Bab I disertasi ini membahas latar belakang masalah sekaligus juga metode dan kerangka teori yang digunakan. Masalah yang diangkat adalah konflik selaku jebakan sosial yang menyimpan asumsi manusia dan rasionalitas tertentu. Asumsi itu kemudian dipersoalkan lewat pembacaan tiga teks primer yaitu: *Ulysses Unbound* (Jon Elster), *Morals by Agreement* (David Gauthier) dan *The Sources of Normativity* (Christine Korsgaard). Pembacaan terhadap tiga teks primer tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan terbaik terhadap masalah konflik sebagai jebakan sosial.

Bab II disertasi ini membahas konteks filosofis persoalan dilema narapidana. Latar belakang filosofis ketiga filsuf (Elster, Gauthier, Korsgaard) yang berbeda-beda, sesungguhnya sama menyoroti moralitas sebagai persoalan rasionalitas. Elster menyebutkan bahwa moralitas memerlukan kerja rasionalitas yang membatasi pilihan-pilihan irasional agen. Gauthier menegaskan bahwa moralitas hanya dimungkinkan apabila rasionalitas agen mengambil modus pemaksimal terkonstrain (*constrained maximizer*) bukan serta merta (*straightforward maximizer*). Korsgaard menekankan bahwa moralitas sesungguhnya adalah persoalan normativitas yang berujung pada fungsi reflektivitas pada rasionalitas agen.

Bab III disertasi ini membahas mengenai konflik sebagai jebakan sosial, sebuah situasi yang dalam teori permainan dikenal dengan sebutan: "dilema narapidana". Dilema narapidana mengandaikan bekerjanya rasionalitas instrumental yang dalam bab ini dijelaskan berdasarkan perspektif teori pilihan rasional (*rational choice theory*).

Bab IV disertasi ini menelaah secara kritis keterutupan rasionalitas instrumental terhadap tujuan, keinginan, atau preferensi sebagai bentuk keputusan nilai (*value judgment*). Telaah kritis rasionalitas instrumental didasarkan pada pembacaan artikel Robert Audi berjudul "*Rationality and Valuation*", Buku *Ulysses Unbound* karya Jon Elster dan *The Theory of Communicative Action Vol.1* karya Jurgen Habermas. Pembahasan kritis terhadap rasionalitas insrumental dimaksudkan untuk menunjukkan kemungkinan rasionalitas lain yang bekerja dalam relasi sosial.

Bab V disertasi ini membahas mengenai keterkaitan antara rasionalitas tindakan dan persoalan identitas. Bahwasannya rasionalitas tindakan tidak berjangkar pada identitas ahistoris semacam *homo oeconomicus* melainkan identitas praktis yang takniscaya. Untuk itu, dalam bab ini pembacaan kritis dilakukan terhadap buku *Morals by Agreement* karya David Gauthier dan *Sources of Normativity* karya Christine Korsgaard.

Bab VI disertasi ini adalah bab kesimpulan berisi hasil penelitian terhadap rasionalitas tindakan yang memungkinkan lepasnya pihak-pihak yang berkonflik dari jebakan sosial. Rasionalitas tersebut adalah rasionalitas kerjasama. Penulis ingin membuktikan bahwa manusia tidak sekadar menggunakan rasionalitas secara instrumental untuk mempromosikan kepentingan pribadinya melainkan mempercakapkan kepentingan, tujuan, nilai, prinsip dengan orang lain. Dengan demikian, apa pun yang menjadi pegangan bagi tindakan tidak diterima begitu saja. Segala pegangan direfleksikan dalam perjumpaan dengan orang lain selaku identitas yang menyejarah.

Bab II

KONTEKS FILOSOFIS DILEMA NARAPIDANA

Dilema narapidana adalah teori permainan yang menjelaskan ketakungkinan pilihan kerjasama dalam situasi strategis. Partisipan dalam dilema narapidana cenderung mempromosikan kepentingan pribadi-jangka pendek daripada keuntungan bersama-jangka panjang. Dengan kata lain, partisipan gagal membangun komitmen etis dengan lawan guna keuntungan yang lebih besar.

Persoalan dilema narapidana sejatinya adalah persoalan moral yang perlu ditelisik secara filosofis. Pendekatan filosofis terhadap persoalan moral dalam dilema narapidana adalah filsafat kontraktarian. Kontraktarianisme beranggapan bahwa moralitas adalah persoalan ada tidaknya kerjasama demi keuntungan yang berkesalingan.

Kontraktarianisme moral berasal dari kaum Sofis pada masa Yunani Kuno. Glaucon, seorang Sofis, memberikan keterangan kontraktarian mengenai asal usul keadilan dalam karya Plato: *Republic*. Namun, keterangan kontraktarian Glaucon adalah sesuatu yang ditolak secara argumentatif dalam karya tersebut. Kontraktarianisme moral muncul kembali dalam filsafat Thomas Hobbes. Hobbes mengubah hukum alam menjadi prinsip rasional yang menuntut setiap orang, yang bertindak demi kepentingan sendiri, untuk menyerahkan sebagian kebebasannya. Ini dilakukan dalam terang asumsi bahwa orang lain melakukan hal yang sama. Namun, kesepakatan tersebut menjadi konstrain aktual hanya melalui kekuasaan politik yang maha kuat. Dari sudut pandang teori moral, perubahan dari kesepakatan menjadi kepatuhan menuntut intervensi Leviathan. Meski demikian, kontraktarianisme Hobbesian sungguh meletakkan dasar yang kokoh bagi para kontraktarianis moral kontemporer. Kurt Baier, seorang kontraktarianisme moral kontemporer, berhutang budi pada Hobbes dalam menyusun tesisnya yang berbunyi: "*raison d'être* moralitas adalah menghasilkan rasionalitas yang mengatasi rasionalitas berbasis kepentingan pribadi dalam kasus-kasus yang mana kepatuhan setiap orang kepada

kepentingan pribadinya akan merugikan semua orang. Kurt Baier menyiratkan bahwa kontraktarianisme moral menyimpan persoalan rasionalitas.

Bab ini berfokus pada persoalan moralitas dalam dilema narapidana. Persoalan yang hendak diperiksa adalah bagaimana rasionalitas, pilihan rasional dan moralitas berhubungan satu sama lain. Bagian pertama akan membahas moralitas dalam filsafat kontraktarian David Gauthier. Bagian kedua membahas kesalinghubungan antara moralitas dan kebebasan dalam filsafat tindakan Jon Elster. Sedangkan bagian terakhir bab ini akan membahas normativitas dan rasionalitas menurut Christine Korsgaard.

II.1 Moralitas melalui Kesepakatan (*Moral by Agreement*)

Tesis pokok Gauthier tentang moralitas adalah teori moral sebagai bagian dari teori pilihan rasional. Prinsip rasional untuk pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif mencakup sebagian prinsip yang membatasi agen dalam mempromosikan kepentingannya secara imparial. Prinsip-prinsip yang membatasi itu adalah prinsip-prinsip moral.

Teori pilihan rasional sendiri terbagi menjadi tiga varian utama. Pertama adalah teori pilihan rasional yang berdiam di dalam teori ekonomi klasik dan neo-klasik. Teori pilihan rasional tersebut memeriksa perilaku rasional dalam situasi yang mana agen mengetahui secara pasti hasil dari setiap pilihan yang mungkin. Varian kedua adalah teori keputusan Bayesian. Teori keputusan Bayesian memeriksa perilaku rasional dalam situasi ketika agen tidak mengetahui hasil dari setiap pilihan yang mungkin. Dengan kata lain, keputusan senantiasa melibatkan risiko dan ketidakpastian.

Teori pilihan rasional dalam ekonomi dan teori keputusan Bayesian terbatas dalam analisa terhadap interaksi. Keduanya meletakkan hasil sebuah pilihan sebagai hasil dari seorang agen semata. Keterbatasan tersebut diatasi oleh teori permainan. Teori permainan menganalisa hasil pilihan dalam kaitannya dengan satu set pilihan. Teori permainan menekankan bahwa pilihan seorang agen sangat ditentukan oleh ekspektasinya mengenai pilihan orang lain. Situasi

yang mana hasil dari pilihan agen ditentukan oleh pilihan orang lain disebut sebagai situasi strategis.

Upaya untuk melihat paralelisme antara teori moral dan teori pilihan rasional bukan sesuatu yang sama sekali baru. Harsanyi menekankan bahwa teori moral adalah bagian dari teori pilihan rasional. John Rawls berbicara tentang prinsip keadilan sebagai objek pilihan rasional. Keduanya, meski demikian, memandang bahwa pilihan rasional dijatuhkan dari sudut pandang imparsial. Prinsip-prinsip Rawls dan Harsanyi ditujukan kepada mereka yang ingin memilih secara bermoral atau imparsial. Sementara, persoalan dalam kontraktarianisme moral adalah bagaimana moralitas dihasilkan sebagai konstrain rasional dari premis non moral sebuah pilihan rasional. Bahwa terdapat situasi yang mana agen mesti memilih secara bermoral untuk memilih secara rasional.

Gauthier bermaksud menghasilkan prinsip rasional dalam menjatuhkan pilihan tanpa apriori moral tertentu. Gauthier tidak mengasumsikan bahwa harus ada konstrain rasional atau imparsial. Dia bahkan tidak mengasumsikan konstrain apa pun, apakah imparsial atau tidak. Gauthier semata mendemonstrasikan bahwa ada konstrain rasional yang bersifat imparsial. Konstrain rasional tersebut kemudian yang diidentifikasi dengan moralitas. Teori Gauthier bertujuan mengesahkan moralitas sebagai seperangkat konstrain rasional terhadap promosi kepentingan pribadi dan bukan untuk membela kode moral tertentu.

Teori pilihan rasional mengandung asumsi mengenai rasionalitas tindakan (*practical rationality*) (Gauthier, 1986, p.7). Pertama adalah konsep rasionalitas maksimalisasi. Rasionalitas maksimalisasi bekerja untuk memaksimalkan pemuasan kepentingan pribadi agen. Kedua adalah konsep rasionalitas universal. Rasionalitas universal menekankan bahwa kerja rasionalitas tidak berhubungan dengan kepentingan orang per orang melainkan semua orang yang terlibat. Konsep rasionalitas universal relatif tidak memiliki banyak persoalan dibanding dengan rasionalitas maksimalisasi. Namun, Gauthier justru

ingin membangun moralitas sebagai bagian teori pilihan rasional berdasarkan konsep rasionalitas maksimalisasi.

Moral melalui kesepakatan mengasumsikan agen sebagai pusat aktivitas yang mendayagunakan segenap kapasitas dan sumber daya untuk memuaskan kepentingannya. Agen memiliki serangkaian pilihan yang dapat dia ambil. Namun, sang agen belum membedakan antara mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Dengan kata lain, bagi sang agen apa yang dapat dilakukan serta merta boleh dilakukan. Lalu kapan agen mampu membedakan antara apa yang dapat dan apa yang boleh dilakukan? Gauthier mengatakan bahwa perbedaan itu dipahami segera setelah para agen bersepakat untuk mengkonstrain pilihan mereka. Segera setelah para agen memahami struktur interaksi mereka, mereka pun mengenali sebuah ruang untuk konstrain yang berkesalingan: dimensi moral dalam interaksi mereka. Moralitas, dengan demikian, tidak jatuh dari langit. Moralitas muncul dari aplikasi rasionalitas maksimalisasi terhadap struktur interaksi tertentu.

Persoalan pokok dalam kontraktarianisme moral adalah perubahan dari kesepakatan hipotetis ke konstrain moral yang aktual. Bagaimana kesepakatan menjelma menjadi kepatuhan. Agen dapat saja bersepakat mengenai konstrain moral tertentu namun belum tentu dia mengikatkan diri pada konstrain tersebut kelak.

Masyarakat adalah ventura kooperatif (*cooperative venture*). Masyarakat sebagai ventura kooperatif adalah seperangkat pengaturan sosial yang menguntungkan semua pihak. Fokus setiap agen untuk memenuhi kepentingannya mesti memastikan kemauannya untuk bergabung dengan sesamanya dalam sebuah ventura yang menjamin semua pihak untuk meningkatkan ekspektasi masing-masing. Keberterimaan sebuah pengaturan sosial sangat tergantung pada keuntungan yang berkesalingan dari pengaturan tersebut. Dalam masyarakat sebagai ventura kooperatif, persoalan kontraktarian mengenai kesepakatan dan kepatuhan tidak menemukan artikulasinya. Kemauan agen untuk bergabung dengan sebuah ventura serta merta berarti kepatuhan agen terhadap pengaturan sosial ventura tersebut.

Institusi dan praktik sosial memainkan peran koordinatif. Sebuah praktik sosial bersifat koordinatif jika setiap agen berkeinginan untuk menyesuaikan diri apabila sebagian besar agen melakukan hal yang sama. Namun, agen berkeinginan untuk tidak menyesuaikan diri apabila sebagian besar agen tidak melakukannya. Praktik sosial disebut sebagai menguntungkan secara koordinatif apabila setiap agen berkeinginan bahwa agen lain menyesuaikan diri daripada tidak, agen juga tidak berkeinginan agen lain menyesuaikan diri dengan praktik-praktik alternatif. Berikut sebuah ilustrasi. Dua orang sedang mendayung perahu. Setiap orang berkeinginan untuk mendayung apabila yang lain juga mendayung, sebaliknya tidak mendayung apabila yang lain tidak. Setiap orang berkeinginan agar yang lain tidak melakukan praktik lain selain mendayung.

Tidak semua praktik sosial yang menguntungkan bersifat koordinatif. Kita dapat mengatakan bahwa sebuah praktik adalah menguntungkan apabila setiap agen menginginkan agar hampir semua agen lainnya melakukan hal yang sama atau tidak melakukan praktik alternatif. Meski demikian, ada kasus yang mana setiap agen tidak ingin melakukan praktik tertentu apabila hampir semua agen lainnya melakukan. Berikut sebuah ilustrasi. Dalam komunitas tertentu dana yang berasal dari pajak dipergunakan secara bijak dan tepat sasaran. Agen dalam komunitas tersebut menginginkan agar yang lain membayar pajak daripada tidak, namun sang agen sendiri dapat saja tidak berkeinginan membayar pajak, apa pun yang dilakukan orang lain. Dengan kata lain, dia ingin menjadi penumpang bebas (*free rider*) dari keuntungan sosial yang dihasilkan orang lain.

Perubahan dari kesepakatan hipotetis mengenai pengaturan sosial ke kepatuhan terhadap kesepakatan itu menjadi problematis. Perubahan dari kesepakatan menjadi kepatuhan tidak serta merta seperti dalam masyarakat selaku ventura kooperatif. Kasus di atas menunjukkan betapa seorang agen dapat saja bergabung dengan sebuah ventura namun tidak mematuhi kesepakatan-kesepakatan dalam ventura tersebut. Setiap agen berkeinginan untuk bergabung dengan harapan mendapat keuntungan dari kepatuhan orang lain dan ketidakpatuhannya. Dalam situasi semacam itu, setiap agen hanya akan

mematuhi kesepakatan apabila masing-masing menerima konstrain terhadap pemenuhan kepentingannya. Apabila tidak, masing-masing hanya akan mematuhi apabila ditekan oleh opini publik atau otoritas.

Persoalannya, apakah kepatuhan dapat dipastikan oleh otoritas? Hobbes menunjuk kondisi alamiah sebagai kondisi yang mana masyarakat tidak diikat oleh konstrain moral. Setiap agen berfokus pada keselamatan diri belaka. Kesepakatan senantiasa dibatalkan. Sebab itu Hobbes berargumen bahwa dalam masyarakat mesti ada pengambil keputusan berdaulat yang membatasi setiap agen namun dirinya sendiri tak dibatasi (Hampton, 1986, p. 198). Sang berdaulat (*the sovereign*) memiliki kekuasaan untuk memutuskan semua perkara di dalam persemakmuran (*common wealth*), termasuk perkara apakah dirinya tetap berkuasa atau tidak.

Sang berdaulat tidak jatuh dari langit. Dia diciptakan oleh agen dalam kondisi alamiah. Setiap agen menyerahkan semua haknya atas semua hal kepada sang berdaulat. Sang berdaulat pun memiliki hak penuh atas agen. Dia berhak memutuskan siapa yang bersalah, menghukumnya, memilih sarana penghukum dan lain sebagainya. Di sini timbul persoalan. Agen tidak akan mau mematuhi perintah sang berdaulat untuk menghukum dirinya sendiri sejauh itu akan membahayakan keselamatan dirinya. Rasionalitas instrumental agen akan membuat perhitungan bahwa berada di bawah kekuasaan sang berdaulat lebih merugikan daripada menguntungkan. Hobbes kemudian menyebutkan bahwa masih ada hak yang melekat pada agen yakni hak pembelaan diri (*self defense right*) (Hampton, 1986, p. 198). Agen berhak membela diri terhadap keputusan sang berdaulat apabila itu bertentangan dengan keselamatan dirinya. Agen berhak memutuskan apakah keputusan yang berdaulat membahayakan keselamatan dirinya atau tidak. Namun, apakah agen yang memiliki hak pembelaan diri akan menciptakan sang berdaulat yang berkuasa penuh? Tentu saja tidak. Keberadaan agen yang memiliki hak pembelaan diri membatasi kekuasaan sang berdaulat. Dia tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memutuskan semua perkara di dalam persemakmuran. Sang berdaulat tidak tak terbatas. Dia

tidak lagi memiliki kekuasaan untuk menghentikan sengketa dan menciptakan kerjasama.

Kounter argumen terhadap Hobbes menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap konstrain moral tidak dapat dijamin oleh kehadiran sang berdaulat (*the sovereign*). Sehubungan dengan persoalan tersebut, Gauthier mengajukan tiga konsep pokok (Gauthier, 1986, p. 13). Konsep pertama adalah zona bebas moral (*morally free zone*) yang merupakan konteks yang mana konstrain moral tidak bekerja. Ekonom mengklaim bahwa pasar persaingan sempurna adalah zona bebas moral. Dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan yang berkesalingan dijamin melalui perilaku tak terkonstrain masing-masing individu dalam mempromosikan kepentingannya. Di dalam pasar persaingan sempurna, setiap agen menikmati kebebasan yang sama dalam pilihan dan tindakan. Ketiadaan parsialitas atau keberpihakan dalam pasar membuat konstrain tidak diperlukan secara moral. Pasar persaingan sempurna menggambarkan interaksi ideal antar agen yang tidak berkepentingan dengan kepentingan orang lain. Setiap agen hanya didikte oleh kepentingan pribadi belaka untuk berpartisipasi secara efektif pada ventura yang saling menguntungkan.

Pasar persaingan sempurna adalah ranah tindakan yang mana harmoni dicapai dengan sendirinya. Hal ini tentu saja adalah sesuatu yang teramat ideal. Pada kenyataannya, kepentingan individu dan keuntungan yang berkesalingan harus direkonsiliasikan lewat kesepakatan rasional. Sebuah kesepakatan yang dimungkinkan apabila hasilnya sungguh menguntungkan satu sama lain. Itu adalah syarat perlu (*necessary condition*) sebuah kesepakatan. Persoalannya, apakah syarat cukup sebuah kesepakatan rasional. Persoalan itu coba didekati oleh teori permainan yang terbagi menjadi dua isu. Isu pertama adalah persoalan negosiasi yang berfokus pada pilihan hasil spesifik dari sederet kemungkinan yang menguntungkan dan posisi awal negosiasi. Kedua, penentuan posisi awal negosiasi tersebut.

Konsep pokok kedua adalah prinsip konsesi minimax (*minimize the maximum*) relatif. Konsep ini menegaskan bahwa kesetaraan rasionalitas para negosiator berujung pada tuntutan bahwa konsesi terbesar, diukur berdasarkan

kepentingan pemberi konsesi, adalah sekecil mungkin. Apabila A adalah negosiator maka konsesi terbesar yang diberikan pada B adalah yang terkecil yang dapat dia berikan. Apabila masyarakat adalah ventura kooperatif untuk keuntungan yang berkesalingan, maka institusi-institusinya harus memenuhi tuntutan prinsip minimax. Prinsip ini mengatur kesepakatan yang mendasari ventura kooperatif yang rasional dan adil. Namun, persoalan mengenai kepatuhan tetap menjadi kendala. Adalah rasional bersepakat untuk menjamin keberlakuan prinsip minimax, namun adalah rasional untuk mengabaikannya apabila menguntungkan. Apakah rasional untuk menginternalisasikan prinsip moral atau hanya mematuhi sejauh kepentingan sang agen diikat oleh konstrain eksternal? Teori kontraktarian menemui jalan buntu di sini.

Oleh sebab itu, perlu diperkenalkan konsep ketiga yakni maksimalisasi terkonstrain (*constrained maximization*). Kita perlu membedakan antara agen yang secara serta merta memaksimalkan kepuasannya dengan agen yang patuh dengan konstrain moral yang saling menguntungkan. Yang disebut belakangan adalah pemaksimal terkonstrain (*constrained maximizer*). Pemaksimal terkonstrain memiliki disposisi untuk bekerjasama sementara pemaksimal serta merta tidak. Memang, pemaksimal terkonstrain dapat dirugikan oleh kepatuhannya dengan konstrain moral. Ini terjadi ketika ekspektasi bahwa orang lain akan bertindak sama ternyata tidak terpenuhi. Meski demikian, keuntungan yang diperoleh dari kerjasama melebihi yang diperoleh dari eksploitasi atau manipulasi. Dengan kata lain, adalah rasional terdisposisi untuk mengkonstrain perilaku maksimalisasi dengan mematuhi prinsip moral. Kontraktarian mampu menunjukkan bahwa mengikuti kepentingan pribadi tanpa konstrain adalah sebetulnya irasionalitas. Di lain pihak, kepatuhan terhadap kewajiban yang didasarkan pada keuntungan berkesalingan adalah rasional.

Kepatuhan, meski demikian, didasarkan secara rasional hanya pada konteks sebuah ventura yang sepenuhnya kooperatif. Ventura kooperatif adalah ranah tindakan ketika setiap partisipan secara sukarela berinteraksi satu sama lain. Gauthier menegaskan bahwa perlu dirumuskan syarat yang memungkinkan setiap partisipan sukarela untuk berinteraksi. Apa yang disebut sebagai posisi

negosiasi awal (*initial bargaining position*). Jika setiap agen secara sukarela patuh pada kesepakatan yang menentukan apa yang dia peroleh dari negosiasi, maka mereka perlu menemukan sesuatu yang dapat diterima bersama yang memungkinkan mereka mau bernegosiasi.

Keberterimaan awal tersebut harus bebas dari koersi atau paksaan. Jika seorang mengambil paksa milik orang lain dan mengajak pihak yang terampas untuk bekerjasama, maka sang korban dapat saja terpaksa mematuhi. Namun, sang korban tidak akan secara sukarela mematuhi. Sebab itu, Gauthier merasakan perlu untuk mengkonstrain posisi negosiasi awal. Konstrain yang dimaksud adalah proviso yang melarang agen membuat dirinya lebih baik melalui interaksi yang memperburuk posisi orang lain. Tidak seorang pun menjadi lebih buruk dalam posisi negosiasi awal ketimbang apa yang diperolehnya dalam konteks nonsosial sebuah kondisi tanpa interaksi.

Proviso tersebut adalah konsep pokok keempat yang diperkenalkan Gauthier. Proviso tersebut bukan hasil melainkan syarat sebuah kesepakatan rasional. Itu adalah kondisi yang mesti diterima oleh setiap agen. Di antara agen yang, betapa pun rasional, namun tidak berharap untuk berinteraksi dalam ventura kooperatif yang saling menguntungkan, maka proviso tersebut tidak memiliki kekuatan apa-apa. Teori moral lewat kesepakatan (*moral by agreement*) tidak memberi tempat bagi konstrain rasional yang tidak menghasilkan keuntungan yang berkesalingan. Teori kontraktarian yang digagas Gauthier ini menolak kewajiban yang bercorak redistributif (ada transfer keuntungan) namun tidak meningkatkan keuntungan bersama. Teori tersebut juga menolak kewajiban yang tidak resiprokal sifatnya. Kewajiban nonresiprokal tidak berdasar secara rasional dan tidak didukung oleh pertimbangan imparsialitas.

II.2 Kebebasan dan Konstrain

Moralitas dalam konsepsi kontraktarian pada dasarnya bertumpu pada konstrain terhadap kebebasan individu dalam mempromosikan kepentingan pribadinya. Kebebasan dan konstrain adalah dua sisi mata uang yang sama. Yang satu senantiasa mengandaikan yang lain. Ini perlu direfleksikan secara

mendalam. Di satu sisi, kebebasan mesti dikonstrains demi moralitas. Sementara, di sisi lain, kebebasan senantiasa diartikan sebagai absennya halangan bagi tindakan. Konsepsi kedua ini ditegaskan oleh Thomas Hobbes. Baginya, kebebasan adalah absennya halangan eksternal bagi tindakan (Gaus, 2000, p.77). Kebebasan seperti ini disebut sebagai kebebasan negatif. Apabila seorang demonstran dijebloskan ke penjara oleh rejim berkuasa maka dia kehilangan kebebasannya untuk bergerak bebas.

Persoalannya, apakah semua halangan eksternal berakibat pada hilangnya kebebasan? Seorang pendaki gunung menemukan tanah longsor yang mengakibatkan dirinya tak bisa meneruskan perjalanan. Apakah dengan demikian dia terampas kebebasannya. Isaiah Berlin dengan tegas mengatakan tidak. Menurut Berlin, seorang kehilangan kebebasannya apabila dihalangi oleh perbuatan orang lain yang disengaja (Gaus, 2000, p. 78). Artinya, sang pendaki gunung kehilangan kebebasannya apabila pendaki di depannya dengan sengaja meledakkan dinamit untuk melongsorkan tanah. Dengan kata lain, sang pendaki tidak kehilangan kebebasannya apabila pendaki di depannya tidak sengaja melongsorkan tanah.

Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang mahasiswa memiliki dua pilihan saat ujian: memberi contekan kepada rekannya atau diam saja. Namun, rekan itu mengancam akan menyakiti si mahasiswa apabila dia tidak memberi jawaban. Berdasarkan konsep Hobbes tentang kebebasan, sang mahasiswa tidak kehilangan kebebasan. Dia tetap dapat memilih untuk berdiam diri. Sang mahasiswa tidak mendapat halangan eksternal sehingga membuat dirinya tidak mungkin melakukan apa yang diniatkan. Namun, sang mahasiswa mendapat tekanan atau koersi dari rekannya yang membatasi kebebasannya. Koersi tidak menihilkan sama sekali pilihan bagi agen. Namun, opsi yang ada sedemikian termanipulasinya sehingga tindakan yang dipilih adalah tindakan yang diinginkan sang penekan. Opsi yang ada adalah semu karena opsi tersebut dilekati oleh hukuman yang berat (disakiti).

Kebebasan negatif mengandung asumsi mengenai peluang. Kebebasan seseorang bergantung pada peluang apa yang dia miliki, bukan apa yang dia

lakukan. Seorang yang tidak banyak melakukan apa-apa namun memiliki beberapa opsi yang tidak dimanipulasi adalah bebas. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang maling ditangkap dan diikat di kursi. Dia tidak dapat menggerakkan tangannya. Namun, sang maling menderita kelainan jiwa. Dia berpikir: "terikat di kursi seperti ini adalah sesuatu yang sejak dulu saya ingin lakukan". Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa kebebasan adalah soal peluang. Sang maling melakukan apa yang dia ingin lakukan (terikat di kursi). Namun, dia tidak bebas karena peluangnya untuk dapat bebas bergerak adalah nihil.

Seorang dikatakan tidak bebas apabila dia dihalangi untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Para advokat kebebasan negatif sepakat mengenai hal tersebut. Seorang filsuf liberal, T.H. Green, mencoba untuk melihat kemungkinan lain. Menurutnya, kebebasan adalah juga absennya halangan internal berupa impuls, dorongan buta, insting atau nafsu (Gaus, 2000, p.83). Seorang yang diperbudak nafsu dikatakan tidak bebas karena melaksanakan kehendak yang tidak bisa dia kendalikan. Seorang pecandu narkoba sudah mengikuti program rehabilitasi selama satu tahun. Dia sudah dinyatakan bebas dari kecanduan. Bahkan sekarang dirinya kerap berbicara di berbagai forum mengenai bahaya narkoba. Namun, satu ketika dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Di situ, kepribadian baru sang mantan pecandu tidak dapat berbuat apa-apa. Sang mantan pecandu didikte oleh impuls asing yang tak dapat dia kendalikan.

Green membagi "diri" (*self*) menjadi dua bagian: diri sejati dan diri semu. Diri sejati adalah nilai, kepentingan dan rencana yang menjadi pribadi dasar (*basic personality*) seseorang. Diri semu, sebaliknya, adalah impuls, nafsu, dorongan buta yang senantiasa berdiri diametral dengan diri sejati. Diri semu adalah diri yang didikte oleh impuls yang tak dapat dikendalikan. Orang disebut bebas apabila dia melakukan apa yang sungguh-sungguh dia mau lakukan—apa yang diri sejatinya mau lakukan. Orang bebas juga biasa disebut sebagai orang otonom, yakni seorang yang memutuskan sendiri apa yang dia ingin lakukan tanpa didikte oleh impuls, ketidaktahuan, kekeliruan, pengkondisian masa lalu atau adiksi. Otonomi sendiri berarti *auto* (sendiri) dan *nomos* (mengatur).

Kebebasan yang digagas Green adalah kebebasan positif. Kebebasan positif bukan absennya halangan eksternal melainkan internal berupa impuls, dorongan buta, nafsu, dan lain sebagainya. Seorang dikatakan tidak bebas secara positif apabila yang bersangkutan diperbudak impuls atau nafsu. Sehingga, orang tersebut tidak menjalankan kehidupan yang ditentukan sendiri dan otonom. Kebebasan positif berbeda secara jelas dan gamblang dengan kebebasan negatif. Kebebasan positif berbicara tentang aktualitas—apa yang secara aktual dilakukan. Sementara, kebebasan negatif berbicara mengenai peluang—apa yang mungkin dilakukan. Berdasarkan kebebasan positif, seorang disebut bebas apabila secara aktual menjalankan fungsi penentuan diri atau pengendalian diri sehingga dengan itu melakukan apa yang sesungguhnya ingin dia lakukan.

Kebebasan positif adalah nama lain dari otonomi. Otonomi sendiri dapat dibedakan menjadi empat jenis (Gaus, 2000, p.84): (a) otonomi sebagai pembangunan kapasitas khas manusia (b) otonomi sebagai kehidupan yang dipilih sendiri (c) otonomi sebagai kehidupan berdasarkan rasionalitas (d) otonomi sebagai hasrat tingkat dua. Berikut adalah elaborasi masing-masing jenis otonomi tersebut.

- (a) otonomi sebagai pembangunan kapasitas khas manusia. Green mendefinisikan kebebasan sebagai pengendalian diri sejati atas impuls dan nafsu. Pengendalian diri adalah sebuah kapasitas khas manusia yang membuatnya menjadi sosok yang otonom. Hidup yang memuaskan adalah hidup yang otonom. Hidup otonom adalah hidup yang mana kapasitas-kapasitas khas manusia terbangun dan berkembang.
- (b) Otonomi sebagai hidup yang dipilih sendiri. Otonomi bukan soal pengembangan kapasitas khas melainkan pilihan yang dijatuhkan sendiri oleh seseorang tentang bagaimana menjalankan hidupnya. Seorang dapat memilih jalan aktualisasi diri atau sebaliknya. Pengembangan kapasitas khas bukan sesuatu yang krusial. Apa yang krusial adalah pilihan mandiri yang dijatuhkan seseorang terhadap

hidupnya. Orang yang sepenuhnya otonom adalah dia yang menjalani hidup hasil pilihannya sendiri. Dia yang membuat keputusan mengenai hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan utamanya.

- (c) Otonomi sebagai hidup berdasarkan rasionalitas. Otonomi bukan semata soal pilihan mandiri seseorang atas nilai, prinsip atau komitmen yang mendasari kehidupannya. Seorang disebut otonom apabila memeriksa secara kritis segenap aspek kehidupannya dan bertindak berdasarkan pemahaman rasional mengenai apa yang terbaik untuk dilakukan.
- (d) Otonomi sebagai hasrat tingkat dua. Hasrat tingkat pertama adalah hasrat yang dimiliki seorang terhadap objek tertentu: hasrat seorang terhadap mobil, penghargaan, gelar akademik dan lain sebagainya. Hasrat tingkat dua adalah hasrat yang membatalkan hasrat tingkat pertama. Hasrat untuk tidak membeli mobil demi uang sekolah anak adalah hasrat tingkat dua. Orang disebut otonom apabila mengaksentuasi kapasitasnya untuk merefleksikan hasrat tingkat pertama berdasarkan hasrat tingkat dua. Seorang yang otonom mampu mengubah atau membatalkan hasrat tingkat pertama dalam terang hasrat tingkat dua.

Persoalannya, apakah kebebasan negatif dan kebebasan positif sedemikian harus dibedakan secara diametral? Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang polisi melihat seorang wanita hendak melangkah ke jembatan yang sudah rapuh. Sang polisi bergegas menghampiri sang wanita untuk mencegahnya melangkahkan kaki ke jembatan tersebut. Pertanyaannya, apakah sang polisi tersebut mengintervensi kebebasan sang wanita? Jawabannya negatif. Kebebasan adalah melakukan apa yang seorang ingin lakukan. Sementara, sang wanita tidak menginginkan untuk jatuh ke sungai.

Keinginan sang wanita adalah menyeberangi jembatan. Meski demikian, dia tidak dapat menuntaskan keinginan tersebut karena tidak memiliki informasi mengenai kondisi jembatan. Sang polisi tidak mencegah si wanita untuk

melakukan apa yang dia mau lakukan: menyeberangi jembatan. Sang polisi mencegah si wanita untuk melakukan apa yang dia tidak inginkan: jatuh ke sungai.

Tindakan yang bebas mesti merupakan sesuatu yang dipilih. Guna bertindak bebas, seorang harus mampu membuat pilihan. Jika seorang berjalan sambil tidur dan akan menyeberangi jalan yang ramai, kita yang mencegah tidak bisa dikatakan tengah merampas kebebasannya. Dia yang berjalan sembari tidur tidak memilih untuk menyeberangi jalan. Tindakan yang bebas, dalam konteks kebebasan negatif, mengandaikan aksentuasi kapasitas untuk memilih secara suka rela. Memilih secara suka rela berarti: (a) si pemilih tidak didikte oleh impuls atau nafsu. (b) si pemilih tahu apa yang harus dia lakukan atau dia sungguh berniat untuk melakukannya. (c) si pemilih tidak salah memahami konteks tindakannya atau tidak memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan. (d) si pemilih tidak dipengaruhi oleh obat-obatan dan distorsi psikologis sehingga dia tidak tahu apa yang dilakukan atau tidak dapat mengendalikan diri. (e) si pemilih tidak boleh dikondisikan oleh orang lain sehingga apa yang dipikirkannya sebagai pilihan ternyata sudah diprogram oleh orang lain. Ilustrasi di atas membuktikan bahwa kebebasan negatif tetap mengandaikan seorang pemilih yang kompeten. Sehingga, dikotomi kebebasan negatif/kebebasan positif tidak berlaku lagi.

Kebebasan, karena itu, bertumpu pada dua konsep dasar yang sama penting: kompetensi dan peluang. Seorang agen yang memiliki kompetensi untuk memilih namun tidak memiliki peluang untuk mengaksentuasinya tidak dapat dikatakan bebas. Sebaliknya, seorang agen yang memiliki sederet peluang namun tidak kompeten memilih juga tidak bebas. Kebebasan adalah pilihan kompeten terhadap satu dari serangkaian opsi yang ada.

Asumsi peluang atau opsi dalam konsep kebebasan tidak sepenuhnya benar. Erich Fromm mengatakan bahwa dunia modern menciptakan rasa takut akan kebebasan (Fromm, 1960, p.54). Agen di dunia modern takut memiliki terlalu banyak pilihan atau opsi dan diatur oleh otoritas yang minimal. Gagasan ini direspon Elster dengan mengatakan bahwa agen akan diuntungkan apabila dia

tidak memiliki terlalu banyak opsi. Elster menekankan bahwa agen dapat diuntungkan dengan hilangnya opsi tertentu, atau opsi itu dapat direalisasikan dengan penundaan, biaya tinggi dan disinsentif lainnya (Elster, 2000, p.2). Singkat kata, agen diuntungkan dengan memiliki peluang atau opsi sesedikit mungkin.

Artinya, konstrain terhadap kebebasan diperlukan demi keuntungan sang agen itu sendiri. Sebenarnya, tanpa kalkulasi utilitarianistik pun, kebebasan senantiasa terbatas. Ilmu sosial strukturalis beranggapan bahwa konstrain apakah itu fisik, ekonomi, kultural atau legal begitu kuatnya sehingga ruang kebebasan menjadi sangat terbatas. Seorang kaya memiliki peluang yang sama dengan seorang tuna wisma untuk tidur di bawah jembatan. Namun, si tuna wisma tidak memiliki peluang atau opsi selain tidur di bawah jembatan.

Elster sendiri membagi konstrain terhadap kebebasan menjadi dua bagian (Elster, 2000, p.4). Pertama adalah konstrain menguntungkan yang tidak dipilih sang agen. Konstrain ini disebut juga sebagai konstrain insidental. Ketika fotografi masih berkutat di masa film hitam putih, ternyata banyak karya artistik justru lahir. Film hitam putih adalah konstrain yang menguntungkan bagi kreativitas fotografer.

Kedua adalah konstrain menguntungkan yang dipilih sang agen sendiri. Ini adalah tesis Elster yang menarik. Agen, menurut Elster, dapat saja membatasi kebebasannya sendiri demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Sang agen membatasi kebebasannya sendiri demi melindungi diri dari keputusan di masa depan yang akan merugikan dirinya. Seorang berencana untuk tidak berbelanja sejak turun dari mobil di parkirannya sebuah pusat perbelanjaan. Namun, selama dia masih mengantungi uang dan kartu kredit tidak ada yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan berbelanja.

Untuk itu diperlukan strategi prakomitmen untuk membatasi kebebasan agar terhindar dari keputusan di masa depan yang merugikan. Strategi prakomitmen memuat sebetulnya rasionalitas atas waktu (*rationality over time*). Pada saat T1, agen hendak memilih A pada T2. Namun, si agen mengantisipasi bahwa dirinya akan memilih B pada T2 kecuali dicegah. Si agen harus melindungi dirinya dari

passion, perubahan preferensi atau pendiskonan waktu (*time discounting*) supaya tetap memilih secara rasional dan menguntungkan.

Fakta bahwa agen bertindak berbeda dengan pertimbangan rasionalnya adalah fakta kelemahan kehendak (*weakness of the will*). Kelemahan kehendak menunjukkan bahwa ada rantai yang terputus antara deliberasi dan intensi. Sesuatu yang selama ini dianggap memiliki keniscayaan kausal. Pertimbangan rasional atau deliberasi menyebabkan intensi dan intensi pada gilirannya menyebabkan tindakan. Kelemahan kehendak menunjukkan bahwa ada kala sang agen sudah membentuk intensi yang kokoh dan tak bersyarat dan ketika saatnya tiba yang bersangkutan tidak melakukannya.

Filsuf Donald Davidson dan R.M Hare beranggapan bahwa persoalan kelemahan kehendak adalah semu belaka (Searle, 2001, p.221). Mereka tetap beranggapan bahwa tindakan adalah konsekuensi niscaya dari sebuah deliberasi atau pertimbangan rasional. Apabila tindakan yang sudah melewati proses rasional tidak dilakukan berarti ada yang tidak beres pada proses rasional tersebut. Baik Davidson maupun Hare menekankan bahwa ketidakberesan pada deliberasi bertolak dari absennya keputusan evaluatif. Davidson menyatakan bahwa keputusan yang ada sekadar keputusan nilai bersyarat. Hare menyatakan bahwa keputusan yang ada bukan sebuah evaluasi moral.

Davidson merumuskan pola tindakan sebagai berikut: "apabila anteseden tindakan terstruktur secara rasional sedemikian rupa maka tindakan akan mengikuti dengan keniscayaan kausal". Davidson mempromosikan dua prinsip tindakan:

(P1) Jika agen ingin melakukan x lebih daripada y dan dia percaya bahwa dia bebas memilih, maka dia akan secara intensional melakukan x apabila dia melakukan secara intensional apakah x atau y

(P2) jika agen memutuskan bahwa lebih baik melakukan x daripada y maka dia menginginkan x lebih dari y

Kedua prinsip di atas berseberangan dengan fakta kelemahan kehendak. Agen memutuskan bahwa lebih baik melakukan x daripada y, dia percaya bahwa dia bebas memilih, namun tetap saja melakukan y dan bukannya x.

Davidson berargumen bahwa kelemahan kehendak adalah akibat dari proses rasional yang tidak beres. Kasus kelemahan kehendak adalah kasus yang mana agen tidak membuat keputusan tak bersyarat (*unconditional judgment*). Keputusan tak bersyarat akan berakibat pada pilihan yang lebih baik yaitu x. Seorang mahasiswa yang tetap mencontek meski sudah berniat tidak melakukannya membuat keputusan tak bersyarat. Dia memutuskan bahwa mencontek tidak jadi soal, sebab apabila dia tidak lulus mata kuliah ini dia akan *drop out*.

Hare memiliki gagasan dasar yang kurang lebih sama dengan Davidson namun dengan sedikit variasi. Hare berargumen bahwa apabila kita menerima sebuah imperatif atau perintah, maka secara kausal keberterimaan tersebut akan bermuara pada tindakan. Baginya, menerima keputusan moral adalah menerima sebetuk imperatif. Hare mengatakan: "adalah tautologi menyatakan bahwa kita tidak dapat mematuhi perintah orang kedua yang ditujukan kepada kita dan pada saat yang sama tidak melakukannya, jika saatnya tepat dan secara fisik dan psikis dapat dilakukan". Bagi Hare, sang mahasiswa dalam ilustrasi di atas gagal membuat keputusan moral dalam proses deliberasi: "mencontek tidak boleh dilakukan apapun konsekuensinya!"

Hare dan Davidson menyalahkan kondisi psikologis agen sebagai biang keladi kelemahan kehendak. Ketidakberesan pada proses rasional atau deliberasi lah yang menyebabkan kelemahan kehendak. Keduanya memantulkan gagasan para filsuf pengusung kebebasan positif yang mendasarkan kebebasan pada kompetensi. Elster, sebaliknya, tidak mau bertaruh pada kompetensi agen. Ada saat sang agen sangat kompeten dalam melakukan proses rasional namun tetap saja bertindak lain. Kompetensi agen dalam deliberasi tetap saja gagal melindunginya dari *passion*.

Ketika kita bertindak di bawah pengaruh *passion*, kita dapat saja berbelok dari rencana tindakan yang dibuat pada masa yang relatif tenang. Elster memaknai *passion* secara luas sehingga mencakup emosi (marah, takut, cinta, malu) dan keadaan mental (mabuk, nafsu seksual, adiksi obat-obatan, rasa sakit). Musuh abadi *passion* adalah rasionalitas. Rasionalitas dipahami sebagai

motivasi yang bersifat imparsial dan tak berkepentingan. Di kalangan ekonom modern, *passion* adalah kebalikan dari kepentingan pribadi rasional (*rational self-interest*). Apabila seorang takut menghambur-hamburkan uang di pusat perbelanjaan, dia meninggalkan kartu kredit dan ATM-nya di rumah.

Elster membedakan empat cara bagaimana *passion* dapat menciptakan kesenjangan antara rencana dan tindakan (Elster, 2000, p.8-10). *Pertama*, *passion* dapat mendistorsi pikiran kita tentang konsekuensi sebuah tindakan. Seorang supir truk yang akan minum di Bar berpikir bahwa dia hanya akan minum bir dua gelas. Dia tahu bahwa minum bir lebih dari dua gelas akan membuatnya mabuk dan tidak dapat mengemudi. Namun, dia tak menolak saat ditawari gelas ketiga. *Passion* sang pengemudi membuatnya berpikir bahwa minum tiga gelas bir tidak akan membuatnya mabuk.

Kedua, *passion* dapat begitu kuat sehingga menghapus semua pertimbangan lainnya. Seorang tahu bahwa musuhnya akan hadir di pesta nanti. Dia berniat untuk tidak emosional saat bertemu dengan sang musuh. Namun, saat dirinya bertemu sang musuh, pertimbangan untuk tetap tenang terhapuskan oleh amarah yang membuatnya bertindak lain. Pertimbangan rasional untuk tidak emosional lenyap saat bertatap muka dengan sang musuh yang begitu dibenci.

Ketiga, seorang dapat saja tahu bahwa tindakannya berlawanan dengan keputusan yang dibuatnya pada saat tenang. Namun, *passion* dapat sedemikian kuat sehingga membuatnya tetap bertindak lain. Ketika ditawari gelas ketiga, sang pengemudi truk tetap menerima dan pada saat yang sama menyadari bahwa hal itu bertolak belakang dengan keputusan rasionalnya.

Keempat, seorang dalam pengaruh *passion* akan menimbang konsekuensi sebuah tindakan secara berbeda dengan saat dia tidak terpengaruh. Seorang pecandu narkoba memiliki pengetahuan akurat mengenai akibat yang mematikan dari narkoba dalam jangka panjang. Namun, sang pecandu berpikir bahwa kenikmatan jangka pendek lebih berharga ketimbang risiko kematian yang akan dihadapinya kelak. Berikut ilustrasi lain: seorang diberi dua tawaran: uang satu juta hari ini atau dua juta tiga hari kemudian. Dia yang berada di bawah pengaruh *passion* akan memilih satu juta yang diberikan hari

ini. *Passion* menciptakan penglihatan jangka pendek (*myopia*) yang sesungguhnya merugikan.

Agen pun harus melindungi diri dari apa yang disebut sebagai pendiskonan waktu (*time discounting*). Pendiskonan waktu adalah fakta bahwa agen memilih keuntungan kecil jangka pendek daripada keuntungan lebih besar namun jangka panjang. Agen mendiskon keuntungan masa depan demi nilai yang lebih kecil saat ini. Terdapat dua pandangan utama mengenai cara kerja pendiskonan waktu. Pandangan pertama datang dari ekonom neo-klasik. Mereka berpendapat bahwa pendiskonan waktu bersifat eksponensial. Keuntungan sejumlah t unit di masa depan didiskon oleh faktor r^t , yang mana $r(<1)$ adalah faktor diskon satu periode. Pandangan kedua datang dari R.H Strotz dan George Ainslie, yang kemudian diteruskan para ekonom behavioral. Strotz dan Ainslie berpendapat bahwa pendiskonan bersifat hiperbolik, yakni keuntungan t unit di masa depan didiskon demi nilai saat ini oleh faktor $1/(1+kt)$, yang mana $k>0$. Pendiskonan hiperbolik terjadi saat orang yang menerima sejumlah uang hari ini lantas membelanjakan separuhnya hari ini dan mengalokasikan sisanya sampai akhir bulan.

Pendiskonan waktu dan *passion* membuat kesenjangan antara deliberasi atau proses rasional dengan tindakan yang diambil. Untuk itu, sang agen perlu melindungi dirinya dari keduanya dengan mengkonstrainsi kebebasannya. Konstrainsi terhadap kebebasan disebut Elster sebagai strategi prakomitmen. Strategi prakomitmen adalah upaya agen untuk membuat pilihan yang merugikan menjadi (a) tidak mungkin (b) berbiaya tinggi (c) mengecil insentifnya atau (d) tertunda cukup lama antara pilihan dan hasil (Elster, 2000, p.31).

Seorang eksekutif muda sudah menyusun rencana untuk tidak berbelanja di pusat perbelanjaan. Namun, dia tidak mau bertaruh dengan deliberasi awalnya tersebut. Oleh sebab itu, dia membatalkan kepergiannya ke pusat perbelanjaan (menihilkan pilihan berbelanja). Dia dapat juga membawa anak-anaknya sehingga meninggikan biaya saat dirinya memilih berbelanja (melekatkan biaya tinggi pada pilihan). Dia memutuskan untuk tidak membawa kartu kredit atau

ATM sehingga memberi waktu tunda antara keputusan berbelanja dengan hasilnya (dia harus pergi ke bank untuk mengambil uang).

Strategi prakomitmen sering disalahartikan dengan hasrat tingkat dua (*second order desire*). Hasrat tingkat kedua adalah hasrat atas hasrat tingkat pertama. Apabila agen berhasrat merokok, maka hasrat untuk berhenti merokok adalah hasrat tingkat dua. Elster memandang bahwa konflik antar hasrat tidak niscaya melahirkan hasrat tingkat dua. Konflik antara hasrat untuk merokok dan hasrat untuk hidup sehat tidak lantas membuahkan hasrat tingkat dua: tidak merokok. Apabila kita mendapati diri kita terbelah oleh dua hasrat yang berbeda, maka kita semata memutuskan hasrat mana yang lebih penting.

Strategi prakomitmen justru bekerja ketika kita gagal membentuk hasrat tingkat dua. Apabila si pecandu rokok dapat menyusun hasrat tingkat dua untuk tidak merokok maka dia tidak memerlukan strategi prakomitmen. Saat dia tidak yakin bahwa dia tidak akan menyentuh rokok ketika hasrat merokok timbul, maka barulah dia membuat strategi prakomitmen. Sang perokok dapat meminta sang istri untuk membuang semua rokoknya ke tempat sampah.

Analisa mengenai strategi prakomitmen memang tidak membutuhkan gagasan mengenai hasrat tingkat dua. Namun, analisa itu membutuhkan asimetri antara hasrat yang berkontestasi. Diri rasional senantiasa berupaya mengikat diri irasional, bukan sebaliknya. Keputusan agen untuk berhenti merokok demi kesehatan mengikat hasratnya untuk terus merokok. Ketika seorang mencoba menerapkan kepentingan jangka panjangnya, dia menyadari halangan yang diakibatkan kepentingan jangka pendek. Hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Asimetri tersebut tidak berhubungan dengan hasrat tingkat dua. Kepentingan jangka pendek adalah objek dari kognisi bukan hasrat. Kepentingan jangka pendek adalah objek dari rasionalitas prakomitmen.

II. 3 Refleksivitas dan Normativitas

Hugo Grotius memulai sebuah persoalan pelik dalam tradisi filsafat moral. Dalam bukunya *On the Law of War and Peace* (1625), Grotius mengatakan: "pun ketika kita menyerah bahwa Tuhan tidak ada atau tidak mau tahu urusan

manusia, manusia memiliki kewajiban moral." Sejak itu filsuf senantiasa berdebat mengenai fondasi moralitas. Apakah moralitas itu sesuatu yang nyata dan objektif atau buatan manusia melalui konvensi.

Hobbes berpendapat bahwa tidak ada baik dan buruk dalam kondisi alamiah (*state of nature*). Moralitas adalah kesepakatan antara agen yang dijaga kokoh oleh kekuasaan absolut Leviathan. Agen tidak berkewajiban mematuhi hukum kerjasama sosial apabila penguasa tidak ada. Moralitas terus bekerja hanya jika kekuasaan terus berjaga-jaga. Persoalannya, tidak ada hubungan linier antara kontraktarianisme dan realisme moral. Argumen bahwa moralitas adalah konvensi tidak ada sangkut pautnya dengan kenyataan bahwa moralitas itu objektif. Patokan moral nyata adanya. Agen meyakini patokan tersebut dan meregulasi perilaku berdasarkan patokan tersebut.

Patokan moral bersifat normatif. Patokan moral tidak sekadar mendeskripsikan bagaimana kita bertindak melainkan membuat klaim atas diri kita. Dia memerintahkan, mewajibkan, membimbing dan merekomendasikan. Ketika seorang mengatakan bahwa tindakan A adalah baik maka sesungguhnya dia mengatakan pada diri sendiri dan orang lain untuk melakukannya. Patokan moral bukan sekadar fakta melainkan sebetulnya keharusan.

Refleksi terhadap normativitas diawali oleh Kant. Persoalan utama yang disambangi Kant dalam *Critique of Practical Reason* adalah bagaimana akal budi murni dapat mendeterminasi kehendak. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, seluruh moralitas adalah ilusi belaka. Tindakan yang didasarkan pada impuls, hasrat atau inklinasi, seperti apa pun lainnya yang berbasis empiris, terikat pada kausalitas fisik. Artinya, segala perbincangan mengenai "keharusan" (*ought*) menjadi tidak relevan. "Keharusan" muncul apabila agen memiliki pilihan antara tindakan berdasarkan inklinasi dengan tindakan yang diperintahkan akal budi sesuai dengan hukum moral. Hukum moral sendiri adalah hukum kebebasan yang bertolak belakang dengan hukum alam yang deterministik.

Agen bertindak berdasarkan prinsip tindakan tertentu. Prinsip tindakan dapat bersifat subjektif atau objektif. Prinsip tindakan disebut subjektif apabila hanya dapat diterapkan untuk agen itu sendiri. Misalnya, kapan pun agen

mendapat peluang untuk meningkatkan kekayaan tanpa risiko, dia akan melakukannya. Sebaliknya, prinsip tindakan disebut objektif apabila berlaku untuk semua orang, atau lebih khusus lagi: agen rasional. Prinsip tindakan subjektif disebut maksim sementara prinsip tindakan objektif disebut hukum.

Agen rasional yang sempurna, menurut Kant, menentukan kehendaknya berdasarkan hukum objektif. Dia bertindak berdasarkan prinsip moral yang rasional. Binatang dan segala sesuatu selain manusia bertindak berdasarkan hukum alam bukan prinsip moral rasional. Manusia sungguh menempati posisi istimewa. Dia dapat bertindak berdasarkan prinsip moral rasional, hukum moral atau prinsip tindakan objektif namun sekaligus dapat pula bertindak sebaliknya. Hukum moral tidak dapat memastikan tindak tanduk manusia. Sehingga, hanya terhadap manusia-lah kata "harus" atau "wajib" itu berlaku. Hanya manusia yang dapat terkena imperatif.

Imperatif, bagi Kant, memiliki dua bentuk: hipotetis dan kategoris. Jika sebuah tindakan yang diperintahkan adalah instrumen yang perlu untuk mencapai sesuatu yang lain, maka imperatif bersifat hipotetis. Jika sebuah tindakan yang diperintahkan adalah baik pada dirinya, maka imperatif bersifat kategoris. Karakter pokok imperatif kategoris adalah ketakterelakkan. Agen tidak bisa mengelak imperatif kategoris karena tidak ada tujuan di luar tindakan itu sendiri yang dipertaruhkan. Sementara, seorang dapat mengelak dari imperatif hipotetis dengan menghapuskan tujuan yang ingin dicapai.

Imperatif kategoris dan hukum moral yang dimanifestasikannya hanya merujuk pada kehendak itu sendiri. Dia tidak merujuk pada sesuatu yang dicapai melalui kausalitas kehendak. Moralitas tidak dapat dirumuskan sebagai seperangkat aturan yang menentukan sarana yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan terberi: kebahagiaan, kesempurnaan manusia, atau realisasi diri. Moralitas adalah seperangkat aturan yang harus ditaati tanpa menimbang konsekuensi.

Prinsip tindakan yang mengandaikan objek yang dihasrati sebagai penentu kehendak tidak dapat memunculkan hukum moral. Prinsip tersebut tetap berdiam pada tingkatan empiris. Padahal moralitas sebuah tindakan tidak dapat

ditentukan oleh materi atau muatan kehendak. Apabila kehendak ditentukan secara material atau empiris, maka pertanyaan tentang moral tidak akan muncul. Abstraksi dari semua muatan material kehendak (semua pikiran tentang tujuan) menyisakan semata properti formal dari universalitas aturan atau hukum yang mengatur kehendak. Dengan kata lain, moralitas sebuah maksim ditentukan oleh kecocokannya untuk berfungsi sebagai hukum universal. Hukum universal tidak berlaku bagi seorang agen di satu waktu dan tempat saja, melainkan berlaku bagi semua agen pada situasi yang sama. Ketika seorang melihat perempuan terpeleset ke sungai, maka hukum moral yang mewajibkan dia untuk menolong juga berlaku bagi siapa saja dalam situasi yang sama.

Korsgaard memperkaya teori normativitas Kant dengan mengajukan apa yang disebut "konsep moral". Sehari-hari kita mengadopsi dan menerapkan konsep moral seperti kebaikan, kewajiban, keutamaan dan keadilan. Konsep moral mengandung tiga pertanyaan penting: pertama adalah apa arti dan muatan dari konsep moral; kedua adalah kepada apa konsep moral diterapkan; ketiga adalah asal muasal konsep moral.

Ketika kita memakai konsep moral tertentu, kita dipengaruhi secara praktis dan psikologis. Berikut adalah beberapa contoh. Pertama, ketika seorang berpikir bahwa sebuah tindakan adalah baik maka dia berpikir bahwa dia harus melakukannya. Pertimbangan tersebut menghasilkan motif untuk melakukannya. Motif yang ada dapat sedemikian kuat. Misalnya, seorang Ibu miskin berpikir bahwa anak adalah segala-galanya. Untuk itu, dia rela berpuasa agar jatah makannya dapat diberikan pada sang anak. Kedua, apabila seorang berpikir bahwa sebuah karakter adalah buruk, maka dia tidak akan menyukai orang yang memiliki karakter tersebut. Konsep moral dalam menghasilkan sentimen positif maupun negatif terhadap orang lain. Ketiga, Konsep moral membuat orang percaya bahwa mereka yang melakukan sesuatu yang baik akan mendapatkan imbalan yang baik, demikian pula sebaliknya.

Dampak psikologis dan praktis konsep moral adalah kriteria kecukupan eksplanatoris. Itu menerangkan mengapa dan bagaimana konsep moral dapat sedemikian mempengaruhi tindak-tanduk seseorang. Persoalannya, moralitas

tidak cukup hanya diterangkan namun juga mesti terjustifikasi. Kita tidak cukup hanya mengetahui mengapa seorang agen berpikir bahwa dia harus melakukan tindakan tertentu. Kita juga perlu mengetahui apakah dia sungguh-sungguh harus melakukannya. Dengan kata lain, apakah perbuatan sang agen sungguh-sungguh terjustifikasi atau tidak. Teori konsep moral harus dapat menyediakan kriteria kecukupan justifikasi (*justificatory adequacy*).

Tidak mudah membedakan antara kriteria kecukupan eksplanatoris dan justifikasi. Keduanya saling berhubungan erat. Teori konsep moral yang tidak mampu menjelaskan dampak psikologis dan praktis sebuah konsep moral tidak akan mampu menjustifikasi dampak tersebut. Perbedaan pokok antara kedua kriteria tersebut terletak pada perspektif. Teori yang dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kebaikan dari sudut pandang orang ketiga dapat gagal menjustifikasinya dari perspektif agen sebagai orang pertama.

Berikut adalah ilustrasi untuk menggambarkan perbedaan di atas. Seorang merumuskan teori moral yang mendasarkan moralitas pada persoalan genetis. Dia menyebutnya teori evolusi moral (*evolutionary theory of morality*). Menurut teori tersebut tindakan moral adalah tindakan yang mempromosikan keberlangsungan spesies. Teori tersebut membuktikan secara empiris bahwa manusia memiliki insting yang dalam dan kuat untuk melestarikan spesiesnya. Berdasarkan teori tersebut, aborsi dianggap amoral karena bertolak belakang dengan prinsip keberlangsungan spesies. Ibu yang tidak membesarkan anaknya dengan baik juga dilekati label amoral.

Kita meyakini teori tersebut. Namun, pada satu ketika moralitas menuntut kita agar mengorbankan anak sendiri demi keselamatan sendiri. Atau kita dituntut melakukan serangan bunuh diri demi kemenangan pasukan. Apakah cukup kita berpikir bahwa tindakan-tindakan di atas mempromosikan keberlangsungan spesies. Kita dapat berpikir lain: "Mengapa keberlangsungan spesies menjadi lebih berarti daripada kebahagiaan individu?" Mungkin apa yang selama ini kita anggap baik ternyata keliru dan tidak layak. Pada kasus tersebut, teori evolusi moral tetap dapat menjelaskan mengapa kita bertindak demikian. Namun, teori tersebut tidak dapat menjustifikasinya berdasarkan sudut

pandang orang pertama. Kita selaku orang pertama dapat saja mengajukan berbagai keberatan terhadap kesahihan tindakan kita sendiri. Sesuatu yang tidak terbuka bagi teoretikus evolusi moral selaku orang ketiga.

Teori evolusi moral di atas sekadar menjawab pertanyaan mengapa manusia bertindak sedemikian. Itu tidak menjawab pertanyaan normatif yaitu pertanyaan orang pertama yang muncul dari agen moral yang harus melakukan apa yang diperintahkan moralitas. Seorang teoretikus normativitas mesti menempatkan diri pada agen yang mana moralitas menyodorkan klaim atas dirinya. Jawaban terhadap pertanyaan orang pertama harus memenuhi tiga syarat utama: Pertama, jawaban tersebut tidak boleh sekadar menerangkan apa yang kita katakan, dalam sudut pandang orang ketiga, tentang agen yang menantang atau mengabaikan klaim moral tertentu. Setiap teori moral mendefinisikan konsep-konsepnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kita membuat asesmen negatif tentang moralitas orang lain. Namun, agen selaku orang pertama dapat saja meragukan apakah dia mesti mematuhi moralitas yang ada. Dia memiliki logika justifikasinya sendiri di luar teori moral yang ada.

Kedua, kita adalah agen yang bertanya sekaligus menjawab pertanyaan normatif, maka teori normatif harus memenuhi syarat transparansi. Teori normatif harus memungkinkan kita untuk bertindak dengan pengetahuan yang jernih mengenai apa moralitas itu dan mengapa kita dapat dipengaruhinya. Pada saat yang sama, kita percaya bahwa tindakan kita adalah sah dan masuk akal. Kita terbuka pada kemungkinan bahwa kita dipengaruhi oleh motif yang tidak kita dukung. Dalam dilema narapidana, misalnya. Seorang yang memegang teguh komitmen dapat berkhianat demi keselamatan dirinya. Padahal, motif tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang dia dukung. Situasi dilema narapidana (asimetri informasi) memaksanya berbuat demikian. Ketiga, jawaban atas pertanyaan normatif harus berakar pada identitas agen selaku subjek moral. Jawaban pertanyaan normatif harus menunjukkan bahwa melakukan perbuatan buruk terkadang sama atau lebih buruk dari kematian. Bagi sebagian manusia satu-satunya yang sama atau lebih buruk dari kematian adalah tidak menjadi diri sendiri lagi. Sebagian manusia berpikir lebih baik mati daripada hidup dengan

alat bantu secara vegetatif belaka. Hidup vegetatif sama saja kehilangan jati diri selaku manusia yang berakal budi. Jika klaim moral layak untuk diperjuangkan dengan nyawa maka pelanggaran terhadap klaim tersebut lebih buruk daripada kematian. Artinya, klaim moral harus berakar dalam-dalam pada identitas atau siapa diri kita.

Normativitas tetap menjadi persoalan tersendiri di kalangan filsuf moral. Filsuf moral modern berdebat tentang sumber atau asal muasal normativitas. Ada empat aliran besar yang menjawab pertanyaan mengenai apa yang membuat moralitas normatif (Korsgaard, 1996, p.18-20).

1. Voluntarisme. Aliran ini berpendapat bahwa kewajiban datang dari perintah seorang yang memiliki otoritas sah atas agen moral sehingga dapat membuat hukum baginya.
2. Realisme. Aliran ini berpendapat bahwa klaim moral adalah normatif apabila klaim tersebut benar. Kebenaran sebuah klaim diukur berdasarkan adanya entitas normatif intrinsik atau fakta yang dideskripsikan secara akurat. Realisme berupaya membangun normativitas moral lewat argumen bahwa nilai atau kewajiban sungguh-sungguh ada.
3. Otonomi. Aliran ini berpendapat bahwa sumber normativitas sebuah klaim moral harus ditemukan pada kehendak agen sendiri. Kapasitas agen untuk berefleksi tentang tindakannya menghasilkan sejenis otoritas terhadap dirinya. Otoritas tersebut lah yang memberikan normativitas pada klaim moral.
4. Dukungan Reflektif (*Reflective Endorsement*). Aliran ini berpendapat bahwa moralitas bersumber pada kodrat manusia. Ketika keterangan mengenai kodrat moral manusia terjawab, kita dapat mengajukan pertanyaan normatif: apakah kita memiliki alasan untuk menerima kodrat moral kita atau haruskah kita menolaknya. Pertanyaannya bukan apakah klaim moral adalah benar. Alasan rasional yang dicari adalah rasionalitas tindakan (*practical reason*) guna menunjukkan bahwa moralitas baik untuk kita.

Selaku filsuf moral kontemporer, Korsgaard berpendapat bahwa sumber normativitas terletak pada struktur reflektivitas pada diri manusia. Menurut Korsgaard, sebagai seorang agen yang reflektif seorang memiliki kapasitas untuk secara reflektif menyadari prinsip yang mendasari tindakannya. Muara reflektivitas adalah identitas sang agen itu. Korsgaard menyebutnya identitas praktis. Melalui konsep tersebut Korsgaard ingin menekankan bahwa prinsip yang mendasari tindakan bukan sederet proposisi abstrak melainkan ekspresi dari identitas agen. Korsgaard mengemukakan dua makna yang melekat pada identitas praktis. Pertama, identitas praktis dapat dimengerti sebagai kondisi partikular identitas seseorang. Kedua, identitas praktis adalah sebuah karakter umum yang melekat pada kemanusiaan seseorang. Kewenangan rasionalitas dalam mendikte tindakan, menurut Korsgaard, bergeser dari pendasaran pada identitas praktis sebagai fakta psikologis partikular ke identitas praktis sebagai karakter umum kepelakuan yang mengandung komitmen publik terhadap tindakan.

Korsgaard menegaskan bahwa apabila reflektivitas merupakan sumber rasionalitas maka identitas praktis adalah sumber kewajiban. Keduanya berkaitan satu sama lain. Alasan rasional bukan semata-mata aturan yang abstrak. Orang tidak menolong orang berdasarkan prinsip emas "lakukan kepada orang lain seperti kau ingin diperlakukan". Alasan rasional adalah ekspresi bermakna nilai dan karakter seseorang. Identitas praktis adalah "sebuah deskripsi ketika seorang menilai dirinya, sebuah deskripsi ketika seorang menemukan bahwa hidupnya layak dijalani dan tindak-tanduknya layak dilakukan.

II.4 Ikhtisar

Dilema narapidana menyembunyikan sebetulnya persoalan moral yang cukup pelik. Situasi dilematis membuat agen tak dapat membangun komitmen etis apa pun dengan lawannya. Kepercayaan yang saling menguntungkan tak dapat dibangun. Prinsip maksimalisasi keuntungan memerintahkan sang agen

untuk bersaksi atas temannya, apa pun pilihan sang teman. Refleksi filsafat moral diperlukan untuk memecahkan persoalan tersebut.

Gauthier menyoroiti persoalan moralitas dari sudut pandang kontraktarianisme. Selaku kontraktarian, Gauthier bersepakat dengan Hobbes bahwa moralitas bukan prinsip yang ditemukan secara metafisik melainkan hasil atau produk sebuah kesepakatan atau kontrak. Berbeda dengan Hobbes, Gauthier tidak mengandaikan otoritas absolut (*leviathan*) untuk menjaga kerjasama tersebut. Gauthier lebih menyoroiti disposisi agen selaku pemaksimal utilitas (*utility maximizer*). Gauthier memandang bahwa agen yang bersaksi terhadap temannya mengambil posisi selaku pemaksimal serta-merta (*straightforward maximizer*). Di sisi lain, seorang pemaksimal terkonstrain (*constrained maximizer*) memiliki disposisi untuk bekerjasama. Pemaksimal terkonstrain meletakkan kepentingan pribadinya dalam jeruji moralitas demi keuntungan bersama.

Moralitas dapat diganggu oleh inkompetensi agen dalam menjatuhkan pilihan. Refleksi filsafat terhadap kebebasan menunjukkan betapa kebebasan sangat berkaitan dengan kompetensi agen dalam membuat pilihan. Sementara, agen sangat rentan untuk dipengaruhi *passion* sehingga menjatuhkan pilihan yang berbeda dengan deliberasi rasionalnya. Moralitas tidak dapat diserahkan pada kehendak baik agen belaka. Sebab itu, Elster menekankan bahwa moralitas memerlukan konstrain. Elster mengajukan strategi prakomitmen untuk mengkonstrain agen selaku subjek moral. Strategi prakomitmen adalah upaya agen untuk membuat pilihan yang merugikan menjadi (a) tidak mungkin (b) berbiaya tinggi (c) mengecil insentifnya atau (d) tertunda cukup lama antara pilihan dan hasil.

Moralitas menuntut reflektivitas. Agen dalam situasi dilema narapidana tidak menyadari bahwa situasi dilema narapidana memaksa dirinya untuk berhianat. Dia mendukung prinsip yang sesungguhnya dibangun oleh situasi dilema narapidana. Komitmen etis yang dia pegang teguh selama ini menjadi tidak berarti apa-apa. Dengan kata lain, prinsip yang mendasari tindakan agen dalam dilema narapidana adalah prinsip yang tidak direfleksikan.

Rasionalitas menurut Korsgaard pada dasarnya adalah struktur refleksi dalam diri manusia. Refleksivitas tersebut memeriksa prinsip tindakan yang kemudian berjangkar pada identitas praktis. Identitas praktis membuat sebuah prinsip bukan semata-mata rumusan formal melainkan ekspresi bermakna nilai dan karakter seseorang. Melalui refleksi selaku sumber normativitas, agen mampu memikirkan ulang prinsip tindakan yang tadinya diterima begitu saja.

Dilema narapidana mematok prinsip maksimalisasi keuntungan sebagai harga mati yang berkait erat dengan sosok manusia sebagai *homo economicus*. Ini tentu saja berakibat fatal pada terbangunnya komitmen etis berupa kepercayaan. Prinsip maksimalisasi keuntungan mesti diletakkan dalam terang refleksi seorang agen selaku identitas praktis dengan segenap komitmen dan karakter nilainya.

Ketiga filsuf (Gauthier, Elster, Korsgaard), meski berbeda latar belakang filosofis, sepakat bahwa persoalan moralitas dalam dilema narapidana adalah persoalan rasionalitas. Rasionalitas yang keliru membuat tidak ada komitmen etis apa pun yang dapat dibangun antar agen. Gauthier menyoroti kekeliruan rasionalitas dalam dilema narapidana yang mengambil disposisi pemaksimal serta merta. Rasionalitas pemaksimal serta merta tidak memperhitungkan disposisi sesungguhnya orang lain (*translucency*) dan menimbang apa dampak tindakan agen terhadap orang lain. Elster menyoroti kelemahan rasionalitas dalam menjamin keputusan moral agen. Rasionalitas tidak serta merta melahirkan tindakan moral. Sebab itu, rasionalitas harus mampu menghasilkan strategi prakomitmen yang mengkonstrain pilihan nonmoral sang agen. Korsgaard menekankan bahwa persoalan moralitas muncul karena rasionalitas tidak bekerja secara refleksif. Dia menyudutkan rasionalitas yang sekadar bekerja menerjemahkan prinsip tindakan yang terberi (prinsip maksimalisasi utilitas). Rasionalitas tidak menimbang ulang prinsip tindakan yang sejatinya adalah bentukan situasi strategis tertentu (dilema narapidana). Prinsip tanpa disertai refleksi rasional dapat membatalkan setiap komitmen etis yang dibangun.

BAB III

JEBAKAN SOSIAL, DILEMA NARAPIDANA DAN RASIONALITAS INSTRUMENTAL

Persoalan konflik bukan semata-mata persoalan bagaimana mereka yang tadinya netral masuk dalam situasi konflik. Persoalan konflik, bagi penulis, adalah persoalan mengapa mereka yang terlibat konflik sulit melepaskan diri darinya. Jawaban awam terhadap itu cukup jelas. Mereka yang sudah terlibat konflik sulit untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Pertanyaan yang tersisa adalah mengapa para partisipan konflik sulit membangun kepercayaan.

Bab ini membahas mengenai konflik sebagai bentuk jebakan sosial. Jebakan sosial menjelaskan secara sosiologis betapa partisipan konflik senantiasa menganggap pilihan untuk mempercayai dan bekerjasama sungguh berbahaya. Mengapa demikian? Jebakan sosial sesungguhnya adalah model teori keputusan yang disebut sebagai teori permainan (*Game Theory*). Teori permainan menganut asumsi fundamental bahwa dalam situasi strategis pihak-pihak yang bersitegang akan berpikir berdasarkan kepentingan pribadi dan mengkhianati orang lain. Ilustrasi dilema narapidana akan sangat jelas menggambarkan asumsi tersebut.

Persoalan lainnya adalah teori permainan mematok satu asumsi antropologis bahwasannya manusia bertindak berdasarkan rasionalitas instrumental belaka. Asumsi antropologis ini membuat partisipan konflik menutup diri dari dua hal: pertama adalah tujuan, preferensi, atau keinginannya; kedua adalah identitas orang lain sebagai sebuah konstruksi sosial.

Sistematika bab ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembahasan mengenai jebakan sosial. Kedua adalah pembahasan mengenai Teori Permainan khususnya varian Dilema Narapidana. Terakhir, bab ini akan melacak genealogi konseptual rasionalitas instrumental selaku asumsi rasionalitas yang terdapat dalam Dilema Narapidana.

III.1 Jebakan Sosial

Kesulitan yang dialami kelompok-kelompok berkonflik untuk keluar dari jejaring kekerasan dirumuskan dalam sebuah konsep yang disebut "jebakan sosial" (Rothstein, 2005, p.12). Jebakan sosial bisa diilustrasikan sebagai berikut. Di suatu daerah terdapat dua kelompok yang sudah sekian lama berkonflik. Kelompok pertama satu ketika menimbang pilihan untuk bekerjasama dan berdamai dengan kelompok kedua. Namun, kelompok pertama tidak bisa menghilangkan rekam jejak kelompok kedua yang selalu saja melanggar perjanjian damai. Kelompok pertama tidak bisa menghapus ingatan kolektif tentang penghianatan yang kerap dilakukan kelompok kedua. Persepsi tersebut demikian mengeras sehingga membuat pilihan bekerjasama dan berdamai menjadi sangat mahal dan membahayakan. Akhirnya keputusan pun kembali jatuh pada pilihan untuk tidak bekerjasama sehingga situasi konflik pun bertahan. Akibatnya, kedua kelompok kehilangan peluang untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kerjasama.

"Jebakan Sosial" adalah konsep yang dikemukakan pertama kalinya oleh seorang psikolog bernama John Platt. Jebakan sosial adalah konsep yang memayungi sejumlah situasi strategis ketika aktor sosial bertindak berdasarkan asesmen terhadap tindakan yang akan diambil orang lain. Sederhananya, apabila kelompok pertama tahu bahwa kelompok kedua akan mengingkari janji maka kelompok pertama tidak akan mengikat kontrak dengan kelompok kedua. Dengan kata lain, hasil akhir dari sebuah keputusan adalah kombinasi dari keputusan kelompok-kelompok yang terlibat dalam situasi strategis. Konflik yang berkepanjangan terjadi karena asesmen kelompok pertama terhadap kelompok kedua selalu negatif. Setiap pertimbangan untuk kerjasama selalu dibayangi oleh ancaman penghianatan sehingga pilihan nonkerjasama menjadi lebih menguntungkan. Logika jebakan sosial sendiri bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. semua orang diuntungkan apabila semua orang memilih untuk bekerjasama
- b. tetapi jika orang tidak bisa mempercayai bahwa hampir semua orang akan bekerjasama maka pilihan untuk bekerjasama menjadi tak bermakna (jika saya tidak bisa percaya bahwa jika kelompok lawan berkuasa maka tidak akan menganiaya saya selaku minoritas (atau sebaliknya) maka pilihan untuk bekerjasama menjadi tidak mungkin, alih-alih saya akan berusaha menggagalkan dengan pelbagai cara atau satu kelompok tidak akan memegang perjanjian damai jika tidak bisa percaya bahwa kelompok lain tidak akan melanggarnya (*pre-emptive strike*))
- c. maka, nonkerjasama mungkin saja rasional ketika orang tidak mempercayai bahwa yang lain akan juga bekerjasama (dilema naraidana)
- d. kesimpulan, kerjasama yang efisien untuk tujuan bersama (perdamaian) hanya bisa tercapai apabila orang mempercayai bahwa sebagian besar orang juga akan memilih untuk bekerjasama
- e. kurangnya kepercayaan itu akan mengakibatkan terjerembabnya masyarakat pada apa yang disebut: jebakan sosial yaitu kita semua berakhir pada kondisi yang buruk bagi semua orang meski kita tahu bahwa kita bisa lebih baik apabila memilih untuk bekerjasama.

Pendekatan jebakan sosial menekankan kesulitan kelompok-kelompok yang terlibat konflik untuk membangun kepercayaan dan bekerjasama. Pilihan kerjasama menjadi tidak menarik karena kesulitan satu kelompok untuk mempercayai bahwa kelompok lain juga akan memilih sama. Kepercayaan pada yang lain ditentukan secara historis dan politis oleh ingatan kolektif. Satu kelompok sulit untuk menanggalkan begitu saja ingatan kolektif atas pengkhianatan, kekerasan dan penipuan yang dilakukan kelompok lain di masa lalu. Satu kelompok tidak bisa begitu saja mengajak kelompok lain melupakan masa lalu dan membangun kepercayaan dari nol. Kepercayaan senantiasa bersejarah.

Kondisi ini diperparah oleh kelakuan para entrepreneur politik yang mengkonstruksi ingatan kolektif tentang pengkhianatan, penipuan dan kekerasan kelompok tertentu. Ini biasanya dilakukan demi memperoleh dan melanggengkan

kekuasaan. Sejarah mencatat sepak terjang para entrepreneur politik. Hitler misalnya menaiki tangga kekuasaan lewat mobilisasi ingatan kolektif tentang bagaimana kaum Yahudi menggerogoti perekonomian Jerman. Soeharto pun setali tiga uang. Kekuasaan yang dibangunnya didirikan di atas ingatan kolektif tentang penghianatan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965.

Menurut Rothstein kata "jebakan" dalam konsep "jebakan sosial" mengandung dua arti. Pertama, aktor-aktor dalam situasi strategis yang dihadapkan pada pilihan kerjasama atau nonkerjasama berakhir pada situasi ketakberuntungan yang tidak diniatkan. Ini terjadi tatkala upaya kerjasama oleh satu kelompok disalahpahami sebagai sebaliknya oleh kelompok lain. Aktor politik kelompok tertentu yang mengendalikan arus informasi berfokus pada informasi negatif tentang kelompok demi kepentingan pribadinya. Kekuasaan dipertahankan lewat pengendalian informasi. Aktor politik terus membunyikan tanda bahaya untuk mempertahankan kepatuhan anggota kelompoknya. Kendali dan manipulasi strategis atas informasi mengenai yang lain adalah karakter pokok dari sebagian besar konflik etnis yang mengguncang dunia di penghujung abad ke-20.

Kedua, kata "jebakan" merujuk pada kenyataan pahit yakni sulitnya kelompok-kelompok yang sudah terlibat di dalam situasi semacam itu untuk melepaskan diri. Untuk meretas jebakan sosial dituntut kemauan dua kelompok yang sudah tidak saling mempercayai sekian lama untuk tiba-tiba melupakan masa lalu. Kepercayaan adalah variabel psikologis yang sangat unik. Sekali ia dipatahkan maka kemungkinan rehabilitasinya sangat sulit. Betapa pun rasional upaya untuk menghapus ingatan kolektif, keputusan untuk melupakan hal seperti ketidakadilan atau penghianatan sangat kecil kemungkinannya.

III.2 Dilema Narapidana

Jebakan sosial dapat dianalisa melalui salah satu model teori keputusan yang disebut teori permainan (*Game Theory*). Sebagai bagian dari teori keputusan, teori permainan dibedakan dengan dua teori keputusan lainnya, teori

utilitas dan etika. Teori utilitas adalah teori pengambilan keputusan dalam kondisi kepastian, berisiko, dan ketidakpastian. Pengambilan keputusan senantiasa dikebawahkan oleh prinsip maksimalisasi utilitas (*utility maximization*) atau maksimalisasi utilitas terharapkan (*expected utility maximization*). Etika adalah teori pengambilan keputusan berdasarkan kriteria impersonal dan imparsial. Ekonom Harsanyi menyebutnya sebagai keputusan nilai rasional yang berfungsi memaksimalkan rata-rata tingkat utilitas semua individu dalam masyarakat (Moser, 1990, p. 278).

Teori permainan adalah teori pengambilan keputusan oleh interaksi dua individu atau lebih yang masing-masing mempromosikan kepentingan pribadinya sebagaimana didikte oleh fungsi utilitasnya (maksimalisasi utilitas). Teori permainan berbeda dengan teori utilitas karena melibatkan variabel keputusan yang diambil pihak kedua. Dengan kata lain kompleksitas persoalan yang dihadapi teori permainan lebih rumit. Adapun dengan etika, teori permainan menarik garis yang sangat tebal. Apabila teori permainan adalah teori mengenai konflik antara kepentingan individu, etika, sebaliknya, selalu berbicara mengenai kepentingan umum (kesejahteraan bersama) masyarakat secara keseluruhan.

"Permainan" adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan situasi konflik yang mana satu pihak mesti memutuskan pilihan dengan mengetahui bahwa pihak lain juga memutuskan dan hasil dari konflik akan ditentukan oleh pilihan dua belah pihak. "permainan" bukan situasi sederhana seperti saat kita mau memberitahu tuan rumah bahwa kita sudah menunggu di depan pintu. Dalam situasi tersebut kita tinggal memencet bel untuk memenuhi tujuan. Namun, coba bayangkan situasi berikut ini. Dua perusahaan A dan B berniat membeli komputer. Perusahaan A berniat membeli 30 komputer sementara B, 24 komputer. *Salesman P* mewakili perusahaan yang saat ini masih merupakan agen penyuplai kedua perusahaan tersebut; *salesman Q* mewakili perusahaan pesaingnya. Setiap *salesman* memperoleh waktu untuk mempromosikan produknya di kedua perusahaan A dan B. Jika kedua *salesman* mengunjungi perusahaan yang sama maka mereka membagi penjualan secara sama dan P berhak atas permintaan total perusahaan kedua. Perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 3

Dua Salesman

		Q	
		A	B
P	A	39 (15 + 24)	30
	B	24	42 (12+30)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari konflik antara salesman P dan Q ditentukan bukan oleh pilihan P atau Q semata melainkan kombinasi keduanya. Jika Q dan P sama-sama mengunjungi perusahaan A kita menemukan angka 39 di persilangan antara kolom A dengan baris A. Dari mana angka tersebut? P, sesuai kesepakatan, memperoleh setengah penjualan di perusahaan A ditambah dengan seluruh penjualan di perusahaan B ($15 + 24 = 39$). Lalu Q memperoleh berapa? Q memperoleh selisih antara total penjualan A dan B dikurangi penjualan yang diperoleh P ($54 - 39 = 15$).

Kita menyaksikan bagaimana P dan Q tidak pernah mendapat hasil yang sama. Apa yang berhasil dimenangkan oleh P berarti kerugian di pihak Q. Ketika P memenangkan penjualan sejumlah 39 unit komputer, Q kehilangan 24 unit komputer yang seharusnya bisa diperoleh lewat penjualan di perusahaan B. Ini adalah prinsip pertama dalam teori permainan yang disebut sebagai prinsip *zero sum game*.

Sebagian besar permainan rekreasi berjenis *zero sum*. Permainan poker misalnya. Pemenang berhak mengambil semua uang yang dipertaruhkan. Sementara, mereka yang kalah kehilangan sejumlah uang yang dipertaruhkan. Meskipun tidak ada uang yang dipertaruhkan, fakta bahwa si A menang bisa dilihat sebagai utilitas. Kemenangan bisa diterjemahkan sebagai utilitas +1 sementara kekalahan, utilitas -1. Jumlah utilitas keduanya adalah $(+1 + -1)$ yakni 0. Oleh karena prinsip itu disebut sebagai *zero sum game*.

Satu hal yang penting di sini adalah utilitas tidak selalu sebangun dengan preferensi aktual pemain. Misalnya, seorang dewasa bermain dengan anaknya dan berniat mengalah. Utilitas si orang dewasa akan terbalik: kekalahan memiliki utilitas +1 sementara kekalahan -1. Karenanya, utilitas tidak selalu sebangun dengan uang, kemenangan, kekalahan, atau objek eksternal yang kentara. Seorang muslim yang berpuasa kehilangan sebagian berat badannya tetapi merasa menang secara rohani.

Pertanyaannya, adakah solusi terhadap situasi *zero sum* ketika kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Tidak ada kemungkinan kerjasama. Situasi seperti itu menurut Von Neumann hanya dapat diatasi dengan sebuah prinsip yang disebut *minimax principle*. Perhatikan ilustrasi berikut ini: "Dua anak dihadapkan pada satu loyang kue yang harus dibagi berdua. Salah satu menjadi pemotong sementara yang lain menjadi pengambil." Dua orang anak tersebut memainkan permainan *zero sum*. Apabila si pemotong memotong secara tidak seimbang, pasti pengambil mengambil bagian yang lebih besar. Bagian yang besar adalah utilitas +1 sementara bagian yang hilang dari si pemotong adalah utilitas -1.

Apabila kita cermati pembagian kue tersebut, baik pemotong maupun pengambil masing-masing memiliki dua strategi. Strategi pemotong ada dua opsi: memotong kue secara seimbang atau memotong kue secara tak seimbang. Strategi pengambil pun ada dua opsi: mengambil bagian yang lebih besar atau mengambil yang lebih kecil. Kombinasi strategi-strategi keduanya akan menghasilkan empat hasil. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 4
Pembagian Kue

Strategi Pemotong	Strategi Pengambil		
		Memilih bagian besar	Memilih bagian kecil
	Memotong kue seimbang	Separuh kue minus remah	Separuh kue plus remah
Memotong kue tidak seimbang	Bagian kecil	Bagian besar	

Dari tabel di atas kita tahu bahwa kombinasi terbaik dari kedua pihak adalah si pemotong memotong seimbang dan si pengambil bagian yang lebih besar. Hasilnya pun jelas, si pemotong mendapat separuh kue minus remah sementara si pengambil mendapat separuh kue plus remah.

Pertanyaannya, bagaimana hasil itu tercapai? Mengapa masing-masing pihak dapat sampai pada kombinasi strategi tersebut? Jawabannya sederhana. Si pemotong tahu bahwa si pengambil akan mengambil bagian yang lebih besar. Artinya, apabila pemotong memotong tidak seimbang maka ia akan mendapat bagian yang lebih kecil. Si pemotong mengantisipasi bahwa dirinya akan ditinggalkan bagian sesedikit mungkin oleh pengambil (*minimax*). Dengan kata lain pengambil bertindak untuk meminimalisir bagian si pemotong. Karenanya, si pemotong bertindak guna memaksimalkan minimum yang ditinggalkan oleh pengambil (*maximin*).

Strategi pemotong (*maximin*) dan strategi pengambil (*minimax*) menjadi sebangun pada hasil "separuh kue minus remah". Hasil yang dilahirkan dari sebangunnya *maximin* dan *minimax* disebut sebagai *saddle point*. Disebut *saddle point* karena kedua pemain tidak bisa memaksakan diri untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia peroleh. Mengapa dapat terjadi hasil semacam itu? Mengapa pemain tidak bisa mengambil strategi lain untuk memperoleh hasil lebih baik. Jawabannya adalah ketamakan dan

ketidakpercayaan. Kedua pemain ingin mendapat bagian besar dan saling tidak percaya kalau pihak lain akan mengambil bagian yang lebih kecil. Separuh kue minus remah adalah hasil maksimal yang bisa didapat pemotong tanpa bantuan dari pengambil. Demikian pula sebaliknya, separuh kue minus remah adalah hasil minimal yang bisa ditinggalkan pengambil bagi pemotong dengan usahanya sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, masing-masing membutuhkan uluran tangan dari lawannya. Ini adalah mustahil mengingat keduanya disifati dengan ketamakan dan ketidakpercayaan.

Teori permainan klasik mengandaikan permainan dengan informasi lengkap. Informasi disebut lengkap apabila semua pemain memiliki semua informasi berkenaan dengan semua variabel yang mendefinisikan permainan. Variabel-variabel tersebut antara lain: fungsi utilitas pemain, kemungkinan strategi, dan jumlah informasi yang dimiliki setiap pemain terhadap variabel yang ada. Dalam ilustrasi pembagian kue misalnya. Masing-masing memiliki informasi bahwa yang lain ingin memiliki bagian yang lebih besar. Masing-masing mengetahui satu sama lain informasi tentang kemungkinan strategi yang tersedia: memotong seimbang/memotong tidak seimbang, mengambil bagian besar/mengambil bagian kecil.

Keterbatasan teori permainan klasik adalah teori tersebut tidak dapat mengatasi permainan dengan informasi tak lengkap. Sebab, sebagian besar situasi permainan dalam keseharian orang per orang tidak bekerja berdasarkan informasi lengkap. Setiap orang memiliki informasi terbatas tentang tujuan sejati orang lain dalam situasi permainan. Setiap orang memiliki informasi terbatas tentang kemungkinan strategi dan informasi yang dimiliki orang lain.

Perang dingin antara Amerika dan Uni Sovyet, misalnya. Perang dingin bisa saja bergerak cepat menjadi perang nuklir karena keduanya berpacu dalam penggunaan nuklir dalam teknologi militer. Kedua pihak tidak tahu satu sama lain soal niat sesungguhnya (damai atau perang) dan kemampuan teknologi. Intelijen dapat saja berhasil mengetahui kondisi aktual persejantaan nuklir lawan namun gagal menembus informasi tentang temuan terkini dalam teknologi militer. Pihak lawan dapat ditipologikan menjadi:

- a. X 1 (pihak yang berniat damai tetapi memiliki akses ke teknologi militer terkini dan berharap pihak lain pun berniat damai)
- b. X 2 (persis seperti X 1 hanya melihat pihak lawan memiliki niat agresi)
- c. X 3 (pelbagai kombinasi lain yang mungkin dari variabel yang ada)

Persoalan yang sama berlaku pada pemilihan kepala daerah. Masing-masing kandidat tidak tahu niat kandidat lain sesungguhnya (sungguh mencalonkan diri atau sekadar memecah suara), kemampuan kandidat lain meraih suara (kapasitas tim suksesnya) dan kuantitas dan akurasi informasi yang dimiliki pihak lawan. Pihak lawan dapat ditipologikan menjadi:

- a. R 1 (pihak yang berniat sungguh mencalonkan diri, memiliki tim sukses yang kuat dan berharap pihak lawan pun sungguh-sungguh)
- b. R 2 (persis seperti R 1 hanya memandang pihak lawan tidak sungguh-sungguh alias sekadar berpartisipasi untuk memecah suara)
- c. R 3 (pelbagai kombinasi lain yang mungkin dari variabel yang ada).

Teori permainan yang berpijak pada informasi terbatas menyisakan sebuah dilema yang disebut dilema narapidana. Dilema narapidana ditemukan oleh dua orang ilmuwan RAND¹, Merrill Flood dan Melvin Dresher. Keduanya menemukan fakta bahwa dalam kondisi informasi tak lengkap, situasi konflik akan menjadi sedemikian rupa sehingga keuntungan bersama tidak dimungkinkan. Dilema narapidana dikembangkan dalam situasi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Dengan kata lain, dilema narapidana bukan sekadar konstruk matematika melainkan juga persoalan nyata dalam hubungan internasional. Dalam perkembangannya, dilema narapidana banyak menarik perhatian ilmuwan dari segala bidang: biologi, ilmu politik, sosiologi, ekonomi, psikologi dan hukum. Di balik berbagai bidang tersebut tersembunyi persoalan yang cukup pelik. Persoalan tersebut adalah bagaimana mempromosikan kebaikan bersama (*common good*) dalam dilema narapidana. Upaya menjawab pertanyaan tersebut adalah kerja intelektual paling penting abad ini (Poundstone, 1992, p. 9)

¹ RAND institute adalah lembaga pemikir (*think tank*) yang dibentuk oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk membuat berbagai analisa mengenai kebijakan luar negeri, keamanan dan hubungan internasional Amerika Serikat

Berikut adalah ilustrasi dilema narapidana. "Dua orang penjahat yang bekerjasama merampok sebuah bank ditangkap pihak yang berwajib. Sayangnya, pihak yang berwajib tidak memiliki cukup bukti untuk menjebloskan mereka ke penjara. Satu-satunya yang bisa digunakan untuk menjebloskan ke penjara adalah kesaksian lisan. Akhirnya, pihak yang berwajib memakai teknik sebagai berikut: kedua penjahat itu ditempatkan di sel terpisah, ketika komunikasi antara keduanya terputus. Pihak yang berwajib pun memberikan tawaran:

1. Jika satu pihak bersaksi atas pihak lain, maka pihak tersebut akan dibebaskan sementara pihak lain terkena hukuman penjara tiga tahun.
2. Jika kedua pihak bersaksi satu sama lain maka masing-masing akan dikenai hukuman penjara dua tahun.
3. Jika kedua pihak tidak bersaksi satu sama lain maka keduanya akan dihukum satu tahun.

Tabel 5
Dilema Narapidana II

	B tidak bersaksi	B bersaksi
A tidak bersaksi	1 tahun, 1 tahun	3 tahun, 0 tahun
A bersaksi	0 tahun, 3 tahun	2 tahun, 2 tahun

Dilema dalam situasi di atas adalah kedua narapidana sesungguhnya dapat memperoleh hukuman lebih ringan (1 tahun) apabila bekerjasama. Hanya, hasil yang lebih baik tersebut tidak mungkin karena situasi memaksa kedua narapidana untuk tidak bekerjasama. Informasi yang tak lengkap membuat narapidana berpikir sebagai berikut: "Andaikan saya bersaksi dan yang lain tidak maka saya bebas dibanding satu tahun penjara, andaikan saya bersaksi dan yang lain berlaku sama maka saya mendapat hukuman penjara dua tahun dan bukannya tiga tahun. Apa pun pilihan yang diambil lawan, saya lebih baik bersaksi karena itu mengurangi hukuman penjara saya sebanyak satu tahun." Ketidaklengkapan informasi juga membuat narapidana berpikir: "saya dapat saja memilih untuk tidak bersaksi tetapi saya tidak percaya bahwa narapidana lain akan mengambil pilihan yang sama." Dengan kata lain, ketidaklengkapan informasi membuat pilihan kerjasama menjadi sesuatu yang mustahil.

Untuk lebih memperjelas persoalan seputar dilema narapidana, perlu dibedakan antara permainan kooperatif dan permainan nonkooperatif. Permainan kooperatif adalah permainan yang mana para pemainnya dapat membuat komitmen yang mengikat sementara permainan non kooperatif adalah sebaliknya. Selain itu, komunikasi bebas antar pemain juga diandaikan dalam permainan kooperatif. Pengandaian yang tidak didapatkan pada permainan non kooperatif.

Harsanyi menolak gagasan tentang komunikasi bebas sebagai kriterium demarkasi antara permainan kooperatif dan non kooperatif. Baginya, isu utama mengenai permainan kooperatif dan nonkooperatif adalah kemungkinan atau ketidakmungkinan kesepakatan yang mengikat dan dapat dijamin keberlakuannya (*enforceable*) (Moser, 1990, p.281). Sebagai contoh, dua mahasiswa, A dan B, bersaing untuk lulus dengan predikat terbaik. Sampai pada suatu saat mereka sadar bahwa mereka tidak dapat mencapai yang terbaik jika tidak bekerjasama. Maka, mulailah keduanya saling mengajari pelajaran yang masing-masing rasakan masih lemah. Mahasiswa A mengajari mahasiswa B statistika. Sebaliknya, mahasiswa B mengajari mahasiswa kalkulus. Keduanya dapat membuat kesepakatan yang mengikat dan dapat dijamin keberlakuannya

(*enforceable*). Dengan kata lain, interaksi antara keduanya tergolong permainan kooperatif.

Permainan kooperatif di atas dimungkinkan karena kedua mahasiswa saling percaya satu sama lain. Keduanya saling percaya bahwa masing-masing akan memberikan yang terbaik. Tetapi bayangkan apabila ketidakpercayaan antara keduanya begitu kuat menancap. Keduanya akan berpikir: "apabila saya membantunya dengan sungguh-sungguh sementara dia tidak, maka saya akan merugi kelak". Dalam situasi tersebut, tidak mungkin dibuat kesepakatan yang dapat dijamin keberlakuannya (*enforceable*). Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Insentif yang didapatkan lewat pelanggaran kesepakatan lebih besar daripada insentif mematuhi. Dalam situasi semacam itu tidak ada kesepakatan yang dapat dijamin keberlakuannya.

Situasi absennya kesepakatan yang dapat dijamin keberlakuannya disebut sebagai titik ekuilibrium. Titik ekuilibrium merupakan kombinasi strategi para pemain yang mana setiap strategi pemain adalah respon terbaik terhadap semua strategi pemain lawan. Perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 6
Titik Ekuilibrium

	B1	B2
A1	2,2	0,3
A2	3,0	1,1

A1: mengajar dengan sungguh-sungguh

A2: mengajar sekenanya

B1: mengajar dengan sungguh-sungguh

B2: mengajar sekenanya

Dalam permainan di atas, pasangan strategi (A2,B2) adalah titik ekuilibrium sebab respon terbaik mahasiswa A terhadap strategi B2 adalah A2. Di sisi yang berbeda, respon terbaik mahasiswa B terhadap strategi A2 adalah B2. Permainan di atas tidak memiliki titik ekuilibrium lain. Jika kedua pemain

menggunakan strategi ekuilibrium (A2,B2) maka mereka akan mendapat keuntungan (1,1)

Sangat jelas terlihat dari tabel 6 bahwa kedua pemain akan mendapat lebih baik jika menggunakan strategi (A1,B1). Pasangan strategi tersebut akan menghasilkan keuntungan (2,2). Persoalannya, kedua strategi tersebut tidak membentuk titik ekuilibrium. Bahkan jika kedua pemain berjabat tangan dan berikrar bahwa mereka akan memakai strategi A1 dan B1 mereka tidak akan melakukannya. Mereka tahu betul bahwa perjanjian itu akan segera dilanggar.

Ekspektasi mereka bahwa hasil permainan adalah pasangan strategi (A1,B1) justru akan menggiring mereka untuk memakai pasangan strategi (A2,B2). Mengapa demikian? Jika mahasiswa A mengantisipasi bahwa mahasiswa B memakai strategi B1, dia tidak akan memakai A1 melainkan A2. Sebab, strategi A2 adalah respon terbaik mahasiswa A terhadap strategi B1. Demikian pula sebaliknya. Jika mahasiswa B mengantisipasi mahasiswa A memakai strategi A1, dia tidak akan memakai strategi B1 melainkan B2. Sebab, respon terbaik mahasiswa B terhadap strategi A1 adalah B2.

Pola seperti di atas tidak akan terjadi pada permainan kooperatif. Dalam permainan kooperatif pemain tidak akan menemukan kesulitan untuk menyepakati pasangan strategi (A1,B1) untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar (2,2). Sebab, perjanjian yang mereka buat sepenuhnya dapat dijamin keberlakuannya (*enforceable*). Meskipun, berdasarkan permainan nonkooperatif, strategi yang masing-masing pemain gunakan bukanlah respon terbaik atas strategi lawan. Strategi mahasiswa A (A1) bukanlah respon terbaik atas strategi mahasiswa B (B1), demikian pula sebaliknya. Namun, keduanya bersepakat untuk menggunakan strategi (A1,B1) demi keuntungan yang lebih besar. Keduanya percaya bahwa masing-masing tidak akan menjadi penumpang bebas (*free rider*) yang mengambil keuntungan dari strategi lawan.

Kesimpulannya, jika permainan dimainkan dengan modus nonkooperatif maka hasilnya adalah titik ekuilibrium (A2,B2) yang dikenal sebagai solusi nonkooperatif. Di lain pihak, jika permainan dimainkan dengan modus kooperatif maka hasilnya adalah titik nonekuilibrium (A1,B1) yang disebut sebagai solusi

kooperatif. Nah, persoalannya adalah apakah ada solusi kooperatif bagi permainan nonkooperatif?

Harsanyi berpendapat bahwa jawaban positif bagi pertanyaan di atas hanya dimungkinkan dalam situasi yang "seolah-olah dilema narapidana" (Moser, 1990). Dalam situasi "seolah dilema narapidana" solusi kooperatif dimungkinkan. Itu terjadi semata karena para pemain adalah individu-individu tulus dan baik. Mereka melekatkan disutilitas pada strategi nonkooperatif (A2,B2) sebagai respon terhadap strategi kooperatif (A1,B1). Tentu saja sikap semacam ini akan mengubah matriks keuntungan dari permainan. Misalnya, kedua pemain melekatkan disutilitas 2 unit terhadap hasil pasangan strategi (A2,B2). Itu akan mengurangi keuntungan mahasiswa A dari pasangan strategi (A2,B1) menjadi $3 - 2 = 1$. Demikian pula sebaliknya. Keuntungan mahasiswa B dari pasangan strategi (A1,B2) akan berkurang menjadi $3 - 2 = 1$. Sehingga, permainan akan memiliki matriks keuntungan baru sebagai berikut:

Tabel 7

Dilema Narapidana Semu

	B1	B2
A1	2,2 (e)	0,1
A2	1,0	1,1 (e)

Harsanyi menegaskan bahwa permainan baru ini bukan lagi dilema narapidana karena baik (A1,B1) dan (A2,B2) adalah titik ekuilibrium. Sehingga meski permainan secara formal adalah permainan nonkooperatif tanpa kesepakatan yang dapat dijamin keberlakuannya, para pemain sekarang tidak memiliki kesulitan mendapat (A1,B1). Pasangan strategi (A1,B1) adalah solusi kooperatif yang akan menghasilkan keuntungan (2,2).

Persoalannya adalah bagaimana mencapai solusi kooperatif dalam permainan yang "sungguh-sungguh dilema narapidana". Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan dilema narapidana sungguhan dengan meminta para pemain untuk beritikad baik dan saling mempercayai. Sementara, insentif untuk melanggar janji demikian besar. Menurut Harsanyi, satu-satunya jalan adalah mengubah permainan nonkooperatif menjadi kooperatif dengan membuat

kesepakatan menjadi dapat dijamin keberlakuannya. Ini hanya dapat dilakukan dengan menyediakan insentif besar terhadap sikap memegang janji, ada atau tidak ada insentif eksternal.

Jebakan sosial adalah salah satu manifestasi permainan nonkooperatif. Itu adalah situasi ketika kesepakatan apa pun akan sulit dijamin keberlakuannya. Pun ketika para pelaku berjabat tangan dan mengucapkan ikrar, respon terbaik tetap tidak bekerjasama. Sebab, situasi jebakan sosial memaksa mereka yang terlibat untuk tidak mempercayai satu sama lain. Situasi jebakan sosial membuat mereka yang terlibat memandang kerjasama sebagai disinsentif

Seperti sudah dijelaskan di atas, kata "jebakan" dalam frase "jebakan sosial" memiliki dua arti. Pertama, para pelaku dalam situasi strategis berakhir pada situasi yang merugikan atau patologis tanpa masing-masing berniat demikian. Misalnya, seorang salah memahami gestur kerjasama pihak lawan sebagai sebaliknya. Kembali pada contoh dua mahasiswa. Mahasiswa A memahami gestur kerjasama mahasiswa B sebagai menipu dan mengancam sehingga situasi beranjak menjadi jebakan sosial. Ini bisa terjadi semata karena kepentingan pribadi sang mahasiswa yang memilih untuk hanya mendengar informasi negatif tentang intensi pesaingnya. Dengan itu dia selalu awas dan terjaga terhadap penghianatan yang akan merugikannya.

Kedua, sekali individu atau kelompok terjerat dalam situasi jebakan sosial maka usaha untuk melepaskan diri sangat lah sulit. Kedua mahasiswa yang sudah tidak percaya satu sama lain akibat ingatan tentang pengingkaran janji di masa lalu akan sulit untuk serta merta berdamai. Kerjasama tidak bisa datang tiba-tiba. Ingatan tidak bisa tiba-tiba diabaikan. Rothstein berargumen bahwa kepercayaan adalah variabel psikologis yang spesial. Sekali kepercayaan di antara dua subjek lenyap, sulit untuk mengembalikannya kembali. Seorang tidak dapat memutuskan begitu saja untuk mempercayai lawan yang sudah tidak dia percaya lagi. Betapa pun rasional keputusan itu, sangat sulit untuk melupakan pengalaman seperti ketidakadilan yang akut atau penghianatan atas kepercayaan.

Apakah ada jalan keluar dari jebakan sosial? Apakah pendekatan insentif Harsanyi dapat digunakan? Kedua pertanyaan itu memerlukan penelitian pada dimensi kognitif teori permainan. Teori permainan kognitif, berbeda dengan teori dilema narapidana, tidak menutup peluang kerjasama. Keputusan seseorang untuk bekerjasama atau tidak tergantung dari persepsi atau antisipasi yang bersangkutan mengenai respon orang lain. Seseorang akan bekerjasama dengan orang lain apabila ia percaya bahwa orang itu akan berlaku sama. Kepercayaan bahwa orang itu akan berlaku sama dapat bertolak dari pengetahuan personal, stereotipe berdasarkan budaya, rekam jejak dan lain sebagainya.

Pendekatan insentif Harsanyi pun memerlukan asumsi kognitif teori permainan. Seorang akan meletakkan insentif tinggi pada kerjasama jikalau dia percaya bahwa orang lain akan berlaku sama. Sebaliknya, apabila seseorang sulit untuk mempercayai orang lain maka dia akan selalu memandang kerjasama sebagai sesuatu yang merugikan. Yang terakhir ini bukan hal yang luar biasa dalam setiap interaksi sosial. Kita biasa memandang orang lain sebagai "si penipu", "si pelanggar janji", "si oportunist" dan lain sebagainya. Kita sulit begitu saja mempercayai kehendak baik dan kemampuan orang lain memegang janji.

Memang, dalam interaksi sosial sering orang memilih untuk tidak bekerjasama. Namun, dekrit dilema narapidana tentang ketidakmungkinan seseorang mempercayai itikad atau kehendak baik orang lain tidak sepenuhnya benar. Jon Elster mengemukakan paling sedikit lima alasan kuat mengapa orang dapat mempercayai orang lain (Elster, 2007, p. 350). Kelima alasan itu antara lain:

- (a) biaya untuk berhati-hati dapat melebihi keuntungan yang menanti baik dalam satu peristiwa atau kehidupan secara keseluruhan. Hidup yang senantiasa dihantui kehati-hatian sangat tidak menyenangkan. Kerugian sekali-sekali yang ditimbulkan dari kepercayaan terhadap penipu adalah kecil dibanding ketenangan batin akibat kecemasan yang minimal.
- (b) Tindakan berhati-hati sendiri dapat memberikan informasi yang dapat dieksploitasi oleh oportunist. Montaigne mengutip peribahasa latin: *furem*

signata sollicitant, aperta effractarius praeterit (rumah terkunci mengundang pencuri, penyamun melewati rumah yang terbuka lebar)

- (c) Gagasan seseorang untuk berhati-hati dapat saja tidak sejalan dengan sikap emosionalnya terhadap orang lain. Ketika dua orang sedang dilanda asmara, mereka akan menolak kalkulasi dingin yang dituangkan dalam perjanjian pranikah.
- (d) Seorang mungkin saja memiliki keyakinan mula-mula (*prior beliefs*) tentang kelayakan-untuk-dipercaya dari orang lain. Keseharian kita tidak melulu disesaki para penipu. Kita melihat banyak orang yang secara konsisten menepati janji, tidak berbohong dan memelihara barang milik orang lain. Mengapa keyakinan mula-mula itu sering tidak bekerja dalam interaksi sosial orang per orang? Seorang yang mempersepsi dirinya sebagai tidak layak dipercaya cenderung mempersepsi orang lain sama. Akibatnya, dia tidak mempercayai orang lain. Ini disebut sebagai efek konsensus palsu (*false consensus effect*). Mekanisme seperti di atas disangga oleh bukti-bukti eksperimental (Elster, 2007, p. 347). Sebaliknya, A mempercayai C karena dia tahu B (orang yang dia percaya) mempercayai C. Penarikan kesimpulan semacam itu tidak sah karena kepercayaan B terhadap C dapat disebabkan semata oleh efek konsensus palsu. Sebagaimana dijelaskan melalui pelbagai contoh di atas kita sering mempercayai atau tidak mempercayai orang berdasarkan alasan yang buruk. Kita memandang orang lain lebih seperti kita daripada diri mereka sendiri. Dalam interaksi yang berulang, kerjasama dapat terjadi kecuali di ronde pertama ketika tidak ada sejarah interaksi sebelumnya. Untuk memulainya para pelaku harus bekerjasama tanpa syarat di ronde pertama. Individu yang percaya akan mengikuti "tit for tat": bekerjasama di ronde pertama dan menggunakan rekam jejak tersebut untuk bekerjasama di ronde berikutnya. Sebaliknya, orang yang sukar percaya akan ingkar di ronde pertama dan mengulanginya lagi di ronde berikutnya.
- (e) Seseorang mungkin menghasilkan kelayakan-untuk-dipercaya dengan mempercayai orang lain. Ketika A tahu bahwa B tidak mengambil langkah berdasarkan prinsip kehati-hatian maka A akan mempercayai B. Sebab,

prinsip kehati-hatian B mengindikasikan bahwa gesturnya adalah ketidakpercayaan terhadap A. Hal tersebut, pada gilirannya, menimbulkan ketidakpercayaan A terhadap B. Berikut adalah eksperimen yang memperkuat premis Elster tersebut: "Seorang investor memiliki opsi untuk mentransfer apa pun antara 0 sampai 10 unit moneter (UM) ke mitranya. Yang bereksperimen menggandakan setiap jumlah yang ditransfer sang investor sampai 3 kali lipat. Artinya, jika si investor mengirim 10 unit moneter maka sang mitra menerima 30 unit moneter. Sang mitra dapat memutuskan untuk mengembalikan jumlah yang ditransfer dari 0 sampai berapa pun jumlah yang ditransfer. Jika investor memutuskan untuk mentransfer maka dia harus mengumumkan secara terbuka berapa jumlah yang dia inginkan untuk dikembalikan. Selain itu, investor diberi pilihan untuk mengumumkan bahwa dia mengenakan denda 4 unit moneter jika sang mitra mengembalikan lebih kecil dari yang diinginkan. Sebagian investor mengumumkan dan sebagian tidak. Jika investor tidak mengumumkan denda maka mitra mengetahui bahwa investor memiliki pilihan mendenda namun tidak menggunakannya. Temuan dari eksperimen di atas adalah jumlah terbesar transfer terjadi saat tak ada denda yang diberlakukan. Sebaliknya, jumlah terkecil transfer terjadi saat denda diberlakukan. Dengan kata lain, gestur ketidakpercayaan investor akan dibalas dengan ketidakpercayaan sang mitra"

Berdasarkan pelbagai pembahasan di atas, dimensi kognitif teori permainan dalam persoalan jebakan sosial mengerucut pada dua persoalan fundamental: rasionalitas dan identitas. Pertanyaan mendasar adalah apakah rasionalitas melulu melayani kepentingan pribadi dan menafikan historisitas atau kesejarahan identitas orang lain. Dengan kata lain, apakah rasionalitas hanya akan berujung pada keputusan tidak bekerjasama mengingat orang lain atau orang lain dipastikan akan berlaku sama. Persoalan rasionalitas akan dibahas dalam sub bab berikut.

III.3 Rasionalitas

III.3.1 Teori Pilihan Rasional

Salah satu teori yang paling banyak dipakai dalam menjelaskan perilaku manusia adalah teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional beranggapan bahwa dalam setiap inci kehidupannya, manusia menjatuhkan pilihan demi tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Misalnya, seorang ingin membeli alat transportasi yang hemat bahan bakar dan ada dua pilihan: mobil berbahan bakar minyak dan mobil berbahan bakar hibrida. Tujuan yang orang tersebut inginkan (alat transportasi hemat bahan bakar) akan terpuaskan secara maksimal apabila dia menjatuhkan pilihan pada mobil berbahan bakar hibrida.

Pendekatan strukturalisme dalam ilmu sosial memandang bahwa pilihan sangat ditentukan oleh rentang peluang (*opportunity set*). Keinginan atau keinginan seseorang memiliki alat transportasi hemat bahan bakar ditentukan oleh rentang peluang yang ada. Apabila ternyata mobil berbahan bakar hibrida belum tersedia di negara orang tersebut, maka pilihannya pun terbatas. Keinginan subjektif orang per orang akan berhadapan dengan peluang objektif yang ada.

Teori pilihan rasional ingin menjelaskan perilaku berdasarkan asumsi bahwa manusia rasional. Salah satu hipotesa dalam asumsi tersebut adalah pelaku menyusun keyakinan rasional tentang pilihan yang tersedia baginya. Oleh karena itu dikotomi keinginan/peluang, subjektif/objektif tidak dikenal dalam kosakata teori ini. Teori pilihan rasional adalah sepenuhnya subjektif.

Bagi teori pilihan rasional sebuah aksi atau tindakan mesti memenuhi tiga tuntutan optimalitas. Pertama, tindakan harus optimal berdasarkan keyakinan. Kedua, keyakinan harus optimal berdasarkan bukti-bukti. Ketiga, bukti-bukti harus dihasilkan oleh investasi optimal dalam pengumpulan informasi. Seorang mahasiswa dapat saja tidak bertindak rasional dalam mencari buku di perpustakaan. Dia mencari buku berdasarkan keyakinan bahwa cara terbaik melacak adalah dengan membuka satu per satu lembar katalog manual. Itu dilakukannya karena mendengar dari kakaknya yang juga alumni bahwa dulu cara mencari buku adalah melalui katalog manual. Artinya, si mahasiswa tidak

optimal dalam mencari informasi. Ketidakoptimalan itu berakibat pada pilihan sarana yang tidak optimal guna memuaskan tujuannya mencari buku.

Tuntutan optimalitas pertama adalah tindakan harus merupakan sarana terbaik guna memuaskan keinginan pelaku. Apa yang "terbaik" senantiasa diungkapkan dalam skala atau preferensi. Seorang lebih menyukai apel (A) daripada jambu (B) untuk menjaga kesehatannya. Namun, daripada durian (C) dia lebih menyukai jambu sebab durian kaya kolestrol. Artinya, dia memilih apel sebagai sarana terbaik guna memuaskan keinginannya untuk sehat. Preferensi tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut: $A > B > C$.

Ada dua prasyarat pokok yang harus dipenuhi untuk menyebut sebuah pilihan sebagai yang terbaik. Pertama, preferensi harus bersifat transitif. Andaikan ada tiga pilihan A, B, C. Jika seorang berpendapat bahwa A lebih baik daripada B dan B lebih baik daripada C maka kesimpulannya A harus lebih baik dari C. Jika syarat transitivitas gagal dipenuhi, misalnya C menjadi lebih baik daripada A maka orang tersebut tidak memilih sarana yang terbaik.

Situasi menjadi lebih kompleks jika pelaku memeringkat pilihan yang dengan aspek pengukur (*counting aspects*). Misalnya, seseorang memilih apel dari apel yang lain jika apel tersebut lebih baik berdasarkan paling sedikit dua dari tiga aspek: harga, rasa dan kematangan. Jika apel A lebih baik daripada apel B pada aspek harga dan rasa, apel B lebih baik daripada apel C pada harga dan kematangan, apel C lebih baik daripada apel A pada rasa dan kematangan maka prinsip transitivitas tidak berlaku.

Prasyarat lain yang harus dipenuhi agar sebuah pilihan disebut yang terbaik adalah kelengkapan (*complete*). Preferensi disebut lengkap apabila di antara dua pilihan, pelaku harus memilih satu di antara keduanya atau indifere terhadap keduanya. Apabila si pelaku tidak dapat mengambil satu dari sikap-sikap di atas maka dia tidak dapat memutuskan mana yang terbaik.

Dalam ilmu ekonomi biasanya preferensi orang diwakili oleh angka yang disebut nilai utilitas (*utility values*) yang dilekatkan pada setiap pilihan. Untuk memungkinkan hal tersebut ada prasyarat lain yang harus dipenuhi yakni kontinuitas. Jika setiap pilihan dalam urutan A_1, A_2, A_3 dst lebih disukai daripada

B dan urutan tersebut bergabung ke dalam A maka A harus lebih disukai daripada B. Sebaliknya, jika B lebih disukai daripada setiap pilihan dalam urutan tersebut maka B harus lebih disukai daripada A.

Bukti sebaliknya datang dari apa yang disebut sebagai preferensi leksikografik (*lexicographic preference*). Kumpulan dua barang A dan B dalam kuantitas (A_1, B_1) lebih disukai daripada kumpulan lain (A_2, B_2) jika dan hanya jika entah $A_1 > A_2$ atau $(A_1 = A_2 \text{ dan } B_1 > B_2)$. Dalam peringkat preferensi tersebut kumpulan $(1.1, 1)$, $(1.01, 1)$, $(1.001, 1)$,..... semua lebih disukai daripada (1.2) yang lebih disukai daripada $(1, 1)$. Artinya, komponen pertama dari kumpulan tersebut tak pelak lagi lebih penting daripada yang kedua karena tidak ada jumlah ekstra dari barang B yang bisa mengganti bahkan kerugian terkecil dari barang A. Preferensi leksikografik jarang terjadi pada konsumsi barang ekonomi. Namun, itu sering terjadi pada pilihan politik. Pemilih dapat memilih kandidat A daripada kandidat B jika dan hanya jika A memiliki pandangan prokehidupan dalam soal aborsi atau jika keduanya memiliki sikap yang sama dan A menawarkan pengurangan pajak. Bagi pemilih semacam itu, nilai sakral kehidupan tidak bisa ditukar dengan uang sebesar apa pun.

Meski terlihat solid sebagai sebuah teori, teori pilihan rasional sesungguhnya mengalami sengketa internal. Ada dua pokok sengketa yang mengemuka. Pokok sengketa pertama adalah asumsi mengenai tujuan manusia. Teori pilihan rasional terbelah menjadi dua kubu dalam asumsi ini. Kubu pertama mengadopsi pendekatan rasionalitas tipis yang mana pelaku dikatakan rasional apabila menggunakan sarana secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Muatan tujuan itu sendiri tidak dibicarakan. Sebaliknya, kubu kedua mengadopsi rasionalitas tebal. Pendekatan ini tidak semata membincang soal rasionalitas tetapi juga memberi keterangan tambahan mengenai tujuan atau preferensi pelaku. Utilitarianisme dan ekonomi klasik bersandar pada pendekatan rasionalitas tipis. Jeremy Bentham, salah satu filsuf utilitarianisme, dengan terang mengatakan bahwa tujuan setiap individu adalah kenikmatan (*pleasure*) dan semua upaya difokuskan untuk memaksimalkan kenikmatan. Filsuf politik Thomas Hobbes pun menerangkan bahwa setiap individu berupaya

untuk memaksimalkan kekuasaan. Upaya itu hanya dapat dipenuhi apabila individu menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada kekuasaan terpusat dan absolut bernama negara.

Pokok sengketa kedua adalah jumlah informasi relevan yang mana pelaku dapat miliki dan jadikan landasan untuk bertindak. Model pasar neoklasik konvensional mengandaikan informasi sempurna dan kemampuan konsumen untuk memahami dan menggunakan informasi tersebut. Sementara dalam ilmu politik, teori pilihan rasional tidak dapat mengandaikan informasi sempurna. Sebab, pemilih tidak dapat diandaikan memiliki informasi sempurna mengenai kebijakan, program, agenda politik kandidat yang mereka pilih. Apalagi dalam epos politik pencitraan dewasa ini. Mereka yang bersandar pada informasi taksempurna berargumen bahwa pemerolehan informasi adalah memakan waktu dan biaya. Pengumpulan informasi mirip seperti investasi ekonomi. Setiap pencari informasi terus menginvestasikan sumber daya untuk menyediakan data sampai keuntungan marginal dari informasi yang diperoleh setara dengan biaya marginalnya. Jon Elster mencatat bahwa logika ekonomi dalam pengumpulan informasi menghasilkan sebuah persoalan baru. Menurut Elster pelaku harus mengevaluasi nilai informasi yang dia belum miliki untuk menentukan apakah layak baginya berpayah-payah mendapatkannya. Variasi dari persoalan ini muncul ketika teoretikus teori pilihan rasional memperdebatkan rasionalitas perilaku miopik. Perilaku miopik adalah perilaku seorang pelaku yang mengejar keuntungan serta-merta tanpa menghiraukan bahwa itu dapat berujung pada hasil yang tidak diinginkan. Jika perencanaan strategis diasumsikan sebagai tak berbiaya, perilaku miopik tidak dapat dikatakan sebagai rasional. Namun, apabila perencanaan strategis membuahkan biaya kognitif yang tak sedikit (atau distraksi dari pemenuhan tujuan-tujuan dalam aspek kehidupan lainnya), maka perilaku miopik pun menjadi rasional. Teori pilihan rasional memang meliputi sederet asumsi tentang pengetahuan pelaku mengenai pilihan-pilihan strategis yang ada.

III.3.2 Rasionalitas Instrumental

Teori pilihan rasional dan teori permainan memakai rasionalitas instrumental sebagai asumsi fundamental yang mendasari setiap pengambilan keputusan orang per orang. Dua pertanyaan dapat segera diajukan. Apa sesungguhnya rasionalitas instrumental itu? Apa bentuk hubungan yang dijalinnya dengan teori permainan khususnya dilema narapidana?

Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang menimbang sarana untuk mencapai tujuan terberi. Tujuan di sini memang bisa saja bercorak altruistik. Namun, teori seperti dilema narapidana misalnya, mereduksi kepentingan para pemain menjadi kepentingan pribadi belaka. Dilema narapidana hanya bekerja apabila satu-satunya tujuan para pemain adalah kemenangannya sebagai ganti dari kekalahan lawan. Rasionalitas para pemain bekerja untuk memaksimalkan utilitasnya. Tak lebih dan tak kurang.

Situasi dilema narapidana memaksa individu mereduksi tujuan menjadi kepentingan pribadinya (lolos dari hukuman). Kerjasama menjadi mustahil karena pihak-pihak dalam situasi dilema narapidana menganggapnya bukan pilihan rasional untuk memaksimalkan utilitas. Bersaksi tentang narapidana lain adalah rasional dalam situasi dilematis meskipun hasil yang lebih baik bisa dicapai kalau mereka saling menutup mulut.

Dalam dilema narapidana, rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang menutup diri dari historisitas identitas orang lain. Rasionalitas hanya bekerja melayani kepentingan pribadi dan mematok identitas orang lain sebagai sesama promotor kepentingan pribadi. Rasionalitas menutup diri terhadap kenyataan bahwa kepentingan pribadi kita ditentukan secara historis, sosial dan kultural. Apa yang menjadi kepentingan kita tidak dilihat sebagai buah persepsi kita terhadap orang lain yang terkonstruksi secara sosial.

Selain tertutup terhadap historisitas identitas orang lain, rasionalitas instrumental juga tertutup dari segala skrutinisasi terhadap tujuan atau preferensi orang per orang. Rasionalitas instrumental tidak menimbang rasional tidaknya tujuan atau preferensi seseorang melainkan rasional tidaknya sarana pemuas preferensi. Utilitas termaksimalkan apabila seorang memilih sarana paling tepat

guna memuaskan preferensi. Sarana disebut paling tepat apabila biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari keuntungan yang didapatkan. Dalam bahasa ekonomi: utilitas termaksimalkan (*maximized utility*).

Ilustrasi: "Seorang pelari misalnya mendapat utilitas per kilometer jarak yang ditempuh tetapi juga disutilitas berupa kelelahan atau kesakitan otot. Pada kilometer berapa ia harus berhenti dengan menimbang selisih antara utilitas dan disutilitas?"

Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 8a

Maksimalisasi Utilitas

Km	Utilitas (kenikmatan, keuntungan)	Disutilitas (kelelahan, kesakitan, biaya)
1	10	2
2	18	4
3	22	6
4	25	8
5	25.5	10
6	24.5	12
7	21.5	14

Tabel 8a menunjukkan bahwa setiap tambahan satu kilometer ada perubahan utilitas (marjin utilitas) dan perubahan disutilitas (marjin disutilitas). Kilometer kedua, misalnya, marjin utilitas adalah 8 (delapan) sementara marjin disutilitas adalah 2 (dua). Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 8b

Marjin Utilitas

Km	Marjin Utilitas	Marjin Disutilitas	Net Utilitas
1	10	2	8
2	8	2	14
3	4	2	16
4	3	2	17
5	0.5	2	15.5
6	-1	2	12.5
7	-3	2	7.5

Dari tabel di atas kita dapat memprediksi bahwa pelari akan berhenti akhir kilometer keempat atau menjelang kilometer kelima. Mengapa demikian? Rasionalitas instrumental sang pelari akan menimbang bahwa tambahan satu kilometer setelah kilometer keempat hanya akan menambah utilitas sebanyak 0.5 unit sementara disutilitas 2 unit. Artinya, sarana paling tepat bagi pelari untuk memaksimalkan utilitas dari aktivitas berlari adalah berhenti pada akhir kilometer ke-empat.

Narapidana memiliki dua pilihan sarana untuk mendapat hukuman ringan. Pertama adalah bersaksi tentang yang lain; kedua, menutup mulut. Pilihan bersaksi tentang yang lain dijatuhkan karena keuntungan melebihi biaya. Sebab, apa pun respon lawan, bersaksi mengurangi hukuman narapidana sebanyak satu tahun. Bagi narapidana, pilihan menutup mulut tidak rasional karena biaya melebihi keuntungan. Apalagi probabilitas dia mendapat hukuman penjara satu tahun sangat rendah mengingat dalam situasi dilema narapidana kecil kemungkinan pihak lawan akan menutup mulut. Berdasarkan asumsi bahwa orang lain bersaksi atasnya, narapidana akan mendapat hukuman sebanyak tiga tahun penjara apabila ia tutup mulut.

Asumsi antropologis dibalik kerja rasionalitas instrumental adalah manusia selaku promotor kepentingan pribadinya atau dalam literatur ekonomi disebut sebagai *homo oeconomicus*. Dalam sejarah filsafat Barat, asumsi antropologis tersebut berakar pada pemikiran filsuf modern seperti Thomas Hobbes.

Padahal, jauh sebelumnya, filsuf Yunani Kuno seperti Socrates berpikiran lain. Dia membedakan antara hidup yang baik (*good life*) dan hidup yang nikmat (*enjoyful life*). Hidup yang nikmat adalah hidup ketika setiap keinginan terpuaskan tanpa kendala berarti. Sementara hidup yang baik adalah hidup ketika setiap keinginan tidak dipenuhi begitu saja tanpa diperiksa oleh akal budi. Manusia bukan sekadar pengurus kepentingan pribadinya dan menafikan orang lain. Socrates berpendapat bahwa orang lain adalah pengukur sejati bagaimana kita menjalani hidup. Sebelum kita bertindak sebaiknya selalu berupaya menilai tindakan kita dari kaca mata orang lain. Apakah tindakan itu memuaskan atau tidak bukanlah sebuah prioritas epistemologis.

Abad pertengahan memiliki andil untuk menyingkirkan asumsi antropologis Sokratean di atas. Pada abad pertengahan, semua orang diberitahu bahwa mengejar kenikmatan adalah dosa. Kesakitan dan kesengsaraan, dalam konteks ketaatan pada pemuka agama dan raja, adalah esensial bagi kehidupan sesudah mati yang menyenangkan. Mengendurnya cengkeraman agama pada kemanusiaan membuat segalanya berubah. Ekonomi yang lebih terbuka membuat keyakinan baru muncul: manusia memiliki hak yang sah untuk bahagia di bumi. Kebebasan dalam ekonomi yang terbuka (ekonomi pasar) adalah kebebasan untuk mengejar kebahagiaan. Hak untuk bahagia tercatat di pelbagai konstitusi negara-negara modern. Kepentingan pribadi bukanlah dosa melainkan kekuatan yang mendorong bekerjanya pasar secara sempurna.

Thomas Hobbes menjejalkan keyakinan baru tersebut pada sebuah filsafat manusia yang kokoh. Hobbes beranggapan bahwa manusia memang terlahir egois. Manusia selalu berupaya untuk memuaskan kepentingan pribadinya meski itu berarti sengketa dengan orang lain. Realitas sosial adalah silang sengketa yang berkelanjutan, perang semua melawan semua (*homo homini lupus*). Kehidupan menjadi soliter, dangkal, brutal dan pendek.

Bagi Hobbes, promosi kepentingan pribadi dalam bentuk penyelamatan diri sendiri tidak lah bertentangan dengan akal budi. Manusia dibenarkan secara rasional untuk melakukan segala cara yang mungkin guna menyelamatkan dirinya sendiri. Hobbes mengatakan:

And forasmuch as necessity of nature maketh men to will and desire bonum sibi, that which is good for themselves...It is not against reason that a man doth all he can to preserve his own body and limbs, both from death and pain. And that which is not against reason, men call right or jus or blameless liberty of using our own natural power and ability. It is therefore a right of nature: that every man may preserve his own life and limbs with all the power he hath (Hobbes, 1994, p. 79)

Hobbes memperkenalkan model manusia yang egois. Manusia menggunakan akal budinya untuk mendapatkan apa yang dia mau meski berarti itu menyakiti orang lain. Namun, situasi sengketa berkelanjutan juga bukan sesuatu yang mengesankan. Maka, manusia pun mulai menemukan rasionalitas dalam harmoni, perdamaian dan ketertiban. Itu pun tidak cukup. Meski orang mulai sadar bahwa damai lebih baik daripada perang, setiap orang tahu pasti bahwa kesepakatan saja tidak cukup. Jika seseorang mencuri dan pada saat yang sama menginginkan agar orang lain taat hukum, maka kesepakatan apa pun akan kehilangan daya ikatnya. Kesepakatan harus dijaga oleh sebuah otoritas yang berkekuatan besar; otoritas tempat orang melepaskan sebagian hak-haknya.

Semua tahu bahwa situasi tanpa otoritas adalah rasional secara instrumental untuk mencuri tanpa takut hukuman. Namun, keberadaan hukum yang tegas dan penegak hukum sebagai pelaksananya adalah lebih rasional. Alasannya sederhana: keuntungan personal dari mencuri dikalahkan secara signifikan oleh rasa takut hidup dalam masyarakat yang mana semua orang dapat merugikan atau menyakiti orang lain dengan mudah.

Gagasan rasionalitas instrumental memang berakar pada filsafat Hobbes. Namun, tak ada filsuf yang dapat memberikan keterangan lebih baik tentang rasionalitas instrumental daripada David Hume. David Hume membicarakan rasionalitas instrumental dalam kerangka filsafat moral. Hume menegaskan bahwa moralitas bukan objek pemahaman rasional (Hume, 2003, p. 195). Mengapa demikian? Pemahaman hanya berkutat seputar dua operasi utama: perbandingan gagasan dan penyimpulan kenyataan faktual. Buah dari dua

operasi rasionalitas tersebut adalah relasi dan kenyataan faktual. Sementara, moralitas bukanlah relasi maupun kenyataan faktual.

Kebaikan (*virtue*) dan keburukan (*vice*) bukan pengetahuan mengenai relasi. Fokus persetujuan dan penolakan moralitas adalah tindakan mental yang berkaitan dengan objek eksternal. Misalnya, rasa sayang ibu pada anaknya atau kehendak untuk mengambil milik orang lain. Jika kebaikan dan keburukan adalah relasi, maka keduanya adalah relasi antara objek eksternal dan tindakan internal. Keduanya bukan relasi antara objek eksternal. Sebab jika memang demikian maka objek irasional dan eksternal dapat memiliki kualitas moral.

Kebaikan dan keburukan bukan pula kenyataan faktual. Hume memberi contoh pembunuhan untuk menjelaskan premis tersebut. Dalam tindakan membunuh kita tidak dapat menemukan apa pun yang disebut "keburukan" kecuali keinginan, motif, kehendak dan gagasan tertentu.

Hume menegaskan bahwa kebaikan dan keburukan bukan relasi atau kenyataan faktual. Keduanya bukan objek pemahaman akal budi manusia. Moralitas memancing keinginan dan memproduksi atau mencegah perbuatan. Akal budi tidak dapat berbuat apa-apa berkenaan dengan mekanisme tersebut. Moralitas bukan kesimpulan dari akal budi kita.

Sebuah tindakan menurut Hume adalah hasil kesukaan atau ketaksukaan terhadap objek. Kesukaan dan ketaksukaan pada gilirannya dipancing oleh kesakitan dan kenikmatan yang ditimbulkan oleh objek bersangkutan. Rasionalitas dapat memberitahukan tentang eksistensi objek-objek dan relasi antar mereka. Namun, jika objek tidak menimbulkan kesukaan atau ketaksukaan pada diri kita, maka informasi yang diberikan rasionalitas tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap kehendak. Rasionalitas semata tidak dapat menimbulkan atau mencegah perbuatan. Hume meringkas pikiran ini dalam satu kalimat terkenalnya: "akal budi adalah hamba sahaya dari keinginan dan tidak dapat berpura-pura berperan apa pun selain melayani dan menaatinya."

Bagi Hume rasionalitas hanya sekadar alat. Hume menjelaskan posisinya ini melalui ilustrasi mengenai mekanika (Hume, 2003, p. 235). Mekanika ditopang oleh matematika sebagai bentuk penalaran demonstratif

(*demonstrative reasoning*). Namun, pada dirinya mekanika tidak mempengaruhi atau menghasilkan tindakan. Mekanika adalah seni mengatur gerak benda-benda demi sebuah tujuan tertentu. Dengan kata lain, penalaran demonstratif tidak pernah mempengaruhi atau menghasilkan tindakan, melainkan sekadar mengarahkan keputusan kita mengenai hubungan sebab akibat.

Hanya kerjasama antara akal budi dan kehendak yang dapat menghasilkan pengaruh yang kuat terhadap kehendak. Akal budi dapat menggugah keinginan dengan memberitahukan mengenai eksistensi objek. Misalnya, seorang berpendapat bahwa di perpustakaan fakultas sastra terdapat karya penyair Chairil Anwar. Keinginan orang itu untuk pergi ke perpustakaan berpijak pada pendapat tersebut. Akal budi pun dapat membimbing keinginan orang itu pada objeknya. Akal budi memerintahkan orang itu untuk membuka mesin pencari pada komputer perpustakaan dan mengetik "Chairil Anwar" pada kolom "Pengarang". Dalam hal ini peran akal budi bisa jadi sangat menentukan. Apabila orang itu kemudian sadar bahwa pendapat atau cara menemukannya salah maka kehendaknya pun bisa jadi berhenti. Namun, peran akal dalam hal ini budi tetap saja administratif karena tidak menghasilkan impuls yang menggerakkan orang tersebut.

Bagi Hume, rasionalitas tidak berurusan dengan keinginan orang per orang. Rasionalitas adalah semata kapasitas untuk memilih tindakan yang paling tepat guna melayani tujuan, keinginan atau kehendak seseorang. Perbuatan manusia ditentukan oleh tiga penentu utama: keinginan (tujuan, kehendak), sarana (sumber daya) dan rasionalitas (kapasitas untuk berpikir logis dalam memeriksa pelbagai opsi yang mungkin).

Si pencari Chairil Anwar memiliki keinginan untuk memperoleh karya sang penyair. Dia pun memiliki kartu perpustakaan yang membuatnya sah untuk memasuki perpustakaan dan membuka mesin pencari di komputer. Terakhir, dia memiliki rasionalitas yang menimbang bahwa membuka komputer perpustakaan adalah cara yang paling tepat daripada menjelajahi rak buku satu per satu. Rasionalitas membantu si pencari untuk menggunakan sarana yang ada demi melayani tujuan sang tuan: keinginan memperoleh karya Chairil.

Hume sepakat dengan Hobbes dalam soal fungsi instrumental akal budi. Namun, dia berbeda pendapat mengenai asumsi manusia sebagai promotor kepentingan pribadi. Kepentingan orang per orang tidak dapat begitu saja dipastikan sebagai kepentingan pribadi. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Hume (Strauss, 1987, p. 545). *Pertama*, hal itu terlalu melebih-lebihkan kekuatan rasionalitas. Bahwasannya keinginan berteman pada dasarnya adalah kepentingan pribadi mengandaikan rasionalitas yang begitu kompleks dan pelik; *kedua*, tidak semua keinginan bisa dikebawahkan oleh keinginan untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya, kasih sayang ibu untuk anaknya; *ketiga*, perbuatan berdasarkan kepentingan pribadi sendiri mengandaikan eksistensi keinginan lainnya. Kepentingan pribadi, misalnya, mendorong kita untuk menyantap nasi goreng yang begitu memikat. Mengapa itu begitu memikat? Karena nasi goreng memuaskan keinginan kita yang lain yaitu rasa lapar. Tanpa keinginan lain selain kepentingan pribadi, kepentingan tersebut tidak akan berurusan dengan apa pun; *keempat*, kepentingan pribadi apabila berbenturan dengan keinginan tertentu lainnya tidak selalu memperoleh prioritas. Manusia mungkin saja lebih menyukai kebaikan yang lebih rendah daripada kebaikan lainnya. Seorang tahu bahwa kuliah di universitas favorit lebih baik daripada universitas nonfavorit. Namun, dia tetap memilih universitas nonfavorit karena lebih dekat dengan rumah orang tuanya.

Persoalannya, dilema narapidana membuat asumsi rasionalitas instrumental tanpa embel-embel pun menimbulkan kerugian. Kedua narapidana dalam dilema tersebut digerakkan oleh kepentingan yang sama: lolos atau memperoleh hukuman minimal. Tujuan itu dilayani dengan baik oleh tindakan bersaksi terhadap perbuatan orang lain. Rasionalitas tidak terbuka untuk memeriksa nilai moral "bersaksi terhadap sesama narapidana" berdasarkan keutamaan sosial yang bernama kepercayaan. Bagi rasionalitas narapidana cara paling tepat untuk lolos atau mendapat hukuman minimal adalah bersaksi, habis perkara. Padahal sikap mempercayai orang lain dapat membuahkan keuntungan yang lebih baik bagi kedua narapidana. Ini artinya, asumsi rasionalitas instrumental dalam dilema narapidana membuat mereka yang terlibat menjadi

promotor kepentingan pribadi belaka. Ini tidak akan terjadi apabila mereka yang terlibat terbuka rasionalitasnya dalam memeriksa hubungan pasti antara tujuan "lolos atau hukuman minimum" dengan sarana bersaksi.

Berdasarkan sudut pandang dilema narapidana, pikiran Hobbes dan Hume tentang hubungan rasionalitas dan keinginan menyimpan persoalan tersendiri. Bagi mereka, rasionalitas tidak memikirkan keinginan itu sendiri. Rasionalitas semata memikirkan sarana paling tepat untuk memuaskan keinginan. Kedua filsuf di atas bisa dikatakan berpegangan pada prinsip ketakberdayaan rasionalitas di hadapan keinginan.

Hume menekankan bahwa kita tidak dapat berargumen mengenai keinginan. Sebab, keinginan bukan bagian dari kenyataan faktual; sehingga tidak pernah dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi objektif "A adalah B". Keinginan hanya dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi subjektif "A menginginkan B". Akibatnya, kita tidak berargumen tentang keinginan melainkan sarana guna memuaskan keinginan. Rasionalitas tidak mempertanyakan keinginan kita untuk makan durian meski kadar kolesterol kita tinggi. Rasionalitas sekadar memikirkan sarana paling tepat untuk dapat menikmati durian secara maksimal.

Sarana, berbeda dengan keinginan, dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi "A adalah B". Misalnya, tindakan memasukkan *password* (A) adalah sarana untuk membuka e-mail (B). Kita dapat berargumen tentang proposisi tersebut. Bahwasannya secara induktif probabilitas terbukanya e-mail dengan memasukkan *password* adalah 99%. Kita dapat saja gagal membuka e-mail meski memasukkan *password* yang benar. Proposisinya menjadi: "tindakan membuka *password* bukan sarana untuk membuka e-mail". Namun, tetap saja kita tengah berargumen mengenai nilai kebenaran proposisi "tindakan memasukkan *password* adalah sarana untuk membuka e-mail".

Keinginan sepenuhnya subjektif dan tidak dapat direfleksikan secara rasional. Kita tidak dapat membenarkan atau menyangkal keinginan yang muncul. Yang dapat kita lakukan semata menyetujui atau menolak keinginan berdasarkan sentimen (rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan). Ketika

kita menyaksikan seseorang makan berlebihan maka kita spontan menyatakan ketidaksetujuan kita. Penolakan itu tidak disebabkan oleh kerja rasionalitas melainkan sentimen. Kita merasakan bahwa apabila kita berada di posisi orang tersebut maka kita akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan yakni sakit perut. Tindak-tanduk kita disebabkan oleh sentimen. Sementara rasionalitas bekerja guna melayani sentimen tersebut.

III. 4 Ikhtisar

Jebakan sosial sebagai dilema narapidana menimbulkan kesulitan teoretis tersendiri. Persoalan dilema narapidana tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan instruksi etis untuk beritikad baik dan saling mempercayai. Sebab, di sisi lain, insentif untuk melanggar janji demikian besar. Menurut Harsanyi, satu-satunya jalan adalah mengubah permainan nonkooperatif menjadi kooperatif dengan membuat kesepakatan menjadi dapat dijamin keberlakuannya. Ini hanya dapat dilakukan dengan menyediakan insentif besar terhadap sikap memegang janji, ada atau tidak ada insentif eksternal.

Persoalan lanjutan adalah bagaimana rasionalitas manusia dapat menemukan insentif dalam sikap mempercayai. Persoalan ini sungguh pelik. Sebab, situasi dilema narapidana memaksa individu mereduksi tujuan menjadi kepentingan pribadinya yang mematok sikap nonkerjasama sebagai "yang menguntungkan". Singkat kata, kerjasama dalam dilema narapidana adalah mustahil. Bersaksi tentang narapidana lain adalah rasional dalam situasi dilematis meskipun hasil yang lebih baik bisa dicapai kalau mereka saling menutup mulut.

Asumsi pokok dalam dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental. Rasionalitas ini sesungguhnya dapat menemukan insentif pada kerjasama asalkan itu memaksimalkan keuntungan. Persoalannya dalam dilema narapidana rasionalitas instrumental bekerja secara tertutup. Rasionalitas adalah rasionalitas yang menutup diri dari historisitas identitas orang lain. Rasionalitas hanya bekerja melayani kepentingan pribadi dan mematok identitas orang lain sebagai sesama promotor kepentingan pribadi. Rasionalitas menutup diri

terhadap kenyataan bahwa baik kepentingan pribadi kita maupun orang lain ditentukan secara historis, sosial dan kultural. .

Selain tertutup terhadap historisitas identitas orang lain, rasionalitas instrumental juga tertutup dari segala skrutinisasi terhadap tujuan atau preferensi orang per orang. Rasionalitas instrumental tidak menimbang rasional tidaknya tujuan atau preferensi seseorang melainkan rasional tidaknya sarana pemuas preferensi. Utilitas termaksimalkan apabila seorang memilih sarana paling tepat guna memuaskan preferensi. Sarana disebut paling tepat apabila biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari keuntungan yang didapatkan.

Rasionalitas tidak dapat berargumen tentang keinginan, tujuan, atau preferensi sebab itu sepenuhnya subjektif. Rasionalitas hanya dapat berargumen tentang sarana yang terkuantifikasi dan terkalkulasi. Artinya, persoalan dikotomi keinginan-subjektif/sarana-objektif mengeram dalam rasionalitas instrumental sebagai rasionalitas tindakan. Bab berikutnya akan membahas beberapa kritik mengenai dikotomi tersebut dan menjajagi kemungkinan rasionalitas yang diperluas (*broaden rationality*).

BAB IV

MEMPERSOALKAN RASIONALITAS INSTRUMENTAL

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, persoalan jebakan sosial sesungguhnya adalah persoalan dilema narapidana dalam teori permainan. Dilema narapidana menganut asumsi antropologis tentang manusia selaku promotor kepentingan pribadi yang semata berpikir tentang sarana paling tepat untuk memaksimalkan kepentingannya tersebut. Tindakan "bersaksi", "menghianati perjanjian", "menyerang terlebih dahulu" didasari argumen bahwa itu adalah tindakan paling rasional guna mengamankan kepentingan jangka pendek seseorang atau satu kelompok.

Persoalannya kemudian adalah apakah rasionalitas yang mendasari itu dapat dibenarkan. Rasionalitas dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental yang berfokus pada pilihan sarana paling tepat guna memaksimalkan utilitas. Ukuran rasionalitas sebuah tindakan dipatok pada ketepatan pilihan sarana. Ketepatan pilihan sarana dikebawahkan oleh tuntutan maksimalisasi utilitas. Ini tentu saja sangat kuantitatif dan mengabaikan tujuan, ideal, atau nilai yang bersifat kualitatif. Tujuan dikeluarkan dari pertimbangan rasionalitas dan dianggap sebagai variabel tetap dan mapan.

Bab ini akan membahas rasionalitas instrumental sebagai rasionalitas tindakan dan kemungkinan perluasannya. Bagian pertama akan difokuskan pada pelbagai asumsi yang melandasi rasionalitas instrumental. Bagian kedua akan membahas kemungkinan perluasan rasionalitas instrumental. Bagian ketiga akan membahas konsepsi Habermas mengenai rasionalitas komunikasi sebagai rasionalitas yang diperluas.

IV.1 Beberapa Asumsi Pokok

Pada perang dunia pertama, ahli psikologi binatang terkenal bernama Wolfgang Köhler mengadakan sebuah eksperimen. Dia menempatkan seekor simpanse di sebuah kandang dengan kotak kayu, tongkat dan terakhir: setandan pisang yang diletakkan di atas jangkauan sang simpanse. Dalam eksperimen tersebut, simpanse mampu menggeser kotak tepat di bawah pisang, menaikinya dan memakai tongkat untuk mengambil pisang. Hal itu membuktikan bahwa simpanse mampu bertindak berdasarkan rasionalitas instrumental. Rasionalitas yang bekerja semata memilih sarana yang memungkinkan kita mencapai sebuah tujuan yang tak dipertanyakan.

Rasionalitas instrumental yang dipertontonkan simpanse juga berlaku pada manusia. Kita dalam keseharian senantiasa memutar otak memilih sarana yang paling tepat untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan. Seorang mahasiswa yang ingin mencari buku sastra di perpustakaan dapat memilih beberapa opsi sarana: (a) membuka katalog konvensional (b) menelusuri rak yang berisikan buku sastra (c) bertanya pada petugas perpustakaan atau (d) membuka katalog digital. Rasionalitas instrumental si mahasiswa akan membuatnya menjatuhkan pilihan pada opsi (d) yakni membuka katalog digital. Sebab, biaya pengumpulan informasi (waktu, tenaga dan pikiran) dari opsi tersebut paling sedikit dibanding opsi lain. Sehingga, tujuan si mahasiswa terpuaskan secara maksimal atau dalam bahasa yang lebih teknis: maksimalisasi utilitas.

John Searle, merumuskan enam asumsi pokok yang terkandung dalam rasionalitas instrumental atau model klasik rasionalitas (Searle, 2001, p. 7-12). Berikut keenam asumsi pokok tersebut:

1. Tindakan rasional disebabkan oleh keyakinan dan keinginan.

Keyakinan dan keinginan berfungsi sebagai sebab dan alasan tindakan kita dan rasionalitas bekerja semata mengkoordinasikan keyakinan dan keinginan sehingga keduanya menyebabkan tindakan secara benar. Perlu diperhatikan bahwa kata "sebab" di sini dipahami sebagai "sebab efisien" seperti pada "gempa menyebabkan rumah itu runtuh"

2. Rasionalitas adalah persoalan menaati aturan yakni aturan yang membedakan antara tindakan rasional dan irasional.

Rasionalitas instrumental menggariskan aturan tentang tindakan rasional sebagai tindakan memilih sarana paling tepat untuk tujuan terberi. Mahasiswa yang hendak mencari buku sastra menaati aturan tersebut apabila membuka katalog digital dan bukan menelusuri rak buku-buku sastra.

3. Rasionalitas adalah fakultas kognitif yang terpisah.

Manusia memiliki berbagai fakultas kognitif yang masing-masing mengampu pekerjaan yang berbeda. Misalnya fakultas penglihatan yang bekerja menangkap kesan-kesan inderawi. Rasionalitas adalah fakultas kognitif yang membedakan manusia dengan spesies lainnya. Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai "binatang berakal budi", dan akal budi adalah satu-satunya fakultas kognitif yang membuat manusia berbeda dengan spesies lainnya.

4. Kasus-kasus *akrasia* atau kelemahan kehendak hanya terjadi ketika ada yang tidak beres dengan anteseden psikologis sebuah tindakan.

Keyakinan dan keinginan adalah penyebab efisien sebuah tindakan. Keduanya menyebabkan tindakan dengan terlebih dahulu memformulasikan intensi. Apabila keyakinan, keinginan dan turunannya yakni intensi adalah rasional, maka tindakan akan mengikuti sebagai keniscayaan kausal. Sehingga, pada kasus ketika tindakan tidak mengikuti, maka dapat dipastikan ada yang tidak beres dengan keyakinan, keinginan dan intensi. *Passion*, nafsu, dorongan buta (*drive*), kekeliruan kognitif adalah sekian dari banyak penyebab terganggunya penyebab efisien sebuah tindakan.

5. Rasionalitas tindakan harus bertolak dari inventori tujuan, keinginan, sasaran, target sang agen yang mana itu semua tidak terbuka bagi skrutinisasi rasional.

Untuk bertindak secara rasional, seorang agen pertama-tama harus memiliki seperangkat hal-hwal yang dia inginkan atau nilai dan rasionalitas instrumental bekerja semata-mata memikirkan bagaimana cara terbaik untuk merealisasikannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang hendak pergi ke kepulauan Riau dan memikirkan cara terbaik untuk sampai ke sana. Dia dapat memakai kapal laut atau pesawat terbang. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menggunakan pesawat terbang. Apabila ilustrasi di atas menggambarkan cara kerja rasionalitas instrumental, maka ada dua hal yang patut dicatat: Pertama, tidak akan ada alasan bagi sebuah tindakan yang tidak bertolak dari keinginan atau dengan kata lain tidak akan ada *desire-independent reason* bagi sebuah tindakan. Kedua, keinginan tersebut tidak dapat dievaluasi secara rasional.

6. Seluruh sistem rasionalitas bekerja dengan baik apabila seperangkat keinginan yang ada tidak mengalami inkonsistensi.

Keyakinan dan keinginan tidak dapat menjadi alasan sebuah tindakan, kecuali mereka konsisten satu sama lain. Mereka tidak boleh mengandung kontradiksi logis, konseptual maupun pragmatis. Misalnya, seorang berniat untuk pada satu waktu dan tempat tertentu bertindak spontan. Kontradiksi terjadi antara keinginan bertindak spontan dan keinginan untuk menentukan ruang dan waktu bagi tindakan tersebut.

Keenam asumsi model klasik rasionalitas tersebut menunjukkan betapa sempit rasionalitas tersebut sebenarnya. Pertama, rasionalitas hanya bekerja memilih sarana tanpa mempertanyakan tujuan yang dilayaninya. Kedua, irasionalitas direduksi pada ketidaktaatan pada aturan rasionalitas instrumental. Sementara, aturan atau prinsip itu sendiri tidak terbuka pada pemeriksaan rasional. Ketiga, rasionalitas bekerja dengan mengabaikan konteks sosial yang ada. Bahwasannya sebuah pertimbangan rasional senantiasa dilakukan dalam konteks sosial tertentu yang sedikit banyak mempengaruhinya.

IV.2 Rasionalitas Instrumental yang Diperluas

Rasionalitas instrumental mematok tindakan rasional sebagai tindakan memilih sarana yang paling tepat guna memaksimalkan tujuan. Seorang yang memilih jalan rusak, berlubang dan sepuluh kilometer lebih jauh dari biasanya untuk sampai ke kantor adalah tidak rasional. Seorang yang membuka halaman buku satu per satu untuk menemukan sebuah konsep adalah tidak rasional. Tindakan memilih jalan rusak dan membuka halaman satu per satu adalah tidak rasional berdasarkan kriteria maksimalisasi utilitas. Tujuan terpenuhi secara maksimal apabila seorang memilih jalan mulus dan pendek atau membuka halaman indeks. Singkat kata, rasionalitas instrumental adalah patokan mengenai rasional atau tidaknya sebuah tindakan. Rasionalitas instrumental adalah sebuah kriterium demarkasi.

Sebagai kriterium demarkasi, rasionalitas instrumental juga membatasi objek skrutinisasi rasionalitas manusia dalam bertindak. Rasionalitas instrumental membatasi skrutinisasi rasionalitas pada sarana guna memuaskan tujuan secara maksimal. Tujuan sendiri bukan objek skrutinisasi rasionalitas melainkan patokan yang mesti dilayani oleh pilihan sarana yang tepat. Alih-alih objek, tujuan malah menjadi subjek penentu rasionalitas tindakan.

Rasionalitas instrumental menuntut agen tidak hanya memiliki tujuan tetapi juga keyakinan tertentu mengenai alternatif yang ada dan kemungkinan hasil-hasilnya. Dalam hal ini rasionalitas instrumental berkuat dengan dimensi probabilitas hasil sebuah tindakan. Rasionalitas instrumental, karenanya, mematok tindakan rasional sebagai tindakan yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan (*expected utility*).

Rasionalitas instrumental menuntut agen untuk (a) menentukan tindakan apa saja yang mungkin (b) kemungkinan hasil-hasilnya (c) nilai subjektif (menggunakan angka arbitrer dari negative ke positif) setiap hasil. Agen kemudian mesti mengalikan nilai subjektif dari setiap hasil dengan probabilitas subjektif hasil yang ada dan menambah hasil-hasil tersebut untuk setiap alternatif tindakan.

Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pamela, seorang ahli bedah tengah menimbang dua opsi: bedah atau nonintervensi. Pamela meyakini bahwa bedah memiliki probabilitas 0.60 dalam menyembuhkan pasien, sebuah hasil yang dia nilai dengan angka 100. Namun, bedah juga memiliki probabilitas 0.40 dalam menyebabkan kematian pasien, hasil yang dia kuantifikasi secara negatif: - 75. Pamela juga berkeyakinan bahwa nonintervensi memiliki probabilitas 0.50 dalam menyembuhkan pasien (100) dan probabilitas 0.20 menyebabkan kematian (-75), dia juga berkeyakinan bahwa nonintervensi memiliki probabilitas 0.30 dalam menghasilkan kesembuhan parsial (30). Komputasi dari kedua opsi tersebut adalah sebagai berikut. Opsi bedah: $(0.60 \times 100) + (0.40 \times -75) = 30$, opsi nonintervensi: $(0.50 \times 100) + (0.20 \times -75) + (0.30 \times 30) = 44$. Rasionalitas instrumental, karenanya, mamatok tindakan rasional dalam hal ini adalah non intervensi (44).

Dari ilustrasi di atas, rasionalitas terlihat hanya berkuat pada sarana (probabilitas subjektif) bukan tujuan atau keinginan (utilitas subjektif). Probabilitas subjektif adalah keyakinan seseorang mengenai seberapa mungkin kenyataan yang diharapkan terjadi. Utilitas subjektif adalah seberapa besar keinginan seseorang atas terealisasi atau tidaknya suatu tujuan. Dalam kasus ahli bedah, tujuan sang ahli sangat jelas yakni menyelamatkan pasien atau menghindari kematian. Kualitas negatif pasti dilekatkan pada kematian pasien (-75). Namun demikian, apakah dengan begitu tujuan tidak perlu dipikirkan masak-masak? Misalnya, demi mempertahankan nyawa pasien sang dokter harus memasang perangkat pendukung kehidupan yang sangat mahal. Dalam kasus tersebut apakah dokter hanya memikirkan sarana belaka tanpa memeriksa tujuan mana yang harus dibela: efisiensi rumah sakit atau nyawa pasien.

Rasionalitas tindakan sesungguhnya memiliki dua dimensi: rasionalitas sarana dan rasionalitas tujuan. Yang pertama sering diidentikan dengan keyakinan (probabilitas subjektif) dan kedua, tujuan (utilitas subjektif). Carl Hempel berpendapat bahwa rasionalitas tindakan hanya perlu berfokus pada dimensi pertama: rasionalitas sarana. Hempel mengatakan:

If we wish to construct a concept of rational action that might later prove useful in explaining certain types of human behavior, then it seems preferable not to impose on it requirement of evidential support; for in order to explain an action in terms of the agent's reasons, we need to know what the agent believed, but necessarily on what grounds. We will not impose the requirement that there must be 'good reasons' for adopting the given ends and norms: rationality of an action will be understood in a strictly relative sense, as its suitability, judged by the given information, for achieving the specified objective. (Hempel, 1965, p.78)

Pikiran Hempel mengenai rasionalitas dapat disistematisir sebagai berikut:

- a. Tindakan rasional tidak memerlukan dukungan bukti-bukti terhadap keyakinan mengenai probabilitas tercapainya kenyataan yang diharapkan
- b. Tindakan rasional tidak memerlukan alasan yang masuk akal (*good reason*) untuk tujuan yang diinginkan.
- c. Rasionalitas sebuah tindakan dipahami sebagai kecocokannya (*suitability*), berdasarkan informasi yang tersedia, untuk mencapai tujuan spesifik.

Poin (c) menunjukkan betapa Hempel menautkan antara rasionalitas sarana dan tujuan yang diinginkan. Baginya, tindakan rasional adalah pilihan sarana yang cocok dengan tujuan yang diinginkan. Hanya saja, di sini Hempel tidak mempersoalkan rasionalitas atau alasan yang masuk akal dari tujuan itu sendiri. Hempel menegaskan bahwa tidak diperlukan alasan yang masuk akal bagi sebuah tujuan. Tujuan dibiarkan begitu saja tanpa diperiksa terlebih dahulu.

Kealpaan Hempel memeriksa rasionalitas tujuan, membuatnya gagal membedakan antara tujuan instrumental dan tujuan internal. Kita sering kali memiliki tujuan internal yakni tujuan pada dirinya yang menjadi kriterium untuk menghakimi tujuan instrumental. Tujuan internal dari belajar di institusi pendidikan formal adalah memperluas dan memperdalam pengetahuan bukan mengejar angka belaka (tujuan instrumental agar naik kelas atau lulus). Apabila suatu ketika seorang siswa menghalalkan segala cara demi memperoleh angka belaka maka tujuan internal sang siswa (memperdalam pengetahuan) dapat menjadi hakim bagi tujuan instrumentalnya (mendapat nilai A).

Berikut sebuah ilustrasi lain. Seorang ayah berkeinginan untuk berhemat (tujuan instrumental) agar anaknya dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (tujuan internal). Satu ketika sang ayah berpikir bahwa penghematan dapat dicapai dengan tidak membelikan buku bagi sang anak. Tujuan penghematan memang tercapai namun tujuan ultim sang ayah yakni meneruskan sang anak ke pendidikan yang lebih tinggi terabaikan. Sang ayah bertindak berdasarkan rasionalitas instrumental sempit yakni tidak membelikan buku sang anak. Dia tidak menggunakan rasionalitas instrumental yang diperluas yakni memikirkan betapa kerugian yang dialami sang anak dengan tidak memiliki buku melebihi keuntungan yang didapatkannya dari berhemat.

Berdasarkan perspektif rasionalitas instrumental yang diperluas, rasionalitas sebuah tindakan bukan semata menghasilkan kepuasan maksimal bagi si pelaku pada saat tertentu. Tujuan internal, dalam konteks yang terbatas, dapat berfungsi sebagai kriterium untuk menghakimi rasionalitas dari tujuan instrumental dan tindakan yang dihasilkannya.

Margareth Archer menegaskan bahwa manusia lebih dari sekadar promotor kepentingan pribadi-jangka pendek. Manusia adalah *homo sentients* yakni sosok yang mampu membuat komitmen moral terhadap tujuan-tujuan pada dirinya sendiri (*ends-in-itself*) (Archer, 2000, p. 53-54). Berdasarkan konsep tersebut, tidaklah cukup kita mengetahui bahwa agen menginginkan konsekuensi yang diharapkan. Kita juga perlu mengetahui nilai atau tujuan apa yang menjadi komitmennya. Saat seorang ibu mengasahi anaknya, misalnya. Dia tidak melakukannya sebagai investasi yang satu saat nanti dia akan tuai. Kasih ibu adalah sebetuk tujuan pada dirinya yang tidak merujuk pada tujuan lain.

Tujuan pada diri bukan semata ekstensi atau ekspresi kedirian kita. Itu pada dasarnya berakar pada yang sosial. Bentuk-bentuk relasi sosial yang mana seseorang berkomitmen penuh padanya (pernikahan, keluarga, karir, komunitas, dan lain sebagainya) bukan sarana melainkan konstituen pengembangan diri si agen. Kita tidak bertanya pada seseorang mengapa dia memberi kecupan pada sang pacar atau menolong teman yang berkesusahan. Semua tindakan itu

adalah ekspresi dari relasi sosial mereka dan bukan sebetulnya investasi jangka pendek atau menengah.

Komitmen moral yang tertanam dalam relasi sosial tidak berwatak kalkulatif maupun sosial. Komitmen moral terhadap tujuan pada dirinya bukan kalkulasi biaya-keuntungan. Itu juga tidak sepenuhnya didikte oleh yang sosial. Sebab, kita bertindak berdasarkan komitmen itu senantiasa beralaskan akal sehat. Adalah tidak rasional ketika seorang ibu mengekspresikan rasa cintanya dengan membelikan apa saja yang anaknya inginkan. Justru karena rasa cintanya yang besar, sang ibu mengajarkan sang anak untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebab itu, komitmen terhadap tujuan pada dirinya adalah sekaligus sosial dan rasional. Relasi kita terhadap orang lain adalah ekspresi siapa dan dari mana kita berasal.

Robert Audi membagi tindakan rasional menjadi *action-type* dan *action-token* (Audi, 1990, p.426). *Action-type* adalah tindakan rasional yang dilakukan tanpa mempertanyakan tujuan atau keinginan yang menjadi alasannya. Dengan kata lain ada keterputusan antara tindakan rasional dengan tujuan atau keinginan sebagai alasannya. *Action-token* adalah tindakan rasional yang dilakukan dengan mempertanyakan dengan sungguh-sungguh tujuan atau keinginan yang menjadi alasannya. Antara tindakan rasional dengan tujuan atau keinginan sebagai alasannya sungguh-sungguh ada relasi sebab-akibat yang rasional.

Berikut sebuah ilustrasi. Seorang bernama Yuni memiliki psikopatologis yakni takut pada ketinggian, sebuah ketakutan irasional. Pada satu saat dia ingin mengunjungi rumah temannya di belakang bukit. Dia memiliki dua opsi. Pertama adalah berjalan melintasi bukit yang berarti dia harus berhadapan dengan jurang dan tebing. Kedua adalah berjalan melewati jalan yang rusak dan berbahaya namun datar. Yuni, dapat ditebak, memilih opsi pertama. Ketika ditanya, dia berkilah, "alasan mengapa saya memilih jalan yang rusak dan berlubang adalah jalan itu lebih pendek daripada jalan di bukit."

Berdasarkan jawaban Yuni sekilas apa yang dia lakukan adalah rasional: memilih jalan yang lebih pendek. Namun, sesungguhnya apa yang dilakukannya

adalah sebuah *action type*, tindakan rasional yang menyembunyikan alasan sesungguhnya. Jawaban "jalan lebih pendek" adalah pembenaran bukan penjelasan. Jawaban itu tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan mengambil jalan non-bukit. Sebab, alasan sesungguhnya adalah untuk menghindari ketinggian yang dia takuti. Apa yang Yuni lakukan adalah *action-type* bukan *action-token*. Ini membuktikan bahwa tindakan rasional tidak cukup diukur hanya dengan rasionalitas sarana melainkan juga rasionalitas tujuan. Sebab, seperti ilustrasi di atas, seseorang dapat memilih sarana secara rasional namun karena alasan yang tidak rasional. Tujuan atau keinginan mau tidak mau harus terbuka terhadap pemeriksaan rasionalitas.

Pertanyaannya kemudian bagaimana tujuan atau keinginan dapat diperiksa secara rasional. Tujuan atau keinginan adalah sesuatu yang bersifat normatif. Ketika seorang mengatakan dia menginginkan lukisan tertentu dia sesungguhnya membuat keputusan nilai (*value-judgment*) terhadap lukisan tersebut. Di sisi lain, tradisi rasionalitas instrumental senantiasa berpijak pada adagium Hume bahwa yang normatif tidak terbuka terhadap skrutinisasi rasionalitas.

Persoalannya, apakah benar sebuah keputusan nilai tidak dapat diperiksa secara rasional? Kita ambil contoh seorang kritikus seni. Ketika dia membuat esei tentang pameran lukisan seorang pelukis dia tidak sedang memamerkan selera pribadinya. Apa yang dia tulis adalah argumentasi rasional mengapa lukisan yang dipamerkan bermutu tinggi. Dia mempertanggungjawabkan keputusan nilainya secara rasional kepada publik. Oleh karena itu polemik dapat terjadi. Apabila dia menutup esainya dengan mengatakan bahwa pendapatnya adalah selera pribadi semata, maka diskusi tidak dapat berlangsung. Sebab, itu adalah relativitas estetis yang tak dapat dipergunjingkan.

Keinginan atau tujuan sebagai keputusan nilai (*value judgment*) adalah elemen motivasi dalam tindakan yang mesti dapat diperiksa secara rasional. Rasionalitas elemen motivasi dalam tindakan sama dengan keterjustifikasian (*well-groundedness*) sebuah keyakinan. Kita yakin bahwa sapu tangan di atas meja berwarna merah karena kita mengalami pengalaman perseptual langsung.

Kita yakin bahwa kita sedang berpikir sebab penyangkalan terhadap kegiatan berpikir justru merupakan afirmasi. Keterjustifikasian (*well-groundedness*) sebuah keyakinan juga dapat bersifat tidak langsung. Sebuah keyakinan terjustifikasi oleh keyakinan lain yang terjustifikasi langsung. Saya yakin bahwa sapu tangan putih di meja itu luntur karena saya meyakini langsung bahwa tadinya berwarna kuning.

Pemeriksaan rasional terhadap elemen motivasi dalam tindakan terbagi dua: (a) rasionalitas instrinsik dan (b) rasionalitas ekstrinsik (Audi, 1990, p.434). Kita mulai dengan rasionalitas instrinsik. Pertama adalah justifikasi kognitif. Seorang, misalnya, meyakini bahwa sebuah lukisan sangat bernilai, memperkaya indera, menyenangkan dan indah. Properti-properti tersebut adalah *desirability characteristics* karena berkat mereka lah suatu kenyataan diklaim sebagai bernilai. Properti-properti yang mana sebuah keyakinan mendasarkan diri padanya bersifat kognitif. Sebab, tanpa kemampuan kognitif yang cukup seseorang tak dapat mengonseptualisasikan properti seperti indah, menyenangkan, berharga, membuka wawasan dan lain sebagainya. Kita tentu saja tidak dapat mempercayai begitu saja seorang anak kecil yang tiba-tiba berkata "betapa agungnya!" di hadapan lukisan monalisa. Singkatnya, rasionalitas instrinsik elemen motivasi tindakan didasarkan pada keyakinan atas keberadaan *desirability characteristics* pada suatu kenyataan.

Kedua adalah justifikasi eksperensial. Berbeda dengan justifikasi kognitif, justifikasi eksperensial tidak memerlukan mediasi keyakinan atas keberadaan *desirability characteristics* pada suatu kenyataan. Justifikasi eksperensial bersifat serta-merta. Seseorang yang mengamati lukisan menemukan *desirability characteristics* pada pengamatan itu sendiri. Dia mengalami persepsi tentang keseimbangan, kontras warna, ketegasan garis dan lain sebagainya. Dia tidak menyusun keyakinan tentang keberadaan *desirability characteristics* pada lukisan untuk mendasarkan penilaiannya. Penilaiannya terhadap lukisan didasarkan pada pengalaman langsung bukan keyakinan adanya *desirability characteristics*.

Baik justifikasi kognitif maupun eksperiensial membuktikan bahwa sebuah keputusan nilai tidak didasarkan pada selera semata melainkan rasionalitas. Rasionalitas sebuah keputusan mensyaratkan tiga hal: subjek, objek dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang melihat lukisan, misalnya. Lukisan menyebabkan keyakinan pada orang tersebut tentang keberadaan *desirability characteristics*. Keyakinan itu pada gilirannya mendasari penilaian orang tersebut terhadap lukisan. Penilaian, dalam konteks justifikasi eksperiensial, disebabkan oleh kualitas-kualitas tertentu pada pengalaman mengamati lukisan tanpa mediasi keyakinan bahwa lukisan itu memiliki kualitas-kualitas tersebut.

Selain rasionalitas instrinsik, elemen motivasi tindakan juga dapat diperiksa oleh rasionalitas ekstrinsik. Rasionalitas ekstrinsik elemen motivasi tindakan adalah rasionalitas yang ditransmisikan dari penilaian instrinsik yang terjustifikasi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seseorang memiliki penilaian instrinsik terhadap permainan piano seorang pianis. Dia menilai bahwa sang pianis memainkan piano dengan sangat baik. Sang pengamat juga yakin bahwa permainan luar biasa sang pianis disebabkan oleh kecakapan pianis memadukan nada. Penilaian sang pengamat terhadap kecakapan pianis memainkan nada bersifat ekstrinsik karena kecakapan itu bernilai sejauh menghasilkan permainan piano yang luar biasa.

Transmisi rasionalitas dari penilaian instrinsik ke penilaian ekstrinsik berlaku apabila: (a) penilaian ekstrinsik bergantung sepenuhnya pada penilaian instrinsik. (b) sang pengamat secara terjustifikasi meyakini bahwa kecakapan memadukan nada membuat permainan sang pianis begitu luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk keinginan instrinsik dan ekstrinsik. Misalnya, seseorang lulusan SMU yang menginginkan kepandaian pasti menginginkan diterima perguruan tinggi kelas dunia. Keinginan ekstrinsik (diterima di perguruan tinggi kelas dunia) bergantung sepenuhnya pada keinginan instrinsik (kepandaian). Si lulusan SMU secara terjustifikasi meyakini bahwa diterima di perguruan tinggi kelas dunia akan menganugerahinya kepandaian.

IV.3 Elster: Teori Tebal Rasionalitas Tindakan

Donald Davidson mengemukakan bahwa tindakan rasional adalah tindakan yang berkaitan erat dengan keyakinan dan keinginan seorang agen. Rumusan ini sudah menjadi semacam adagium umum dalam teori tindakan. Sebagai salah satu teoretikus tindakan Jon Elster pun mengiyakan rumusan itu. Hanya saja, Elster mengategorikannya ke dalam teori tipis rasionalitas tindakan. Teori tipis menekankan bahwa keyakinan dan keinginan tertutup bagi pemeriksaan rasional. Di sisi lain, Elster mengemukakan tentang teori tebal rasionalitas tindakan. Teori tebal menegaskan bahwa rasionalitas sebuah tindakan lebih dari sekadar konsistensi tindakan berdasarkan keyakinan dan keinginan tertentu. Teori tebal menuntut agar keyakinan dan keinginan terbuka terhadap pemeriksaan rasional.

Rumusan Davidson mengenai tindakan rasional dapat dibagi menjadi tiga klausa pokok: Pertama, alasan adalah sungguh-sungguh alasan bagi sebuah tindakan. Kedua, alasan yang ada memang menyebabkan tindakan. Ketiga, alasan menyebabkan tindakan dengan cara yang benar.

Elster mengategorikan tiga klausa Davidson di atas sebagai tuntutan konsistensi sebuah tindakan rasional (Elster, 1996, p. 3). Sebuah tuntutan yang biasa diajukan dalam teori tipis rasionalitas tindakan. Teori tipis rasionalitas tindakan menuntut agar tindakan konsisten dengan keyakinan dan keinginan sang agen. Teori tipis menegaskan bahwa sebuah alasan, menimbang keyakinan yang ada, adalah alasan tindakan rasional jika dan hanya jika tindakan tersebut adalah cara terbaik untuk merealisasikan keinginan agen.

Persoalannya, teori tipis tidak membuka keyakinan dan keinginan terhadap pemeriksaan rasional. Sehingga, selalu ada kemungkinan adanya beberapa opsi tindakan yang setara dalam memaksimalkan utilitas. Jika seseorang meyakini bahwa menusuk boneka temannya adalah cara terbaik untuk membunuhnya maka dia bertindak rasional apabila menusukkan jarum ke boneka. Keinginan dan keyakinan tersebut sama sekali tidak diperiksa secara rasional.

Klausula kedua rumusan Davidson dibutuhkan untuk mengenyampingkan kebetulan-kebetulan dari kelas pertama (*coincidences of the first class*). Misalnya, seseorang memiliki alasan kuat untuk bertindak A namun dia ternyata bertindak berdasarkan alasan lain. Seseorang dapat saja bertindak secara kebetulan namun ternyata mendapatkan alasan kuat untuknya. Ilustrasi, seorang dosen tadinya ingin mendisiplinkan anak didiknya dengan mengadakan ujian mendadak dari waktu ke waktu. Namun, ketika kemudian ditanya sang dosen menjawab bahwa alasan dia mengadakan ujian mendadak adalah untuk membuat anak didik takut padanya.

Klausula ketiga rumusan Davidson mengesampingkan kebetulan-kebetulan dari kelas kedua. Sebuah alasan memang menyebabkan tindakan tertentu namun dengan cara yang salah. Ilustrasi, seseorang pembunuh bayaran ingin membunuh targetnya dengan cara menembak dari jarak jauh. Namun, tembakannya ternyata meleset mengenai papan iklan. Papan iklan tersebut lantas jatuh mengenai sang target yang kemudian terbunuh karenanya. Di sini jelas bahwa sang pembunuh bayaran tidak secara langsung membunuh targetnya. Alasan sang pembunuh menyebabkan kematian targetnya tidak melalui cara yang benar (menembak langsung sang target).

Untuk menjadi alasan sebuah tindakan rasional, keyakinan dan keinginan harus memenuhi kriteria konsistensi. Seperangkat keyakinan adalah konsisten apabila terdapat dunia yang mungkin yang mana semua mereka benar, atau jika tidak mungkin disimpulkan berbagai kontradiksi dari mereka. Seorang matematikawan yang terkenal rasional satu ketika ditanya, "mengapa Anda menggantung kaki kucing di pintu rumah, apakah Anda percaya bahwa kaki kucing membawa keberuntungan?", Sang matematikawan menjawab, "saya tidak percaya, tetapi saya diberitahu bahwa kaki kucing membawa keberuntungan bahkan bagi mereka yang tidak percaya." Berdasarkan jawaban tersebut, sang matematikawan memiliki dua keyakinan yang bertolakbelakang. Pertama, sang matematikawan meyakini: "kaki kucing tidak akan membawa keberuntungan bagi saya". Kedua, sang matematikawan meyakini: "kaki kucing membawa keberuntungan bagi mereka yang tidak percaya". Dengan kata lain, keyakinan

sang matematikawan gagal memenuhi kriteria konsistensi karena kita dapat menyimpulkan kontradiksi darinya.

Sebelum merumuskan kriteria konsistensi terhadap keinginan atau preferensi, kita terlebih dahulu harus memeriksa kodrat sebuah tindakan rasional. Tindakan rasional dapat dibedakan antara tindakan yang dilakukan berdasarkan preferensi dan tindakan berdasarkan rencana. Ketika saya mengambil apel dari piring, saya tidak menghasilkan sebuah proses kausal pada realitas eksternal. Saya sekadar menggerakkan tangan untuk mengambil apel yang tergeletak di piring. Tindakan mengambil apel di piring disebabkan oleh preferensi saya terhadap apel tersebut, tidak lebih. Sebaliknya, ketika saya memecahkan kaca dengan melemparnya dengan batu, saya menciptakan proses kausal yang independen. Saya menghasilkan sebuah peristiwa (kaca pecah) yang secara kausal berhubungan dengan lemparan batu.

Tindakan pertama adalah tindakan yang didasarkan pada preferensi. Tidak perlu ada penjelasan mengenai sebuah perencanaan. Misalnya, saya mengambil apel untuk menghasilkan atau memaksimalkan sensasi tertentu di organ pencecap saya. Sementara, tindakan kedua melibatkan perencanaan. Saya memiliki rencana untuk memecahkan kaca dan meyakini bahwa batu adalah sarana paling tepat dari sekian opsi untuk merealisasinya. Memilih batu atau sepatu adalah tipe tindakan yang berbeda dari memilih apel atau jeruk. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kriteria konsistensi bagi tindakan berbasis preferensi dan rencana.

Kriteria konsistensi bagi preferensi minimal melibatkan apa yang disebut sebagai prinsip transitivitas. Apabila seorang memilih a ketimbang b dan b ketimbang c maka dia harus memilih a ketimbang c. Preferensi dapat didefinisikan dalam konteks pertarungan, yakni probabilitas kemungkinan opsi-opsi. Prinsip dominasi (*dominance principle*) berbunyi: "jika seorang memilih a ketimbang b dan $p > q$ maka seorang secara rasional harus memilih opsi a dengan probabilitas p dan b dengan probabilitas (1-p) daripada opsi a dengan probabilitas q dan b dengan probabilitas (1-q).

Preferensi juga dapat didefinisikan sebagai satu urutan opsi-opsi. Kita mengenal istilah *time preference* untuk menunjukkan prioritas preferensi pada satu titik waktu tertentu di banding pelbagai titik waktu lain. Seorang lebih suka mendapat untung kecil dalam jangka pendek (T1) daripada untung besar dalam jangka panjang (T2). Ini adalah apa yang dikenal sebagai fenomena *time discounting*. *Time discounting* adalah sebetuk irasionalitas berdasarkan dua ukuran: ketidaksabaran dan inkonsistensi. Seorang agen meyakini bahwa lebih baik menunggu agak lama tetapi hasil yang diperoleh lebih besar. Namun ia memilih hasil lebih kecil tetapi diperoleh dalam waktu relatif singkat. Si agen melakukan *time discounting* yang disebabkan oleh ketidaksabarannya.

Kriteria konsistensi terhadap time preferensi dipenuhi apabila: sebuah rencana yang dibuat pada waktu T1 untuk alokasi konsumsi antara waktu T2 dan T3 harus tetap bertahan saat T2 datang. Ini mengandaikan ketiadaan perubahan kepribadian atau perubahan pada perangkat opsi yang ada. Seorang yang berencana (T1) akan memilih menikahi A (T2) disebut inkonsisten apabila pada T2 dia memilih menikahi B.

Semua syarat di atas adalah syarat yang diajukan oleh teori tipis terhadap tindakan rasional. Teori tipis menuntut agar tindakan agen senantiasa konsisten dengan keyakinan dan keinginannya. Sebaliknya, teori tebal rasionalitas tindakan tidak sekadar berpegangan pada konsistensi antara keyakinan, keinginan dan tindakan. Bagi teori tebal, tindakan disebut rasional apabila keyakinan dan keinginan agen terbuka terhadap pemeriksaan rasional.

We need a broader theory of rationality that goes beyond the exclusively formal considerations, and that allows scrutiny of the substantive nature of the desires and beliefs involved in action. We want to be able to say that acting rationally means acting consistently on beliefs and desires that are not only consistent, but also rational
(Elster, 1996, p. 15)

Keyakinan kita sangat rentan terhadap irasionalitas. Pertama adalah apa yang disebut sebagai *wishful thinking*. *Wishful thinking* terjadi saat keyakinan didikte sepenuhnya oleh keinginan. Keinginan yang begitu kuat untuk

mendapatkan penghargaan tertentu, misalnya. Keinginan tersebut membuat seorang begitu yakin bahwa panitia telah melakukan kecurangan ketika namanya tidak terpilih. Kedua adalah kekeliruan penyimpulan (*inferential error*). Kekeliruan penyimpulan terjadi akibat aparatus kognitif yang tidak bekerja dengan baik. Misalnya, seorang kemungkinan besar anggota DPR dan dia hampir tidak mungkin melakukan korupsi. Kesimpulan yang didapatkan adalah dia adalah anggota DPR yang memiliki kemungkinan, meski tidak besar, untuk korupsi. Probabilitas keanggotaan seseorang di DPR (+) dan melakukan korupsi (-) di atas mengalami penjumlahan bukan multiplikasi.

Keyakinan tidak dapat dipastikan begitu saja sebagai rasional tanpa memeriksa bukti, kisah kausal dan keputusan agen. Pertama, keyakinan harus senantiasa didasarkan pada bukti yang menguatkan. Persoalannya, sering kalkulasi untung-rugi dikenakan pada aktivitas pencarian bukti. Dari sudut pandang kalkulasi untung-rugi, pencarian bukti harus memenuhi tuntutan optimalitas. Sebuah aktivitas pencarian bukti disebut optimal apabila jumlah total biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk mencari bukti tidak melebihi keuntungan yang didapatkan dari bukti tersebut. Akibatnya, alih-alih mengeluarkan lebih banyak biaya dan waktu untuk menemukan bukti bahwa produk makanan tertentu membahayakan kesehatan, produsen produk tersebut serta merta menyatakannya aman.

Kedua, rasionalitas keyakinan ditentukan juga oleh kisah kausal yang menghasilkan keyakinan. Sebab, sering seseorang melalui rute yang tidak rasional sampai pada satu keyakinan yang kebetulan memiliki bukti-bukti yang kuat. Misalnya, seorang perempuan meyakini kekasihnya selingkuh hanya karena melihat sang kekasih duduk berdua dengan perempuan lain. Keyakinan sang perempuan kebetulan memang berdasar ketika kemudian ditemukan bukti-bukti yang menguatkan. Namun, kisah kausal yang menghasilkan keyakinan tersebut tidak sah secara logis. Premis duduk berduaan tidak memiliki hubungan logis dengan kesimpulan selingkuh.

Ketiga, rasionalitas keyakinan ditentukan oleh pengambilan keputusan (*judgment*). Pengambilan keputusan dimengerti sebagai kapasitas untuk

mensitesakan informasi yang begitu banyak dan beranekaragam untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perempuan yang memutuskan hubungannya dengan sang kekasih hanya karena informasi "duduk berduaan" tidak mempertontonkan pengambilan keputusan yang baik. Contoh lainnya adalah seorang pialang saham yang memutuskan untuk menjual saham hanya karena informasi yang masih kabur mengenai turunnya dana talangan pemerintah. Pengambilan keputusan adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam rasionalitas keyakinan.

Teori tebal juga menuntut pemeriksaan rasional terhadap keinginan. Keinginan tidak dapat didikte begitu saja oleh dorongan buta, ketaksadaran, dan lain sebagainya. Rasionalitas keinginan dijejakkan pada gagasan mengenai otonomi. Keinginan yang otonom adalah keinginan yang dipilih, diperoleh atau diubah dengan sengaja, apakah melalui kehendak atau proses perencanaan karakter (*character planning*).

Rumusan di atas memiliki dua kekurangan. Pertama, rumusan di atas terlalu lemah. Disebut demikian karena keinginan kedua yang menyebabkan keinginan yang ada (*second order desire*) juga rentan terhadap pengaruh-pengaruh kausal yang tidak relevan. Kedua, rumusan tersebut dapat juga terlalu kuat sehingga mengesampingkan keinginan yang tidak direncanakan atau spontan.

Sebagian orang juga sering mencampuradukkan antara pengertian keinginan otonom dengan keinginan etis. Padahal, otonomisasi keinginan tidak ada sangkut pautnya dengan moralitas. Untuk melihat perbedaan tersebut, kita mesti membedakan antara konformitas (*conformity*) dan konformisme (*conformism*). Konformitas adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh perilaku orang lain. Misalnya, seorang menghormat pada bendera karena orang lain juga melakukannya. Konformisme adalah perilaku orang lain mempengaruhi deskripsi objek keinginan seseorang. Misalnya, bendera dideskripsikan sebagai bernilai dan layak dihormati karena orang lain menghormatinya.

Seorang disebut memiliki keinginan otonom apabila dia memiliki keinginan atau preferensi yang bersifat nonkonformis. Seorang mendeskripsikan bendera

sebagai bernilai dan layak dihormati bukan karena orang lain menghormatinya. Seorang disebut tidak otonom apabila bertindak etis semata karena dia sepanjang waktu didukung oleh lingkungan yang menanamkan padanya keinginan yang etis. Tindakan moral yang otonom adalah kapasitas untuk bertindak moral bahkan di dalam lingkungan yang tidak bermoral.

Irasionalitas sebuah keinginan dapat disebabkan oleh proses kognitif yang keliru atau pengaruh yang berlebihan dari dorongan buta¹ (*drive*). Contoh irasionalitas keinginan yang disebabkan oleh dorongan buta adalah formasi keinginan yang adaptif (*adaptive preference formation*). Formasi keinginan yang adaptif adalah penyesuaian keinginan terhadap kemungkinan. Misalnya, seorang mengubah preferensinya terhadap anggur yang menggantung karena terlalu tinggi untuk dicapai. Penyesuaian tersebut tidak didasarkan pada kesengajaan atau deliberasi melainkan dorongan buta untuk mereduksi ketegangan atau frustrasi yang dirasakan akibat memiliki keinginan yang tidak mungkin dicapai.

Irasionalitas keinginan yang disebabkan oleh proses kognitif yang keliru disebut sebagai perubahan preferensi oleh rekayasa (*preference change by framing*). Perubahan preferensi oleh rekayasa terjadi ketika preferensi seseorang berubah tatkala situasi pilihan direkayasa ulang yang secara rasional sesungguhnya sama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang konsumen berkenan mengeluarkan biaya tambahan (X) dari harga mobil (Y) untuk perangkat audio. Namun, ketika biaya tambahan itu (X) dikenakan setelah ia membeli mobil tersebut seharga Y, sang konsumen tidak berkenan. Perubahan keinginan atau preferensi sang konsumen tidak rasional karena sesungguhnya harga yang mesti dia bayarkan sama yakni (X+Y).

IV.4 Elster: Rasionalitas Konstrain

Elster meyakini bahwa preferensi atau keinginan tidak dapat dibiarkan tanpa skrutinisasi rasionalitas. Preferensi seperti sudah dijelaskan sangat rentan

¹ dorongan buta (*drive*) adalah dorongan tak sadar yang membentuk atau memengaruhi keinginan namun pada dirinya bukan merupakan keinginan. Dorongan buta dibedakan dengan keinginan sebab melulu mencari kenikmatan jangka pendek sementara keinginan sadar dapat mengorbankan kenikmatan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang.

terhadap pengaruh dorongan buta (*drive*) dan ketidakmemadaiannya piranti kognitif manusia². Selain kedua distorsi tersebut, Elster mengemukakan empat distorsi lain terhadap preferensi yang diakibatkan oleh *passion* (Elster, 2000, p.8-11). Keempat distorsi tersebut antara lain:

(1) *passion* mendistorsi pikiran kita tentang konsekuensi yang akan dihasilkan. Seorang pengemudi menginginkan dua gelas minuman beralkohol saja karena dia akan mengemudi setelahnya. Namun, ketika dia tidak menolak ketika ditawarkan gelas ketiga. Hal itu dikarenakan *passion* terhadap minuman mendistorsi keinginan awalnya yakni dua gelas minuman yang tidak memabukkan. Meski bukti ilmiah menetapkan bahwa tiga gelas minuman beralkohol akan membuat seseorang mabuk, sang pengemudi tidak mengindahkannya.

(2) *passion* melemahkan kehendak kita dengan menganulir pertimbangan rasional saat kejadian. Sebelum seseorang bertemu dengan sang musuh di sebuah pesta, dia menginginkan agar dirinya nanti tetap tenang untuk menjaga perasaan tuan rumah. Namun, begitu dia bertatap muka dengan sang musuh, pertimbangan rasional yang dibuatnya lenyap dan dia langsung melabraknya.

(3) *passion* mendorong seseorang untuk bertindak bertentangan dengan keputusan rasionalnya. Ketika si pengemudi ditawarkan gelas ketiga, dia menerimanya meski pada saat yang sama berpikir bahwa dia tidak boleh minum lagi. Alasan rasional untuk menolak bisa jadi lebih kuat daripada alasan kuat untuk menerima. Namun, alasan menerima berdampak langsung terhadap kenikmatan fisik dan psikis.

(4) *passion* membuat seseorang menimbang akibat dari perbuatannya secara berbeda dengan pertimbangan yang dibuat dalam kondisi tenang. Si pengemudi memiliki keyakinan ilmiah tentang hubungan antara minuman beralkohol dengan kecelakaan lalu lintas. Hanya saja, *passion* membuatnya menimbang bahwa

² Paul Ricoeur dalam bukunya *Fallible Man* berargumen bahwa terdapat kesenjangan antara dimensi terbatas dan tak terbatas seorang manusia. Kesenjangan ini ditunjukkan melalui celah antara manusia yang spasio-temporal (bios) dan kapasitas rasional manusia yang mampu menangkap yang serba umum (logos). Kesenjangan ini memanifestasikan dirinya dalam persepsi, pikiran, ujaran dan tindakan. Berkat kesenjangan tersebut, manusia tidak pernah sepenuhnya berdamai dengan dirinya. Dengan kata lain, manusia dapat berbuat salah. Manusia adalah falibilitas.

hubungan antara keduanya terlalu dilebih-lebihkan dan dia yakin bahwa dirinya dapat tetap menjaga konsentrasi ketika mengemudi.

(5) *passion* membuat orang melakukan *time discounting*. *Time discounting* terjadi saat seseorang mengorbankan keuntungan besar jangka panjang demi keuntungan kecil namun jangka pendek. Seseorang diberikan dua opsi: menemui sang pacar selama sepuluh menit hari ini atau menemuinya selama satu jam besok. Dia, berdasarkan *time discounting*, akan memilih opsi pertama. Dia mengorbankan keuntungan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek yang lebih kecil.

Seorang dapat terhindar dari berbagai distorsi dari *passion* apabila dia dapat menghasilkan keinginan kedua (*second order desire*). Keinginan kedua bekerja membatasi atau menolak keinginan pertama (*first order desire*) seseorang yang diakibatkan oleh pengaruh *passion*. Ketika seseorang menginginkan untuk minum *whiskey*, pada saat yang sama dia membuat keinginan kedua yakni keinginan untuk tidak menginginkan *whiskey*.

Persoalannya, orang tidak dapat bergantung pada keinginan kedua untuk membatasi keinginan irasionalnya. Sebab, tidak ada yang menjamin bahwa *passion*, dorongan buta, kekeliruan kognitif tidak akan mendistorsi keinginan kedua saat dibutuhkan. Elster berpendapat bahwa keinginan irasional harus dibatasi oleh rasionalitas. Untuk itu, rasionalitas harus bekerja untuk mengikat preferensi guna mencegahnya dari perubahan yang merugikan. Rasionalitas ini berlandaskan asumsi bahwa preferensi individu yang sudah ditimbang masak-masak dapat berubah akibat *passion* atau pergerakan waktu belaka.

Precommitment embodies a certain form of rationality over time. At time 1 an individual wants to do A at time 2, but anticipates that when time 2 arrives he may or will do B unless prevented from doing so. In such cases, rational behavior at time 1 may involve precautionary measures to prevent the choice B at time 2, or at least to make that choice less likely
(Elster, 2000, p. 5)

Rasionalitas konstrain menghasilkan strategi pra-komitmen yang mencegah preferensi rasional seorang berubah saat tiba waktu memutuskan. Strategi pra-komitmen memuat rasionalitas berdimensi waktu. Pada saat T1 seorang berencana melakukan A pada T2, namun mengantisipasi apabila saat itu tiba (T2) dia akan melakukan B kecuali dicegah untuk melakukannya. Rasionalitas konstrain pada T1 merumuskan langkah-langkah pencegahan untuk menisbikan pilihan B pada T2.

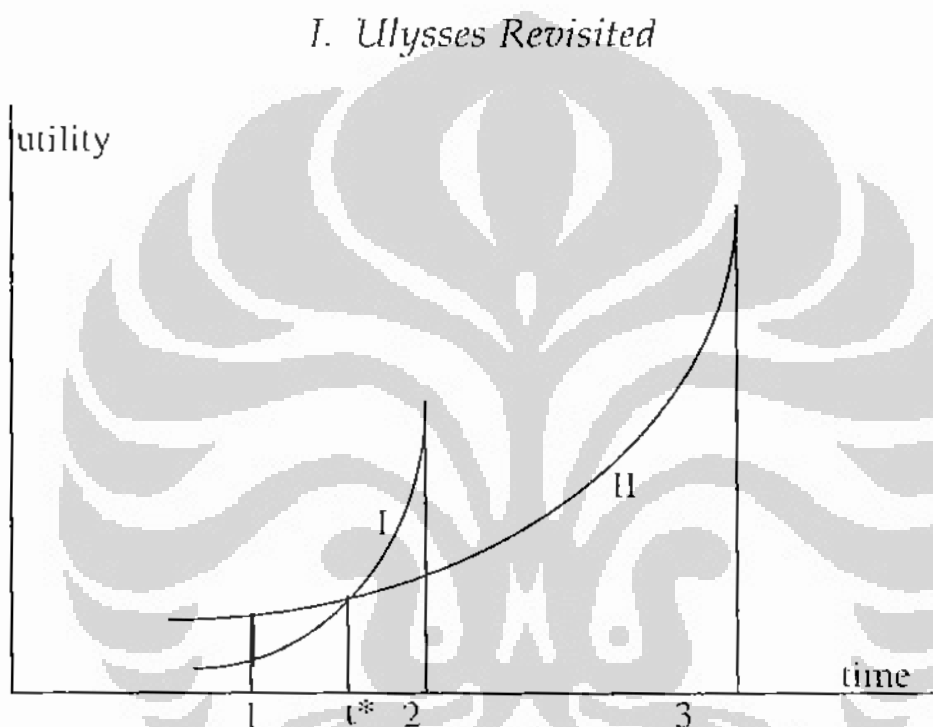
Perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang baru keluar dari klinik rehabilitasi pecandu alkohol. Dia bersumpah bahwa dirinya tidak akan menyentuh alkohol lagi. Namun, dia tidak percaya bahwa dirinya tidak akan tergoda selamanya. Untuk itu, rasionalitas konstrain membuatnya memutuskan untuk menyimpan minuman beralkohol di kotak besi yang kuncinya ditiptkan di rumah temannya. Rumah sang teman tersebut berjarak 30 km dari rumahnya. Sang bekas pecandu memberikan waktu tunda yang panjang apabila dirinya ingin mengambil alkohol. Dia harus pergi ke rumah sang teman dan itu menghabiskan waktu dan ongkos. Biaya itu masuk dalam perhitungannya ketika godaan datang menghampiri dirinya.

Di satu sisi, preferensi seseorang dapat berubah semata karena berlalunya waktu. Di sisi lain, preferensi seseorang berubah ketika seorang mendiskon waktu (*time discounting*) secara hiperbolik³. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang berencana mengeluarkan dana tanggung jawab sosialnya dapat berubah dan memutuskan untuk mengejar laba jangka pendek. Seseorang memutuskan mulai tahun depan akan mendistribusikan setengah kekayaannya dalam jumlah yang sama sepanjang sisa hidupnya. Namun, pada awal tahun kedua dirinya memutuskan untuk mengalokasikan 75% dari setengah kekayaannya pada tahun itu dan mengalokasikan sisanya sebanyak 25 % sepanjang sisa hidupnya. Perhatikan kurva di bawah ini:

³ Pendiskonan waktu secara hiperbolik (*hyperbolic time discounting*) dibedakan dengan pendiskonan eksponensial (*exponential time disc.*). Pendiskonan waktu secara eksponensial tidak mengubah preferensi yang sudah diputuskan dari waktu ke waktu. Apabila A memutuskan untuk memilih keuntungan kecil jangka pendek maka seterusnya tidak akan berubah. Sebaliknya, pendiskonan waktu hiperbolik berdasarkan asumsi bahwa preferensi orang berubah dan oleh karenanya rasionalitas konstrain dalam merumuskan strategi pra-komitmen diperlukan.

Kurva 1

Time Discounting



Sumber: (Elster, 2000, p. 30)

Pada T_1 seorang memiliki pilihan antara keuntungan kecil pada T_2 atau keuntungan lebih besar pada T_3 . Kurva di atas menunjukkan bagaimana keuntungan jangka panjang didiskon secara hiperbolik. Sebelum t^* ketika nilai kurva keuntungan lebih besar (kurva I) di atas nilai kurva keuntungan kecil (kurva II), orang tersebut memilih keuntungan lebih besar. Namun, setelah t^* nilai kurva keuntungan kecil berada di atas nilai kurva keuntungan lebih besar. Pada T_2 , dia pun memilih keuntungan kecil.

Rasionalitas konstrain bekerja guna mencegah perubahan preferensi akibat pendiskonan waktu secara hiperbolik. Rasionalitas konstrain, dalam hal

ini, menggariskan empat strategi pra-komitmen sebagai berikut (Elster, 2000, p. 31):

1. Membuat pilihan keuntungan kecil jangka pendek secara fisik tidak mungkin, sehingga seorang tidak bisa tidak akan memilih keuntungan lebih besar jangka panjang. Ilustrasi, seorang memiliki tabungan sebesar 100 juta dan dia tergoda untuk membeli mobil seharga sama. Untuk menghindari godaan, dia mendepositokan uangnya sehingga mustahil mengambil uangnya sebelum waktu yang ditentukan. Kalaupun nanti uangnya sudah dapat diambil, harga mobil sudah naik sehingga tak terbeli.
2. Mengenakan biaya yang sangat tinggi pada pilihan keuntungan kecil, sehingga kurva I akan bergeser turun dan sepenuhnya berada di bawah kurva II. Keuntungan lebih besar akan senantiasa menjadi pilihan dan akan juga dipilih pada T2. Ilustrasi, seorang cemas kalau dia akan membelanjakan uangnya secara berlebihan. Dia kemudian membuang kartu ATM-nya tetapi tetap menyimpan kartu kredit yang mengenakan biaya administrasi 5% setiap kali transaksi.
3. Memberikan hadiah yang begitu besar bagi pilihan keuntungan lebih besar sehingga kurva II bergeser ke atas dan sepenuhnya berada di atas kurva I. Seperti strategi sebelumnya, strategi ini akan membuat keuntungan lebih besar senantiasa menjadi pilihan. Ilustrasi, seorang meminta pinjaman bank namun menandatangani kontrak bahwa uang hanya dicairkan apabila dirinya memakainya untuk modal usaha dan bukan konsumsi.
4. mengenakan waktu tunda yang cukup lama antara waktu memilih dan waktu memperoleh keuntungan. Kurva I bergeser ke kanan sehingga nilai keuntungan lebih kecil pada T2 menjadi lebih kecil daripada nilai keuntungan lebih besar. Ilustrasi, seorang memutuskan untuk tidak memiliki ATM dan menghapuskan fungsi penarikan langsung dari kartu kreditnya. Dia hanya dapat menarik uang tunai dengan pergi ke bank

pada jam kerja. Dengan kata lain, terdapat waktu tunda yang cukup lama antara keputusan untuk menarik uang dengan cairnya uang.

IV.5 Habermas: Rasionalitas Komunikatif

Pikiran Jurgen Habermas adalah kelanjutan dari tradisi panjang teori kritis yang dikembangkan sekolah Frankfurt (*Frankfurt Schule*). Tokoh sekolah Frankfurt awal seperti Horkheimer sangat kritis terhadap keseimbangan antara antara modernitas dan rasionalisasi di setiap aspek kehidupan. Apalagi bentuk rasionalitas yang mendominasi adalah rasionalitas instrumental. Paradigma rasionalitas jenis ini memiliki andil luar biasa dalam hilangnya makna dan kebebasan manusia modern.

Teori kritis bukan teori yang solid. Itu lebih merupakan rumpun teori-teori yang kritis terhadap modernisasi. Namun, terdapat benang merah yang mengikat kritisisme teori-teori tersebut. Teori kritis menemukan sebetulnya persoalan yang mengeram di dalam paradigma rasionalitas instrumental. Rasionalitas ini, bagi teori kritis, tidak dapat menjelaskan mengapa satu tujuan atau keinginan dipromosikan kecuali itu memaksimalkan utilitas. Sementara, maksimalisasi utilitas dapat berbenturan dengan berbagai skema nilai yang ada. Upaya sebuah perusahaan menambah produksi dengan membeli mesin yang tidak ramah lingkungan adalah upaya maksimalisasi utilitas. Namun, upaya tersebut berbenturan dengan hak masyarakat sekitar terhadap lingkungan yang bersih.

Dengan kata lain, rasionalitas adalah pedang dengan dua sisi tajam. Sisi tajam pertama memotong mitos, tradisi dan keyakinan kolot yang menghalangi masyarakat dari kemajuan. Sisi tajam lainnya memotong segala pertimbangan di luar maksimalisasi utilitas dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, kemajuan yang begitu cepat dan masif pada masyarakat modern dihantui oleh kemungkinan katastrofi. Saat ini, kemajuan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya, dituding memiliki peran sempurna dalam pemanasan global.

Critical theorists were zealous critics of modernity, claiming that it was not synonymous with unqualified human progress; and indeed that were clear signs of the opposite effect.

Horkheimer and Adorno eventually hypothesized that rationalization was a dialectical process that resulted in contradiction between increased potential for manipulating the world and the increased likelihood that ill effects of this manipulation would be felt in the realm of everyday life. In other words, rationalization meant "a return of barbarism" that was equated with increasing forms and intensities of domination (Jaeger, 2001, p.234)

Habermas, selaku penerus teori kritis, berbagi keprihatinan yang sama terhadap rasionalitas instrumental. Berbeda dengan teoretikus sebelumnya, Habermas melakukan studi komprehensif terhadap hubungan antara rasionalitas, bahasa dan kebebasan. Sebuah studi yang belum dilakukan para teoretikus sebelumnya. Lewat studi tersebut Habermas menggeser fokus penelitian terhadap rasionalitas dari konteks kerja ke konteks komunikasi intersubjektif.

Keprihatinan pertama Habermas adalah rasionalitas instrumental telah menceraiberaikan kerja rasionalitas dari akar sosialnya. Kerja rasionalitas menjadi begitu solitaristik dan mengabaikan realitas sosial yang ada. Padahal, kita menyadari rasionalitas tindak-tanduk kita melalui konfirmasi dari pengalaman, pengetahuan kultural dan orang lain. "Yang rasional" tidak dapat ditentukan sepihak atau dalam ruang hampa sosial. Hanya melalui interaksi sosial ukuran-ukuran rasionalitas ditentukan.

Tindakan berbasis rasionalitas instrumental sendiri mau tidak mau berpijak pada konsensus sosial. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang penebang kayu yang ingin menebang pohon sedemikian rupa sehingga jatuh pada target lokasi yang diinginkan. Sekilas, sang penebang berpikir secara instrumental tanpa bantuan orang lain. Namun, pengetahuan mengenai jenis gergaji, kedalaman potongan, sudut potong dan lain sebagainya tidak didapatkan dalam kesendirian. Skema konseptual⁴ yang melatari pengetahuan tersebut adalah hasil sosialisasi dan proses reproduksi sosial.

⁴ Skema konseptual dalam pemikiran Martin Heidegger adalah struktur prasuposisi yang melatari segala aktivitas *dasein* selaku *in-der-welt-sein*. Ketiga struktur tersebut adalah *fore-having*, *foresight*, dan *fore-conception*. Saat penebang kayu hendak menebang pohon, dia sudah memahami (*fore-having*) mengenai alat untuk menebang pohon. Dia pun sudah memiliki penglihatan (*fore-sight*)

Pengetahuan kita mengenai kenyataan faktual, masyarakat dan diri sendiri adalah hasil dari sosialisasi, budaya dan akumulasi pengalaman. Habermas merumuskan sebuah konsepsi sosial tentang tindakan (*social conception of action*) menggantikan konsepsi atomistik yang berbasis pada kalkulasi untung rugi belaka. Bagi Habermas, para teoretikus terlalu lama berkuat dengan kerja rasionalitas pada konsepsi atomistik dan lalai menggarap kerja rasionalitas pada konsepsi sosial.

Habermas merekonstruksi makna rasionalitas dengan memperkenalkan tiga ruang nilai (*sphere of values*). Tiga ruang nilai tersebut adalah semacam geografi tindakan dengan karakteristik rasionalitas atau ukuran evaluasinya masing-masing, masing-masing. Ketiganya adalah ruang nilai sains, ruang nilai etis dan ruang nilai estetis. Apa yang orang lakukan dalam tiga ruang nilai tersebut merujuk pada tiga dunia: fisik, sosial dan personal. Dalam kasus pencemaran susu bayi, misalnya. Seorang ilmuwan merujuk pada dunia fisik yakni kandungan kimiawi pada susu tersebut. Seorang pemuka agama merujuk pada dunia sosial yakni kepatutan sosial berkenaan dengan tindak pencemaran. Sementara, pabrik susu dihadapkan dengan dunia personal yakni kejujuran mengenai kandungan berbahaya yang terdapat dalam susu tersebut.

Dalam diskursus orang berhubungan dengan tiga dunia tersebut melalui tindak ujaran⁵. Inheren dalam tindak ujaran adalah apa yang disebut sebagai klaim validitas. Klaim validitas untuk tindak ujaran dalam ruang nilai sains adalah kesesuaian dengan fakta. Apabila sang ilmuwan mengatakan, "susu ini mengandung formalin", maka klaim validitas yang diajukan adalah kesesuaian dengan fakta. Bahwasannya susu ini memang terbukti di laboratorium mengandung senyawa formalin.

mengenai ke arah mana pohon akan jatuh. Terakhir, sang penebang kayu sudah mengonseptualisasikan (*fore-conception*) alat penebang, sudut terbang dan arah angin demi jatuhnya pohon yang berujung pada status dia selaku penebang yang handal.

⁵ Tindak ujaran (*speech act*) adalah salah satu jenis tindakan intensional yang terdiri atas: tindak lokusioneer, tindak ilokusioneer, dan tindak perlokusioneer. Tindak lokusioneer adalah tindak ujaran yang menyatakan sesuatu kenyataan faktual, contoh. "anjing pak Yudi galak". Tindak ilokusioneer adalah tindak ujaran untuk mengartikulasikan sebuah keyakinan, dalam contoh "anjing pak Yudi galak", si pengujar mengutarakan keyakinan bahwa si anjing memang galak karena terbukti sudah menggigit dua orang dalam waktu satu minggu. Si pengujar mengutarakan keyakinannya kepada pendengar umum guna secara tidak langsung meminta mereka menghindari si anjing. Tindak perlokusioneer adalah tindak ujaran yang berfungsi meyakinkan orang lain tentang suatu kenyataan, dalam contoh "anjing pak Yudi galak" si pengujar meyakinkan orang lain bahwa si anjing memang galak dan meminta pendengar langsung, orang kedua (interlokutor) untuk menghindarinya. (Audi, Robert, *Cambridge Dictionary of Philosophy*, 1999, hal. 869)

Sementara, tindak ujaran etis dan estetis pun mengajukan klaim validitasnya masing-masing. Klaim validitas tindak ujaran etis, misalnya, tidak didasarkan pada kesesuaian dengan fakta melainkan norma-norma yang tertanam dalam realitas sosial. Klaim validitas tindak ujaran estetis didasarkan pada kesesuaian dengan realitas batin yang hanya dapat diakses oleh si agen.

Paling tidak terdapat tiga jenis klaim validitas yakni kebenaran, kepatutan dan kejujuran. Ketiganya tidak diperiksa secara terpisah. Rasionalitas masing-masing tindak ujaran tidak sekadar memeriksa klaim validitasnya sendiri-sendiri. Kemungkinan pengakuan intersubjektif terhadap adalah bagian dari baik rasionalitas sains, etis maupun estetis. Rasionalitas ketiga klaim validitas yang ada pun tidak cukup sekadar mengakui namun juga saling mengkritisi satu sama lain. Habermas mengatakan:

Normatively regulated actions and expressive self-presentations have, like assertions or constative speech acts, the character of meaningful expressions, understandable in their context, which are connected with criticizable validity claims. Their reference is to norms and subjective experiences rather than to facts. The agent makes the claim that his behavior is right in relation to a normative context recognized as legitimate, or that the first person utterance of an experience to which he has privileged access is truthful or sincere. Like constative speech acts, these expressions can also go wrong. The possibility of intersubjective recognition of criticizable validity claims is constitutive for their rationality too. or in his own subjective world. (Habermas, 1984, p. 15-16)

Habermas menekankan bahwa tiga bentuk rasionalitas tindak ujaran (sains, etis, estetis) harus bekerjasama dalam tindak komunikasi yang bertujuan pada kesalingpahaman dan konsensus. Kesalingpahaman dan konsensus tanpa paksaan berpijak pada pengakuan intersubjektif terhadap kemungkinan keliru masing-masing klaim validitas. Rasionalitas yang tidak sekadar memperjuangkan klaim validitasnya namun juga mempercakapkannya untuk mencapai kesalingpahaman disebut Habermas sebagai rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif tidak dapat direduksi ke dalam rasionalitas saintifik,

praktis atau estetik melainkan merupakan koordinasi dari ketiganya guna mencapai kesalingpahaman tanpa paksaan. Habermas mengatakan:

This concept of communicative rationality carries with it connotations based ultimately on the central experience of the unconstrained, unifying, consensus-bringing force of argumentative speech, in which different participants overcome their merely subjective views and owing to the mutuality of rationally motivated conviction, assure themselves of both the unity of the objective world and the intersubjectivity of their lifeworld (Habermas, 1984, p.10)

Habermas, karenanya membagi rasionalitas ke dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah tiga bentuk independen rasionalitas yang berhubungan erat dengan tiga ruang nilai: sains, etis dan estetik. Tingkatan kedua adalah rasionalitas komunikasi yang mana ketiga bentuk rasionalitas berkoordinasi secara konsisten dan saling berkaitan. Dengan kata lain, rasionalitas komunikasi mentransendensi sekaligus menggamit ketiga bentuk rasionalitas sebelumnya. Disebut mentransendensi karena tidak terjebak ke dalam klaim validitas rasionalitas sains, etis dan estetik. Disebut menggamit karena tidak meninggalkan melainkan mempertanyakan klaim-klaim validitas yang ada demi tercapainya kesalingpahaman dan konsensus tanpa paksaan.

Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah perusahaan susu bubuk berniat menambahkan nutrisi kimiawi pada susu (fortifikasi) untuk meningkatkan gizi bayi. Upaya fortifikasi tersebut secara keilmuan dan teknis tidak bermasalah. Teknologi fortifikasi juga sangat murah sehingga tidak akan menambah harga susu dan membebani konsumen. Dengan kata lain, target perusahaan menghasilkan susu bayi yang murah namun memiliki aneka gizi tambahan dapat tercapai melalui fortifikasi. Fortifikasi adalah pilihan yang paling efisien untuk memberi gizi tambahan kepada balita dengan harga murah.

Persoalannya, evaluasi terhadap tujuan akhir dari fortifikasi tidak cukup hanya melalui rasionalitas sains-teknologi belaka. Rasionalitas etis dan estetik juga harus mampu mempersoalkan tujuan dari fortifikasi. Rasionalitas etis misalnya mempertanyakan apakah meningkatkan kesehatan bayi melalui

fortifikasi absah secara moral. Apakah dijamin tidak ada risiko kesehatan terhadap bayi? Apakah semua informasi mengenai risiko sudah dipertimbangkan? Apakah informasi tersebut diupayakan semaksimal mungkin untuk ditemukan?

Fortifikasi adalah pelanggaran terhadap prinsip kesepakatan yang diinformasikan (*informed consent*). Prinsip ini menuntut setiap upaya yang berhubungan dengan nasib orang lain harus atas dasar kesepakatan yang bersangkutan. Analoginya adalah ketika orang hendak dioperasi. Seorang yang hendak dioperasi senantiasa diminta kesepakatannya secara tertulis oleh rumah sakit. Apabila yang bersangkutan berhalangan maka keluarga dapat mewakilinya.

Rasionalitas estetis mempertanyakan kejujuran perusahaan susu bubuk tersebut. Apakah formula yang tertera pada kaleng susu bubuk tersebut menggambarkan kandungan yang sebenarnya? Apakah teknologi fortifikasi yang begitu murah tidak mencurigakan? Adakah formula tersembunyi yang dapat membahayakan kesehatan bayi?

Dalam kasus fortifikasi, ketiga bentuk rasionalitas baik sains, etis maupun estetis harus bekerja sama untuk mencapai kesalingpahaman atau konsensus tanpa paksaan. Dengan kata lain, rasionalitas yang bekerja dalam kasus tersebut adalah rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif tidak meminggirkan satu klaim validitas tertentu atas nama klaim lainnya. Rasionalitas komunikatif senantiasa merefleksikan klaim validitas tertentu dalam terang klaim-klaim lainnya.

Rasionalitas komunikatif sesungguhnya merupakan solusi konseptual terhadap persoalan yang diidap rasionalitas instrumental. Kerja rasionalitas instrumental yang melulu berfokus pada efektifitas dan efisiensi sarana tanpa refleksi dan justifikasi terhadap validitas dari tujuan yang dipilih (meningkatkan gizi bayi) sungguh berbahaya. Kerja rasionalitas semacam itu berpotensi untuk menjadi eksploitatif sehingga secara etis dan estetis tidak bertanggungjawab. Tabel berikut adalah perbandingan antara rasionalitas komunikatif dengan rasionalitas instrumental:

Tabel 9

Perbandingan antara rasionalitas komunikatif dengan instrumental

	Rasionalitas Komunikatif	Rasionalitas Instrumental
Kodrat pilihan	kolektif	Individualis
Tujuan	Kesalingpahaman tanpa paksaan	Mempromosikan preferensi atau keinginan pribadi (maksimalisasi utilitas)
Konteks	Mengakui konstruksi sosial terhadap rasionalitas	Mengabaikan watak sosial dari rasionalitas
Ukuran rasionalitas	Pluralitas dalam ukuran (saintifik, estetik dan moral)	singularitas dalam ukuran (teknik)
Lingkup pemeriksaan rasional	Memeriksa preferensi, keinginan, dan nilai	Memeriksa sarana tapi mengabaikan preferensi, keinginan dan nilai

Habermas memberikan dimensi baru yang tidak terdapat dalam kritik Elster terhadap rasionalitas instrumental. Dimensi tersebut adalah dimensi sosial. Habermas mendasarkan upaya pemeriksaan rasional terhadap tujuan atau keinginan pada kesalingpahaman dan kesepakatan tanpa paksaan. Sementara Elster semata mendasarkannya pada keuntungan besar dalam jangka panjang. Selain itu, Habermas menuntut agar pemeriksaan rasional terhadap tujuan atau keinginan dilakukan tidak dalam kesendirian. Pemeriksaan rasional terhadap tujuan atau keinginan seseorang dilakukan dalam terang tujuan atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, pemeriksaan rasional terhadap tujuan atau keinginan harus bersifat dialogis. Habermas, tak pelak lagi, memberi sumbangan cukup penting dalam teori rasionalitas tindakan, khususnya rasionalitas komunikatif. Persoalannya, Habermas mempromosikan rasionalitas komunikatif dalam kerangka pencapaian konsensus dalam kemajemukan kepentingan masyarakat demokratis. Sementara, rasionalitas kerjasama

berfokus pada persoalan pada ranah yang berbeda. Rasionalitas kerjasama berupaya menyelesaikan situasi konflik yang sifatnya bipolar seperti dimodelkan dalam dilema narapidana.

IV.6 Ikhtisar

Persoalan yang diidap oleh jebakan sosial ditimbulkan oleh asumsi rasionalitas tindakan yang dianutnya: rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental bekerja semata-mata menimbang sarana paling tepat untuk mencapai tujuan yang terberi. Tujuan sendiri sebagai bentuk keputusan nilai (*value judgement*) tidak terbuka terhadap pemeriksaan rasional. Oleh karena itu, rasionalitas instrumental dapat dikatakan sebagai rasionalitas sempit atau tipis.

Kemungkinan perluasan rasionalitas instrumental harus menjawab satu pertanyaan pokok: apakah tujuan sebagai alasan sebuah tindakan rasional terbuka pada pemeriksaan rasional? Robert Audi memberi jawaban positif. Baginya, tujuan sebagai keputusan nilai dapat diperiksa baik instrinsik maupun ekstrinsik oleh rasionalitas. Pemeriksaan instrinsik terhadap tujuan dapat termediasi oleh keyakinan atau bersifat eksperiensial. Saat kita menilai sebuah lukisan, misalnya. Penilaian tersebut dapat termediasi oleh keyakinan mengenai keberadaan *desirability characteristics* atau kualitas-kualitas yang melekat pada pengalaman kita sendiri. Sementara, rasionalitas ekstrinsik sebuah keputusan nilai adalah rasionalitas yang ditransmisikan dari penilaian instrinsik yang terjustifikasi.

Seperti halnya Audi, Jon Elster juga menuntut dibukanya tujuan, preferensi, keinginan agen terhadap pemeriksaan rasional. Keinginan atau preferensi agen sangat rentan terhadap gangguan *passion*, dorongan buta, *time discounting* dan berbagai pengaruh lingkungan. Manusia, misalnya, cenderung mendiskon waktu dengan memilih keuntungan kecil dalam jangka pendek daripada keuntungan besar namun masih lama. Untuk itu, rasionalitas menurut Elster harus mampu mengikat keinginan manusia supaya tidak berubah ke arah yang merugikan dirinya. Rasionalitas konstrain bagi Elster adalah rasionalitas

yang menghasilkan strategi pra-komitmen guna mencegah preferensi rasional seorang berubah saat tiba waktu memutuskan.

Habermas, seperti halnya Audi dan Elster juga mempersoalkan betapa sempitnya rasionalitas instrumental. Bagi Habermas, rasionalitas yang tidak mempersoalkan tujuan, keinginan atau preferensi berpotensi eksploitatif. Untuk itu, Habermas merumuskan rasionalitas komunikatif yang bertujuan mencapai kesalingpahaman dan kesepakatan tanpa paksaan. Rasionalitas komunikatif menuntut agar berbagai klaim apakah itu sains, etis atau estetis dapat saling menguji dan berkoordinasi guna mencapai kesalingpahaman.

Habermas menambah dimensi sosial dalam kritik terhadap rasionalitas instrumental. Habermas menuntut agar nilai, tujuan, keinginan atau preferensi tidak diperiksa dalam kesendirian namun dalam terang nilai, tujuan, keinginan atau preferensi orang lain. Tujuan pemeriksaan rasional tersebut tidak didasarkan pada pencapaian keuntungan jangka panjang melainkan kesalingpahaman dan kesepakatan tanpa paksaan.

BAB V

PERSOALAN IDENTITAS DALAM RASIONALITAS TINDAKAN

Rasionalitas instrumental yang menjadi asumsi dasar teori permainan khususnya, dilema narapidana memiliki dua persoalan pokok. Persoalan pertama adalah rasionalitas instrumental tertutup bagi setiap upaya pemeriksaan rasional terhadap keinginan, tujuan atau nilai. Persoalan ini sudah diatasi dengan mengemukakan kemungkinan perluasan rasionalitas instrumental lewat pembacaan gagasan Robert Audi, Jon Elster dan Jurgen Habermas. Pada dasarnya ketiga filsuf tersebut menginginkan agar rasionalitas tidak sekadar memeriksa sarana melainkan juga tujuan, keinginan atau nilai.

Persoalan kedua adalah rasionalitas instrumental memasung pihak lawan dalam situasi strategis sebagai sesama pemaksimal utilitas (*fellow utility maximizer*). Akibatnya, rasionalitas instrumental mengabaikan kesejarahan pihak lawan sekaligus kontigensi sang agen. Prinsip tindakan dalam dilema narapidana berbunyi: "bersaksi terhadap lawan adalah rasional mengingat lawan pasti juga akan bersaksi berkenaan dengan statusnya sebagai sesama pemaksimal utilitas.

Prinsip di atas tidak pernah direfleksikan dan kalau pun direfleksikan tujuannya tetap adalah maksimalisasi utilitas, meski jangka panjang. Dengan kata lain, refleksi terhadap prinsip tindakan narapidana tetap berfokus pada "yang pribadi" (*self-centered*). Habermas dalam hal ini menambah dimensi sosial dalam kritik terhadap rasionalitas instrumental. Habermas menuntut agar nilai, tujuan, keinginan atau preferensi tidak diperiksa dalam kesendirian namun dalam terang nilai, tujuan, keinginan atau preferensi orang lain. Namun, Habermas tidak pernah menyinggung siapa yang lain itu dan bagaimana interaksi dengan yang lain dapat membuat seseorang merefleksikan tujuan, prinsip, nilai-nilainya.

Bertolak dari persoalan di atas, bab ini berfokus pada kemungkinan rasionalitas lain yang bekerja dalam situasi sengketa yakni rasionalitas

kerjasama. Kemungkinan bekerjanya rasionalitas terkait erat dengan persoalan identitas baik agen maupun orang lain. Bagian pertama akan membahas gagasan David Gauthier mengenai pemaksimal terkonstrain. Bagian kedua membahas gagasan Charles Taylor mengenai rasionalitas ad hominem. Bagian terakhir membahas tesis Christine Korsgaard mengenai reflektivitas dalam rasionalitas tindakan.

V.1 Pemaksimal Terkonstrain (*Constrained Maximizer*)

Dalam dilema narapidana, dua agen tidak bekerjasama sehingga menghasilkan kerugian bagi keduanya. Mereka tidak bekerjasama karena situasi dilema menutup informasi antara keduanya. Ketertutupan informasi tersebut membuat mereka berasumsi bahwa yang lain akan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan solidaritas. Alhasil, pilihan yang paling rasional pada saat itu adalah bersaksi terhadap yang lain. Perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 10
Dilema Narapidana III

	B tidak bersaksi	B bersaksi
A tidak bersaksi	1 tahun, 1 tahun	3 tahun, 0 tahun
A bersaksi	0 tahun, 3 tahun	2 tahun, 2 tahun

Baik A maupun B menolak untuk bekerjasama berdasarkan strategi individual, yakni strategi untuk mendapatkan hasil optimal apa pun yang dipilih orang lain (bersaksi atau tidak). Namun, mereka tidak akan pernah bertaruh

dengan kehendak baik orang lain. Paling aman bagi mereka adalah mengandaikan satu sama lain sebagai sosok yang egois.

Dalam strategi individual, seorang melihat situasi yang ada dan menimbang utilitas terharapkan (*expected utility*) dari berbagai tindakan yang mungkin. Dengan kata lain, strategi individual adalah pertarungan dari berbagai tindakan yang mungkin dari seorang agen. Sebaliknya, dua agen yang memilih untuk bekerjasama bertindak berdasarkan strategi bersama (*joint strategy*). Bersepakat untuk bekerjasama adalah bersepakat untuk memakai strategi bersama dan bukan individual. Kerjasama adalah rasional apabila utilitas yang diharapkan dari strategi bersama paling tidak sama dengan utilitas dari strategi individual terbaik.

Perbedaan mendasar antara strategi individual dan bersama terletak pada fokus strategi. Apabila strategi individual berfokus pada pilihan tindakan yang terbaik (bersaksi), maka strategi bersama berfokus pada hasil yang terbaik (masing-masing menjalani hukuman 1 tahun). Hasil terbaik ini mengkonstrain perilaku memaksimalkan utilitas masing-masing agen.

David Gauthier membagi agen ke dalam dua kategori: pemaksimal serta merta (*straightforward maximizer*) dan pemaksimal terkonstrain (*constrained maximizer*) (Gauthier, 1986, p.166). Pemaksimal serta merta adalah agen yang memberi label irrasional pada tindakan kerjasama. Dia adalah agen yang berupaya memaksimalkan utilitasnya dengan menimbang strategi orang lain. Sebaliknya, pemaksimal terkonstrain adalah agen yang melihat rasionalitas dalam tindakan kerjasama.

Straightforward maximizer is a person who seeks to maximize his utility given the strategies of those with whom he interacts. A constrained maximizer, on the other hand, is a person who seeks in some situations to maximize his utility, given the not the strategies but the utilities of those with whom she interacts
(Gauthier, 1986, p. 167)

Pemaksimal terkonstrain memiliki beberapa karakteristik:

1. pemaksimal terkonstrain adalah agen yang berupaya memaksimalkan utilitasnya dengan tidak hanya menimbang strategi (strategi berbasis kepentingan pribadi) melainkan juga utilitas orang lain.
2. pemaksimal terkonstrain adalah agen yang memiliki disposisi bersyarat untuk mendasarkan tindakannya pada strategi bersama tanpa menimbang apakah strategi individual akan menghasilkan utilitas yang lebih besar.
3. pemaksimal terkonstrain adalah agen yang bertindak berdasarkan strategi bersama jika dan hanya jika utilitas yang diharapkan apabila semua pihak melakukan hal yang sama tidak kurang (lebih) dari utilitas yang dihasilkan apabila semua pihak memakai strategi individual.
4. pemaksimal terkonstrain adalah agen yang bertindak tidak hanya berdasarkan strategi bersama yang dituntut oleh negosiasi rasional melainkan pula strategi bersama yang memenuhi utilitas yang diharapkan dari kerjasama rasional
5. pemaksimal terkonstrain bukan agen yang semata memiliki pandangan lebih luas di banding orang lain yakni melayani kepentingan yang lebih luas dengan mengorbankan kepentingan jangka pendek.
6. pemaksimal terkonstrain adalah agen yang tidak berpikir lebih efektif tentang bagaimana memaksimalkan utilitas (memberi biaya pada kepentingan pribadi yang berdampak pada keuntungan jangka pendek) melainkan berpikir dengan cara lain (berpikir kooperatif)

Persolannya, bagaimana apabila orang lain berpura-pura sebagai pemaksimal terkonstrain padahal sesungguhnya pemaksimal serta-merta? Menurut Gauthier, agen harus mampu memperkirakan kecenderungan orang lain bertindak kooperatif dan menghitung bukan utilitas yang diharapkan apabila semua pihak bekerjasama melainkan utilitas yang diharapkan apabila dirinya bekerja sama, berkaitan dengan hasil perkiraannya mengenai probabilitas kerjasama orang lain.

Gauthier menyebut kemampuan agen memperkirakan disposisi orang lain sebagai *translucency*. *Translucency* adalah asumsi bahwa disposisi orang lain

tidak sepenuhnya transparan dan juga tersembunyi sehingga apakah seorang bekerjasama atau tidak dapat diperkirakan tidak dengan kepastian tetapi juga bukan sekadar tebakan liar (Gauthier, 1986, p.174).

Rasionalitas disposisi pemaksimal terkonstrain dapat dipenuhi apabila nilai p (probabilitas bahwa jika seorang adalah pemaksimal terkonstrain maka mereka akan sukses bekerjasama dengan mencapai kesalingpengertian) lebih besar dari nilai q (probabilitas bahwa jika seorang adalah pemaksimal terkonstrain maka dirinya akan dieksploitasi oleh pemaksimal serta merta atau jika seorang adalah pemaksimal serta merta maka dirinya akan mengeksploitasi pemaksimal terkonstrain).

Dua narapidana berjanji untuk tidak saling bersaksi apabila diinterogasi. Apa yang menjamin bahwa perjanjian tersebut tidak dilanggar sewaktu interogasi dijalankan? Perjanjian dipegang teguh jika terdapat *translucency* yang memastikan bahwa utilitas yang diharapkan dari pemaksimal terkonstrain lebih besar daripada yang diharapkan dari pemaksimal serta-merta.

Translucency adalah asumsi kognitif yang membedakan antara pemaksimal terkonstrain dengan serta-merta. Pemaksimal serta-merta hanya menimbang strategi individual orang lain. Apabila orang lain menggunakan strategi pemaksimal serta-merta maka dirinya juga akan menggunakan strategi yang sama. Sebaliknya, pemaksimal serta-merta menimbang utilitas dan niat sesungguhnya dari orang lain. Apabila dirinya atau orang lain berpura-pura maka satu sama lain dapat mengetahui niat sesungguhnya yang berujung pada strategi yang merugikan bersama. Seorang agen tidak akan menyembunyikan strategi pemaksimal serta-merta di balik pemaksimal terkonstrain karena, berdasarkan asumsi *translucency*, strategi sesungguhnya dapat diketahui orang lain, demikian pula sebaliknya.

Translucency dalam kerja rasionalitas tindakan memecahkan persoalan asimetri informasi dalam dilema narapidana. *Translucency* membuat terobosan teoretis yang membuat setiap kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa dapat dijamin keberlakuannya. Hal itu dipastikan karena rasionalitas, dengan *translucency*, sekarang tidak sekadar menimbang strategi orang lain namun

juga utilitasnya. Pertanyaan dibalik dari "apa dampak strategi lawan buatku" menjadi "apa dampak strategiku buat lawan".

Namun, *translucency* pun tidak terlepas dari beberapa persoalan pokok. Persoalan pertama terletak pada asumsi bahwasannya agen adalah pemaksimal utilitas. Gauthier berasumsi bahwa agen rasional adalah pemaksimal utilitas. Seorang pemaksimal utilitas akan berusaha untuk menipu orang lain ketika tipuan itu menguntungkan dan mungkin. Ketika utilitas yang diharapkan lewat penipuan lebih besar daripada utilitas yang diharapkan lewat kerjasama, seorang pemaksimal utilitas tidak akan memilih untuk bekerjasama kecuali dia yakin bahwa orang lain akan bertindak sama. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengambil risiko untuk mempercayai orang lain karena dia adalah seorang pemaksimal utilitas yang akan berusaha sekeras mungkin agar niat sesungguhnya tidak dapat dideteksi.

Asumsi agen sebagai pemaksimal utilitas juga dapat dipersoalkan dari perspektif strategi *tit-for-tat*. Strategi *tit-for-tat* adalah strategi dalam teori permainan yang mana permainan dimainkan lebih dari satu kali. Apabila pada permainan pertama seorang tidak bekerjasama maka strategi pada permainan kedua akan mengikuti yang pertama. Jika pada putaran pertama seorang agen gagal membedakan antara pemaksimal terkonstrain sejati dengan pemaksimal terkonstrain semu, maka pada putaran berikutnya sang agen akan segera memakai strategi pemaksimal serta-merta.

Persoalan kedua adalah determinasi strategi oleh situasi pilihan (*choice situation*). Pilihan strategi seseorang tidak dapat ditentukan oleh rekam jejak pilihan strateginya. Dalam situasi pilihan tertentu, seorang yang terbiasa bekerjasama dapat saja memilih untuk tidak bekerjasama. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang mahasiswa memiliki rekam jejak yang baik yakni tidak pernah mencontek sewaktu ujian. Pada saat mengikuti ujian akhir semester dia menghadapi sebuah situasi pilihan: semalam dia tidak belajar dan dia harus lulus ujian ini; sebab apabila dia tidak lulus maka dia harus mengulang mata kuliah tersebut tahun depan yang berarti sudah melewati masa studinya. Di bawah ancaman *drop out*, sang mahasiswa memilih untuk tidak bekerjasama yakni

mencontek pekerjaan teman. *Translucency* tidak menjamin seseorang akan memakai strategi pemaksimal terkonstrain. Di bawah determinasi situasi pilihan tertentu, seorang dapat berubah menjadi pemaksimal serta merta meski memiliki rekam jejak panjang sebagai pemaksimal terkonstrain.

Asumsi agen sebagai pemaksimal utilitas dalam pemikiran David Gauthier sungguh bermasalah. Asumsi itu akan menghambat terjadinya kerjasama meski diandaikan adanya *translucency*. Sebab itu, rasionalitas tindakan tidak hanya cukup memperhitungkan strategi dan utilitas orang lain. Rasionalitas tindakan, pertama-tama, harus memperhitungkan orang lain sebagai identitas konkret dengan komitmen partikular. Kedua, rasionalitas tindakan juga harus merefleksikan prinsip-prinsip yang mendasari pilihan tindakannya, misalnya prinsip maksimalisasi utilitas (*utility maximizing principle*) atau turunannya seperti prinsip situasi pilihan (*choice situation principle*). Gagasan rasionalitas *ad hominem* dari Charles Taylor berikut, sedikit banyak, mulai memperhitungkan orang lain sebagai yang konkret.

V.2 Rasionalitas Ad Hominem

Tindakan rasional adalah tindakan yang didasarkan pada komitmen fundamental terhadap sebuah prinsip. Teori pilihan rasional menegaskan bahwa tindakan rasional harus didasarkan pada prinsip maksimalisasi utilitas (*utility maximizing principle*). Bahwasannya sebuah tindakan harus memilih opsi yang paling memuaskan preferensi sang agen. Rasionalitas tindakan semacam itu adalah rasionalitas instrumental. Dengan kata lain, rasionalitas instrumental adalah salah satu jenis rasionalitas tindakan yang berkomitmen pada prinsip maksimalisasi utilitas.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana rasionalitas instrumental mencegah pemeriksaan rasional agen terhadap keinginan, tujuan dan nilai. Selain itu, rasionalitas instrumental sebagai rasionalitas yang berpegangan pada prinsip maksimalisasi utilitas juga memiliki catatan lain. Charles Taylor mengemukakan konsep rasionalitas apodiktik. Rasionalitas apodiktik adalah penalaran yang bertolak dari komitmen fundamental tentang

sebuah prinsip tertentu. Rasionalitas ini senantiasa mengajukan kriteria untuk memutus antara beberapa klaim yang berkontestasi. Berdasarkan gagasan Taylor tersebut, rasionalitas instrumental adalah bagian dari rasionalitas apodiktik. Sebab, rasionalitas instrumental memutuskan pilihan tindakan berdasarkan prinsip atau kriteria maksimalisasi utilitas.

Rasionalitas apodiktik memutus opsi mana yang diambil berdasarkan ukuran eksternal. Misalnya, berdasarkan rasionalitas apodiktik, Y lebih baik daripada X karena Y didukung fakta lapangan yang lebih akuntabel. Rasionalitas apodiktik adalah rasionalitas transisional, yakni rasionalitas yang menuntun kita untuk beralih dari satu pilihan (X) ke pilihan lain (Y) berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu.

Rasionalitas apodiktik adalah salah satu model penalaran yang menjelaskan transisi dari satu pilihan ke pilihan lain. Terdapat, paling tidak, tiga model rasionalitas yang menjelaskan transisi dari satu pilihan ke pilihan lain (Taylor, 1995, p. 43-52). Ketiga model tersebut adalah:

1. Rasionalitas Sudut Pandang (*standpoint rationality*)

Transisi dari X ke Y dijelaskan tidak hanya berdasarkan akurasi melainkan juga sudut pandang Y, sejarah X, dan pola anomali tertentu, kesulitan, gangguan, dan lain sebagainya yang dapat dikenali lebih jelas. Dalam mengadopsi Y kita tidak sekadar memahami dunia secara lebih baik tetapi juga sejarah kita dalam menjelaskan dunia. Misalnya, transisi dari teori gerakan Aristotelian ke Galilean. Teori gerakan Galilean membuat terang kesulitan yang dialami teori Aristoteles berkenaan dengan gerakan liar proyektil. Kesulitan dapat dijelaskan ketika Galileo mengadopsi model inersia dan mengubah seluruh asumsi yang ada. Superioritas Galileo tidak semata-mata karena dukungan fakta lapangan tetapi juga kemampuan masing-masing teori merefleksikan diri dan yang lain dalam menjelaskan fakta.

2. Rasionalitas Premis Implisit (*rationality of implicit premise*)

Transisi dari X ke Y dijelaskan oleh premis implisit dari X yang telah diatasi oleh Y. Misalnya, premis pra Galilean mengenai pemahaman sebagai

adaptasi (*attunement*) diatasi oleh premis Galilean mengenai pemahaman sebagai utilisasi. Apabila dahulu memahami semesta adalah beradaptasi dengannya maka sekarang memahami adalah menggunakan semesta untuk berbagai keperluan manusia. Penghukuman dulu adalah soal maksimalisasi kesakitan untuk menyebar ketakutan dan mengendalikan masyarakat. Sekarang, penghukuman adalah soal minimalisasi rasa sakit untuk mengendalikan masyarakat secara lebih efisien. Kepatuhan tidak lagi didatangkan melalui cambuk melainkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

3. Rasionalitas Fondasionalis (*foundationalist form of rationality*)

Transisi dari X ke Y adalah sebuah penambahan pengetahuan dengan menunjukkan bahwa X salah dan Y benar atau X memiliki probabilitas n dan Y, $2n$. Rasionalitas jenis ini bekerja untuk meminimalisasi kesalahan (*error-reducing move*). Transisi sejatinya adalah mengatasi kesalahan dengan menghapus kontradiksi, kebingungan, atau pengakuan terhadap faktor relevan yang tadinya diabaikan. Seorang, misalnya, melihat gajah berwarna merah jambu di kelas. Fakta bahwa memang ada gajah tersebut di kelas tidak diukur berdasarkan ukuran eksternal tetapi oleh upaya minimalisasi kesalahan (seorang tersebut menggosok-gosok matanya) untuk menjernihkan kebingungan (kenapa ada gajah berwarna merah jambu di kelas saya?)

Charles Taylor mengajukan konsep rasionalitas lain yaitu apa yang disebutnya sebagai rasionalitas *ad hominem*. Rasionalitas *ad hominem* tidak bertolak dari sebuah komitmen fundamental terhadap prinsip tertentu. Rasionalitas *ad hominem* bertolak dari apa yang menjadi komitmen orang lain. Alih-alih menjadi objek kritisisme berdasarkan prinsip tertentu, komitmen orang lain justru dijadikan titik berangkat.

Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seorang anak hendak melanjutkan sekolah ke luar negeri namun dilarang oleh ayahnya. Sang ayah ingin sang anak kuliah di

dalam negeri supaya dapat senantiasa dekat dengan orang tua. Sementara, sang anak ingin melanjutkan kuliah di luar negeri demi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan rasionalitas *ad hominem*, sang anak tidak menghakimi prinsip kekerabatan sang ayah dengan kriteria maksimalisasi utilitas. Sang anak tidak serta merta mengatakan bahwa keinginan sang ayah adalah tidak masuk akal. Komitmen sang ayah tersebut justru dijadikan titik berangkat untuk merenungkan ulang keinginan sang anak dan menjajagi kemungkinan-kemungkinan lain.

Di sini terlihat jelas perbedaan antara rasionalitas *ad hominem* dan apodiktik. Rasionalitas apodiktik bertujuan melepaskan agen dari kurungan perspektifnya dengan menggamit prinsip objektif tertentu. Sementara, rasionalitas *ad hominem* justru menggunakan perspektif orang lain sebagai titik berangkat. Modus ini dapat dibaca sebagai konservatisme oleh pendekatan apodiktik. Namun, rasionalitas tindakan yang bergulat dengan individu-individu konkret mau tidak mau mesti memperhitungkan perspektif orang lain.

Rasionalitas *ad hominem* bekerja tidak sekadar untuk menjustifikasi keinginan atau preferensi saat ini melainkan dapat mengubah preferensi tersebut melalui minimalisasi kesalahan (*error-reducing move*). Sang anak bertolak dari prinsip kasih sayang sang ayah dan mempertanyakan: Pertama, apakah kasih sayang selalu harus berarti berada dekat dengan orang tua. Kedua, apakah kasih sayang di sini dapat diartikan sebagai frekuensi komunikasi batin antara anak dan orang tua. Ketiga, apakah kuliah di luar negeri berarti minimnya komunikasi dengan orang tua. Begitu seterusnya.

Rasionalitas *ad hominem* menuntut sebuah percakapan intens dan konkret orang per orang. Kita dapat berargumentasi satu sama lain untuk mengubah keinginan atau preferensi masing-masing. Pertemuan dengan orang lain sebagai sosok yang konkret adalah sebuah pengalaman baru yang dapat mengubah atau memperkaya keinginan atau preferensi seseorang. Perubahan satu keinginan ke keinginan lain tidak didasarkan pada kriteria eksternal melainkan argumentasi yang menimbang komitmen orang lain.

Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang tadinya tidak mau bertegur sapa dengan tetangga sebelah karena berbeda agama. Dia melakukan itu

berdasarkan keyakinan bahwa berkawan dengan orang kafir akan membawanya pada keburukan. Namun satu ketika dalam satu acara dia tidak bisa menghindar untuk tidak bercakap-cakap dengan sang tetangga. Dari percakapan itu dia menyimpulkan bahwa sang tetangga adalah orang yang sangat welas asih. Dia merenungkan keyakinannya dan bertanya, "apakah orang yang begitu welas asih sepertinya akan membawaku pada keburukan?". Di situ rasionalitas ad hominem bekerja mengubah keinginan atau preferensi sang agen melalui minimalisasi kesalahan yang dimanifestasikan dalam percakapan dengan orang lain.

V.3 Rasionalitas Tindakan, Refleksivitas dan Identitas Praktis

Salah satu persoalan pokok dalam model rasionalitas instrumental adalah ketaatan buta terhadap prinsip maksimalisasi utilitas. Model tersebut menekankan kerja rasionalitas dalam menentukan sarana paling tepat untuk memaksimalkan utilitas. Sementara, prinsip tersebut sendiri dalam situasi dilema narapidana menumpulkan setiap kemungkinan kerjasama.

Christine Korsgaard mencoba untuk mendobrak kebuntuan model rasionalitas instrumental melalui gagasannya mengenai refleksivitas dan identitas praktis. Korsgaard memulainya dengan mengajukan apa yang disebutnya sebagai "pertanyaan normatif". Saya mencoba membagi pertanyaan normatif Korsgaard menjadi dua pertanyaan: pertama, "Mengapa seorang bertindak berdasarkan alasan rasional tertentu?" Jawaban Korsgaard bagi pertanyaan pertama adalah alasan rasional memiliki kekuatan normatif terhadap tindakan. Ini membawa kita pada pertanyaan kedua: "Mengapa alasan rasional memiliki kekuatan normatif terhadap tindakan? Pertanyaan ini dijawab Korsgaard dengan mengemukakan konsep refleksivitas. Agen memiliki struktur reflektif dalam sistem kognitifnya yang mendukung alasan rasional yang bersangkutan. Agen memiliki kapasitas untuk secara reflektif mendukung alasan rasional tertentu.

Sebagai seorang agen yang reflektif seorang memiliki kapasitas untuk secara reflektif menyadari hasrat X dan dukungannya terhadap tindakan Y.

Begitu sang agen menyadarinya, dia dihadapkan pada pertanyaan: "Haruskah saya bertindak seperti yang didiktekan oleh X? Untuk menjawab pertanyaan ini sang agen harus memutuskan apakah dia bertindak berdasarkan X atau tidak. Bagi seorang agen reflektif, bertindak berdasarkan X berarti bertindak berdasarkan prinsip umum tertentu. Refleksivitas akan membawa pertanyaan itu lebih jauh: "Haruskah sang agen mendukung prinsip tersebut?"; "Apakah sang agen adalah jenis orang yang mendukung prinsip tersebut?" Bertindak A dalam refleksivitas yang penuh adalah dukungan terhadap sebuah konsepsi diri yang disebut Korsgaard sebagai "Identitas Praktis".

Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang memutuskan untuk menolong tetangga yang kesusahan meski dia berbeda keyakinan dengannya. Apabila orang tersebut adalah seorang agen reflektif maka dia akan menemukan prinsip umum di balik tindakannya: "tolonglah orang lain tanpa melihat keyakinannya". Refleksi selanjutnya akan sampai pada identitas praktis. Orang itu berpegangan pada prinsip "welas asih tanpa sekat" disebabkan oleh identitas praktisnya sebagai seorang muslim moderat. Prinsip "welas asih tanpa sekat" bukan aturan abstrak melainkan ekspresi konkret dari identitas praktisnya sebagai muslim moderat.

Argumentasi Korsgaard mengenai refleksivitas secara kronologis dapat dijabarkan menjadi tujuh proposisi (Bratman, 1998, p. 701-704):

(1) Saya adalah sepenuhnya agen reflektif

Proposisi di atas bukan klaim bahwa seorang agen senantiasa merefleksikan tindak-tanduknya. Itu adalah klaim bahwa karakter pokok kepelakuan (*agency*) manusia adalah refleksivitas. Refleksivitas adalah karakter pembeda antara manusia dan spesies lainnya. Manusia mengalami jeda antara inklinasi dan respon reflektif terhadapnya. Respon reflektif tersebut yang membuat manusia memiliki dimensi normatif yang tidak dimiliki spesies lainnya. Refleksivitas adalah paradigma atau model bagi tindakan rasional.

(2) Saya dihadapkan pada keinginan (X) yang mendorong saya untuk melakukan (Y)

Status saya sebagai reflektif agen membuat saya mampu menyadari adanya keinginan (X) yang berpotensi menghasilkan tindakan (Y). Saya menyadari (X) bukan semata-mata sebagai faktor kausal bagi (Y). Lebih dari itu, kesadaran saya tentang (X) adalah manifestasi kepelakuan saya. Sebagai manifestasi kepelakuan saya, (X) tidak dibiarkan begitu saja tanpa direfleksikan. Pertanyaan berikutnya adalah:

(3) Apakah saya sekarang harus bertindak berdasarkan (X)? Haruskah saya sekarang mendukung tindakan yang didasarkan pada (X)?

Sebagai agen yang sepenuhnya reflektif, saya bertindak berdasarkan (X) jika dan hanya jika saya mendukung tindakan tersebut. Dukungan itu menurut Korsgaard mengambil bentuk keputusan bahwa (X) adalah sungguh-sungguh alasan bagi (Y)¹. Namun, tesis Korsgaard di atas memiliki kekurangan. Seorang secara reflektif menyadari bahwa (X) adalah sungguh-sungguh alasan bagi (Y). Namun, dia dapat saja masih ragu untuk bertindak (Y) karena konflik antara tujuan yang dikehendaki. Seorang menyadari bahwa keinginan untuk mendapat pendidikan terbaik adalah sungguh-sungguh alasan untuknya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun, dia tetap saja ragu untuk bertindak karena ayahnya yang sakit-sakitan sehingga membutuhkan perawatan jarak dekat yang berkesinambungan.

(4) Jika saya secara reflektif mendukung tindakan saya berdasarkan (X) maka saya mendukung prinsip umum yang menopang tindakan tersebut.

Refleksi terhadap keinginan partikular (X) yang mendasari tindakan tertentu (Y) adalah klaim terhadap sifat universalitasnya. Apabila saya kemudian bertindak berdasarkan (X) maka saya bertindak berdasarkan prinsip umum bahwasannya dalam situasi apa pun, kapan pun alasan yang sama (X) akan menjadi dasar bagi tindakan (Y). Korsgaard merumuskan:

If I am to regard this act, the one that I do now as the act of my will, I must at least make a claim to universality, a claim

¹ Korsgaard mengatakan bahwa acap kali sebuah inklinasi menyodorkan diri sebagai kandidat alasan yang kuat untuk bertindak, kita harus memeriksanya apakah itu sungguh-sungguh alasan rasional untuk bertindak. Sebagaimana sebuah rumah yang merupakan kombinasi antara gabungan tembok dengan atap, gabungan antara tindakan dan alasan yang tepat akan membangun maksim yang dapat dikehendaki sebagai hukum umum

that the reason for which I act now will be valid on the other occasions, or on occasions of this type—including this one conceived in a general way (Korsgaard, 1996, p. 231-232)

(5) Prinsip umum yang mendukung tindakan saya berdasarkan (X) tertanam dalam konsepsi identitas praktis saya.

Saya, misalnya, mendukung tindakan saya berdasarkan (X) dengan merujuk pada prinsip umum (P). Saya dapat menyadari semua itu secara reflektif sejauh proses kompleks dari penalaran praktis tersebut adalah aktivitas saya sendiri. Dukungan terhadap tindakan yang didasarkan pada prinsip umum (P) adalah dukungan terhadap identitas orang yang mendukung (P). Hasil akhir dari reflektivitas terhadap keinginan (X) yang mendasari tindakan (Y) adalah identitas yang mendukung prinsip umum (P). Seorang tidak akan bertindak berdasarkan prinsip umum tertentu apabila prinsip itu bukan ekspresi dari identitasnya. Seorang mendukung prinsip "berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang keyakinannya" bukan semata-mata karena sifat umum dari prinsip tersebut. Melainkan, prinsip tersebut adalah ekspresi identitasnya sebagai seorang muslim moderat.

(6) Saya mendukung reflektivitas saya sebagai konsepsi identitas praktis yang merupakan karakter umum kemanusiaan.

Dukungan terhadap reflektivitas saya bukan semata-mata dukungan terhadap aktivitas reflektif pada peristiwa tertentu. Seorang agen yang sepenuhnya reflektif tidak sekadar merefleksikan (X) sebagai alasan bagi (Y), melainkan merefleksikan kodratnya sebagai binatang yang berefleksi. Ketertanaman sebuah prinsip umum tindakan pada identitas praktis tertentu tidak lantas menjebak prinsip tersebut pada parokialisme. Ada yang bersifat umum dalam identitas praktis yakni reflektivitas sebagai corak kemanusiaan dan bukan ekspresi parokial belaka. Penghargaan agen terhadap kemanusiaan yang tertanam dalam rasionalitasnya menuntut penghargaan terhadap kapasitas yang sama pada orang lain. Ini menuntun kita pada proposisi ke-7:

(7) Saya mendukung (yang artinya menghargai) reflektivitas sebagai bentuk kemanusiaan dalam diri saya sekaligus orang lain.

Korsgaard mengemukakan:

To value yourself just as human being is to have moral identity, as the enlightenment understood it. So this puts you in moral territory. Or at least, it does so if valuing humanity in your own person rationality requires valuing it in the person of others (Korsgaard, 1996, p. 121).

Proposisi (6) dan (7) meninggalkan persoalan tersendiri dalam pemikiran Korsgaard, khususnya mengenai identitas praktis. Korsgaard menegaskan bahwa pertanyaan normatif sesungguhnya adalah pertanyaan orang pertama (*first person question*)

The normative question is a first person question that arises for the moral agent who must actually do what morality says. When you want to know what a philosopher's theory of normativity is, you must place yourself in the position of agent on whom morality is making a difficult claim. You then ask the philosopher: must I really do this? Why must I do it? And his answer is his answer to the normative question (Korsgaard, 1996, p.16).

Jawaban terhadap pertanyaan normatif harus memungkinkan kita menyapa seseorang dalam posisinya selaku orang pertama. Seorang agen yang menimbang apakah dia harus melakukan sesuatu yang beralasan secara rasional atau tidak. Lebih dari itu, jawaban tersebut harus mengenai rasa ke-identitas-an kita. Sebuah keputusan moral untuk mengeluarkan zakat misalnya. Keputusan itu tidak sekadar bersandar pada prinsip keadilan distributif yang bersifat umum. Keputusan itu tertanam dalam identitas si pemberi zakat sebagai seorang muslim yang taat.

Persoalan pun timbul. Pertama, apakah saya memberi zakat hanya karena identitas praktis saya selaku muslim? Kalau demikian, perintah moral berzakat menjadi semata-mata imperatif bersyarat. Kedua, bagaimana mendamaikan antara sifat umum sebuah prinsip tindakan dengan partikularitas identitas praktis? Bagaimana seorang dalam kekhususannya mendukung sebuah prinsip umum tindakan?

Korsgaard mengemukakan dua makna yang melekat pada identitas praktis. Pertama, identitas praktis dapat dimengerti sebagai kondisi partikular identitas seseorang. Kedua, identitas praktis adalah sebuah karakter umum yang melekat pada kemanusiaan seseorang. Kewenangan rasionalitas dalam mendikte tindakan, menurut Korsgaard, bergeser dari pendasaran pada identitas praktis sebagai fakta psikologis partikular ke identitas praktis sebagai karakter umum kepelakuan yang mengundang komitmen publik terhadap tindakan.

Korsgaard menegaskan bahwa apabila reflektivitas merupakan sumber rasionalitas maka identitas praktis adalah sumber kewajiban. Keduanya berkaitan satu sama lain. Alasan rasional bukan semata-mata aturan yang abstrak. Orang tidak menolong orang berdasarkan prinsip emas "lakukan kepada orang lain seperti kau ingin diperlakukan". Alasan rasional adalah ekspresi bermakna nilai dan karakter seseorang. Identitas praktis adalah "sebuah deskripsi yang mana seorang menilai dirinya, sebuah deskripsi yang mana seorang menemukan bahwa hidupnya layak dijalani dan tindak-tanduknya layak dilakukan." (Korsgaard, 1996, p. 101).

Konsepsi tentang diri dimungkinkan karena kapasitas reflektif yang menghasilkan alasan-alasan rasional. Kita merasa memiliki kewajiban karena kita memiliki identitas personal yang melaluinya tindakan tertentu menjadi tampak terlarang. Seorang muslim taat berpikir, "saya tidak dapat menanggung malu apabila tidak berzakat.". Identitas praktis sebagai muslim membuat tindakan "tidak membayar zakat" menjadi terlarang dan bertolak belakang dengan konsepsi diri sebagai muslim. Bagi Korsgaard, alasan rasional kita berkekuatan normatif dikarenakan dua hal. Pertama, kita melekatkan otoritas pada alasan tersebut melalui reflektivitas. Kedua, konsepsi diri kita membimbing bahkan memaksa kita untuk bertindak sesuai dengan konsepsi tersebut guna mempertahankan rasa identitas yang berkesatuan.

Gagasan identitas praktis dalam kaitannya dengan kewajiban mengandung persoalan yang cukup pelik. Korsgaard menekankan bahwa kewajiban tidak lain adalah reaksi terhadap ancaman hilangnya identitas (Korsgaard, 1996, p.102). Dua persoalan mengemuka. Pertama, apakah

kewajiban seorang untuk bertindak semata-mata karena persoalan identitas? Apakah seorang membayar zakat hanya karena takut kehilangan identitasnya sebagai muslim? Kedua, apakah kekuatan normatif alasan rasional adalah hasil dari ancaman terhadap identitas atau indikator belaka tentang hadirnya kewajiban? Apakah ancaman terhadap identitas merupakan sumber atau sekadar gejala adanya kewajiban?

Korsgaard memiliki dua jawaban yang tidak dapat dikatakan konsisten satu sama lain mengenai persoalan di atas. Pertama, kewajiban memmanifestasikan dirinya dalam identitas yang terancam. Sebab itu, sumber kewajiban adalah kondisi psikologis yakni konsepsi diri yang terancam. Ini menurut Korsgaard membuat kewajiban menjadi nyata secara psikologis dan tak terelakkan dalam orang pertama. Kenyataan bahwa konten proposisi tertentu telah secara reflektif didukung tidak dapat menjadi penjelasan mengenai otoritas rasionalitas. Tindakan yang beralasan tetap bergantung sepenuhnya pada gerak dari kehendak. Penggerak kehendak adalah operasi psikologis.

Kedua, sumber normativitas adalah identitas praktis dalam artian umum. Dalam konteks ini, fakta psikologis mengenai agen tidak menjelaskan apa-apa mengenai otoritas rasionalitas. Adalah kapasitas kita sebagai peminta dan pemberi alasan rasional yang berfungsi sebagai sumber otoritas normatif. Jika otoritas rasionalitas bersifat konsitutif terhadap kepelakuan (agency) dalam artian umum, maka justifikasi normatif terhadap tindakan tidak memerlukan konsepsi konsepsi diri partikular.

Kedua jawaban Korsgaard di atas memiliki persoalan. Persoalan pada jawaban pertama adalah bagaimana membedakan kondisi psikologis yang pseudo dan sesungguhnya? Keterancamannya terhadap identitas bisa jadi adalah gejala psikopatologis. Seorang bisa saja mengunci dirinya di rumah karena takut identitas keagamaannya tergerus oleh kehidupan urban yang menyesatkan. Persoalan lainnya adalah reduksi rasionalitas ke dalam operasi psikologis. Fenomenolog Edmund Husserl mengingatkan mengenai ketaktereduksian yang rasional ke dalam yang psikologis (Husserl, 2000, p. 30-34). Bagi Husserl tugas rasionalitas bukan mengusut asal muasal atau akibat dari sebuah aktivitas

intelektual melainkan muatan kebenaran aktivitas intelektual tersebut. Rasionalitas bekerja dengan pikiran atau keputusan yang benar bukan hukum yang secara faktual bekerja pada aktivitas intelektual tertentu. Tugas rasionalitas, oleh sebab itu, bukan mengusut asal muasal kewajiban “tolonglah orang lain tanpa memandang keyakinannya!” melainkan memeriksa nilai kebenarannya.

Persoalan pada jawaban kedua adalah penetapan identitas praktis sebagai karakter umum kemanusiaan bertentangan dengan tuntutan pertanyaan normatif sebagai pertanyaan orang pertama. Padahal, seperti dikemukakan sebelumnya, Korsgaard menekankan bahwa jawaban sebuah pertanyaan normatif harus berasal dari orang pertama dengan segala kekhususannya. Penetapan identitas praktis sebagai karakter umum kemanusiaan menjangkarkan jawaban terhadap pertanyaan normatif pada orang ketiga bukan pertama.

V.4 Ricoeur: Idem dan Ipse

Gagasan identitas praktis Korsgaard bermasalah karena gagal menyelesaikan ambiguitas “yang partikular” dan “yang umum” berkenaan dengan Identitas. Persoalan yang oleh Paul Ricoeur dianalisa dengan cukup baik dan rinci dalam bukunya *Oneself as Another* (1992). Ricoeur membedakan antara identitas sebagai kesamaan (idem) dan identitas sebagai kedirian (ipse). Identitas sebagai kesamaan menjawab pertanyaan “apa” tentang manusia. Sementara, identitas sebagai kedirian menjawab pertanyaan “siapa”. Idem adalah identitas manusia dalam keumumannya sementara ipse, kekhususan. Hubungan antara keduanya, menurut Ricoeur, tidak sesederhana yang dikira orang.

Identitas sebagai kesamaan (idem) terbagi menjadi tiga modus: (a) identitas numeric (b) identitas kualitatif dan (c) kesinambungan takterinterupsi (*uninterrupted continuity*) (Ricoeur, 1992, p. 116-117). Identitas numerik adalah apabila dua kejadian dari sesuatu hal tidak membentuk dua hal yang berbeda. Identitas di sini dapat dimaknai sebagai kesatuan sebagai oposisi dari

kemajemukan (pluralitas). Identitas kualitatif adalah identitas yang disebabkan oleh kualitas yang melekat pada suatu hal. Misalnya, A dan B mengenakan kaos yang sama sehingga sukar untuk dipertukarkan satu sama lain.

Dua modus identitas sungguh terpisah satu sama lain. Yang pertama adalah mengenai kuantitas sementara yang kedua, kualitas. Namun, keduanya tidak sungguh-sungguh asing satu sama lainnya. Variabel waktu yang terdapat dalam identitas numerik membuat reidentifikasi menimbulkan keraguan. Kita misalnya melihat cincin emas bertakhta berlian di satu hari tertentu. Keesokan harinya kita datang ke toko yang sama namun ragu untuk mengidentifikasi cincin yang sama seperti yang kita lihat kemarin. Dengan kata lain, kemiripan ekstrim yang mana tak ada keraguan di dalamnya adalah kriteria tak langsung yang menguatkan identitas numerik.

Modus ketiga adalah kesinambungan takterinterupsi. Modus ini adalah identitas antara tahap pertama dan terakhir dari perkembangan individu yang sama. Modus ini lah yang membuat kita mampu mengidentifikasi seseorang yang sudah sekian puluh tahun tidak bertemu. Kriteria ini berfungsi maksimum ketika pertumbuhan atau penuaan beroperasi sebagai faktor pembeda seiring jalannya waktu. Prinsip yang menopang modus kesinambungan takterinterupsi adalah prinsip keberterusan dalam waktu. Kita misalnya masih mengatakan bahwa alat yang tergeletak di gudang adalah sebuah sepeda motor meski sebagian onderdilnya sudah hilang. Bagian dari perkakas tertentu dapat saja hilang namun strukturnya tetap tak berubah.

Prinsip keberterusan dalam waktu ditemukan dalam pertanyaan "apa" tentang manusia. Dengan kata lain, prinsip tersebut adalah prinsip bagi identitas kesamaan (*idem*). Di sini timbul persoalan: "adakah bentuk keberterusan dalam waktu yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan 'siapa'?". Adakah bentuk keberterusan dalam waktu yang berlaku bagi identitas kedirian (*ipse*)?

Ketika kita membicarakan diri kita sendiri, kita menemukan dua model keberterusan dalam waktu yaitu karakter dan pemegang janji. Karakter adalah seperangkat ciri pembeda yang memungkinkan identifikasi individu tertentu

sebagai sosok yang sama. Karakter adalah disposisi yang menetap yang melaluinya seseorang dikenali.

Frase "disposisi yang menetap" mengandaikan bahwa disposisi tidak merupakan bawaan genetik. Disposisi adalah sesuatu yang dibuat dan kemudian menetap pada diri seseorang. Disposisi memiliki dimensi temporalnya sendiri. Dimensi temporal disposisi dapat ditemukan dalam kebiasaan, baik kebiasaan yang tengah dibentuk atau kebiasaan yang sudah menetap. Dua bentuk kebiasaan ini memberi kesejarahan pada karakter. Namun, kesejarahan tersebut bersedimentasi sehingga cenderung menutup segenap inovasi dan kreasi yang datang belakangan, atau bahkan menghapuskannya sama sekali. Adalah sedimentasi tersebut yang memberikan pada karakter corak keberterusan dalam waktu. Ini membuat kesebangunan antara *ipse* dan *idem*. Karakter sebagai modus identitas kedirian (*ipse*) berbagi prinsip yang sama dengan berbagai modus identitas kesamaan (*idem*): identitas numerik, identitas kualitatif dan kesinambungan tak terinterupsi.

Dimensi temporalitas juga ditemukan pada identifikasi seorang atau kelompok pada nilai, norma, tauladan, model dan pahlawan yang mana melaluinya seorang atau kelompok mengenali dirinya. Identifikasi dengan figur heroik adalah identifikasi yang lain sebagai dirinya sendiri. Hal serupa secara implisit ditemukan pada identifikasi seorang pada nilai yang meletakkan sebuah tujuan ideal (*cause*) di atas keselamatan dirinya. Dengan kata lain, terdapat elemen kesetiaan pada karakter. Kita, sebab itu, tidak dapat memikirkan mengenai *idem* seseorang tanpa merujuk pada *ipse* pun ketika yang satu sepenuhnya membungkus yang lain.

Stabilitas karakter dihasilkan oleh kebiasaan dan identifikasi pada yang ideal. Stabilitas itu pula yang menyebabkan karakter memiliki identitas numerik, identitas kualitatif, dan kesinambungan tak terinterupsi yang kesemuanya berporos pada kesamaan. Karakter adalah "apa" dari "siapa". Itu adalah *idem* dari *ipse*, yang ajek dari yang dinamis. Kita, misalnya, tidak akan mengajak seorang kolega ke klub malam karena tahu mengenai komitmen yang bersangkutan terhadap larangan agamanya untuk tidak mendekati maksiat. Kita

juga dapat mengenali seorang teman lama dari sikap kesehariannya yang mengikuti tauladan Bung Karno.

Menurut Ricoeur, meskipun *ipse* tertutup sama sekali oleh *idem* kita tetap dapat membedakan antara keduanya (Ricoeur, 1992, p. 122). Dialektika antara inovasi dan sedimentasi, dialektika antara diri dan yang lain, dan internalisasi senantiasa mengingatkan kita bahwa karakter bukan bawaan. Karakter memiliki kesejarahannya sendiri yang telah diketatkan sedemikian rupa hingga tampak stabil. Stabilitas karakter sesungguhnya memiliki dimensi naratif. Sang teman lama dapat berkisah, "saya mendapat kebiasaan untuk belajar sebelum ujian saat duduk di kelas dua SMP, persisnya ketika hendak mengikuti ujian matematika yang terkenal sulit" atau "saya mulai terpukau pada Bung Karno ketika mendengar rekaman pidato beliau di Radio Republik Indonesia."

Selain karakter terdapat modus keberterusan dalam waktu lain yaitu komitmen terhadap janji. Komitmen terhadap janji, menurut Ricoeur, mengekspresikan konsistensi diri yang berbeda dengan konsistensi karakter. Komitmen terhadap janji tidak dapat ditanamkan pada identitas umum (*idem*) melainkan khusus dan dinamis (*ipse*). Kesenambungan karakter dan konsistensi dalam memegang janji adalah dua hal yang berbeda. Karakter adalah "apa" sementara, komitmen terhadap janji: "siapa".

Komitmen terhadap janji adalah perlawanan terhadap waktu, sebuah penolakan terhadap perubahan. Seorang pengantin pria bersumpah, "Dalam suka dan duka aku akan tetap menjaga komitmen pada istriku". Kita memang tidak dapat memastikan masa depan. Namun, apa pun yang terjadi nanti kita akan tetap berpegang pada komitmen yang sudah diucapkan saat ini.

Komitmen terhadap janji berhubungan dengan apa yang digagas Heidegger sebagai "kesungguhan yang mengantisipasi" (*anticipatory resoluteness*). Kesungguhan yang mengantisipasi bukan sikap manusia kebanyakan (*Das Man*). Seorang yang tengah memilih koran di warung dekat rumahnya tidak sedang mempertontonkan kesungguhan yang mengantisipasi. Kesungguhan yang mengantisipasi adalah sikap manusia sebagai *Dasein* yang memiliki cara berada sebagai ada-menuju-kematian. Bahwasanya *Dasein*

memiliki kemungkinan yang sungguh-sungguh miliknya yaitu kematian. Dengan kata lain, *Dasein* tidak menjalani kematian orang lain selain dirinya sendiri. Dalam diri *Dasein* terdapat kebeluman yang tak berbagi. Manusia yang bersungguh-sungguh mengantisipasi kematian adalah manusia yang menjalani hidup dalam segenap keotentikannya². Manusia tidak menjalani kesungguhan yang mengantisipasi sebagai sosok yang serba umum. Ia menjalaninya sebagai ada-menuju-kematian yang serba khusus dan unik.

Komitmen terhadap janji adalah modus keberterusan dalam waktu yang bertolak belakang dengan keberterusan karakter. Di sini persisnya kedirian (*ipse*) dan kesamaan (*idem*) berhenti berhubungan satu sama lain. Kata "saya" dalam "saya berjanji akan mengembalikan buku" tidak menunjukkan karakter yang timbul dari kebiasaan yang bersedimentasi. Sebab, apabila "saya" adalah karakter maka buat apa "saya" berikrar untuk menepati janji? Apabila "saya" yakin bahwa karakter "saya" tidak akan mengingkari janji maka buat apa "saya" susah payah berikrar? Komitmen pada janji mengandaikan dimensi nonkarakter pada diri

Identitas manusia memiliki corak naratif. Narasi menyatukan elemen-elemen terpisah dalam penceritaan menjadi kesatuan plot dalam kurun waktu tertentu. Semua elemen yang disatukan oleh narasi bersifat kontigen. Semuanya bisa saja berbeda atau malah tidak ada. Apabila berdiri sendiri elemen sebuah penceritaan dapat menempati posisi cukup penting. Namun, ketika elemen tersebut disatukan ke dalam plot maka statusnya adalah kuasi-niscaya. Karakter dalam narasi hanya berubah status menjadi pribadi ketika seorang mengevaluasi karakter tersebut sebagai terpuji atau sebaliknya.

Narasi tentang manusia menceritakan baik hubungan-hubungan yang menyatukan berbagai perilaku dalam kurun waktu tertentu maupun hubungan-hubungan yang menghubungkan berbagai sudut pandang dan asesmen

² Cara berada *Dasein* sebagai keutuhan menurut Heidegger adalah unik. Itu tidak melibatkan penghapusan segenap kemungkinan atau sebaliknya: aktualisasi kemungkinan. Cara berada *Dasein* adalah cara berada yang memiliki segenap kemungkinan namun terbatas. Segenap kemungkinan tersebut selalu dibatasi oleh kemungkinan akan ketidakmungkinan untuk bereksistensi. Dengan kata lain segenap kemungkinan *Dasein* dibatasi oleh kematian. Kefanaan adalah kemungkinan paling pribadi yang dimiliki seseorang. Kefanaan adalah apa yang membuat hidup seseorang menjadi miliknya sendiri untuk dijalani. Kehidupan yang seseorang jalani dalam segenap keotentikan dengan terus dibayangi kemungkinan noneksistensinya.

terhadap berbagai perilaku tersebut. Narasi membangun identitas karakter yang disebut sebagai identitas naratif.

Kita memaknai identitas pribadi seperti halnya identitas karakter dalam cerita. Pertama, kita memahami berbagai karakter yang ada melalui plot yang menyatukan apa yang terjadi pada mereka: tujuan, proyek dan apa yang secara aktual dilakukan. Sama seperti itu, kita memaknai identitas kita dengan bercerita tentang kisah hidup kita. Identitas naratif bukan merupakan struktur atau substansi yang tetap. Sampai satu cerita selesai, identitas karakter-karakter di dalamnya tetap terbuka untuk direvisi.

Kedua, setiap identitas selalu beririsan dengan identitas lain dalam narasi. Interseksi tersebut dapat menghasilkan cerita kelas dua (*second-order stories*), misalnya cerita tentang keluarga yang mengisahkan keterhubungan antara berbagai cerita individu. Sama seperti itu, cerita yang membangun identitas kita menunjukkan bahwa hidup kita senantiasa berhubungan dengan orang lain. Hubungan ini bisa saja di luar kemauan kita. Dengan kata lain, orang lain senantiasa merupakan konstituen dalam identitas kita, demikian pula sebaliknya.

Ketiga, setiap karakter dalam cerita bukan sosok universal melainkan sosok yang datang dari tempat tertentu dan pewaris tradisi tertentu. Sama seperti itu, kita tidak pernah sepenuhnya kosmopolitan. Kita adalah ada-dalam-dunia yang senantiasa bersituasi dan menyejarah.

Keempat, narasi menunjukkan bahwa dari sudut pandang etika terdapat sejenis supremasi orang lain terhadap diri kita. Kesatuan naratif hidup ini terdiri atas momen-momen responsivitas atau kegagalan merespon orang lain. Diri responsif berurusan tidak dengan kondisinya sendiri melainkan berupaya merespon orang lain secara jujur dan ikhlas. Diri responsif bukan sosok yang otonom secara moral. Diri responsif bukan subjek Kantian yang merenungkan kebaikan dalam kesendirian. Dia hidup dengan harapan bahwa responsivitasnya terhadap orang lain akan menghasilkan hidup yang lebih baik bagi semua, hidup yang mana mereka semua berpartisipasi dengan dan untuk orang lain.

Analisa Ricoeur terhadap identitas manusia sebagai identitas naratif menghasilkan empat kesimpulan:

1. Oleh karena identitas saya adalah identitas naratif, saya dapat memaknai diri saya hanya melalui keterlibatan dengan orang lain.
2. Dalam keterlibatan saya dengan orang lain, saya tidak sekadar menjalankan peran atau fungsi yang sudah ditentukan di depan. Saya dapat mengubah diri saya lewat upaya saya sendiri dan dapat secara rasional mendorong orang lain untuk berubah.
3. Karena saya bertubuh sehingga mewarisi konstrain biologis dan psikologis, saya tidak dapat mengubah segala sesuatu berkenaan dengan diri saya. Orang lain juga memiliki konstrain yang sama sehingga saya tidak dapat mengubah dia secara menyeluruh.
4. meskipun saya dapat dievaluasi melalui berbagai cara, evaluasi etis berkenaan dengan responsivitas saya terhadap orang lain adalah yang terpenting.

Identitas naratif berosilasi di antara dua batas: batas bawah dan batas atas. Batas bawah adalah batas yang mana permanensi dalam waktu mengaburkan perbedaan antara *idem* dan *ipse*. Batas atas adalah batas yang mana *ipse* melontarkan pertanyaan tentang identitasnya tanpa bantuan *idem*. Identitas naratif adalah hasil pemahaman kehidupan sebagai sebuah kisah yang disatukan oleh tujuan hidup yang baik sehingga memungkinkan tiap orang menunjukkan kualifikasi etisnya³. Identitas naratif adalah identitas etis yang di tengah-tengah perubahan tetap mampu membuat dan mempertahankan komitmen etis. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pastor katolik memiliki sahabat beragama Islam yang terkenal religius namun moderat. Sang pastor dapat berdiskusi secara kritis tentang Islam dan yakin bahwa sang sahabat tidak akan tersinggung. Hal itu dapat terjadi karena identitas naratif sang sahabat yang, meski ada perubahan, tetap memegang posisi etisnya sebagai seorang Islam moderat.

³ Definisi ini adalah rumusan Dr. Haryatmoko berdasarkan gagasan Ricoeur mengenai identitas di dalam buku *Oneself as Another* (1992)

Teori Identitas Ricoeur dapat dijadikan perspektif untuk membaca gagasan Korsgaard mengenai identitas praktis. Ambiguitas Korsgaard mengenai identitas praktis disebabkan kegagalannya membedakan antara identitas *idem* dan *ipse*. Identitas praktis jelas-jelas adalah si penjawab pertanyaan normatif dalam segala kekhususannya. Ini sudah dengan tegas dinyatakan Korsgaard. Identitas praktis adalah identitas orang pertama yang serba khusus dan unik. Identitas praktis dalam konteks tersebut adalah *ipse*. Namun, kemudian Korsgaard menyebut mengenai identitas praktis sebagai karakter umum. Ini adalah pembungkusan *ipse* oleh *idem*. Apabila Korsgaard dengan tegas menyatakan bahwa identitas praktis adalah *ipse* tanpa noda *idem*, maka ambiguitas dalam pikirannya akan terselesaikan.

Persoalan seputar sumber kewajiban pun akan terselesaikan apabila Korsgaard mengartikan identitas praktis sebagai *ipse*. Kekhususan menghasilkan kewajiban. Seperti ilustrasi di atas, seorang merasa wajib memegang janji justru karena dirinya bukan abstraksi etis yang tak bercela. Saya berikrar dari kekhususan bukan keumuman identitas saya. Dengan demikian, identitas praktis sebagai *ipse* melahirkan kewajiban. Saya wajib memenuhi janji justru karena saya adalah yang unik, khusus dan tak tergantikan.

Korsgaard mengatakan bahwa muara dari reflektivitas adalah identitas praktis. Reflektivitas berakhir pada kesadaran tentang keberadaan identitas praktis. Penulis berpendapat bahwa proses tersebut dapat berjalan terbalik. Kesadaran tentang Identitas praktis sebagai *ipse* membuat seorang merefleksikan prinsip-prinsip tindakan yang tadinya diterima sebagai yang ajek. Bahwasannya prinsip tindakan seorang tertanam pada identitas praktis yang serba konkret dan khusus. Ketertanaman prinsip tindakan pada identitas praktis sebagai *ipse* telah merelativisirnya. Saya sadar bahwa prinsip: "tolong mereka yang seiman" bertolak dari identitas praktis saya sebagai seorang yang "kebetulan" berkeyakinan tertentu. Prinsip tersebut kemudian direfleksikan sebagai yang relatif karena tertanam pada modus identitas *ipse* bukan *idem*.

Tabel 11

Perbandingan Teori Rasionalitas Tindakan

	GAME THEORY (JOHN VON NEUMANN, OSKAR MORGENSTERN)	TEORI KONSTRAN (JON ELSTER)	TEORI PEMAKSIMAL TERKONSTRAN (DAVID GAUTHIER)	TEORI RASIONALITAS REFLEKSIF (CHRISTINE KOSRGAARD)
RASIONALITAS	Rasionalitas instrumental-tertutup	Rasionalitas instrumental-tertutup	Rasionalitas instrumental-terbuka	Rasionalitas refleksif terbuka
ASUMSI ANTROPOLOGIS KERJASAMA	Homo oeconomicus	Homo oeconomicus	Homo oeconomicus	Subjek reflektif
	Tidak dimungkinkan-orientasi pada kepentingan jangka pendek	Dimungkinkan-orientasi pada kepentingan jangka panjang	Dimungkinkan-orientasi pada kepentingan jangka panjang	Dimungkinkan-orientasi pada kesalingpahaman yang berujung pada kesalingpercayaan
DERAJAT KETERTUTUPAN	Rasionalitas dalam teori permainan tertutup pada informasi mengenai yang lain sebagai sosok historis	Konstran dalam bentuk strategi pra komitmen bukan untuk membangun kesalingpercayaan melainkan kepentingan pribadi-jangka panjang	Rasionalitas yang bekerja masih bercorak instrumental meski mulai membuka diri pada utilitas atau nasib orang lain, dengan kata lain rasionalitas masih instrumental dalam melayani keinginan memperoleh keuntungan maksimal yang didapatkan dari kerjasama	Rasionalitas tidak bekerja di ruang hampa melainkan berjangkar pada identitas praktis tertentu.

V. 5 Ikhtisar

Rasionalitas instrumental bercorak nonkerjasama karena bersandar pada prinsip maksimalisasi utilitas yang pada gilirannya tertanam dalam model agen sebagai pemaksimal utilitas. Rasionalitas instrumental agen tidak dapat merefleksikan prinsip maksimalisasi utilitas sebab agen sendiri sudah dipatok sebagai pemaksimal utilitas. Di sini persoalan non kerjasama dalam rasionalitas tindakan bertautan erat dengan persoalan identitas baik agen maupun orang lain.

David Gauthier kemudian memperkenalkan gagasan mengenai agen sebagai pemaksimal terkonstrain. Pemaksimal terkonstrain adalah agen yang melihat rasionalitas dalam tindakan kerjasama. Pemaksimal terkonstrain tidak sekadar menimbang strategi lawan tetapi juga utilitasnya. Pertanyaan pemaksimal terkonstrain bukan semata "apa dampak strategi lawan buatku" melainkan "apa dampak strategiku buat lawan". Pemaksimal terkonstrain juga memiliki kemampuan untuk menebak secara hamper pasti disposisi sesungguhnya dari orang lain. Dia dapat membedakan antara pemaksimal terkonstrain sejati dengan pemaksimal terkonstrain semu. Kemampuan ini disebut Gauthier sebagai *translucency*.

Persoalan mendasar dalam gagasan Gauthier adalah asumsi agen sebagai pemaksimal utilitas. Berangkat dari asumsi itu, target agen tetap adalah maksimalisasi utilitas, meski sekarang adalah utilitas jangka panjang dan kolektif. Pendasaran rasionalitas kerjasama pada model pemaksimal bermasalah karena seorang pemaksimal utilitas akan berusaha untuk menipu orang lain ketika tipuan itu menguntungkan dan mungkin. Ketika utilitas yang diharapkan lewat penipuan lebih besar daripada utilitas yang diharapkan lewat kerjasama, seorang pemaksimal utilitas tidak akan memilih untuk bekerjasama kecuali dia yakin bahwa orang lain akan bertindak sama.

Rasionalitas kerjasama Gauthier tidak merefleksikan prinsip maksimalisasi utilitas melainkan sekadar meluaskannya sehingga mencakup utilitas jangka panjang dan kolektif. Identitas agen dan orang lain pun masih dibungkus oleh model pemaksimal utilitas yang abstrak.

Persoalan rasionalitas dan identitas kemudian disambangi lagi oleh Charles Taylor. Taylor mengemukakan gagasan mengenai rasionalitas *ad hominem*. Rasionalitas ini tidak bertolak dari sebuah komitmen fundamental terhadap prinsip tertentu. Rasionalitas *ad hominem* bertolak dari apa yang menjadi komitmen orang lain dalam kekonkretannya. Alih-alih menjadi objek kritisisme berdasarkan prinsip tertentu, komitmen orang lain justru dijadikan titik berangkat.

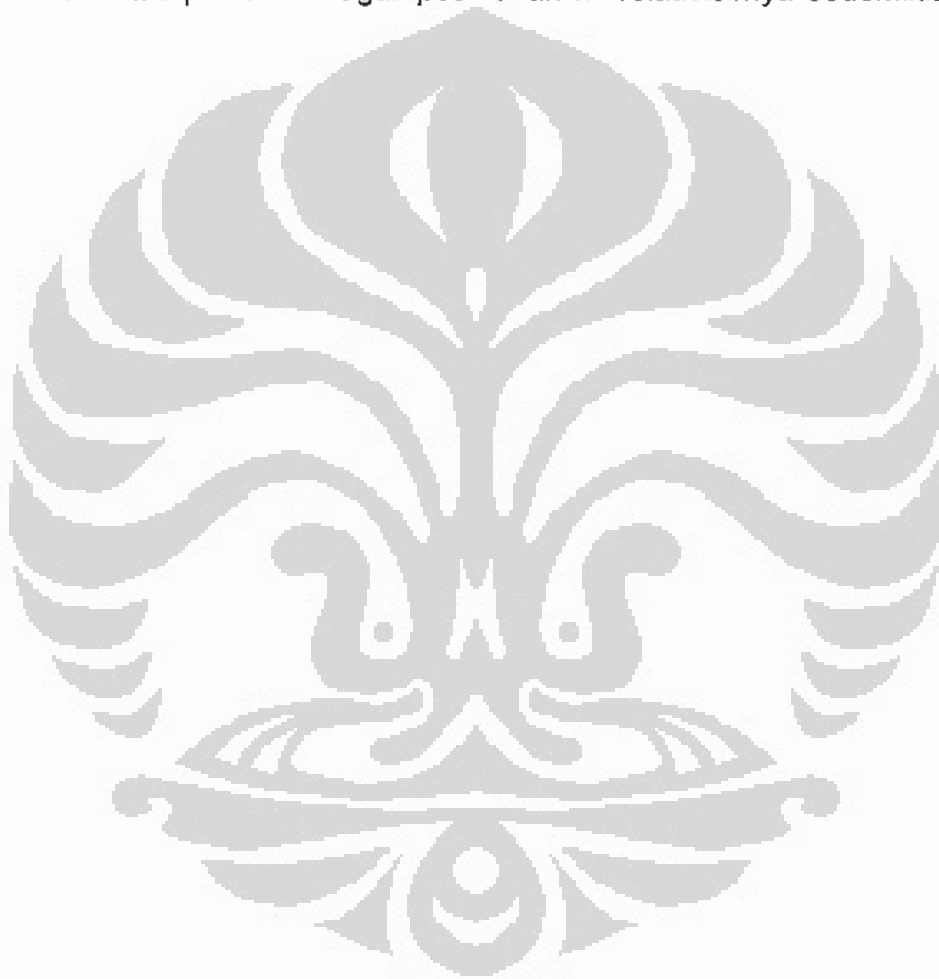
Rasionalitas ad hominem menuntut sebuah percakapan intens dan konkret orang per orang. Kita dapat berargumentasi satu sama lain untuk mengubah keinginan atau preferensi masing-masing. Pertemuan dengan orang lain sebagai sosok yang konkret adalah sebuah pengalaman baru yang dapat mengubah atau memperkaya keinginan atau preferensi seseorang. Perubahan satu keinginan ke keinginan lain tidak didasarkan pada kriteria eksternal melainkan argumentasi yang menimbang komitmen konkret orang lain.

Charles Taylor mengingatkan bahwa rasionalitas kerjasama menuntut perjumpaan dengan identitas orang lain sebagai yang konkret. Di samping itu, rasionalitas kerjasama juga membutuhkan refleksi terhadap prinsip yang mendasari tindakan. Christine Korsgaard mengemukakan tentang modus reflektivitas dalam rasionalitas tindakan.

Menurut Korsgaard, sebagai seorang agen yang reflektif seorang memiliki kapasitas untuk secara reflektif menyadari hasrat X yang mendukung tindakan Y. Begitu sang agen menyadarinya, dia dihadapkan pada pertanyaan: "Haruskah saya bertindak seperti yang didiktekan oleh X? Untuk menjawab pertanyaan ini sang agen harus memutuskan apakah dia bertindak berdasarkan X atau tidak. Bagi seorang agen reflektif, bertindak berdasarkan X berarti bertindak berdasarkan prinsip umum tertentu. Reflektivitas akan membawa pertanyaan itu lebih jauh: "Haruskah sang agen mendukung prinsip tersebut?"; "Apakah sang agen adalah jenis orang yang mendukung prinsip tersebut?" Bertindak A dalam reflektivitas yang penuh adalah dukungan terhadap sebuah konsepsi diri yang disebut Korsgaard sebagai "Identitas Praktis".

Korsgaard membuat terobosan dengan mendasarkan prinsip tindakan pada identitas praktis. Bahwasannya prinsip tidak berupa sederet proposisi abstrak melainkan ekspresi dari identitas agen. Persoalannya Korsgaard sendiri masih bersikap ambigu mengenai identitas praktis. Di satu sisi, identitas praktis adalah sesuatu yang konkret dan kontekstual sementara di sisi lain, identitas praktis disebut Korsgaard sebagai karakter umum kemanusiaan. Korsgaard gagal menentukan apakah identitas praktis adalah, meminjam istilah Ricoeur, *idem* (kesamaan) atau *ipse* (kepribadian).

Penulis sendiri berpendapat bahwa reflektivitas terhadap prinsip tindakan tidak bekerja dalam ruang hampa. Reflektivitas bekerja dalam sosok identitas dalam segenap kekhususannya. Oleh sebab itu, reflektivitas harus senantiasa dihubungkan dengan identitas praktis sebagai *ipse* bukan *idem*. Kesadaran tentang Identitas praktis sebagai *ipse* membuat seorang merefleksikan prinsip-prinsip tindakan yang tadinya diterima sebagai yang ajek. Ketertanaman prinsip tindakan pada identitas praktis sebagai *ipse* telah merelativisirnya sedemikian rupa.



Bab VI

KESIMPULAN

Konflik adalah persoalan sosial yang mengundang banyak keterangan dan analisa. Dalam ilmu sosial, salah satu keterangan mengenai konflik dikemukakan oleh seorang ilmuan politik, Bo Rothstein. Rothstein menerangkan konflik sebagai jebakan sosial. Jebakan sosial adalah konflik yang berulang dan menyulitkan agen untuk melepaskan diri karena absennya kepercayaan. Kepercayaan sulit dibangun karena ingatan kolektif masing-masing agen mengenai keburukan lawan.

Jebakan sosial adalah dilema narapidana dalam teori permainan. Dilema narapidana adalah situasi strategis yang mana hasil yang didapat sang agen terkait dengan pilihan yang diambil lawan. Situasi strategis dilema narapidana membuat agen mengambil opsi tidak bekerjasama yang sesungguhnya tidak saling menguntungkan. Tidak ada komitmen etis apa pun yang bisa dibangun. Sebab, insentif yang didapat dari pelanggaran atasnya lebih besar dari kepatuhan.

Dilema narapidana sesungguhnya adalah persoalan moralitas yakni ketakungkinan dibangunnya komitmen etis yang berkesalingan. Namun, di balik itu sebenarnya bersembunyi persoalan rasionalitas tindakan (*practical rationality*). Rasionalitas dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental yang semata-mata bekerja berdasarkan prinsip maksimalisasi utilitas. Prinsip ini adalah model tindakan bertujuan yang berjangkar pada model manusia ekonomi (*homo economicus*), sebuah model yang abstrak dan mengabaikan historisitas agen. Bisa dikatakan, komitmen etis gagal dibangun karena cara kerja rasionalitas instrumental yang mengabaikan kapasitas refleksi dan historisitas agen.

VI.1 Dilema Narapidana dan Ketakungkinan Komitmen Etis

Thomas Hobbes mengemukakan apa yang disebut sebagai kondisi alamiah (*state of nature*). Kondisi alamiah menurut Hobbes adalah kondisi perang semua

melawan semua yang mana kerjasama mustahil terjadi. Situasi ini terjadi karena manusia satu-satunya kepentingan yang tertanam di benak manusia adalah kepentingan pribadi untuk menjaga kelangsungan hidupnya (*self preservation*). Dalam kondisi antropologis sedemikian, kepentingan pribadi satu dengan yang lain akan bertabrakan dan manusia terjat dalam situasi konflik.

Psikologi Hobbesian membuat pilihan bekerjasama menjadi irasional dalam kondisi alamiah. Bagi manusia Hobbesian, janji untuk tidak menyerang orang lain adalah irasional karena orang lain adalah sosok egois yang dapat dipastikan akan melanggar janji. Persoalan pokok yang dihadapi individu dalam kondisi alamiah adalah apa yang disebut sebagai dilema narapidana. Dilema yang banyak didiskusikan dalam diskursus ilmu sosial kontemporer dan filsafat sejak tahun 1950 an. Situasi dilema narapidana berujung pada konflik karena agen akan senantiasa menjatuhkan pilihan untuk tidak bekerjasama apa pun yang dipilih pihak lawannya. Hal itu berlaku pula sebaliknya (**Bab II**).

Perhatikan situasi berikut ini. Agen A berpikir bahwa apabila B memutuskan untuk tidak menyerangnya, dia dapat menyerang atau tidak menyerang. Hasil terbaik bagi agen A apabila agen B tidak menyerangnya didapatkan melalui pilihan menyerang. Agen A juga berpikir bahwa apabila B memutuskan untuk menyerangnya, maka hasil terbaik tetap didapatkan melalui pilihan menyerang. Artinya, dalam situasi dilema narapidana, meski buah dari kerjasama adalah terbaik bagi kedua pihak, keduanya akan tetap memilih untuk tidak bekerjasama. Dilema ini menjelaskan mengapa manusia Hobbesian di dalam kondisi alamiah secara persisten gagal untuk bekerjasama dan senantiasa menyerang satu sama lain.

Dilema narapidana membuat tidak ada komitmen etis yang dapat dijamin keberlakuannya. Komitmen etis gagal dipertahankan karena absennya kepercayaan. Para partisipan pada akhirnya hanya berpikir tentang kepentingannya masing-masing dan berpegangan pada prinsip tindakan yang menguntungkan dirinya. Dalam dilema narapidana, prinsip yang berbunyi: "tetap tutup mulut dan percaya bahwa orang lain akan berbuat sama" adalah tidak rasional.

Perhatikan ilustrasi berikut. Dua mahasiswa, A dan B, bersaing untuk lulus dengan predikat terbaik. Sampai pada suatu saat mereka sadar bahwa mereka tidak dapat mencapai yang terbaik jika tidak bekerjasama. Maka, keduanya berkomitmen untuk saling mengajari. Mahasiswa A mengajari mahasiswa B ekonometri. Sebaliknya, mahasiswa B mengajari mahasiswa teori keputusan. Keduanya dapat membuat kesepakatan yang mengikat dan dapat dijamin keberlakuannya (*enforceable*). Dengan kata lain, interaksi antara keduanya tergolong permainan kooperatif.

Kerjasama pada ilustrasi di atas dimungkinkan karena kedua mahasiswa saling percaya satu sama lain. Keduanya saling percaya bahwa masing-masing akan memberikan yang terbaik. Tetapi bayangkan apabila ketidakpercayaan antara keduanya begitu kuat menancap. Keduanya akan berpikir: "apabila saya membantunya dengan sungguh-sungguh sementara dia tidak, maka saya akan merugi kelak". Dalam situasi tersebut, tidak mungkin dibuat kesepakatan yang dapat dijamin keberlakuannya (*enforceable*). Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Insentif yang didapatkan lewat pelanggaran kesepakatan lebih besar daripada insentif mematuhi.

Hobbes mengemukakan bahwa komitmen etis untuk bekerjasama hanya bisa dijamin oleh tangan besi Leviathan. Sebab, insentif untuk tidak bekerjasama begitu besar dalam kondisi alamiah. Apabila kita mengabaikan variabel Leviathan sebagai solusi terhadap dilema narapidana, maka muncul persoalan baru. Persoalan tersebut adalah bagaimana perubahan kesepakatan hipotetis untuk bekerjasama menjadi konstrain moral yang aktual. Dengan kata lain, bagaimana kesepakatan menjelma menjadi kepatuhan. Agen dapat saja bersepakat mengenai konstrain moral tertentu namun belum tentu dia mengikatkan diri pada konstrain tersebut kelak.

Persoalan dilema narapidana tidak dapat diselesaikan dengan semata mengandaikan tangan besi. Kita harus menjawab bagaimana agen dapat menerima konstrain atas kepentingan pribadi dan mengikatkan diri pada komitmen etis. Artinya, persoalan yang harus diselesaikan tersembunyi pada cara kerja rasionalitas pihak-pihak yang berkonflik. Penelitian atas dilema

narapidana membawa kita pada persoalan rasionalitas tindakan (*practical rationality*)

VI.2 Rasionalitas Kerjasama: Sebuah Benang Merah

Pada dasarnya, dalam situasi dilema narapidana, pihak-pihak yang bertikai adalah mereka yang memiliki persoalan dengan kerja rasionalitas tindakannya. Rasionalitas tindakan sekadar melayani kepentingan pribadi dan keuntungan jangka pendek belaka. Ini membuahkan persoalan tersendiri. Pihak-pihak yang bertikai tidak akan membangun kepercayaan bahwa masing-masing akan memegang komitmen etisnya. Komitmen etis senantiasa dibatalkan oleh pilihan rasional agen untuk mempromosikan kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, absennya kepercayaan adalah buah dari kerja rasionalitas yang keliru. Kerja rasionalitas disebut keliru apabila sekadar melayani kepentingan pribadi dan menutup segala pertimbangan mengenai pihak lawan. Rasionalitas tindakan dalam kondisi alamiah Hobbesian tidak dapat menemukan jaminan apa pun bahwa pihak lawan akan bekerjasama. Rasionalitas tindakan yang bekerja dalam dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental bersandar pada prinsip maksimalisasi utilitas dan model manusia ekonomi (*homo economicus*). Rasionalitas instrumental menutup diri dari historisitas identitas orang lain dengan mematoknya sebagai sesama promotor kepentingan pribadi (Bab III).

Rasionalitas instrumental tidak tanpa persoalan. Beberapa filsuf, ekonom dan sosiolog sudah mengajukan gugatan terhadap konsep rasionalitas tersebut. Ekonom John C Harsanyi menuduh rasionalitas instrumental telah mengerdilkan kerja rasionalitas manusia. Rasionalitas manusia tidak singular melainkan plural. Rasionalitas instrumental hanya satu dari sekian alternatif rasionalitas tindakan. Harsanyi menyebut paling tidak tiga alternatif rasionalitas tindakan.

Pertama adalah rasionalitas kriteria. Rasionalitas kriteria menuntut seseorang untuk menjatuhkan pilihan guna memenuhi kriteria tertentu dan bukan tujuan selanjutnya. *Kedua* adalah rasionalitas biaya oportunitas. Menurut rasionalitas ini, sebuah pilihan selalu mengenyampingkan pelbagai alternatif pilihan lain yang

mungkin. Tindakan mengenyampingkan pelbagai alternatif pilihan lain membuahkan biaya yang disebut biaya oportunitas (*opportunity cost*). Model rasionalitas tindakan berbasis biaya oportunitas menuntut kita menimbang dengan seksama biaya oportunitas yang dihasilkan oleh pilihan tersebut. Model ini menjelaskan mengapa individu berpindah dari satu tujuan ke tujuan lain meski perangkat preferensi dasarnya tidak berubah. *Ketiga* adalah rasionalitas risiko dan ketidakpastian. Rasionalitas tindakan ini berbeda dengan rasionalitas instrumental yang bekerja dengan kepastian. Orang yang beroperasi dengan rasionalitas instrumental mampu memprediksi secara akurat hasil yang akan dicapai oleh pilihan yang dijatuhkannya. Seperti ketika kita memencet bel dan yakin bel itu akan berbunyi. Sementara orang yang beroperasi dengan rasionalitas risiko dan ketidakpastian tidak memperoleh privilese semacam itu. Dalam konteks risiko, seseorang tidak bisa memprediksi hasil tapi paling tidak ia mengetahui probabilitas objektif yang melekat pada pelbagai hasil yang mungkin. Ketika kita melempar dadu satu kali probabilitas objektif untuk mendapat angka tiga adalah satu banding enam. Dalam konteks ketidakpastian, sebagian atau bahkan semua probabilitas objektif yang melekat pada hasil yang mungkin tidak diketahuinya.

Sosiolog Margareth Archer Margareth Archer menegaskan bahwa manusia dalam kesehariannya bukan *homo economicus* yang menimbang-nimbang sarana guna mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manusia adalah *homo sentiens* yang selalu terlibat secara sosial. *Homo sentiens* adalah karakter yang mampu membuat komitmen moral yang mana alasan untuk mempertahankannya bertolak dari keterlibatan sosial bukan kepentingan pribadi. Tindak-tanduk seorang *homo sentiens* tidak bisa diukur semata-mata berdasarkan preferensi pribadinya melainkan nilai sosial yang melekat pada tindakan itu.

Ketika kita meminta dicintai dan dihormati kita tidak memintanya untuk tujuan lain melainkan cinta dan kehormatan itu sendiri. Tujuan-tujuan semacam itu bukan saja merupakan kepanjangan dan ekspresi diri kita tetapi merupakan sesuatu yang bercorak sosial. Segala modus relasi sosial yang menjadi

kepedulian utama kita (pernikahan, keluarga, karir, agama dan komunitas) bukan sarana melainkan prinsip konstitutif bagi kualitas hidup.

Filsuf Robert Audi mengajukan gugatan terhadap rasionalitas instrumental yang membiarkan tujuan, nilai atau prinsip tak diperiksa. Menurut Audi, rasionalitas tindakan harus mampu memeriksa tujuan sebagai keputusan nilai. Tujuan dapat diperiksa baik instrinsik maupun ekstrinsik oleh rasionalitas. Pemeriksaan instrinsik terhadap tujuan dapat termediasi oleh keyakinan atau bersifat eksperiensial. Saat kita menilai sebuah lukisan, misalnya. Penilaian tersebut dapat termediasi oleh keyakinan mengenai keberadaan *desirability characteristics* atau kualitas-kualitas yang melekat pada pengalaman kita sendiri.

Rasionalitas ekstrinsik sebuah keputusan nilai adalah rasionalitas yang ditransmisikan dari penilaian instrinsik yang terjustifikasi. Misalnya, penilaian sang pengamat terhadap kecakapan seorang gitaris memainkan nada bersifat ekstrinsik karena kecakapan itu bernilai sejauh menghasilkan permainan gitar yang luar biasa (penilaian instrinsik) (Bab IV).

Filsuf Jurgen Habermas menegaskan bahwa rasionalitas yang tidak mempersoalkan tujuan, keinginan atau preferensi berpotensi eksploitatif. Rasionalitas instrumental sekadar memikirkan bagaimana kepentingan agen dipromosikan bukan diuji dalam diskursus demokratis. Sebaliknya, Habermas merumuskan rasionalitas komunikatif yang bertujuan mencapai kesalingpahaman dan kesepakatan tanpa paksaan. Rasionalitas komunikatif menuntut agar berbagai klaim apakah itu sains, etis atau estetis dapat saling menguji dan berkoordinasi guna mencapai kesalingpahaman. Habermas menuntut agar nilai, tujuan, keinginan atau preferensi tidak diperiksa dalam kesendirian namun dalam terang nilai, tujuan, keinginan atau preferensi orang lain (Bab IV).

Rasionalitas instrumental pada dasarnya adalah sebetulnya kekeliruan kognitif yang mengakibatkan kerjasama menjadi mustahil. Gauthier menekankan bahwa rasionalitas instrumental adalah rasionalitas agen selaku pemaksimal serta-merta (*straightforward maximizer*). Pemaksimal serta merta hanya menghitung keuntungan bagi dirinya tanpa menimbang keuntungan pihak lawan dan opsi

yang menghasilkan keuntungan bersama. Lawan dari pemaksimal serta merta adalah pemaksimal terkonstrain (*constrained maximizer*). Rasionalitas pemaksimal terkonstrain memuat apa yang Gauthier sebut sebagai *translucency*. *Translucency* adalah kemampuan untuk menyingkap disposisi sesungguhnya dari orang lain. Penyingkapan itu tidak mesti akurat tetapi paling tidak lebih baik dari sekadar dugaan. *Translucency* memungkinkan kita untuk memilah antara mereka yang berpura-pura dengan yang sungguhan. *Translucency* memiliki dua fungsi utama. Pertama, itu memberikan kriteria untuk memutuskan apakah kita mempercayai orang lain atau tidak. *Translucency* memungkinkan kita untuk menentukan apakah orang lain berniat bekerjasama atau tidak. Kedua, itu memberi kita alasan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, karena jika orang bisa melihat niat kita sesungguhnya maka hasil maksimal hanya bisa dicapai apabila kita berlaku sebagai pemaksimal terkonstrain.

Pengandaian Gauthier mengenai *translucency* menuntut refleksi tambahan atas rasionalitas tindakan. Rasionalitas tindakan dituntut untuk tidak tertutup dari kepentingan orang lain. Rasionalitas tindakan mesti mampu mengubah patokan strategi seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Rasionalitas tidak menghamba pada kepentingan pribadi melainkan mau menimbang kepentingan orang lain dan berubah bersamanya (Bab V).

Jon Elster menunjukkan bagaimana rasionalitas tindakan dalam proses deliberasi tidak dapat dijadikan pegangan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa saat diinterogasi sang agen tidak akan mengkhianati temannya. Sebab itu, Elster menekankan bahwa moralitas memerlukan konstrain. Kehendak baik yang didasarkan deliberasi saja tidak cukup. *Passion* dapat menggoyahkan disposisi rasional seseorang. Sebab itu, opsi yang berlawanan dengan deliberasi sang agen harus dikonstrainsedemikian rupa. Sehingga saat menjatuhkan pilihan, sang agen tidak akan memilih opsi yang amoral. Bagi Elster, rasionalitas tidak berfungsi untuk melayani keinginan sang agen. Rasionalitas harus mampu membatasi keinginan agen yang muncul akibat godaan *passion*. Rasionalitas harus dimaterialisasikan dalam bentuk strategi prakomitmen guna mengkonstrain agen selaku subjek moral. Strategi prakomitmen adalah upaya

agen untuk membuat pilihan yang merugikan menjadi (a) tidak mungkin (b) berbiaya tinggi (c) mengecil insentifnya atau (d) tertunda cukup lama antara pilihan dan hasil. Singkat kata, komitmen etis harus dijaga dengan rasionalitas prakomitmen .

Gauthier dan Elster cukup berhasil memecahkan persoalan nonkerjasama dalam dilema narapidana. Rasionalitas tindakan yang mereka gagas adalah alternatif baru terhadap rasionalitas instrumental dalam dilema narapidana. Gauthier menekankan bahwa rasionalitas harus mengadopsi kemampuan *translucency* untuk menebak secara hampir pasti disposisi orang lain. Orang lain tidak dilihat sebagai ancaman melainkan mitra kerjasama. Elster menekankan bahwa rasionalitas tindakan harus memiliki kemampuan untuk membatasi pilihan yang bertolak belakang dengan deliberasi rasional sang agen. Deliberasi rasional yang menghasilkan keputusan untuk bekerjasama harus dilindungi agar aktualisasinya nanti tidak mengalami perubahan.

Baik Elster dan Gauthier menambahkan kemampuan tambahan yang harus dimiliki oleh rasionalitas tindakan agar kerjasama dimungkinkan. Gauthier menekankan agar rasionalitas tidak sekadar melayani kepentingan pribadi melainkan menimbang disposisi orang lain. Rasionalitas juga turut memikirkan dampak strategi yang dipilih terhadap kepentingan orang lain. Elster menekankan agar rasionalitas mampu membatasi pilihan nonrasional (tidak bekerjasama) dengan menyusun strategi prakomitmen. Rasionalitas berfungsi membatasi bukan melayani keinginan sang agen. Sebab, keinginan sang agen bisa jadi adalah nama lain dari *passion* yang bertolak belakang dengan deliberasi rasionalnya.

Namun, menurut penulis, teori rasionalitas tindakan Gauthier dan Elster masih menyimpan persoalan. Keduanya masih meletakkan "kerjasama" di bawah terang kalkulasi utilitarianistik. Kerjasama bukan tujuan pada dirinya melainkan syarat yang memungkinkan terciptanya keuntungan jangka panjang dan berkesalingan (*long term and mutual benefit*). Persoalannya, apakah kerjasama tetap menjadi opsi yang menarik apabila iming-iming keuntungan tersebut dihilangkan? Kerjasama, menurut hemat penulis, bukan sebab

keuntungan jangka panjang melainkan akibat dari kerja rasionalitas yang terbuka, ada atau tidak ada keuntungan.

Kekurangan dalam teori rasionalitas Elster dan Gauthier perlu dilengkapi. Kita tahu bahwa agen dalam situasi dilema narapidana bergerak berdasarkan prinsip maksimalisasi keuntungan. Persoalannya, apakah sang agen secara sadar mengadopsinya? Sang agen tidak menyadari bahwa situasi dilema narapidana lah yang memaksa dirinya untuk berkhianat. Dia mendukung prinsip yang sesungguhnya dibangun oleh situasi dilema narapidana. Komitmen etis yang dia pegang teguh selama ini menjadi tidak berarti apa-apa dalam situasi demikian. Dengan kata lain, prinsip yang mendasari tindakan agen dalam dilema narapina adalah prinsip yang tidak direfleksikan.

Korsgaard mengemukakan bahwa sumber normativitas tindakan adalah struktur refleksi dalam diri manusia. Berkat struktur refleksi tersebut, agen mampu memeriksa prinsip tindakan yang berjangkar pada identitas praktis. Identitas agen bukan model ekonomi tentang manusia (*homo economicus*) melainkan identitas yang hidup dalam konteks tertentu. Identitas praktis membuat sebuah prinsip bukan semata-mata rumusan formal melainkan ekspresi bermakna nilai dan karakter seseorang. Melalui refleksi selaku sumber normativitas, agen mampu memikirkan ulang prinsip tindakan yang tadinya diterima begitu saja. Berikut urutan logis reflektivitas agen:

(1) Saya adalah sepenuhnya agen reflektif

Proposisi di atas bukan klaim bahwa seorang agen senantiasa merefleksikan tindak-tanduknya. Itu adalah klaim bahwa karakter pokok kepelakuan (*agency*) manusia adalah reflektivitas. Reflektivitas adalah karakter pembeda antara manusia dan spesies lainnya. Manusia mengalami jeda antara inklinasi dan respon reflektif terhadapnya. Respon reflektif tersebut yang membuat manusia memiliki dimensi normatif yang tidak dimiliki spesies lainnya. Reflektivitas adalah paradigma atau model bagi tindakan rasional.

(2) Saya dihadapkan pada keinginan (X) yang mendorong saya untuk melakukan (Y)

Status saya sebagai reflektif agen membuat saya mampu menyadari adanya keinginan (X) yang berpotensi menghasilkan tindakan (Y). Saya menyadari (X) bukan semata-mata sebagai faktor kausal bagi (Y). Lebih dari itu, kesadaran saya tentang (X) adalah menifestasi kepelakuan saya. Sebagai manifestasi kepelakuan saya, (X) tidak dibiarkan begitu saja tanpa direfleksikan.

(3) Apakah saya sekarang harus bertindak berdasarkan (X)? Haruskah saya sekarang mendukung tindakan yang didasarkan pada (X)?

Sebagai agen yang sepenuhnya reflektif, saya bertindak berdasarkan (X) jika dan hanya jika saya mendukung tindakan tersebut. Dukungan itu menurut Korsgaard mengambil bentuk keputusan bahwa (X) adalah sungguh-sungguh alasan bagi (Y)¹. Namun, tesis Korsgaard di atas memiliki kekurangan. Seorang secara reflektif menyadari bahwa (X) adalah sungguh-sungguh alasan bagi (Y). Namun, dia dapat saja masih ragu untuk bertindak (Y) karena konflik antara tujuan yang dikehendaki. Seorang menyadari bahwa keinginan untuk mendapat pendidikan terbaik adalah sungguh-sungguh alasan untuknya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Namun, dia tetap saja ragu untuk bertindak karena ayahnya yang sakit-sakitan sehingga membutuhkan perawatan jarak dekat yang berkesinambungan.

(4) Jika saya secara reflektif mendukung tindakan saya berdasarkan (X) maka saya mendukung prinsip umum yang menopang tindakan tersebut.

Refleksi terhadap keinginan partikular (X) yang mendasari tindakan tertentu (Y) adalah klaim terhadap sifat universalitasnya. Apabila saya kemudian bertindak berdasarkan (X) maka saya bertindak berdasarkan prinsip umum bahwasannya dalam situasi apa pun, kapan pun alasan yang sama (X) akan menjadi dasar bagi tindakan (Y).

(5) Prinsip umum yang mendukung tindakan saya berdasarkan (X) tertanam dalam konsepsi identitas praktis saya.

Saya, misalnya, mendukung tindakan saya berdasarkan (X) dengan merujuk pada prinsip umum (P). Saya dapat menyadari semua itu secara reflektif sejauh proses kompleks dari penalaran praktis tersebut adalah aktivitas saya sendiri. Dukungan terhadap tindakan yang didasarkan pada prinsip umum (P) adalah dukungan terhadap identitas orang yang mendukung (P). Hasil akhir dari reflektivitas terhadap keinginan (X) yang mendasari tindakan (Y) adalah identitas yang mendukung prinsip umum (P). Seorang tidak akan bertindak berdasarkan prinsip umum tertentu apabila prinsip itu bukan ekspresi dari identitasnya. Seorang mendukung prinsip "berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang keyakinannya" bukan semata-mata karena sifat umum dari prinsip tersebut. Melainkan, prinsip tersebut adalah ekspresi identitasnya sebagai seorang muslim moderat.

(6) Saya mendukung reflektivitas saya sebagai konsepsi identitas praktis yang merupakan karakter umum kemanusiaan.

Dukungan terhadap reflektivitas saya bukan semata-mata dukungan terhadap aktivitas reflektif pada peristiwa tertentu. Seorang agen yang sepenuhnya reflektif tidak sekadar merefleksikan (X) sebagai alasan bagi (Y), melainkan merefleksikan kodratnya sebagai binatang yang berefleksi. Ketertanaman sebuah prinsip umum tindakan pada identitas praktis tertentu tidak lantas menjebak prinsip tersebut pada parokialisme. Ada yang bersifat umum dalam identitas praktis yakni reflektivitas sebagai corak kemanusiaan dan bukan ekspresi parokial belaka. Penghargaan agen terhadap kemanusiaan yang tertanam dalam rasionalitasnya menuntut penghargaan terhadap kapasitas yang sama pada orang lain.

(7) Saya mendukung (yang artinya menghargai) reflektivitas sebagai bentuk kemanusiaan dalam diri saya sekaligus orang lain (Bab V)

VI.3 Kesimpulan tentang Rasionalitas dan Dilema Narapidana

Konflik sejatinya adalah jebakan sosial yang membuat agen yang terlibat sulit untuk melepaskan diri. Model teori keputusan konsep jebakan sosial adalah dilema narapidana, yakni situasi strategis yang mana agen yang terlibat tertutup dari kemungkinan kerjasama yang lebih menguntungkan. Dilema narapidana membuat komitmen etis apa pun tidak dapat dijamin keberlakuannya karena insentif (*benefit*) bagi pelanggaran lebih besar dari biaya (*cost*) yang dihasilkannya. Komitmen etis tidak dapat dijamin keberlakuannya karena absennya kepercayaan yang diakibatkan asumsi mengenai orang lain sebagai sesama promotor kepentingan pribadi.

Ketiadaan kepercayaan, pada gilirannya, diakibatkan oleh rasionalitas yang keliru yakni rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang semata menimbang sarana yang paling tepat guna memaksimalkan keuntungan. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas tertutup. Pertama, rasionalitas instrumental menutup tujuan, nilai dan prinsip tindakan dari refleksi sang agen. Kedua, rasionalitas instrumental menutup agen dari historisitas identitas orang lain dengan mematoknya sebagai promotor kepentingan pribadi (*homo economicus*).

Jurgen Habermas, bahkan, mengingatkan kemungkinan eksploitatif rasionalitas instrumental. Rasionalitas tidak dapat sekadar mempromosikan tujuan agen tanpa meletakkannya di meja ujian diskursus demokratis. Rasionalitas instrumental sebagai bentuk kekeliruan kognitif yang menjebak kita dalam situasi konflik harus diatasi dengan bentuk rasionalitas baru yakni rasionalitas kerjasama. Gauthier dan Elster menegaskan kemampuan tambahan yang harus dimiliki rasionalitas agar dapat menyelesaikan persoalan dilema narapidana. Gauthier mengatakan bahwa rasionalitas harus mengadopsi kemampuan *translucency* untuk menebak secara hampir pasti disposisi orang lain. Orang lain tidak dilihat sebagai ancaman melainkan mitra kerjasama. Elster mengatakan bahwa rasionalitas tindakan harus memiliki kemampuan untuk

membatasi pilihan yang bertolak belakang dengan deliberasi rasional sang agen.

Persoalannya, Gauthier dan Elster masih meletakkan kerjasama di bawah kalkulasi utilitarianistik. Kerjasama adalah penyebab keuntungan jangka panjang. Sebagai imperatif, meminjam istilah Kant, kerjasama adalah bentuk imperatif hipotetis. Pada konteks persoalan tersebut, Korsgaard menambahkan dimensi nonutilitarian pada rasionalitas kerjasama. Baginya, kerjasama adalah hasil kerja rasionalitas yang merefleksikan prinsip tindakan nonkerjasama yang berakar pada identitas praktis sang agen. Namun, refleksi Korsgaard bekerja dalam kesendirian dan dijejalkan semata pada identitas praktis agen.

Sementara, Menurut hemat penulis, refleksi tidak dapat dilakukan dalam kesendirian melainkan merupakan hasil interaksi dengan orang lain selaku identitas naratif yakni identitas yang memiliki kualifikasi etis berdasarkan historisitasnya. Variabel yang paling menentukan refleksi bukan identitas praktis sang agen melainkan identitas naratif orang lain. Refleksi timbul melalui perjumpaan antar identitas sebagai yang konkret dan naratif. Perjumpaan refleksif seperti ini tidak bersifat instrumental atau purposif. Perjumpaan tersebut bersifat informal dan tidak terkurung berbagai sangsi dan norma dalam hidup yang serius². Pendeknya, perjumpaan refleksif membuka berbagai kemungkinan relasional yang tadinya dibekukan oleh perjumpaan instrumental. Itu dapat memecahkan kebekuan prasangka yang menghambat dialog refleksif antar identitas. Dialog antar dua kelompok yang lama bertikai, misalnya, tidak dapat dilangsungkan serta merta dalam forum yang formal. Itu memerlukan beberapa perjumpaan informal yang jauh dari keseriusan seperti pertandingan bola, karaoke, *camping* dan lain sebagainya. Suasana informal seperti itu akan mencairkan kebekuan prasangka dan mematangkan kepercayaan.

² Gagasan mengenai perjumpaan refleksif dikembangkan oleh Dr. Haryatmoko dari gagasan Ricoeur mengenai distansiasi kreatif yang mengadopsi prinsip analogi permainan Gadamer (Ricoeur, 1991, p. 100-101)

VI.4 Logika Rasionalitas Kerjasama

Dilema narapidana mematok prinsip maksimalisasi keuntungan sebagai harga mati yang berkait erat dengan identitas agen sebagai *homo economicus*. Ini tentu saja berakibat fatal pada terbangunnya komitmen etis berupa kepercayaan. Prinsip maksimalisasi keuntungan mesti diletakkan dalam terang refleksi seorang agen selaku identitas praktis dengan segenap komitmen dan karakter nilainya.

Persoalannya, identitas praktis adalah identitas sang agen. Refleksi agen yang bermuara pada identitasnya sama sekali tidak menyinggung orang lain dalam relasi interpersonal. Refleksi bersifat tertutup. Dengan demikian, jebakan solipisisme sulit untuk dihindari. Padahal, Identitas orang lain justru mengambil peran penting dalam refleksi agen terhadap prinsip-prinsipnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang mertua senantiasa bertengkar dengan mantu perempuannya. Mantu perempuan yang berkarir di dunia publik dituduhnya kurang memperhatikan anak. Sang mertua berprasangka bahwa mantunya lebih memikirkan karir daripada anak. Sementara, dia memiliki prinsip bahwa perempuan harus meninggalkan pekerjaan demi anak. Sampai satu ketika, sang mertua berkesempatan berjalan bersama mantu dan cucunya. Pada kesempatan itu, sang mertua melihat betapa sang mantu begitu memperhatikan anaknya. Dia menyusui sang anak ketika haus dan mengganti popok ketika buang air. Pada saat itu sang mertua tersadar dan merefleksikan prinsipnya mengenai relasi domestik-publik. Prinsip lamanya berubah. Sekarang, dia berprinsip bahwa kerja domestik dan publik tidak harus saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan bersamaan tanpa konflik yang berarti.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa refleksi adalah buah dari interaksi interpersonal. Prinsip direfleksikan bukan karena identitas sang agen melainkan orang lain. Rasionalitas tidak memeriksa prinsip, tujuan, nilai dalam jeruji identitas agen melainkan melalui interaksi dengan identitas yang lain. Identitas yang lain bukan model abstrak melainkan sesuatu yang konkret dan menyejarah. Identitas yang lain adalah identitas naratif.

Identitas manusia menurut Ricoeur memiliki corak naratif. Ada lima kesimpulan yang dapat ditarik berkenaan dengan identitas naratif.

1. Identitas naratif beresilasi di antara dua batas: batas bawah dan batas atas. Batas bawah adalah batas yang mana permanensi dalam waktu mengaburkan perbedaan antara *idem* dan *ipse*. Batas atas adalah batas yang mana *ipse* melontarkan pertanyaan tentang identitasnya tanpa merujuk *idem*.
2. Identitas naratif adalah hasil pemahaman kehidupan sebagai sebuah kisah yang disatukan oleh tujuan hidup yang baik sehingga memungkinkan tiap orang menunjukkan kualifikasi etisnya.
3. Identitas naratif adalah identitas etis yang di tengah-tengah perubahan tetap mampu membuat dan mempertahankan komitmen etis.
4. Oleh karena identitas saya adalah identitas naratif, saya dapat memaknai diri saya hanya melalui keterlibatan dengan orang lain.
5. Dalam keterlibatan saya dengan orang lain, saya tidak sekadar menjalankan peran atau fungsi yang sudah ditentukan di depan. Saya dapat mengubah diri saya lewat upaya saya sendiri dan dapat secara rasional mendorong orang lain untuk berubah.
6. Karena saya bertubuh sehingga mewarisi konstrain biologis dan psikologis, saya tidak dapat mengubah segala sesuatu berkenaan dengan diri saya. Orang lain juga memiliki konstrain yang sama sehingga saya tidak dapat mengubah dia secara menyeluruh.
7. meskipun saya dapat dievaluasi melalui berbagai cara, evaluasi etis berkenaan dengan responsivitas saya terhadap orang lain adalah yang terpenting.

Narativitas baik pada identitas orang lain maupun diri kita sendiri membuat kita senantiasa terbuka pada refleksi dan revisi. Oleh sebab itu, rasionalitas yang bermuara pada kerjasama harus terbuka pada orang lain selaku identitas naratif. Kepercayaan selama ini gagal dibangun karena dalam dilema narapidana identitas orang lain dipatok sebagai *homo economicus* belaka. Patokan identitas tersebut membuat agen senantiasa mengambil opsi nonkerjasama. Padahal,

agen dan lawan sesungguhnya adalah identitas naratif. Identitas naratif senantiasa mengandung dimensi etis. Seorang pebisnis, misalnya, hanya mau membuat kontrak dengan mitra yang sudah teruji komitmennya (tidak pernah melakukan wanprestasi). Komitmen etis dapat dibangun dan dipertahankan apabila agen mau dan mampu memahami narativitas identitas lawan sekaligus dirinya.

Kontigensi identitas sang agen tidak ditemukan begitu saja melalui refleksi tertutup. Kita menyadari kontigensi identitas diri melalui orang lain sebagai identitas naratif. Melalui interaksi interpersonalnya selama ini, agen menyadari bahwa orang lain ternyata adalah orang yang dapat dipercaya. Hal itu membuatnya sadar bahwa prinsip: "berkhianat diperbolehkan demi keuntungan pribadi" tidak tertanam pada dirinya selaku identitas naratif. Prinsip itu adalah bentukan situasi dilema narapidana yang mana terdapat asimetri informasi. Identitas agen selaku pemaksimal utilitas juga tidak terberi melainkan bentukan situasi dilema narapidana. Sementara, agen sesungguhnya adalah identitas naratif yang mampu membangun dan mempertahankan komitmen etis. Artinya, prinsip maksimalisasi utilitas dalam dilema narapidana bukan ekspresi bermakna identitas agen. Prinsip tersebut dibentuk oleh kekuatan eksternal yang tidak mengakar pada identitas.

Rasionalitas Gauthier dan Elster, menurut penulis, mampu membuahkan kerjasama. Rasionalitas Gauthier menimbang kepentingan orang lain dan dilengkapi dengan kemampuan menebak secara hampir pasti disposisi orang lain. Rasionalitas Elster menjamin keberlakuan komitmen etis dengan mengkonstrain opsi yang tidak dikehendaki. Persoalannya, rasionalitas Gauthier dan Elster bekerja dengan masih menimbang keuntungan jangka panjang dari kerjasama. Artinya, kerjasama masih dikebawahkan oleh pertimbangan kalkulasi. Absennya keuntungan jangka panjang dapat membatalkan opsi kerjasama. Padahal, rasionalitas kerjasama semestinya membuahkan kerjasama tanpa insentif apa pun. Apabila masih menimbang untung-rugi, rasionalitas kerjasama masih berjangkar pada identitas abstrak agen selaku pemaksimal

utilitas. Rasionalitas kerjasama adalah rasionalitas yang melaluinya kerjasama dimungkinkan tanpa insentif apa pun.

Berbeda dengan kedua filsuf di atas, Korsgaard tidak membicarakan rasionalitas berdasarkan kalkulasi utilitarianistik. Korsgaard menawarkan rasionalitas yang merefleksikan prinsip tindakan sang agen selaku identitas praktis. Persoalannya, orang lain selaku subjek dalam relasi interpersonal tidak diperhitungkan. Refleksi bekerja dalam jeruji identitas sang agen tanpa mau memperhitungkan narativitas identitas orang lain. Sebab itu, penulis memahami rasionalitas kerjasama sebagai **rasionalitas yang menimbang narativitas identitas orang lain guna merefleksikan prinsip tindakan nonkooperatif**. Berikut urutan logis rasionalitas kerjasama:

1. Sebagai subjek reflektif agen terbuka pada orang lain selaku identitas naratif.

Agen sebagai subjek reflektif tidak tertutup pada kesejarahan orang lain. Agen terbuka pada narativitas identitas orang lain dan menjadikan itu pertimbangan dalam deliberasi rasionalnya.

2. Keterbukaan agen pada narativitas orang lain bermuara pada kesadaran atas kontigensi identitasnya sendiri.

Agen yang menyadari narativitas identitas orang lain sekaligus menyadari narativitas identitas dirinya. Pemahaman agen bahwa orang lain bukan seperti yang dikira berujung pada pemahaman bahwa agen sendiri bukan apa yang dikiranya.

3. Keterbukaan agen terhadap narativitas orang lain dan kontigensi diri memungkinkannya merefleksikan prinsip tindakan nonkooperatif.

Keterbukaan pada orang lain selaku identitas naratif membuka narativitas agen. Dua keterbukaan tersebut membuat agen merefleksikan prinsip tindakan yang selama ini ditopang identitas yang keliru. Sebagai subjek reflektif agen menyadari bahwa prinsip tindakan nonkooperatif adalah bentukan situasi dilema narapidana dan bukan berakar pada identitasnya..

4. Kerjasama, oleh sebab itu, adalah konsekuensi reflektivitas yang terbuka.

VI.5 Rasionalitas dan Rekonsiliasi: Aceh

Konflik sebagai jebakan sosial bersifat permanen disebabkan dua hal (Rothstein, 2005, p.18): Pertama, disposisi kerjasama senantiasa dipahami sebaliknya. Ini dapat disebabkan oleh aktor politik yang mengendalikan informasi senantiasa berfokus pada informasi negatif mengenai lawan. Manipulasi informasi ini berjalan secara sistematis untuk membatalkan setiap upaya kerjasama. Kedua, kepercayaan adalah variabel psikologis yang kompleks. Ketidapercayaan yang cukup lama dan mendalam tak mungkin diselesaikan dalam semalam. Seorang tidak mungkin tiba-tiba mempercayai lawannya yang sudah tidak dipercayainya sekian lama.

Dua faktor yang menimbulkan konflik yang permanen di atas pada dasarnya berdiri pada satu aras yang sama: informasi yang asimetri. Kepentingan aktor politik dan rekam jejak lawan membuat informasi apa pun yang datang dari lawan tidak dapat dipercaya. Rekonsiliasi menjadi demikian sulit dicapai. Kebenaran mengenai siapa sesungguhnya lawan dan siapa sesungguhnya agen tidak pernah terkuak.

Berdasarkan penelitiannya di Afrika Selatan, James Gibson mengatakan bahwa kebenaran berkontribusi pada rekonsiliasi (Gibson, 2006, p. 411). Gibson berargumen bahwa proses kebenaran memfasilitasi rekonsiliasi karena itu dapat mendistribusikan kesalahan secara proporsional kepada semua pihak dalam perjuangan melawan apartheid. Proses kebenaran ini didukung oleh dua karakter utama yakni pluralisme politik dan *rule of law*. Dengan kata lain, demokratisasi menjadi syarat politik yang memungkinkan rekonsiliasi.

Distribusi tanggung jawab, kesalahan dan korban menciptakan identitas bersama yang menjadi dasar bagi dialog. Ini juga menghasilkan ingatan kolektif yang mengatasi segenap dikotomi kebaikan/kejahatan. Setiap pihak dalam perjuangan melawan apartheid melakukan hal yang buruk. Rekonsiliasi

ditentukan oleh berapa besar keberterimaan segenap pihak terhadap kebenaran ini. Perhatikan tabel di bawah ini.

Afrika	keberterimaan	————	.23	————→	rekonsiliasi
Kulit Putih	keberterimaan	————	.53	————→	rekonsiliasi
Kulit Berwarna	keberterimaan	————	.34	————→	rekonsiliasi
Asia	keberterimaan	————	.09	————→	rekonsiliasi

Sumber: Gibson (2004)

Pengalaman rekonsiliasi di Afrika Selatan menunjukkan betapa rekonsiliasi memerlukan kerja rasionalitas yang terbuka. Rasionalitas yang tidak sekadar menghakimi melainkan terbuka terhadap historisitas lawan yang pada gilirannya membuka tabir historisitas diri. Historisitas disini adalah sejarah kebenaran berupa tanggung jawab, kesalahan dan korban yang ada di kedua pihak yang bertikai. Keberterimaan kedua pihak terhadap kebenaran tersebut adalah pijakan awal bagi rekonsiliasi. Tanpanya, setiap upaya rekonsiliasi akan selalu dibatalkan oleh sedimen ketidakpercayaan yang tertanam di kedua belah pihak. Kelompok kulit putih mau berekonsiliasi karena tahu bahwa kelompok Afrika, kulit berwarna dan Asia mau menerima distribusi kesalahan juga. Kelompok yang selama ini terpinggirkan mau berekonsiliasi karena keberterimaan kelompok kulit putih terhadap beban, kesalahan dan korban. Keduanya saling mengandaikan dan berkesalingan (resiprokal). Resiprokalitas tersebut yang mendorong rekonsiliasi.

Seperti halnya Afrika Selatan, pengalaman di aceh menunjukkan bahwa konflik yang sudah demikian dalam dan tua sangat sulit diselesaikan. Konflik bermula pada tahun 1949 ketika terjadi transfer kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia. Transfer tersebut tidak sah di mata rakyat aceh karena aceh tidak pernah merasa djajah Belanda. Konflik dipertajam setelah muncul fakta bahwa Aceh hanya dijadikan lahan eksploitasi bagi pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah sesuatu yang anonim. Masyarakat Aceh

menyebut sang penghias sebagai Jawa kolonial. Sebab, pemerintah pusat, khususnya elit politik, kebanyakan berasal dari suku Jawa.

Penolakan rakyat Aceh meletup menjadi pemberontakan pada bulan Desember 1953 ketika pemberontak lokal yang dipimpin Teungku Daud Beureuh bergabung dengan Darul Islam. Darul Islam sendiri adalah pemberontakan yang bermula pada tahun 1948 di Jawa Barat yang kemudian menyebar ke pelosok nusantara. Pemberontakan tersebut kemudian dicoba diredam ketika Presiden Sukarno menetapkan Aceh sebagai "daerah istimewa". Status baru tersebut memberikan Aceh otonomi luas di bidang pendidikan, agama dan adat. Alhasil, pada bulan September 1961 Beureuh menurunkan tuntutan dari pendirian negara Islam yang independen menjadi implementasi Syariah Islam di Aceh. Pemerintah pusat pun membuka negosiasi dengan Aceh dan pada awal tahun 1962 menghasilkan kesepakatan damai yang intinya memberi otonomi bagi Aceh untuk menjalankan Syariah Islam di wilayahnya.

Kesepakatan yang sudah dicapai, sayangnya, dirusak oleh kebijakan sentralisasi yang dijalankan pemerintahan orde baru. Status "daerah istimewa" tinggal nama belaka karena pada kenyataannya Aceh diperlakukan sama seperti provinsi lainnya. Pada tahun 1971 ditemukan cadangan minyak dan gas yang cukup besar di Aceh Utara. Eksploitasi pun dilakukan secara masif, dan keuntungannya dinikmati sebesar-besarnya oleh pusat. Akibatnya, kekecewaan rakyat Aceh menjadi semakin dalam.

Pada bulan Desember 1976, Tengku Hasan Muhammad di Tiro, seorang pengusaha sukses dan duta besar Darul Islam di PBB, kembali ke Aceh dan membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Seperti pendahulunya Daud Beureuh, Tiro mengumumkan perang terhadap pemerintah pusat dan bermaksud kembali mendirikan negara Aceh yang independen. Ini adalah opsi yang paling masuk akal bagi Tiro dan GAM karena status "daerah istimewa" tidak mengubah secara fundamental hubungan Aceh dan Jakarta.

Jakarta pun tidak tinggal diam. Apabila orde baru menggunakan pendekatan diplomasi maka orde baru di bawah pimpinan Suharto menggunakan pendekatan militer. Pada tahun 1989, Jakarta melancarkan

operasi kounter-insurgensi secara besar-besaran. Aceh pun diubah statusnya menjadi daerah operasi militer (DOM) yang artinya adalah penerapan hukum militer secara teritorial. Hampir 12.000 personil tentara dan polisi diturunkan dalam operasi tersebut. Hasilnya sungguh memprihatinkan. Temuan Komnas HAM menunjukkan bahwa semasa DOM, 944 rakyat Aceh terbunuh atau hilang, 3000 wanita menjadi janda, dan 15.000 anak menjadi yatim piatu. Konflik pun semakin menajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan selesai.

Harapan datang ketika orde baru jatuh dan Indonesia mulai memasuki masa transisi demokrasi. Demokratisasi, seperti ditunjukkan Gibbons, adalah prasyarat utama kontribusi kebenaran terhadap rekonsiliasi. Distribusi kebenaran takkan terjadi di rejim totaliter yang mana monopoli terhadap kebenaran berlangsung. Kebenaran orde baru adalah GAM sebagai gerakan separatis yang menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Historisitas kemunculan GAM dan alasan-alasannya tak pernah menjadi bahan pertimbangan. Sebaliknya, perlakuan Jakarta terhadap Aceh menguatkan stereotip yang melekat di benak rakyat Aceh bahwa Jakarta tak lain adalah kekuatan kolonial baru: Jawa kolonial.

Aleksius Jemadu, seorang ahli hubungan internasional, mengajukan tesis yang cukup menarik. Dia berargumen bahwa demokratisasi pasca jatuhnya rejim orde baru tidak serta merta menyelesaikan konflik di Aceh (Jemadu, 2006, p.275). Jemadu mengajukan empat alasan pokok. *Pertama*, kenyataan bahwa meningkatkan dukungan publik untuk melakukan referendum di Aceh bersamaan dengan kemenangan partai Nasionalis PDI P pada pemilihan umum 1999. Kebijakan partai ini ditopang oleh ideologi NKRI yang menolak segala bentuk separatisme. *Kedua*, tiga pemerintahan pasca-Suharto memiliki pola kebijakan yang sama: pendekatan militer. Presiden Habibie yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi di Aceh tidak dapat mencegah kejadian di Beuteung Ateuh yang mana operasi militer berdarah dilangsungkan. Presiden Abdurrahman Wahid yang membuka negosiasi sipil juga tidak berdaya ketika diminta menandatangani keputusan presiden untuk sebuah operasi militer baru di Aceh. Pemerintahan Presiden Megawati memperoleh kemajuan dengan

ditandatanganinya kesepakatan gencatan senjata dengan GAM pada tanggal 9 Desember 2002. Namun, enam bulan kemudian Presiden Megawati tidak memiliki pilihan lain kecuali menandatangani berlakunya hukum militer di Aceh yang memberikan otoritas penuh bagi operasi militer terhadap GAM. *Ketiga*, elit militer dan sipil di pusat mengubah proses demokratisasi menjadi arena kontestasi ekonomi dan politik. Ini menunjukkan konflik di Aceh terlalu sederhana apabila dipahami semata sebagai konflik antara pemerintah pusat dan gerakan separatis. *Keempat*, marginalisasi akar rumput di Aceh dari proses politik dan ekonomi, yang diakibatkan oleh supremasi pendekatan militer, membuat perdamaian yang permanen sulit untuk dicapai.

Berdasarkan perspektif rasionalitas kerjasama, konflik di Aceh sulit diselesaikan karena tidak ada komitmen etis yang dapat dijamin keberlakuannya. Komitmen etis tidak dapat dibangun karena absennya kepercayaan yang resiprokal. Informasi yang asimetri mengambil peran pokok dalam hal ini. Informasi yang asimetri, pada gilirannya, disebabkan oleh deliberasi rasional yang keliru. Deliberasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai subjek reflektif agen tidak terbuka pada orang lain selaku identitas naratif.

Agen (pemerintah RI) tidak terbuka pada Aceh sebagai identitas naratif yang berkesejarahan. Historisitas GAM diabaikan dengan melekatkan stereotip "gerakan separatis" pada mereka. GAM tidak dilihat sebagai produk dari kekecewaan terhadap kebijakan sentralistis dan pendekatan militer pada masa orde baru yang berakibat rusaknya kepercayaan.

2. Ketertutupan agen pada narativitas orang lain tidak bermuara pada kesadaran atas kontigensi identitasnya sendiri.

Pemerintah RI yang tertutup terhadap historisitas Gerakan Aceh Merdeka pada gilirannya tertutup pada historisitas dirinya. Pemerintah RI tidak pernah memandang rakyat Aceh sebagai identitas naratif yang mampu membangun dan mempertahankan komitmen etis. Rakyat Aceh sudah pernah membuat komitmen etis dengan pemerintah RI pada masa Presiden Sukarno yang, sayangnya, dirusak oleh kebijakan sentralisasi orde baru. Ketertutupan tersebut membuat

pemerintah RI tidak pernah berpikir bahwa dia sesungguhnya adalah kekuatan kolonial baru yang menghisap sumber daya Aceh dengan proteksi militer. Pemerintah RI senantiasa mengidentifikasi diri sebagai "penjaga NKRI".

3. Ketertutupan agen terhadap narativitas orang lain dan kontigensi diri melanggengkan prinsip tindakan nonkooperatif.

Stereotipikasi GAM sebagai gerakan separatis yang ilegal dan pemerintah pusat sebagai penjaga NKRI yang sah membuat prinsip tindakan nonkooperatif senantiasa menjadi landasan kebijakan. Ini dibuktikan ketika tiga pemerintahan pasca-Suharto pun tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan militer dalam penyelesaian konflik Aceh.

4. Deliberasi rasional yang tertutup membatalkan setiap upaya kerjasama.

Deliberasi pemerintah pusat yang tidak dapat melepaskan diri dari dikotomi kebaikan/keburukan, pemerintah/GAM, NKRI/separatis membuat setiap upaya kerjasama menjadi sia-sia. Kerjasama pernah diupayakan pada pemerintahan Presiden Sukarno dengan memberikan status "daerah istimewa" kepada Aceh. Hal ini sayangnya tidak berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Suharto yang mengedepankan pendekatan militer. Pendekatan militer juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma kebijakan tiga pemerintah pasca-Suharto (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati) dalam menyelesaikan persoalan Aceh.

Rekonsiliasi memerlukan proses deliberasi yang mengadopsi perspektif rasionalitas kerjasama. Perspektif ini, menurut hemat penulis, sedikit banyak tampak pada proses perundingan antara Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan GAM di Helsinki. Deliberasi tersebut terlihat pada beberapa indikator utama dalam perjanjian antara RI dan GAM:

1. GAM dijadikan mitra setara dalam perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah organisasi bernama *Crisis Management Initiative* (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia: Martti Ahtisaari.
2. Aceh akan melaksanakan kewenangan di semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan

kebebasan beragama dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi (**nota kesepahaman No. 1.1.2 (a)**).

3. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumberdaya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh (**nota kesepahaman No. 1.3.4**)
4. Sebuah pengadilan HAM akan dibentuk di Aceh (**nota kesepahaman No. 2.2**)
5. Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja (**nota kesepahaman No. 3.2.5 (a)**).

Kelima indikator di atas menunjukkan bahwa proses deliberasi yang berlangsung berupaya memecahkan problem informasi yang asimetri. Dijadikannya GAM sebagai mitra setara yang didengar segala tuntutan menunjukkan bahwa stereotip GAM sebagai gerakan separatis ilegal mulai ditinggalkan. Komitmen untuk bagi hasil yang berkeadilan menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengakui bahwa selama ini berjalan semacam kolonialisme domestik yang merugikan rakyat Aceh. Ini juga ditunjukkan dengan pembagian lahan guna meningkatkan taraf hidup bekas anggota GAM pasca kesepakatan damai. Otonomi spesial yang diberikan pada Aceh menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengakui historisitas gerakan perlawanan yang tumbuh dari peralihan status "daerah istimewa" pada masa orde lama menjadi daerah operasi militer pada orde baru. Ini semua menunjukkan bahwa kerjasama (rekonsiliasi) adalah hasil dari proses deliberasi rasional yang tepat. Deliberasi tersebut terbuka pada narativitas identitas orang lain sekaligus diri sendiri. Deliberasi atau rasionalitas yang tidak memaksakan ideologi atau kepentingan melainkan mau berubah berdasarkan keterbukaan terhadap narativitas orang lain.

VI.6 Catatan Penutup

Kerjasama membutuhkan kepercayaan dan rasionalitas yang mendasarinya. Kerjasama mengandaikan kepercayaan yang resiprokal antara pihak-pihak yang berkontestasi. Kepercayaan pada dirinya memiliki fungsi rekonsiliatif. Fukuyama menambahkan fungsi lain pada kepercayaan. Apa yang membuat masyarakat berkembang secara material bukanlah kecurigaan, dekonstruksi atau kepentingan pribadi melainkan justru sebaliknya yakni kepercayaan. Dia berargumen bahwa performa ekonomi akan meningkat apabila terdapat kepercayaan dalam derajat yang cukup tinggi. Dalam masyarakat yang mana ikatan kekerabatan atau komunal begitu kuat, agen memiliki kesulitan untuk membangun ikatan sosial yang dapat menghasilkan relasi mikro-ekonomi yang efisien.

Fukuyama membagi masyarakat menjadi dua jenis: masyarakat berkepercayaan tinggi (*high trust society*) dan masyarakat berkepercayaan rendah (*low trust society*) (Fukuyama, 1995, p. 38). Masyarakat berkepercayaan rendah ditemukan di Italia Selatan, Cina, sebagian besar Prancis. Masyarakat di berbagai tempat tersebut berpatokan pada otoritas paternal yang mengakar dalam pada sejarah spiritual dan kultural masing-masing. Sebab itu, masyarakat tersebut memiliki kepercayaan yang sangat rendah terhadap relasi nonkeluarga. Masyarakat berkepercayaan rendah cenderung membuat perusahaan keluarga di satu sisi dan perusahaan milik negara di sisi lain. Hubungan antara keduanya cenderung korup.

Masyarakat berkepercayaan tinggi ditemukan di Jepang, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat. Masyarakat berkepercayaan tinggi ditandai dengan banyaknya asosiasi sukarela yang tidak didasarkan pada ikatan kekerabatan atau komunal. Dalam masyarakat berkepercayaan tinggi, kepercayaan terhadap relasi nonkeluarga sangat tinggi. Kepercayaan tersebut membuat masyarakat terhindar dari inefisiensi ekonomi akibat nepotisme.

Persoalannya, apakah kepercayaan selalu harus dikebawahkan pada keuntungan ekonomi semata. Logika Fukuyama berbunyi: "jika kita membangun kepercayaan nonkeluarga maka kita akan sejahtera, dan jika tidak maka

kerugiannya diukur berdasarkan ukuran finansial bukan moral". Sementara, terdapat perbedaan mendasar antara mempromosikan kepercayaan demi langgengnya pernikahan dengan promosi kepercayaan demi bisnis yang lebih baik. Dalam kasus pertama, kepercayaan adalah sarana bagi tujuan yang didefinisikan sepenuhnya berdasarkan kepercayaan itu sendiri. Artinya, diskusi mengenai nilai instrumental dari kepercayaan adalah sah. Dalam kasus kedua, kepercayaan, sebaliknya, merupakan sarana bagi sebuah tujuan yang logika internalnya tidak memberi tempat bagi kepercayaan. Pada kenyataannya, secara analitis maupun historis, ketidakpercayaan lah yang menjadi bagian intrinsik dari relasi pasar.

Fukuyama berbicara tentang fungsi kepercayaan bagi kemajuan ekonomi. Tesis tersebut sebenarnya cukup menarik. Namun, instrumentalisasi kepercayaan di situ masih didasarkan pada kalkulasi utilitarianistik semata. Padahal, seperti sudah ditunjukkan sebelumnya, kalkulasi utilitarianistik membuat kepercayaan menjadi sebuah imperatif hipotetis belaka. Sementara, berdasarkan perspektif rasionalitas kerjasama, kepercayaan adalah instrumen pokok dalam menjamin keberlakuan komitmen etis yang berujung pada kerjasama, ada atau tidak ada insentif ekonomi.

Kepercayaan dilandasi oleh rasionalitas tindakan yang tidak sekadar mengikuti dan melaksanakan prinsip yang egosentris sifatnya. Damasio, seorang neuropsikolog, beragumen bahwa proses pilihan rasional dimuati oleh emosi. Manusia menyadari dampak perbuatan mereka terhadap orang lain. Manusia yang didorong oleh empati dan simpati secara konstan menyesuaikan perilaku mereka dengan menimbang perasaan orang lain. Penyesuaian tersebut bukan semata kalkulasi rasional. Untuk membuktikannya, Damasio meneliti seorang bernama Phineas Gage yang mengalami kerusakan otak pada bagian *prefrontal cortex*. Kerusakan tersebut tidak membuat Phineas kehilangan kemampuan membuat kalkulasi rasional. Phineas tetap mampu menganalisa situasi, membaginya ke dalam berbagai kemungkinan tindakan dan membandingkan satu sama lain. Namun, Phineas tidak mampu berinisiatif untuk memilih satu dari sekian alternatif tindakan yang sudah dianalisa. Apa yang hilang dari Phineas,

menurut Damasio, adalah kepekaan moral. Dia tidak dapat berempati terhadap orang lain dan menjadi tidak sensitif terhadap dampak tindakannya terhadap orang lain.

Berdasarkan pikiran Damasio tersebut, Fukuyama mengemukakan bahwa rasionalitas manusia tidak sekadar menaati prinsip atau norma sekadar karena norma atau prinsip tersebut menguntungkan (Fukuyama, 1999, p. 184). Rasionalitas agen melekatkan apa yang disebutnya sebagai tanda somatik (*somatic marker*) pada norma atau prinsip. Dengan demikian, norma atau prinsip pada dasarnya memuat emosi manusia seperti marah, perasaan bersalah, kebanggaan dan perasaan malu. Norma atau prinsip menjadi tujuan pada dirinya bukan instrumen untuk melayani kepentingan pribadi agen.

Fukuyama membedakan antara norma konvensional dan metanorma (Fukuyama, 1999, p.184). Norma konvensional secara serta merta mengatur kerjasama sosial (misalnya, pembagian harta waris secara adil di antara para ahli waris). Agen melaksanakan norma konvensional karena norma tersebut menguntungkannya. Berdasarkan prinsip pembagian waris, jika agen tidak memastikan bahwa saudaranya mengikuti norma pembagian harta waris, maka dia berisiko kehilangan bagiannya.

Metanorma berurusan dengan cara yang tepat untuk mendefinisikan, mendiseminasikan, dan menegakkan norma konvensional (misalnya, masyarakat yang harmoni hanya dapat dibangun dengan landasan nilai-nilai Pancasila). Pelaksanaan metanorma tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kepentingan pribadi agen. Masyarakat harmoni adalah sesuatu yang abstrak dan pelaksanaannya menguntungkan semua orang.

Metanorma, meski demikian, adalah norma bermuatan emosi yang sering dipertontonkan orang dalam kesehariannya. Orang sering mengabaikan kepentingan materialnya karena marah terhadap ketidakadilan yang dilakukan penguasa atau merasa bersalah karena dirinya bertindak tidak adil. Mahasiswa yang berdemonstrasi menentang orde baru tidak berpikir mengenai keuntungan apa yang akan didapatkan. Mereka berdemonstrasi karena marah terhadap kekuasaan yang korup dan totaliter.

Dalam situasi dilema narapidana, "pengkhianatan" adalah satu kemungkinan strategi yang dapat atau tidak dapat diikuti tergantung kalkulasi agen terhadap hasil yang dapat dicapai. Dalam situasi tersebut "pengkhianatan" adalah sekadar satu dari sekian strategi yang mungkin untuk memaksimalkan keuntungan. Pengkhianatan, sebaliknya, tidak pernah secara moral netral dalam keseharian kita. Kita terbiasa memberikan sanksi moral terhadap orang yang berkhianat. Kita menyebut para pengkhianat sebagai "si penikam dari belakang", "musuh dalam selimut", "tak tahu malu" dan lain sebagainya. Sanksi itu dijatuhkan karena orang sangat menghargai "kesetiaan" sebagai metanorma. Orang marah apabila melihat orang lain melanggar metanorma "kesetiaan" dan merasa bersalah apabila dirinya sendiri melanggar.

Rasionalitas kerjasama adalah kritik terhadap rasionalitas kalkulatif yang mengabaikan metanorma. Rasionalitas kerjasama menggugat instrumentalisasi norma demi kepentingan pribadi belaka. Untuk itu, rasionalitas kerjasama merefleksikan prinsip atau norma yang tadinya diterima berdasarkan kalkulasi keuntungan pribadi semata. Refleksi itu tidak bekerja dalam ruang hampa sosial. Refleksi bekerja melalui perjumpaan dengan orang lain selaku identitas naratif. Narativitas pada diri orang lain membuat agen menimbang kembali prinsip tindakan yang didasarkan pada kepentingan pribadi dirinya.

Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang pebisnis dihadapkan pada situasi dilematis. Dia diajak berkongsi oleh pebisnis yang menjadi musuh abadi sahabat baiknya. Rasionalitas kalkulatif pebisnis mengatakan bahwa keuntungan yang dia dapatkan dari perkongsian tersebut sangat besar. Namun, apakah dirinya akan mengorbankan pertemanan demi keuntungan ekonomi semata? Dengan kata lain, apakah dirinya akan mengikuti prinsip tindakan: "berkhianat terhadap teman diperbolehkan demi keuntungan ekonomi". Perjumpaan dirinya dengan sang sahabat sebagai identitas naratif yang selama ini tidak pernah melukainya membuatnya berpikir ulang untuk berkongsi. Sang pebisnis pun kemudian mengadopsi metanorma yang berbunyi: "kesetiaan tidak dapat dinegosiasikan demi keuntungan ekonomi belaka".

Kepercayaan selama ini dimengerti sebagai variabel yang bersifat emotif atau nonrasional. Variabel ini sering didudukkan dalam ranah afeksi yang tidak melibatkan sama sekali deliberasi rasional. Rasionalitas kerjasama, menurut hemat penulis, membuktikan bahwa variabel emotif tidak sepenuhnya berada di luar kerja rasionalitas. Rasionalitas kerjasama merefleksikan prinsip tindakan yang didukung berdasarkan keuntungan pribadi belaka. Itu dilakukan dengan melekatkan tanda somatik (*somatic marker*) pada norma atau prinsip. Sehingga, prinsip tidak sekadar didasarkan pada kalkulasi dingin seorang *homo economicus*. Sebuah prinsip, sebaliknya, adalah hasil refleksi rasional yang sekaligus juga melibatkan kepekaan moral (*moral sentiment*) terhadap orang lain selaku identitas naratif.



DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA PRIMER

- Elster, John. *Ulysses Unbound*. New York: Cambridge University Press, 2000
- Gauthier, David. *Morals by Agreement*. New York: Oxford University Press, 1988
- Korsgaard, Christine M. *The Sources of Normativity*. New York: Cambridge University Press, 2005

PUSTAKA SEKUNDER

Buku

- Archer Margareth (et.al). *Rational Choice Theory: Resisting Colonialization*. London: Routledge, 2000
- B. Strong, Tracy (ed.). *The Self and the Political Order*. New York: New York University Press, 1997
- Berlin, Isaiah. *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press, 1969
- Bermudez, Jose Luis (ed.). *Philosophy of Psychology*. London: Routledge, 2006
- Bertrand, Russell. *Human Society in Ethics and Politics*, London: Allen and Unwin, 1954
- Bicchieri, Cristina. *Rationality and Coordination*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007
- Davis, Morton. *Game Theory: A Nontechnical Introduction*. New York: Basic Books, 1983
- Elster, John. *Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality*. New York: Cambridge University Press, 1996
- _____. *Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007
- F. Gaus, Gerald. *Political Concepts and Political Theories*. Colorado: Westview Press, 2000
- Fromm, Erich. *Fear of Freedom*. London: Routledge, 1960
- Fukuyama, Francis. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. New York: Free Press, 1999

- _____. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York,: Free Press, 1995
- Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action* (trans. Thomas McCarthy), Boston: Beacon Press, 1984
- Hampton, Jean. *Hobbes and the Social Contract Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996
- Hempel, Carl G. *Aspects of Scientific Explanation*, New York: Oxford University Press, 1965
- Hobbes, Thomas. *Human Nature and De Corpore Politico*. New York: Oxford University Press, 1994
- Hume, David. *A Treatise of Human Nature*. New York: Everymen Library, 2003
- Husserl, Edmund. *Shorter Logical Investigation* (abridged). London: Routledge, 2000
- Kaplan, Mark. *Decision Theory as Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996
- Katz, Jerold. *Realistic Rationalism*. Cambridge: MIT Press, 1998
- Kemp, John. *The Philosophy of Kant*. Oxford: Oxford University Press, 1968
- Krog, Antjie. *Country of My Skull*. London: Vintage, 1999
- Moser, Paul K (ed.). *Rationality in Action: Contemporary Approaches*. New York: Cambridge University Press, 1990
- Poundstone, William. *Prisoner's Dilemma*. New York: Anchor Books, 1993
- Reid, Anthony (ed.). *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*. Singapore: Singapore University Press, 2006
- Rescher, Nicholas. *Philosophical Reasoning*. Massachusetts: Blackwell Publisher, 2001
- Ricoeur, Paul. *Fallible Man: Philosophy of Will* (trans. Charles Kebley). New York: Fordham University Press, 1986
- _____. *Oneself as Another* (trans. Kathleen Blamey). Chicago: University of Chicago Press, 1994
- Rothstein. Bo. *Social Traps and the Problem of Trust*. New York: Cambridge University Press, 2005

Russell, Bertrand. *Human Society in Ethics and Politics*. London: Allen and Unwin, 1954

Searle, John R. *Rationality in Action*. Cambridge: MIT Press, 2001

Simmel, Georg. *Conflict and the Web of Group-Affiliations* (trans. Wolff). New York: The Free Press, 1964

Taylor, Charles. *Philosophical Arguments*, Cambridge: Harvard University Press, 1995

Warburton, Nigel; Pike, John et. al. *Reading Political Philosophy: Machiavelli to Mill*. London: Routledge, 2000

Warnock, Mary. "The Resurrection of Ethics", dalam *Women of Ideas* (ed. Anita Avramides). London: Duckworth, 1995

Williams, Bernard. "External and Internal Reasons" dalam *Moral Luck: Philosophical Papers 1973-1980*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981

Jurnal

Ann Miller, Michelle. "The Conflict in Aceh: Context, Precursors and Catalysts". *Accord*, 2008, 20, 12

Bradie, Michael. "Evolutionary Game Theory Meets the Social Contract". *Biology and Philosophy*, 14, 1999: 607-613

Bratman, Michael. "The Sources of Normativity" dalam *Philosophy and Phenomenological Research*, Vol. 58, No. 3 (September., 1998)

Elster, Jon. "Marxism, Functionalism and Game Theory: The Case for Methodological Individualism". *Theory and Society*. 11, 1982: 453-511

Gibson, James L. "The Contributions of Truth to Reconciliation: Lessons from South Africa", *The Journal of Conflict Resolution*, Juni 2006, 50, 3

Lindsay, Phillips. "Trust and the Bottom Line". *The Review of Politics*. Vol 58, No 4 (Autumn, 1996)

Phillips, David. "Contractualism and Moral Status". *Social Theory and Practice*, 1998, 24, 2

Ricoeur, Paul. "Narrative Identity". *Philosophy Today*, Spring 1991;35,1

S. Brady, Michael. "Skepticism, Normativity, and Practical Identity". *Journal of Value Inquiry*, 2002; 36, 4

Stackhouse, Max L. "Trusting Economics? Review of Francis Fukuyama's *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*". *Theology Today*: Juli 1996: 53, 2

Swedberg, Richard. "Sociology and Game Theory: Contemporary and Historical Perspectives". *Theory and Society*. 30, 2001: 301-335

Internet

MOU RI-GAM, <http://www.scribd.com/doc/14819915/Aceh-MoU-Indonesia?autodown=pdf>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2009



Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Nota Kesepahaman
antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Gerakan Aceh Merdeka

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.

Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
 - b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
 - c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
 - d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.
- 1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.
- 1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.
- 1.1.6. *Kanun* Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.
- 1.1.7. Lembaga *Wali Nanggroe* akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2. Partisipasi Politik

- 1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

- 1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.
- 1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.
- 1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.
- 1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.
- 1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.
- 1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.
- 1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

- 1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).
- 1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.
- 1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- 1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.
 - 1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.
 - 1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.
 - 1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.
 - 1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.
 - 1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).
- 1.4. Peraturan Perundang-undangan**
- 1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.
 - 1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - 1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.
 - 1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

- 1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2. Hak Asasi Manusia

- 2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.
- 2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

3.1. Amnesti

- 3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.
- 3.1.4. Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

3.2. Reintegrasi kedalam masyarakat

- 3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasalahatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.
- 3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.
- 3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.
- 3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- 3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:
 - a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.
 - b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
 - c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- 3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.
- 3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

- 4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- 4.3. GAM melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.
- 4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.
- 4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.
- 4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.
- 4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- 4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal manapun.
- 4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.
- 4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.
- 4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

- 5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.
- 5.2. Tugas AMM adalah untuk:
 - a) memantau *demobilisasi* GAM dan *decomissioning* persenjataannya.
 - b) memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
 - c) memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
 - d) memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
 - e) memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
 - f) memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
 - g) menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
 - h) membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.
- 5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- 5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.
- 5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.
- 5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.
- 5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.
- 5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM.
- 5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.
- 5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.
- 5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

- 5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggungjawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.
- 5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.
- 5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian perselisihan

- 6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:
 - a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
 - b) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
 - c) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia,

A.n. Gerakan Aceh Merdeka,

Hamid Awaluddin
Menteri Hukum dan HAM

Malik Mahmud
Pimpinan

Disaksikan oleh,

Martti Ahtisaari
Mantan Presiden Finlandia
Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative*
Fasilitator proses negosiasi